INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

1

EKONOMI

Editor: Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

LIPI

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

1

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian
dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

1

EKONOMI

Editor: Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LIPI Press

© 2021 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia. Seri 1 Ekonomi/Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono (Ed.)–Jakarta: LIPI Press, 2021.

xxv+ 245 hlm.; 17,6 x 25 cm

ISBN 978-602-496-207-4 (no. seri lengkap cetak)
978-602-496-208-1 (cetak)
978-602-496-220-3 (no. seri lengkap *e-book*)
978-602-496-221-0 (*e-book*)

1. Indonesia 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Ekonomi

621.042

Copy editor : Noviastuti Putri Indrasari dan Nikita Daning Pratami
Proofreader : Sarwendah Puspita Dewi dan Fadly Suhendra
Penata isi : Landi Achmad dan Meita Safitri
Desainer sampul : D.E.I.R Mahelingga

Cetakan Pertama : Juli 2021

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id
LIPI Press
@lipi_press
lipi.press

Bekerja sama dengan:
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia
Mayapada Tower 1, Lt. 19,
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28,
Jakarta Selatan 12920
e-mail: kesekretariatan@ppi.id
website: ppi.id

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Daftar Gambar ix
Daftar Tabel xiii
Pengantar Penerbit xv
Kata Pengantar Koordinator PPI Dunia 2020–2021 xvii
Kata Pengantar Direksi Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021 xxi
Kata Pengantar Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D. xxiii

Bab I SDGs Sebagai Panduan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono 1

Bab II Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas: Tantangan dan Peluang Menuju Negara Maju di 2045
Krisna Gupta 9

BAGIAN 1 INKLUSIVITAS DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Bab III Menekan Ketimpangan dan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Hildayanti Moehammad Loekman 31

Bab IV Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ghibran Fahreza Dipayana 53

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAGIAN 2 TUMBUH BERSAMA LINGKUNGAN

Bab V Manifestasi Resiliensi terhadap Bencana: Dari Lawan Menjadi Kawan
Inaz Yasmine 71

Bab VI Implikasi *Ecological Footprint*:Sebuah Studi Berkelanjutan *Economic Growth* (GDP) Menuju SDGs Indonesia
Enny Susilowati Mardjono 87

Bab VII Kolaborasi Kemenparekraf dan *Super App* untuk Menciptakan Pemasaran Inovatif Destinasi dan Usaha Pariwisata di Indonesia
Agung Maulana & Abdurrahman 103

BAGIAN 3 PERAN INSTITUSI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF

Bab VIII Sentralitas Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
Irma Tsuraya Choirinnida, Dimas Fadhillah Ramadhan, & Krisna Gupta 121

Bab IX Mikroprudensial dan Inklusivitas Sektor Keuangan
Denny Irawan 133

Bab X Perlindungan Sosial di Indonesia: Optimisme Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Masyarakat
Putri Haryani 145

Bab XI Perdagangan Internasional dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Permasalahan dan Solusi
Malik Cahyadin 157

BAGIAN 4 TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF DAN SEJAHTERA

Bab XII Migrasi: Peluang Hidup Mengatasi Rintangan Keterbatasan Ekonomi
Irma Tsuraya Choirinnida dan Nabilah Deskisphaputri Kusuma Wardhani 177

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab XIII Menciptakan Pekerjaan yang Layak
Riandy Laksono 177

Bab XIV Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Berkelanjutan: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Pengangguran Usia Muda
Krisna Gupta & Malik Cahyadin 193

Bab XV Menuju Indonesia Emas 2045, Bersama-sama
Krisna Gupta, & Enny Susilowati Mardjono 229

Daftar Singkatan 233
Daftar Istilah 237
Indeks 241
Biografi Editor 243
Biografi Penulis 245
Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021 251

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDB Tahunan Periode 2000–2019 11
Gambar 2.2 PDB Pekerja Periode 1990–2019 (*World development indicators*) 12
Gambar 2.4 Indikator Pertumbuhan Indonesia Periode 1980–2019 ...14
Gambar 2.5 Nilai Tambah Per Pekerja Periode 1990–2019 15
Gambar 2.6 Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Klasifikasi *Broad Economic Category* (BEC) 17
Gambar 2.7 Neraca Perdagangan dan Pembayaran Indonesia 18
Gambar 2.8 Perbandingan Neraca Pembayaran Indonesia dengan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS 19
Gambar 2.9 Perbandingan Total Utang dan Defisit Fiskal Tahunan Pemerintah 20
Gambar 2.10 Perbandingan Pendapatan negara Indonesia dengan Negara Pembanding 21
Gambar 3.1 Rasio Gini dan Laju Pertumbuhan PDB di Indonesia ...33
Gambar 3.2 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia.....37

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 3.3 Perbandingan Rasio Gini Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia 37
Gambar 3.4 Persentase Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia 41
Gambar 3.5 Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan dengan Pendekatan Multidimensi dan Moneter 42
Gambar 4.1 Presentasi Kaum Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga di DKI Jakarta Tahun 2018 60
Gambar 5.1 Grafik Rata-Rata Korban Hilang dan Meninggal, serta Masyarkat Terdampak 73
Gambar 5.2 Kerugian Ekonomi Akibat Bencana 74
Gambar 5.3 Total Bencana Indonesia 2010–2017 75
Gambar 5.4 Peta Cincin Api Dunia 77
Gambar 5.5 Grafik Bencana Geologi dan Hidrometereologi Indonesia 78
Gambar 6.1 Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita 2015–2019 (Model *Oxford Economics*) 89
Gambar 6.2 Indikator Kualitas Lingkungan Nasional 2015–2019 93
Gambar 6.3 *Environmental Kuznet Curve* 95
Gambar 6.4 Kurva Lingkungan Kuznets Indonesia 98
Gambar 7.1 Siklus Permasalahan Pembangunan Destinasi di *Rural Area* atau Desa Wisata 111
Gambar 8.1 Persentase Jumlah Pekerja Informal Sektor Nonagrikultura 123
Gambar 10.1 Jumlah Peserta BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 149
Gambar 11.1 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (%) 160
Gambar 11.2 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Indonesia Tahun 2009–2018 (%) 164
Gambar 11.3 Proporsi Penduduk Pengguna Internet Periode 2015–2018 (%) 167
Gambar 12.1 Remitansi per PDB Periode 2010–2019 180

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 13.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Periode 1990–2020 194
Gambar 13.2 Tingkat Pengangguran Negara Berkembang..... 195
Gambar 13.3 Tingkat Pekerja Informal Beberapa Negara Berkembang 196
Gambar 13.4 Pertumbuhan Produktivitas Pekerja Negara ASEAN Periode 1980–2019 198
Gambar 13.5 Pola Transformasi Perekonomian Indonesia Jangka Panjang Periode 1971–2012 199
Gambar 13.6 Produktivitas Rata-Rata Per Sektor Tahun 2012..... 200
Gambar 13.7 Sektor Lapangan Kerja dan Status Pekerjaan Tahun 2017 201
Gambar 13.8 Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Nonpertanian di Perkotaan..... 201
Gambar 14.1 Proporsi Anak Bersekolah Dasar..... 214
Gambar 14.2 Proporsi Pengangguran Usia Muda..... 215

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Prediksi PDB pada Tahun 2045 untuk beberapa negara pilihan 10

Tabel 3.1 Rata-Rata Koefisien Gini 2015–2018 32

Tabel 3.2 20 Besar Negara dengan Peningkatan Ketimpangan Tertinggi Periode Tahun 2000-an 34

Tabel 3.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi Perkotaan dan Pedesaan 43

Tabel 4.1 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kaum Pria dan Wanita Periode 2017–2019 57

Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah dan Persentase Pria dan Wanita Berpendidikan Tinggi (2008–2012) 62

Tabel 5.1 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2015–2018 75

Tabel 6.1 Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita 90

Tabel 6.2 PDB Sektor Pertanian, Industri, Transportasi Menurut Lapangan Usaha 2011–2019 91

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Air, dan Udara 2015–2019 (%) 92

Tabel 7.1 Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata Indonesia dan Dunia 2019 104

Tabel 7.2 *Travel and Tourism Competitiveness Index* Kawasan ASEAN 105

Tabel 7.3 Capaian *Travel Competitiveness Index* (TTCI) Indonesia (World Economic Forum, 2019) 106

Tabel 8.1 Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan 123

Tabel 8.2 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja 128

Tabel 9.1 Indikator FSIs Inti Sektor Perbankan Indonesia 134

Tabel 9.2 Indikator FSIs Inti Sektor Perbankan Indonesia dan Negara Pembanding 135

Tabel 9.3 Indikator Inklusi Finansial Indonesia Periode 2011–2018 141

Tabel 9.4 Indikator Inklusi Finansial Indonesia dan Negara Pembanding 142

Tabel 11.1 Biaya Logistik di Indonesia Periode 2013–2019 166

Tabel 11.2 Koefisien Gini Indonesia Periode 2015–2019 168

Tabel 11.3 Proporsi Volume Remitansi Terhadap PDB Indonesia Periode 2015–2018 (%) 169

Tabel 11.4 Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Kerangka TPB di Indonesia 170

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku bunga rampai ini merupakan satu dari 12 seri buku hasil pemikiran para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri, dengan tujuan untuk menggariskan konsep "Indonesia Emas Berkelanjutan 2045". Isu yang dibahas adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) disertai dengan analisis dan rekomendasi untuk meraih "Indonesia Emas Berkelanjutan 2045". Kelebihan bunga rampai ini adalah memiliki perspektif lintas disiplin.

Seri Ekonomi berbicara tentang hal yang sedang hangat, yakni Indonesia yang didaulat menjadi *upper middle-income country*, yaitu negara yang memiliki Produk Nasional Bruto di atas US$4,046 pada tahun 2019. Hal ini memantapkan visi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun, Covid-19 memukul

Buku ini tidak diperjualbelikan.

balik progress Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Seperti halnya negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi terpukul mundur ke teritori negatif. Oleh karena itu, analisis di dalam buku ini diarahkan oleh SDGs untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku bunga rampai ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar Koordinator PPI Dunia 2020–2021

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran intelektual anak bangsanya. Bermula dari perhimpunan yang bernama Indische Vereeniging yang dibentuk di negeri penjajah, para pelajar seperti Mohammad Hatta, Soetomo, dan Achmad Soebardjo mengubah organisasi tersebut menjadi lebih revolusioner. Pada tahun 1922 organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging dan sejak Januari 1923 mendaulat Hatta untuk merevitalisasi majalah *Hindia Poetra* sebagai media perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Sepulang para pelajar itu ke tanah air, mereka menjadi tulang punggung pergerakan perjuangan bangsa Indonesia.

Hari ini, pada tahun 2021 atau tepat 99 tahun sejak PPI diinisiasi oleh Hatta dan rekan-rekannya, PPI Dunia mencoba meneruskan semangat juang, ide, dan pemikiran Hatta dan Habibie serta untuk meneruskan inisiasi para pendahulu, PPI Dunia berkolaborasi dengan PPI Negara yang tersebar di seluruh dunia menerbitkan buku dengan judul *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 1 Ekonomi* sebagai refleksi kepedulian seluruh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, mencermati laporan Price Waterhouse Coopers pada 2017 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar dunia dan menghasilkan GDP terbesar keempat di dunia di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, PPI Dunia berpendapat bahwa sudah seharusnya mahasiswa Indonesia di luar negeri berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara terbesar keempat di dunia tahun 2050.

PPI Dunia, yang saat ini memosisikan diri sebagai *expert community* yang intelektual dan akademis, mencoba memberikan sumbangsih pemikiran melalui buku ini sebagai *expert opinions* kepada *policy makers* dan *stakeholders* di Indonesia. Buku ini menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rencana aksi global 2030 yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia serta untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dengan berprinsip tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Melalui Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia, buku ini merepresentasikan 17 tujuan dalam SDGs yang terbagi dalam berbagai bab dan ditulis oleh perwakilan mahasiswa Indonesia di luar negeri dari berbagai negara.

Ide sederhana dari buku ini adalah menyalurkan energi positif para pelajar Indonesia sebagai *social capital* yang luar biasa untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Buku ini adalah bentuk tanggung jawab dan upaya untuk membayar utang kepada negara atas kesempatan yang kami dapatkan sebagai mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, PPI Dunia Kawasan Asia-Oseania, dan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika serta 60 PPI Negara yang ikut serta memberikan pemikiran, dukungan moral, serta dukungan SDM hingga buku ini bisa terwujud. Kami ucapkan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepala LIPI beserta jajarannya yang ikut ambil bagian dan menjadi penerbit buku ini sehingga buku ini bisa menambah khazanah baru pemikiran pembangunan bagi kemajuan bangsa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan teriring harap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar dan langsung bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Choirul Anam,

Charles University, Ceko

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar Direksi Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Para pembaca yang kami hormati,

Atas nama Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia 2020-2021, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas terbitnya rangkaian buku ini dengan tema "Mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia". Buku ini merupakan rangkaian tulisan pemikiran pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, dalam rangka memberikan sumbangsih konsep untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju padi tahun 2045.

Rangkaian buku ini terdiri dari 12 judul. Sebanyak 11 buku berfokus pada definisi Indonesia sebagai negara maju yang berorientasi berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunannya. Dari sisi konten, bahasan setiap bab dalam 11 buku ini terkait erat dengan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Landasan pemikiran kami sangat sederhana bahwa Indonesia emas haruslah berkelanjutan da, proses pembangunan haruslah bertahap. Di samping itu, terdapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1 buku yang berfokus pada kajian keislaman dan Timur Tengah dalam kaitannya dengan konteks Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah terlibat aktif dalam penulisan buku ini. Tak lupa juga kepada LIPI Pres, yang berkenan menerbitkan buku kami serta seluru, jajaran pengurus Ditlitka PPI Dunia 2020–2021 yang berjumlah lebih dari 130 orang. Suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja bersama dengan insan cemerlang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk menuntut ilmu.

Terakhir, kami tentu berharap rangkaian buku ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan di IndonesiaaSsemoga rangkaian buku ini bisa menjadi literatur yang baik dan menjadi catatan sejarah kontribusi pemikiran para pemuda Indonesia yang peduli pada negara dan bangsanya. Untuk Indonesia Jaya!

Horma Kami,

Direksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D. [1]

Cita-cita menjadi bangsa yang besar telah menjadi salah satu tujuan penting dari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tapi sejak saat itu, mulai dari periode perang kemerdekaan dan periode perlawanan dari anasir-anasir yang tetap antirepublik pada awal 1950-an, sampai ketika Pemerintah Reformasi sejak 1998 menggelindingkan proses demokratisasi saat desentralisasi dan menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2004, Indonesia dilanda oleh berbagai gejolak. Sejarah Indonesia menunjukkan hampir tak henti diguncang oleh gejolak politik, gejolak ekonomi, bahkan kontingensinya yang juga melebar dan meluas ke isu-isu sosial.

Yang paling diingat adalah saat rezim Soekarno, Indonesia dihantam oleh peristiwa Gerakan 1965, pada saat Indonesia sangat memerlukan bantuan IMF dan mitranya, IGGI. Lalu saat orde Baru dihantam oleh gejolak Mei 1998, dan lengsernya Presiden Soeharto. Untuk kedua kalinya, Indonesia meminta bantuan IMF dan mitranya CGI. Pada periode tersebut, meledak peristiwa hiperinflasi yang dibarengi kekacauan fiskal, moneter, dan sektor-sektor riil.

[1] Guru besar Emeritus FEB UI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebelum dihantam oleh gejolak resesi akibat pandemi Covid-19, Indonesia telah berhasil mencapai *milestone* penting, yaitu menjadi bagian dari negara ekonomi *high-middle income* menurut klasifikasi World Bank. Akan tetapi, tantangan ke depan menjadi bangsa yang besar masih banyak. Pertumbuhan produktivitas saat ini masih lemah. Perkembangan *human capital* masih di bawah harapan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh berbagai sektor berbasis sumber daya alam. Ketergantungan terhadap harga komoditas membuat ekonomi Indonesia tidak dapat terlepas dari gejolak ekonomi global. Di samping itu, jika *human capital* tidak dapat ditingkatkan dengan cepat maka *windows of opportunity* di tengah-tengah bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Resesi yang diakibatkan oleh Covid-19 menunjukkan berbagai kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi dan bantuan sosial yang selama ini kurang diperhatikan. Hal-hal seperti kekurangan data akibat informalitas, mengakibatkan bantuan sosial yang tidak optimal dan menghantam sisi konsumsi dengan demikian hebat. *Youth unemployment* memiliki risiko jangka panjang yang tidak dapat diremehkan, karena akan memengaruhi produktivitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Buku *Indonesia Emas berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 1 Ekonomi*, hadir di saat yang tepat. Buku ini membahas tentang permasalahan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Buku ini mengangkat berbagai permasalahan Indonesia mulai dari sisi makroekonomi seperti keseimbangan perdagangan dan sektor finansial, hingga permasalahan yang mendasar, seperti informalitas tenaga kerja dan perkembangan sumber daya manusia. Kesemuanya adalah permasalahan-permasalahan yang dapat memiliki dampak jangka panjang jika tidak ditangani sedini mungkin.

Saya sangat mengapresiasi penggunaan indikator *Sustainable Development Goals*, atau SDGs 2030, oleh para penulis. Menjadi bangsa yang besar adalah suatu cita-cita yang perlu dukungan ho-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rizon jauh di atas sekadar naiknya angka-angka PDB. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tumbuh secara inklusif dan tumbuh secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya mampu mengangkat lebih banyak manusia dari kemiskinan dan berbagai isu ketimpangan, serta pengangguran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tumbuh dengan mengandalkan kemajuan-kemajuan *skill* dan *knowledge*. Pertumbuhan berbasis ekstraktif seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan, dan hal ini bukan sesuatu yang baik.

Bunga rampai ini berisi pemikiran putra dan putri Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Sungguh memberikan harapan bahwa pemuda-pemudi ini telah memiliki inisiatif yang tinggi untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pemimpin bangsa saat ini. Sebagai calon-calon pemimpin masa depan sejak pemilu 2024, bunga rampai ini merupakan sebuah wadah yang baik bagi para penulis untuk terus belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik lagi dalam kapasitas analisisnya

Saya mengucapkan selamat kepada para anggota PPI Dunia atas terbitnya bunga rampai ini. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu pondasi bagi pemuda Indonesia untuk menghasilkan pemikiran yang relevan untuk masa depan Indonesia, mengikuti tradisi Sumpah Pemuda 1928 yang demikian visioner.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

SDGs sebagai Panduan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

Pada Musrenbangnas 2019, Presiden Joko Widodo meluncurkan Visi Indonesia 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas. Visi ini dituangkan dalam publikasi Kementerian PPN/Bappenas berjudul "Visi Indonesia 2045" (Bappenas, 2019). Publikasi tersebut memuat sebuah harapan bahwa pada seratus tahun usianya, Indonesia akan menjadi ekonomi yang maju dan berkelanjutan serta pembangunan yang merata dan inklusif. Pada proyeksi tersebut, ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan rerata di atas 5%, memiliki partisipasi tenaga kerja di atas 70%, bebas kemiskinan akut pada 2040, dan mendorong redistribusi aktif guna menekan rasio Gini di angka 0,35.

Hal ini tidak berarti langkah menuju negara maju merupakan sebuah jalan yang mulus. Covid-19 memukul balik kemajuan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Seperti halnya negara lain, pertumbuhan ekonomi terpukul mundur ke teritori negatif. Hal ini terjadi di tengah rendahnya pertumbuhan produktivitas pekerja

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia dibanding dengan negara lain di satu kawasan. Indonesia juga belum mengoptimalkan alternatif pertumbuhan ekspor jasa, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pariwisata.

Sisi inklusivitas pertumbuhan ekonomi juga memiliki permasalahan yang masih cukup pelik, salah satunya perlindungan sosial di Indonesia yang masih terbatas karena kekurangan data. Data yang baik sulit untuk dikumpulkan karena sektor informal yang sangat tinggi sehingga sebagian besar aktivitas perekonomian Indonesia tidak tertangkap oleh pemerintah. Indikator inklusivitas di publikasi *Visi Indonesia 2045* tidak selengkap indikator makroekonomi. Meskipun telah ada target penurunan kemiskinan dan rasio Gini, indikator inklusivitas penting lainnya, seperti kesetaraan gender, peningkatan akses terhadap layanan keuangan, dan perlindungan sosial belum terlihat menjadi prioritas.

Berdasarkan hal tersebut, akhirnya publikasi ini disusun. Publikasi ini merupakan sebuah bunga rampai yang ditulis oleh warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut di luar negeri dan tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia. Buku ini adalah seri kelima dari serangkaian buku PPI Dunia tentang Visi Indonesia Emas 2045. Buku ini mencermati beberapa potensi masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memaparkan beberapa bauran kebijakan yang dapat menjadi solusi. Untuk melengkapi indikator inklusivitas, kami menggunakan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dari 17 target SDGs yang ada, buku ini memilih hanya tiga target sebagai fokus bahasan, yaitu "akhiri kemiskinan di mana pun dalam segala bentuk" (target poin pertama), "pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan kondisi lapangan pekerjaan yang berkualitas" (target poin kedelapan), serta "berkurangnya kesenjangan" (target poin keselupuh). Ketiga target ini dipilih karena dirasa memiliki dampak sosial yang sangat penting dan relevan dengan pembahasan soal ekonomi. Ketiga target tersebut memiliki beberapa subtarget yang di dalam buku ini dibagi ke dalam 13 bab.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab dalam bunga rampai ini ditulis oleh beberapa penulis secara independen dan tim editor memberikan keleluasaan bagi para penulis dalam mengeksplorasi ide masing-masing. Meski demikian, pembahasan pada setiap bab tetap disesuaikan dengan koridor SDGs yang telah ditetapkan bersama-sama. Beberapa bab membahas secara lebih umum dan mengikuti dengan ketat indikator yang dibahas, sementara beberapa bab lainnya memiliki fokus yang lebih tajam daripada indikator, bahkan masuk ke isu tertentu yang lebih spesifik.

Buku ini dibuka dengan Bab II yang membahas pertumbuhan ekonomi secara umum. Ekspor dan ledakan komoditas membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada periode 2000-an, namun hal ini mengakibatkan ekonomi yang sangat tergantung dengan komoditas. Seiring dengan kebijakan yang semakin protektif, industri manufaktur gagal menangkap peluang tumbuh dengan rantai pasok global. Bab ini mencoba mengupas kebijakan yang tepat untuk membantu Indonesia kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam jangka panjang.

Bab tersebut disambung dengan serangkaian bab mengenai pembahasan di isu inklusivitas karena memastikan inklusivitas pembangunan ekonomi akan menjadi inti dari tulisan-tulisan di buku ini dan sebagian besar bab didedikasikan untuk target SDGs yang mendorong inklusivitas. Pada Bab III, penulis memberikan sedikit gambaran mengenai perkembangan pemberantasan kemiskinan absolut di Indonesia, baik secara umum maupun ketimpangan antara desa dan kota.

Masih di bab yang sama, penulis memberikan perbandingan antara Indonesia dengan negara lain dan bagaimana ketimpangan di Indonesia berprogres sejak 2000-an. Di samping itu, penulis mendiskusikan beberapa indikator ketimpangan lain, misalnya ketimpangan berdasarkan konsumsi dan berdasarkan aset, sesuatu yang jarang ditemui di indikator umum seperti milik Badan Pusat Statistik (BPS). Penulis juga menawarkan pembahasan lebih mendalam terhadap ketimpangan antarwilayah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Inklusivitas terhadap gender memberikan kesempatan ekonomi yang sama untuk laki-laki dan perempuan merupakan tantangan yang cukup besar di Indonesia. Mengurangi hambatan bagi wanita yang ingin terlibat lebih di dalam aktivitas ekonomi adalah target SDGs yang penting. Bab VI menawarkan pembahasan yang cukup umum tentang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Dua bab berikutnya menawarkan sedikit pembahasan tentang lingkungan yang merupakan isu utama dalam program keberlanjutan. Indonesia, negara dengan bentang yang luas dan berada di jalur pegunungan berapi, memiliki risiko becana yang tidak hanya tinggi, namun juga tidak merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan penduduk di daerah rawan bencana dan meningkatkan mitigasi risiko daerah bencana ke depannya yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab V.

Bab VI akan memuat pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang harus memerhatikan faktor lingkungan. Bab ini juga memberikan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan serta menawarkan beberapa pemikiran bagaimana ekonomi tumbuh tanpa meninggalkan permasalahan lingkungan.

Lingkungan sering kali dibenturkan dengan pertumbuhan ekonomi, seolah keduanya tidak dapat berjalan secara beriringan. Bab VII memberikan pembahasan bagaimana meningkatkan kapasitas pariwisata Indonesia dan membuatnya lebih berkelanjutan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang justru memanfaatkan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi. Terletak di daerah tropis dan dianugerahi daerah kepulauan yang indah, Indonesia memiliki modal yang sangat baik dalam membangun bisnis pariwisata. Di samping itu, pariwisata tidak membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terlalu tinggi, sesuatu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar penduduk Indonesia saat ini.

Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentunya tidak dapat terlepas dari peran pemerintah sebagai institusi yang berperan aktif dalam memberikan jaminan sosial dan dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diandalkan oleh semua warganya yang membutuhkan. Jaminan sosial yang luas untuk konsumsi dan kesehatan dan kesehatan merupakan hal yang sangat esensial untuk menangkal kemiskinan, mengurangi ketimpangan konsumsi, dan mendorong pihak swasta tumbuh karena para pekerjanya dilindungi oleh pemerintah.

Informalitas menjadi salah satu masalah sentral di Indonesia. Hal ini terlihat sangat jelas di pembahasan beberapa bab tentang jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang ada di buku ini. Bab VIII kembali mengangkat permasalahan informalitas dalam memberikan layanan kesejahteraan pekerja dan menambahkan permasalahan informalitas ke dalam pembahasan tentang salah satu target SDGs yang memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja.

Informalitas tidak hanya menjadi problem ketenagakerjaan, namun juga kewirausahaan (*entrepreneurship*). Akses perbankan yang tidak menyeluruh mengakibatkan sulitnya mengakses kredit bagi usaha kecil di Indonesia. Bab IX mengupas tentang mikroprudensial akses perbankan dan bagaimana akses perbankan Indonesia saat ini berada di tahap yang sangat tepat untuk lebih ekspansif dan inklusif untuk lebih banyak bisnis dan konsumen.

Jaminan sosial yang baik akan menyuburkan iklim ketenagakerjaan dan bisnis di Indonesia. Pembahasan secara umum mengenai sistem jaminan sosial di Indonesia ada di bab X yang juga menambahkan beberapa permasalahan di bidang jaminan kesehatan sosial, seperti transparansi dan keberlanjutan institusi penting seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Data juga merupakan sebuah permasalahan di sistem jaminan sosial Indonesia secara umum dan tingginya informalitas mengakibatkan sulitnya memberikan cakupan layanan jaminan sosial seluas-luasnya.

Memastikan kesempatan pertumbuhan ekonomi bagi seluas-luasnya bagi semua orang adalah cara yang tepat tanpa menggantungkan masyarakat pada pemerintah. Berdagang dengan pasar global adalah salah satu pendorong ekonomi pembangunan bagi negara berkembang dan beberapa target SDGs yang dipilih memandu pemerintah untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melakukan ini. Bab XI mengupas tentang kemudahan melakukan perdagangan internasional secara umum. Perdagangan internasional yang baik dan dapat diakses oleh semua orang membuka jalan bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri. Hal ini sangat penting bagi produsen kecil komoditas, seperti minyak sawit, karet, kopi, dan lainnya. Di samping itu, perdagangan internasional yang lancar sangat membantu Indonesia melakukan integrasi dengan rantai pasok global.

Serangkaian bab berikutnya membahas lebih dalam tentang sektor ketenagakerjaan. Mungkin para pembaca sudah sering mendengar pentingnya peranan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mengamankan devisa negara dan memberikan pekerjaan bagi banyak tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang cukup rendah. Bab XII yang mengupas peluang dari imigrasi menawarkan pembahasan tentang berbagai permasalahan di bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan bagaimana pemerintah dapat membuatnya lebih baik.

Bab XIII memberikan pembahasan tentang perkembangan pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjamin ketersediaan pekerjaan yang baik bagi penduduk Indonesia. Pekerjaan yang baik seharusnya memberikan pendapatan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak, namun lagi-lagi informalitas menjadi permasalahan karena sebagian besar pekerjaan di sektor informal memberikan upah yang lebih rendah dan perlindungan yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor formal.

Tersedianya pekerjaan layak adalah satu hal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengisi pekerjaan tersebut adalah hal lain. Bab XIV membahas mengenai masalah sumber daya manusia di Indonesia dan bagaimana permasalahan *link and match* antara institusi pendidikan dengan dunia usaha berpotensi menjadi penghambat Indonesia menjadi negara maju tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. Selain itu, Bab XIV juga mengangkat isu betapa tingginya pengangguran usia muda di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penggunaan indikator SDGs memiliki tantangan sendiri karena tidak semua indikator di dalam SDGs dikumpulkan datanya oleh pemerintah Indonesia. Beberapa indikator, seperti kelestarian lingkungan, pemanfaatan pariwisata, migrasi, kesetaraan gender, akses terhadap layanan sosial, dan penguatan akses bagi orang dengan disabilitas, tidak dikumpulkan atau tidak lengkap. Penulis mencoba membahas di isu yang spesifik atau menggunakan indikator alternatif pada beberapa indikator pembahasan.

Kami sangat berharap tulisan ini dapat menjadi cerita situasi Indonesia di dalam mencapai semua tujuan di dalam SDGs sekaligus memberikan pandangan dari kami para pelajar. Harus diakui bahwa tulisan ini mungkin memiliki banyak kekurangan. Meskipun demikian, sebagai pelajar Indonesia di luar negeri, kami mencoba menawarkan pandangan kami dengan kerendahan hati. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu karya awal bagi kami para pelajar Indonesia di luar negeri untuk kemudian berbakti lebih banyak untuk negeri ke depannya. Di samping itu, kami berharap karya ini dapat memprovokasi lebih banyak lagi pelajar Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menghasilkan tulisan lain dan memperkaya tulisan masyarakat Indonesia di dunia literatur akademis, terutama studi mengenai Indonesia.

REFERENSI

Bappenas. (2019). Visi Indonesia 2045. https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-ekonomi/contents-deputi-bidang-ekonomi/visi-indonesia-2045/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB II
Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas: Tantangan dan Peluang Menuju Negara Maju di 2045

Krisna Gupta

A. PENDAHULUAN

Pada 1 Juli 2020, Bank Dunia memperbarui klasifikasi negara berdasarkan pendapatan (Serajuddin & Hamadeh, 2020). Pada pemutakhiran tersebut, Indonesia 'naik kelas' menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*). Negara di kategori berpendapatan menengah atas adalah negara yang memiliki Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 4.046–12.535 USD. Indonesia sendiri memiliki PNB sebesar 4.050 USD di tahun 2019 dengan kurs Rp13.901,00 per USD (Badan Pusat Statistik); angka tersebut setara dengan upah Rp4.691.587,00 per bulan.

Ini adalah sebuah pencapaian yang penting bagi Indonesia menuju level pendapatan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu sasaran yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi menjamin taraf hidup yang lebih layak bagi seluruh umat manusia. Dalam publikasi "Visi Indonesia 2045" (Bappenas, 2019a), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memprediksi bahwa Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akan menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2036. Sementara, dalam Lampiran I "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (RPJMN)", Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditargetkan untuk tumbuh sebesar rata-rata 5,7% per tahun sampai 2045.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah lembaga yang didirikan oleh negara-negara maju, meramalkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh lebih cepat. Tabel 2.1 menunjukkan urutan sepuluh ekonomi terbesar dunia di tahun 2045 yang diukur dengan menggunakan PDB. Pada 2045, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia, melewati Jepang dan hanya kalah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk di suatu negara dapat keluar dari kemiskinan dan memiliki taraf hidup

Tabel 2.1 Prediksi PDB pada Tahun 2045 untuk beberapa negara pilihan.

No	Negara	PDB (juta dolar AS)	PDB per kapita (ribu dolar AS)
1	RRT	50.591.680	35.40
2	India	34.792.330	21.47
3	Amerika Serikat	28.978.050	77.62
4	Indonesia	8.894.611	27.31
5	Jepang	6.591.090	60.18
6	Turki	5.411.470	56.43
7	Brazil	5.366.815	23.37
8	Jerman	5.275.824	65.01
9	Inggris Raya	4.434.909	60.47
10	Meksiko	4.406.876	28.82

Keterangan: Satuan PDB menggunakan dolar konstan 2010 disesuaikan dengan daya beli

Sumber: OECD (2018); United Nations, D. o. E. a. S. A., & Population Division (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang layak. Pertumbuhan ekonomi tertuang di sasaran ke-8 *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana pertumbuhan ekonomi tahunan dan produktivitas menjadi target utama. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan riil PDB tahunan, sementara produktivitas diukur dengan pertumbuhan riil PDB tahunan per jumlah pekerja.

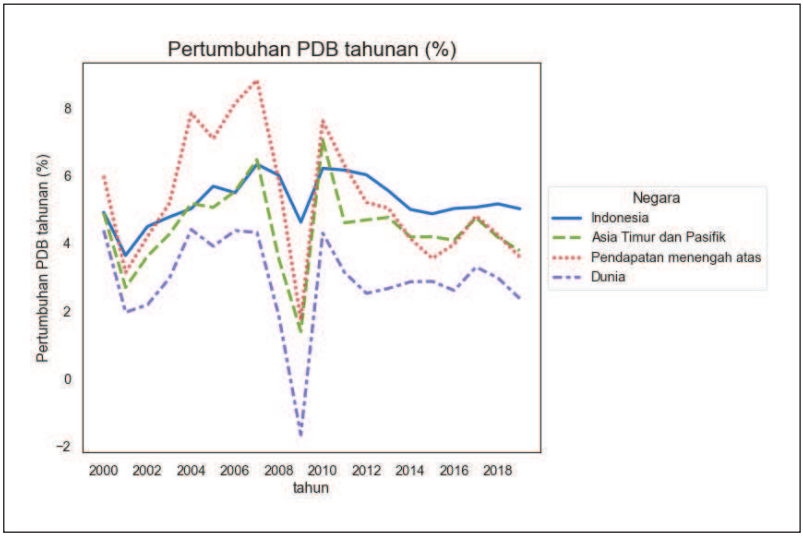

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDB Tahunan Periode 2000–2019

Gambar 2.1 menunjukkan pertumbuhan PDB tahunan Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019. Indonesia terlihat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil jika dibandingkan dengan regional Asia Timur dan Pasifik, kelompok negara berpendapatan menengah atas, atau dunia. Krisis global 2008 tidak begitu berdampak bagi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata setelah krisis global, namun rata-rata pertumbuhan sejak 2014 hanya sekitar 5,033%. Angka ini masih cukup jauh dari target yang tertuang di RPJMN, yaitu sebesar 5,7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari RPJMN terakhir kali terjadi pada tahun 2012, yaitu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebesar 6,03%. Untuk itu, mengejar pertumbuhan di atas 5% akan menjadi tantangan yang tidak mudah (Resosudarmo & Abdurohman, 2018).

Gambar 2.2 menunjukkan PDB per pekerja sebagai alat ukur produktivitas. Dengan pembanding yang sama, performa Indonesia di sini tampak tidak lebih baik karena krisis 1998 berdampak terhadap pertumbuhan yang cukup permanen dan membuat Indonesia kehilangan momentum (Aswicahyono dkk., 2010). Pertumbuhan produktivitas tampak cukup baik setelah tahun 2000, namun kurvanya tampak melandai dan makin jauh perbedaannya dengan regional Asia Timur dan Pasifik setelah tahun 2005.

Dengan kata lain, meski relatif baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum secepat harapan yang tertuang di RPJMN. Di samping itu, pertumbuhan PDB per pekerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain yang sepadan, bahkan cenderung melambat sejak tahun 2005. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam jangka panjang, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

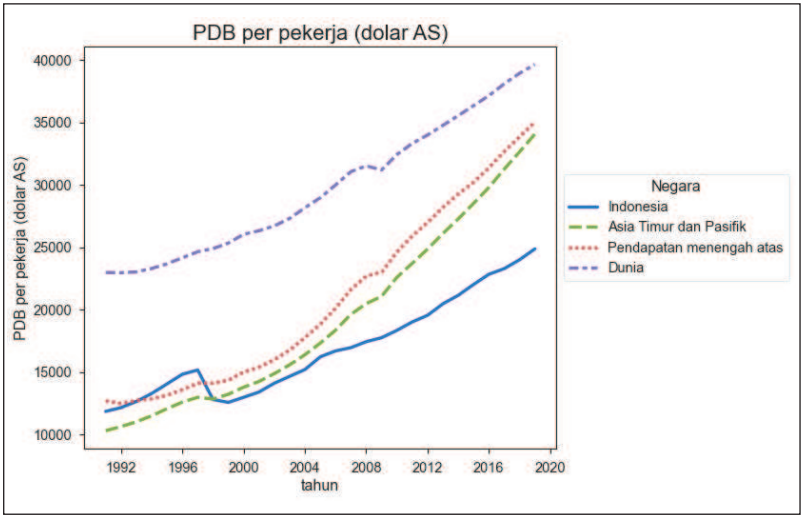

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 2.2 PDB Pekerja Periode 1990–2019 (*World development indicators*)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Strategi pertumbuhan jangka panjang pemerintah adalah dengan mengoptimalkan pertumbuhan ekspor dan investasi dengan sektor manufaktur sebagai motor penggerak (Bappenas, 2019a; 2019b). Sektor manufaktur didorong untuk tumbuh melebihi pertumbuhan PDB dan produk olahan bernilai tambah tinggi diharapkan menggantikan peran sumber daya alam yang saat ini masih mendominasi keranjang ekspor Indonesia (Bappenas, 2019a). Tumbuhnya sektor manufaktur akan mendorong transformasi ekonomi yang awalnya berbasis pertanian menjadi berbasis industri, dan pada akhirnya berbasis sektor jasa.

Strategi ini sebenarnya tidak berbeda dari apa yang dilakukan Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an, masa jatuhnya harga minyak dunia. Indonesia yang ketika itu mengandalkan minyak bumi untuk menopang surplus neraca perdagangan, harus mulai melakukan diversifikasi ke manufaktur (Hill, 2018). Investasi asing yang mulanya berbasis sumber daya alam mulai digantikan investasi asing berbasis manufaktur yang sebagian besar datang dari Jepang, Korea Selatan, dan Eropa (Lindblad, 2015). Kebijakan industri dan perdagangan beralih dari substitusi impor ke diversifikasi ekspor (Pangestu dkk., 2015).

Seperti dapat dilihat di Gambar 2.3, ekspor kembali tumbuh positif di akhir tahun 1980-an berkat strategi tersebut. Sayangnya, proteksionisme kembali seiring dengan menguatnya ekonomi Indonesia. Pada 1998, krisis ekonomi menyerang dan Indonesia harus mulai lagi dari nol dengan dana bantuan dari International Monetary Fund (IMF).

Pada 2004, Indonesia mendapatkan durian runtuh seiring dengan bergabungnya RRT dengan World Trade Organization (WTO) (Pangestu dkk., 2015). Permintaan yang sangat tinggi akan bahan baku dan energi dari RRT mengangkat harga-harga komoditas, seperti mineral, batu bara, *crude palm oil* (CPO), dan karet. Ekspor kembali tumbuh dengan cepat sampai akhir ledakan harga komoditas di 2012

Buku ini tidak diperjualbelikan.

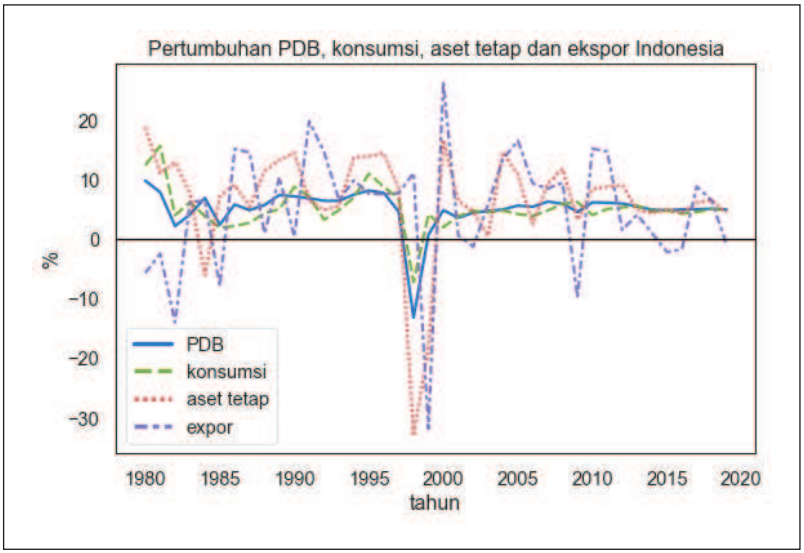

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 2.3 Indikator Pertumbuhan Indonesia Periode 1980–2019

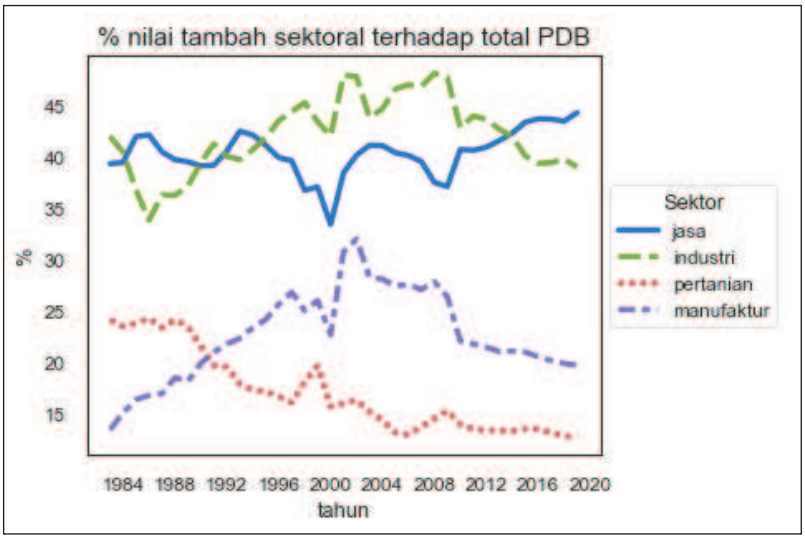

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 2.4 Indikator Pertumbuhan Indonesia Periode 1980–2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hanya terinterupsi oleh krisis finansial global tahun 2008. Akan tetapi, ledakan komoditas membawa tantangan tersendiri. Ledakan harga komoditas di pertengahan tahun 2000-an berimbas pada tumbuhnya sektor komoditas, namun melemahnya sektor manufaktur. Sektor pengekspor sumber daya alam mengalami pertumbuhan yang pesat dengan menyerap kapital dan tenaga kerja dari sektor lain. Upah mengalami pertumbuhan pesat, namun mengakibatkan sektor padat karya menjadi kurang kompetitif (Grabowski & Self, 2020).

Menurut gambar 2.4, peralihan dari substitusi impor di pertengahan 1980-an mampu meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur dan mendorong transformasi struktur ekonomi ke arah manufaktur. Namun, ketika ledakan komoditas di tahun 2004 dimulai, proporsi nilai tambah dari sektor manufaktur mengalami penurunan meskipun proporsi sektor industri masih meningkat. Artinya, tumbuhnya nilai tambah industri didorong oleh sektor industri nonmanufaktur.

Peningkatan peran sektor jasa di perekonomian dapat dianggap sebagai transformasi ekonomi yang cukup baik, namun sektor jasa di Indonesia masih belum matang karena masih didominasi oleh

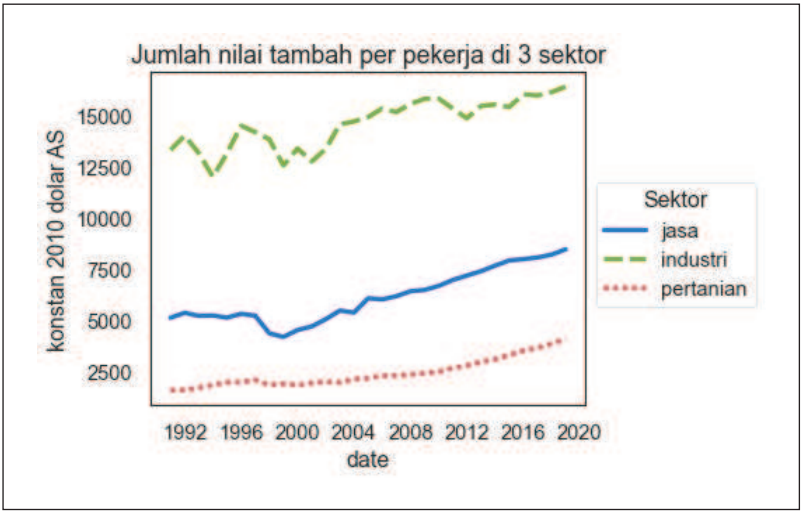

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 2.5 Nilai Tambah Per Pekerja Periode 1990–2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.

aktivitas bernilai tambah rendah seperti jasa retail dan transportasi. Sektor jasa bernilai tambah tinggi memerlukan banyak tenaga kerja spesialis dan berpendidikan tinggi. Dengan kondisi tenaga kerja saat ini, mengandalkan pertumbuhan dari sektor industri masih menjadi strategi yang lebih masuk akal.

C. PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PEMANFAATAN RANTAI PASOK GLOBAL

Salah satu peluang untuk menumbuhkan industri adalah dengan berpartisipasi dalam rantai pasok global (RPG). RPG memecah proses produksi menjadi beberapa mata rantai yang saling berkaitan, dan setiap mata rantai dapat dilakukan di beberapa negara berbeda. Hal ini dapat menguntungkan sebuah negara yang memiliki kemampuan terbatas dalam memproduksi barang padat modal dan padat ilmu. Negara maju dapat mengerjakan mata rantai yang padat modal dan padat ilmu, sementara negara yang masih berkembang dapat mengerjakan mata rantai yang padat karya.

Industri elektronika di Vietnam memanfaatkan hal ini (World Bank, 2020). Meskipun tidak memiliki basis industri komponen yang kuat, Vietnam mampu menjadi salah satu pengekspor telepon genggam terbesar di dunia. Mereka mengimpor komponen berteknologi tinggi dan merakit produknya di Vietnam. Dengan cara ini, Vietnam yang tenaga kerjanya relatif berpendidikan rendah dapat berpartisipasi dalam pembuatan produk berteknologi tinggi seperti telepon genggam.

RPG mengakibatkan strategi pengembangan manufaktur menjadi berbeda dibandingkan era 1980-an karena impor memiliki peranan yang signifikan untuk memanfaatkan RPG (Amiti & Konings, 2007; Ing dkk., 2019; World Bank, 2020). Gambar 2.6 menunjukkan bahwa struktur impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dan barang modal untuk berproduksi. Demikian juga dengan ekspor yang didominasi bahan baku industri yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki partisipasi yang cukup baik di dalam RPG.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

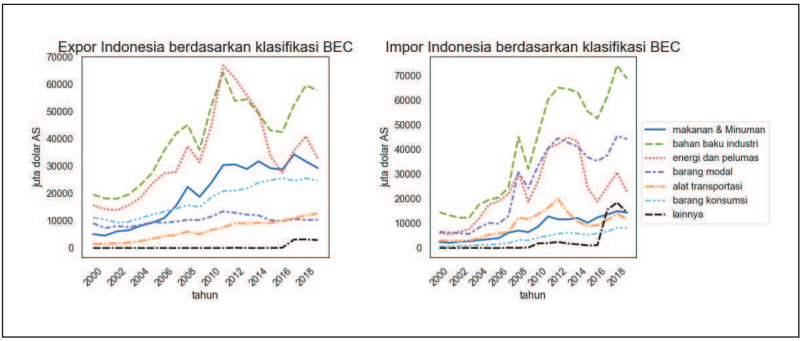

Gambar 2.6 Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Klasifikasi *Broad Economic Category* (BEC)

Di era RPG, mendorong ekspor manufaktur tidak cukup dengan kebijakan yang berbasis akses pasar luar negeri saja. Percepatan impor juga diperlukan bagi perusahaan untuk dapat berproduksi dan menjual hasilnya ke luar negeri. Pembatasan impor hanya berimbas kepada perusahaan yang tidak dapat berkompetisi di pasar global karena kehilangan akses ke bahan baku yang berkualitas dan/atau murah. Dengan kata lain, pembatasan impor berpotensi memunculkan keterbatasan ekspor.

D. DILEMA NERACA PEMBAYARAN DAN NILAI TUKAR

Meskipun impor merupakan hal yang penting, namun pemerintah Indonesia sepertinya masih merasa bahwa impor merupakan hal yang buruk. Ide bahwa impor diperlukan untuk membangkitkan ekspor industri manufaktur memang terdengar tidak masuk akal, apalagi bagi sebuah negara yang hampir selalu mengalami neraca perdagangan yang positif. Neraca perdagangan positif sangat penting untuk menjaga nilai mata uang agar tetap stabil. Nilai mata uang yang terjaga sangat penting bagi negara yang mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membangun kapitalnya seperti Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mungkin alasan yang lebih penting adalah pengalaman krisis 1998. Indonesia mengalami neraca pembayaran yang negatif sebelum terjadinya krisis 1998 dan hal ini memberikan trauma tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan pengambil kebijakan. Neraca perdagangan yang positif sekalipun tidak mampu mengangkat neraca pembayaran akibat beratnya beban utang luar negeri ketika itu. Indonesia berhasil bangkit dari krisis salah satunya adalah berkat ekspor (Hill, 2018).

Sejak krisis tahun 1998, Indonesia selalu mengalami surplus neraca pembayaran dan baru merasakan neraca pembayaran yang negatif sejak tahun 2012. Segera setelah berakhirnya ledakan harga komoditas, Bank sentral Amerika Serikat menghentikan program *Quantitative Easing* atau pembelian aset secara masif. Seiring dengan berkurangnya ekspor, valuta asing ikut meninggalkan pasar modal di Indonesia dan negara kembali mengalami teritori neraca pembayaran

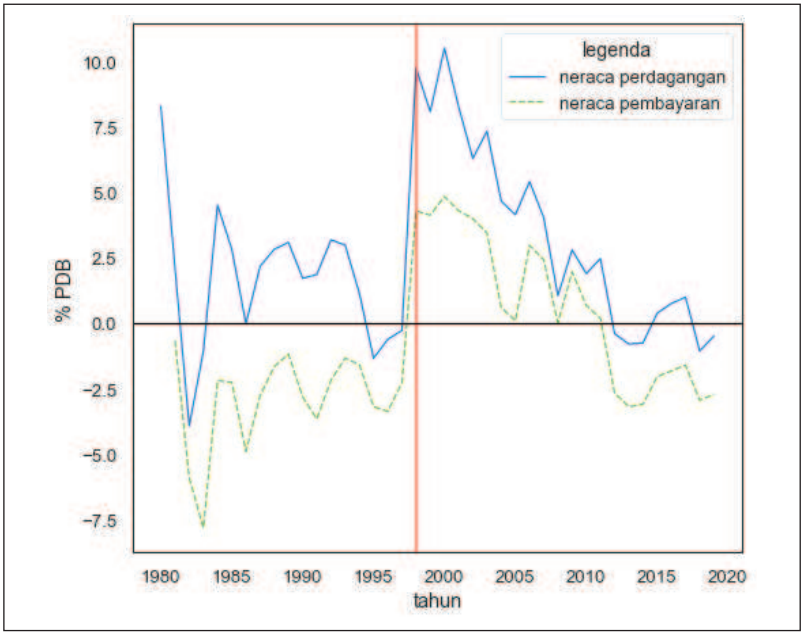

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 2.7 Neraca Perdagangan dan Pembayaran Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negatif. Nilai mata uang yang sejak tahun 2000 sering berada di bawah Rp10.000 per dolar AS naik ke wilayah Rp13.000 (Gambar 2.8).

Kejadian ini disebut juga sebagai *taper tantrum* (Basri, 2017). Rupiah yang melemah membantu stabilisasi defisit neraca pembayaran, namun di saat yang sama restriksi impor meningkat tidak hanya hambatan nontarif, tetapi juga tarif (Pangestu dkk., 2015; Patunru, 2018; Patunru & Rahardja, 2015). Defisit neraca pembayaran berhasil ditekan, namun di saat yang sama menyulitkan manufaktur Indonesia untuk bangkit dan memanfaatkan RPG.

Tingginya utang dalam mata uang asing ikut berimbas pada keinginan untuk menekan defisit neraca perdagangan. Menurut Triggs dkk. (2019), utang luar negeri terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu potensi utama risiko stabilitas makroekonomi Indonesia. Bank Indonesia dirasa perlu menjaga nilai mata uang agar stabil sehingga nilai utang luar negeri terkendali.

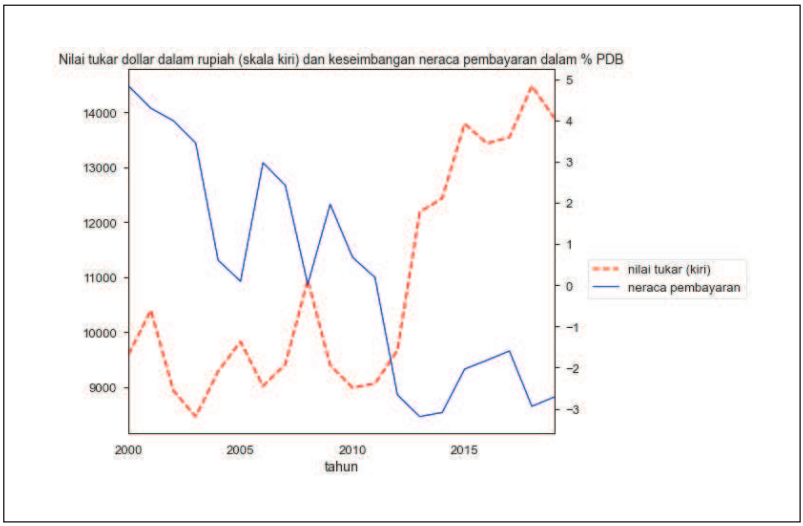

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019); World Bank (t.t.)

Gambar 2.8 Perbandingan Neraca Pembayaran Indonesia dengan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pandemi Covid-19 membuat permasalahan ini kian pelik. Krisis kesehatan yang menjadi krisis ekonomi ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan defisit belanja pemerintah secara masif (International Monetary Fund, 2020a). Anggaran Percepatan Ekonomi Nasional (PEN), program stimulus ekonomi untuk menanggulangi krisis Covid-19, mencapai 695,7 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2020), setara dengan sekitar 4,3% PDB Indonesia. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini selalu di bawah 3% PDB terpaksa mencapai level lebih dari 6%, tertinggi sejak reformasi.

Dengan kata lain, saat ini Indonesia mengalami dilema. Di satu sisi, investasi dan produksi membutuhkan impor bahan baku dan barang modal. Tanpa dibantu impor barang dan modal, Indonesia akan kesulitan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pelebaran defisit neraca dagang memberi tekanan pada nilai mata uang yang berujung pada meningkatnya biaya pembayaran utang. Ekspor yang selama ini menolong neraca pembayaran dan pendapatan negara seperti kehilangan kekuatan magisnya setelah berakhirnya ledakan harga komoditas dan *Quantitative Easing* pasca 2012.

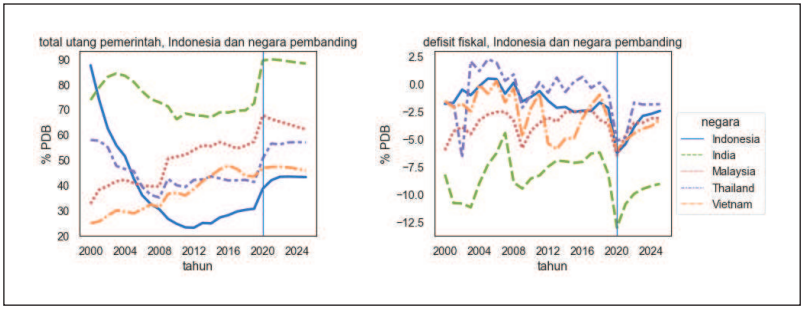

Sumber: International Monetary Fund (2020b)

Gambar 2.9 Perbandingan Total Utang dan Defisit Fiskal Tahunan Pemerintah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

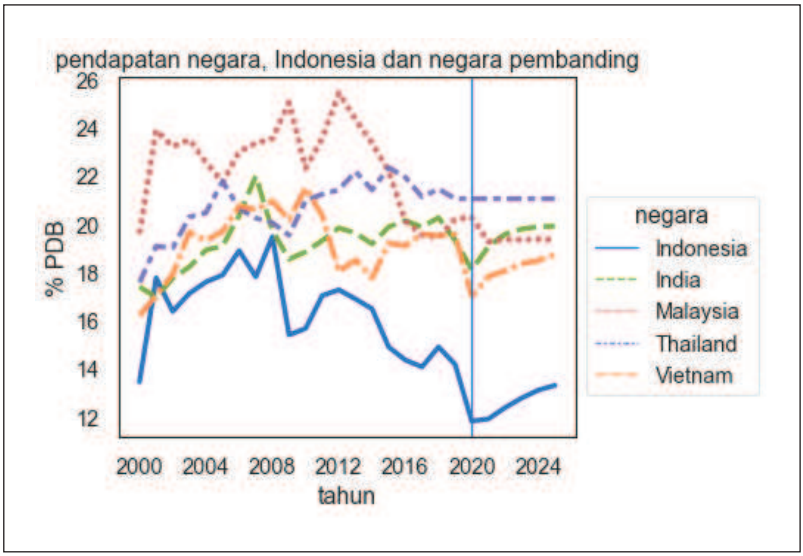

Sumber: International Monetary Fund (2020b)

Gambar 2.10 Perbandingan Pendapatan negara Indonesia dengan Negara Pembanding

E. STRATEGI MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Demi mencapai Indonesia yang sejahtera di 2045, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah syarat yang sangat penting. Strategi pemerintah mendorong ekspor dan investasi adalah langkah yang tepat di tengah rendahnya tingkat suku bunga global, terutama di negara maju. Manufaktur adalah sektor yang tepat untuk didorong karena dapat memanfaatkan ekspor barang padat karya sesuai profil tenaga kerja Indonesia saat ini.

Dalam jangka pendek, memberikan stimulus ekonomi untuk menghadapi krisis Covid-19 adalah langkah yang tepat. Bantuan sosial yang terkandung dalam paket PEN dapat mengurangi dampak terhadap kemiskinan serta mencegah permintaan berkurang terlalu drastis. Di samping itu, subsidi pelatihan dan jaminan ketenagakerjaan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terkandung dalam paket PEN dan UU Ciptaker dapat mengurangi risiko hilangnya kesempatan bagi para *lockdown generations* jangka panjang (International Labour Organization, 2020; International Labour Organization & Asian Development Bank, 2020).

Manajemen utang yang baik harus lebih diterapkan, tidak hanya utang pemerintah, namun juga utang BUMN. Pemerintah berhasil mengurangi defisit APBN dengan memotong subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) (Basri, 2017) dan mempercepat infrastruktur tanpa membebani APBN, namun di saat yang sama, beban utang BUMN meningkat (Triggs dkk., 2019). Tanpa manajemen yang baik, pemerintah terpaksa kembali menyuntik modal dengan sumber dana dari APBN.

Strategi yang mengandalkan investasi, terutama penanaman modal asing langsung, memiliki konsekuensi defisit neraca berjalan, setidaknya dalam waktu dekat. Pembangunan infrastruktur dan arus modal masuk akan meningkatkan impor, terutama bahan baku dan permesinan yang tidak sanggup diproduksi sendiri. Sektor konstruksi harus membeli bahan baku, seperti baja, dari luar negeri karena penawaran domestik tidak cukup, sementara permesinan biasanya adalah industri yang padat modal dan berteknologi tinggi dengan produsen terbatas.

Di sisi lain, pemerintah memilih untuk melakukan strategi substitusi impor. Harga jual mineral diatur untuk mengakomodasi pasar domestik, meskipun harga dunia sedang tinggi (Setiawan, 2020). Industri elektronik dipaksa meningkatkan kandungan lokal, meskipun berpotensi mengakibatkan produk yang kurang kompetitif di pasar dunia. Kebijakan seperti ini berpotensi memiliki dampak menekan ekspor sehingga dapat semakin memperlebar defisit neraca perdagangan.

Pemanfaatan RPG adalah strategi yang tepat karena kita dapat berpartisipasi dalam produksi rantai yang kita bisa, misalnya rantai padat modal. RPG merupakan strategi yang memanfaatkan investasi asing yang tidak hanya mengincar pasar domestik, namun juga pasar internasional. Sebagai contoh, Intel dan Samsung datang ke Vietnam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan membawa kapital dan teknologi untuk memanfaatkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Dengan berbagai perjanjian dagang yang dimiliki oleh Vietnam, mereka datang bukan untuk mengincar pasar Vietnam, namun pasar dunia. Oleh karena itu, RPG adalah strategi yang paling tepat jika kita ingin mengombinasikan ekspor, investasi asing, dan industri padat modal. Selain itu, pemanfaatan RPG berarti mempermudah arus barang dan jasa. Membatasi perdagangan mengakibatkan investor bingung untuk menentukan industri mana yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang. Proteksi terhadap satu sektor berpengaruh pada sektor lainnya, misalnya proteksi jagung berdampak pada industri peternakan, sementara proteksi terhadap serat sintetis memiliki dampak serius terhadap industri produk tekstil. Kita tentu ingin menghindari investor datang karena mengincar pasar yang diproteksi. Di samping itu, konsentrasi produksi hanya di satu negara tidak hanya inefisien, namun juga berisiko (Fiorini dkk., 2020; World Bank, 2020).

Indonesia telah membangun momentum yang baik setelah ditandatanganinya *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IACEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Pemanfaatan kedua perjanjian ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industri serta meningkatkan integrasi dalam RPG. Keduanya merupakan perjanjian komprehensif pertama dengan keterlibatan Indonesia dalam mengatur tidak hanya tarif, tetapi juga nontarif, investasi, kompetisi, dan perdagangan jasa. Artinya, sinergi antarkementerian/lembaga (K/L) harus lebih kuat karena kedua perjanjian tersebut mengatur isu-isu yang digawangi K/L di luar Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

Potensi penerimaan pajak juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan ekonomi karena peningkatan pendapatan fiskal adalah syarat penting untuk dapat mempertahankan defisit fiskal. Pemerintah perlu mengkaji lebih jauh efektivitas dari berbagai kebijakan pemotongan pajak yang selama ini telah dilakukan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Melihat besarnya proporsi pertambangan, industri pengolahan (yang di dalamnya terdapat produk turunan kelapa sawit), transportasi, dan perdagangan, dapat kita duga betapa besar ketergantungan penerimaan negara terhadap sektor ekspor (Direktorat Genderal Pajak Kementerian Keuangan, 2019). Diversifikasi *tax base* perlu dilakukan. Indonesia memiliki sektor informal yang besar dan jumlah wajib pajak yang tergolong rendah (Rothenberg dkk., 2016). Beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah mensyaratkan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penerima PEN. UU Cipta Kerja memberikan kelonggaran bagi UMKM, seperti pengecualian dari membayar pajak dan upah UMR sehingga mengurangi alasan untuk tidak mendaftarkan usahanya secara formal. Anggap saja seperti *tax holiday* untuk UMKM.

Penguatan industri melalui pemanfaatan RPG prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai stimulus untuk mendorong permintaan. Memperbaiki pendataan dan *tax base* sangat penting untuk mengurangi defisit fiskal serta membiayai program pembangunan.

Mengurangi dampak buruk *lockdown generation* akan berbuah manis di jangka panjang. Pembangunan manusia adalah agenda yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah di sektor manufaktur, pembangunan manusia juga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi melalui sektor jasa. Saat ini, Indonesia memiliki keunggulan dalam 'mengekspor' pariwisata dan pekerja domestik. Di masa depan, jasa profesional, seperti akuntan dan kesehatan, memiliki potensi yang tinggi dalam membantu meningkatkan ekspor Indonesia.

Pengalaman buruk krisis ekonomi mengakibatkan munculnya rasa tabu akan defisit berkepanjangan. Namun, seperti halnya sebuah perusahaan yang sedang berkembang, neraca yang defisit merupakan hal yang lumrah bagi negara yang masih tumbuh dengan cepat. Dengan perencanaan yang baik dan eksekusi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Amiti, M. & Konings, J. (2007). Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: Evidence from Indonesia. *The American Economic Review*, *97*(5), 1611–1638. doi:10.1257/000282807783219733

Aswicahyono, H., Hill, H., & Narjoko, D. (2010). Industrialisation after a deep economic crisis: Indonesia. *The Journal of Development Studies*, *46*(6), 1084–1108. doi:10.1080/00220380903318087

Badan Pusat Statistik. (2019). Kurs tengah beberapa mata uang asing terhadap rupiah di Bank Indonesia dan harga emas di Jakarta (rupiah), 2000–2019. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/952

Bappenas. (2019a). Visi Indonesia 2045. https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-ekonomi/contents-deputi-bidang-ekonomi/visi-indonesia-2045/

_____. (2019b). Voluntary national reviews (VNR): Empowering people and ensuring inclusiveness and equality. https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia

Basri, M. C. (2017). India and Indonesia: Lessons learned from the 2013 taper tantrum. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *53*(2), 137–160. doi:10.1080/00074918.2017.1392922

Direktorat Genderal Pajak Kementerian Keuangan. (2019). Peningkatan kapasitas secara berkesinambungan melalui penguatan tata kelola data dan teknologi informasi perpajakan. Diakses dari https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2019

Fiorini, M., Hoekman, B., & Yildirim, A. (2020). COVID-19: Expanding access to essential supplies in a value chain world. Dalam R. E. Baldwin & S. J. Evenett (Eds.), *COVID-19 and trade policy: Why turning inward won't work* (49–61). https://www.globaltradealert.org/reports/53

Grabowski, R. & Self, S. (2020). Industrialization and deindustrialization in Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, *7*(1), 95–111. doi:http://dx.doi.org/10.1002/app5.295

Hill, H. (2018). Asia's third giant: A survey of the Indonesian economy. *Economic Record*, *94*(307), 469–499. doi:10.1111/1475-4932.12439

Ing, L. Y., Yu, M., & Zhang, R. (2019). The evolution of export quality: China and Indonesia. Dalam L. Y. Ing & M. Yu (Eds.), *World trade evolution: Growth, productivity, and employment* (261–302). London: Routledge.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

International Labour Organization. (2020). *ILO Monitor: COVID-19 and the world of work fourth Edition*. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_745963/lang--en/index.htm

International Labour Organization & Asian Development Bank. (2020). *Tackling the COVID-19 youth employment crisis in Asia and the Pacific*. Bangkok & Manila: International Labour Organization dan Asian Development Bank.

International Monetary Fund. (2020a). Fiscal monitor: policies for the recovery. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor

_____. (2020b). World Economic Outlook: A long and difficult ascent. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020

Kementerian Keuangan. (2020). Realisasi PEN dan penanganan covid-19 hingga pertengahan Oktober capai Rp344,11 Triliun [Press release]. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pen-dan-penanganan-covid-19-hingga-pertengahan-oktober-capai-rp344-11-triliun/

Lindblad, J. T. (2015). Foreign direct investment in Indonesia: Fifty years of discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *51*(2), 217–237. doi:10.1080/00074918.2015.1061913

OECD. (2018). Real GDP long-term forecast. https://www.oecd-ilibrary.org/content/data/d927bc18-en

Pangestu, M., Rahardja, S., & Ing, L. Y. (2015). Fifty years of trade policy in Indonesia: New world trade, old treatments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *51*(2), 239–261. doi:10.1080/00074918.2015.1061915

Patunru, A. (2018). Rising economic nationalism in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, *35*(3), 335–354. doi:10.1355/ae35-3b

Patunru, A. & Rahardja, S. (2015). Trade protectionism in Indonesia: Bad times and bad policy. Diakses dari https://www.lowyinstitute.org/publications/trade-protectionism-indonesia-bad-times-and-bad-policy

Resosudarmo, B. P. & Abdurohman. (2018). Is being stuck with a five percent growth rate a new normal for Indonesia? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *54*(2), 141–164. doi:10.1080/00074918.2018.1521776

Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*, *80*, 96–113. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Serajuddin, U. & Hamadeh, N. (2020). *New World Bank country classifications by income level: 2020–2021*. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021

Setiawan, V. N. (2020). Kementerian ESDM pantau 8 perusahaan tak patuhi harga patokan nikel. *Katadata*. https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fd9f52273199/kementerian-esdm-pantau-8-perusahaan-tak-patuhi-harga-patokan-nikel

Triggs, A., Kacaribu, F., & Wang, J. (2019). Risks, resilience, and reforms: Indonesia's financial system in 2019. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *55*(1), 1–27. doi:10.1080/00074918.2019.1592644

United Nations. (n.d.) *UN comtrade*. https://comtrade.un.org/data/

United Nations, D. o. E. a. S. A., Population Division. (2019). *World population prospects 2019* (Online edition, Rev.1). https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/

World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*: Washington, D.C.: World Bank.

_____. (t.t.). *World development indicators*. https://data.worldbank.org/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Inklusivitas dalam Pertumbuhan Ekonomi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB III

Menekan Ketimpangan dan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hildayanti Moehammad Loekman

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, ketimpangan sosial menjadi dampak yang sulit dihindari di tengah masyarakat dan dapat memengaruhi berbagai bidang utama, salah satunya di bidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator dari ketimpangan ekonomi. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan rasio Gini, 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna. Berdasarkan data (World Bank, 2018), rata-rata indeks gini dari tahun 2015–2018 tercatat bahwa Namibia memiliki tingkat ketimpangan tertinggi dari 109 negara dengan indeks gini sebesar 0,591. Sepuluh besar negara dengan rata-rata tingkat ketimpangan tertinggi didominasi oleh negara-negara di Afrika dan Amerika.

Indonesia berada di peringkat ke-46 dengan rata-rata indeks gini sebesar 0,386. Sejak Maret 2015, ketimpangan di Indonesia mengalami tren penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 0,408 dan terus menurun hingga 0,381 pada Maret 2020. Namun, fenomena yang sering dialami Indonesia adalah ketika pertumbuhan ekonomi melambat, ketimpangan mengalami penurunan, dan begitupun sebaliknya, ketimpangan akan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 3.1 Rata-Rata Koefisien Gini 2015–2018

Peringkat	Negara	Indeks Gini Versi Bank Dunia (Rata-Rata 2015–2018)
1	Namibia	0,591
2	Zambia	0,571
3	Sao Tome and Principe	0,563
4	Eswatini	0,546
5	Botswana	0,533
6	Brazil	0,531
7	Angola	0,513
8	St. Lucia	0,512
9	Honduras	0,508
10	Colombia	0,505
...	...	...
46	Indonesia	0,386

Sumber: World Bank (2018)

meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan di Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, tetapi diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, yaitu kisaran 5%. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai titik 6%, tetapi rasio Gini juga mengalami kenaikan 0,032 dari yang sebelumnya 0,378 menjadi 0,410. Begitu juga pada 2008 ketika terjadi krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah hanya di kisaran 4% dan rasio Gini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (BPS, 2020a).

Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara menjadi tujuan utama dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs). Pada poin SDGs ke-10, tertuang bahwa, pada 2030 diharapkan secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi yang terbawah ke tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik dengan memastikan kesempatan yang sama demi meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *no one left*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

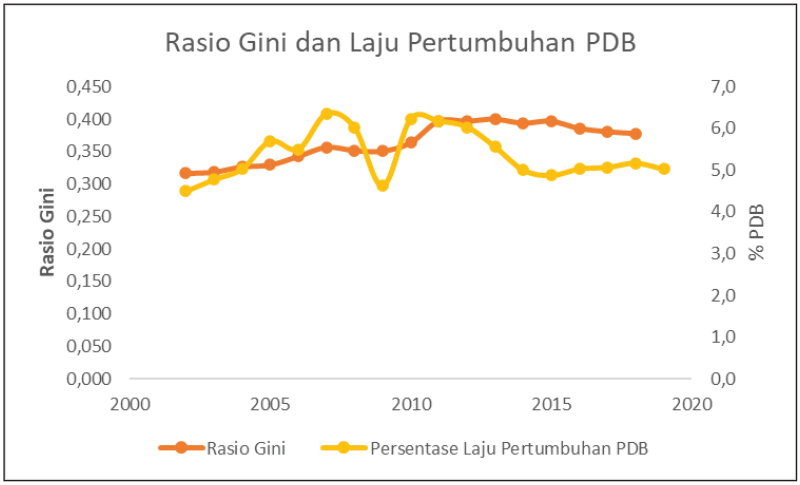

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 3.1 Rasio Gini dan Laju Pertumbuhan PDB di Indonesia

behind (United Nations, 2020). Program pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan antarwilayah dan pemerataan distribusi pendapatan pada setiap golongan rumah tangga menjadi acuan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (Kementerian PPN & Bappenas, 2020).

B. TANTANGAN DAN PELUANG: ASPEK KETIMPANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

Dunia sedang mengalami pembalikan ganda. Hal tersebut ditandai dengan penurunan ketimpangan antarnegara yang disertai dengan peningkatan ketimpangan di dalam negara. Meskipun kesenjangan pendapatan global telah menyempit, namun kesenjangan di dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negara-negara terus meningkat (IMF, 2018). Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan tahunan di atas 5% selama tahun 2000-an termasuk negara yang mengalami peningkatan tertinggi dalam ketimpangan pendapatan (Brida dkk., 2019). Data World Bank menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perubahan peningkatan ketimpangan ke-4 terpesat dari seluruh negara di dunia pada periode 2000-an. Meskipun demikian, Indonesia masih berpeluang penurunan perubahan ke yang lebih rendah. Hal tersebut terlihat dari perbandingan rasio Gini sebelum dan sesudah di periode 2000-an.

Terjadinya ledakan komoditas memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh penduduk kelas menengah yang mengalami perluasan hingga mendukung pendapatan bagi dunia usaha, pendapatan yang

Tabel 3.2 20 Besar Negara dengan Peningkatan Ketimpangan Tertinggi Periode Tahun 2000-an

Peringkat	Negara	Periode		Rasio Gini		% Perubahan	Perubahan
				Sebelum	Sesudah		
1	Sao Tome and Principe	2000	2017	32,1	56,3	75,4	24,2
2	Zambia	2002	2015	42,1	57,1	35,6	15
3	Benin	2003	2015	38,6	47,8	23,8	9,2
4	Indonesia	2000	2018	28,6	37,8	32,2	9,2
5	Mozambique	2002	2015	47	54	14,9	7
6	South Africa	2000	2014	57,8	63	9	5,2
7	Ethiopia	2004	2015	29,8	35	17,4	5,2
8	Denmark	2000	2017	23,8	28,7	20,6	4,9
9	Malawi	2004	2016	39,9	44,7	12	4,8
10	Bulgaria	2006	2017	35,7	40,4	13,2	4,7
11	Cameroon	2001	2014	42,1	46,6	10,7	4,5
12	Luxembourg	2000	2017	30,4	34,9	14,8	4,5
13	Tanzania	2000	2017	37,3	40,5	8,6	3,2
14	Pakistan	2001	2015	30,4	33,5	10,2	3,1
15	Germany	2000	2016	28,8	31,9	10,8	3,1
16	Djibouti	2002	2017	40	41,6	4	1,6
17	Sweden	2000	2017	27,2	28,8	5,9	1,6
18	Albania	2002	2017	31,7	33,2	4,7	1,5
19	Eswatini	2000	2016	53,1	54,6	2,8	1,5
20	Tajikistan	2003	2015	32,7	34	4	1,3

Sumber: World Bank (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diterima rumah tangga, dan penerimaan pemerintah yang selanjutnya mendorong permintaan di dalam negeri cukup tajam (World Bank, 2014). Namun, hal ini menyebabkan gap antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Pertumbuhan riil konsumsi per kapita bagi 20% kelompok rumah tangga atas dan 40% kelompok rumah tangga menengah masing-masing sebesar 5,9% dan 3,5%, sementara untuk 40% kelompok rumah tangga miskin hanya 1,3% per tahun (BPS, 2015).

Peristiwa ini diiringi dengan terjadinya peningkatan kekayaan perusahaan dan pasar saham atas aset-aset pertambangan, batu bara, dan minyak sawit yang semata-mata hanya mendukung peningkatan pendapatan bagi kaum berada saja. Besarnya pengeluaran subsidi BBM hanya menguntungkan beberapa golongan. Sekitar lebih dari 40% manfaat dinikmati oleh rumah tangga atas dan menengah dan hanya 1% yang dapat dinikmati oleh kelompok rumah tangga miskin. Bahkan, masyarakat miskin tidak hanya menerima manfaat yang lebih rendah saja, mereka juga lebih menderita akibat buruknya pengadaan infrastruktur (World Bank, 2014).

Tampak jelas bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh masyarakat golongan atas dan menengah saja. Menurut World Bank (2016), Indonesia mengalami kenaikan ketimpangan selama dua tahun terakhir sebesar 1,14% per tahun sejak 1998. Setelah berakhirnya ledakan komoditas pada 2012, Indonesia kembali menghadapi guncangan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas. Pendapatan dan daya beli kelompok rumah tangga atas pun melemah dan pengeluaran rumah tangga golongan bawah meningkat sehingga mampu menyetarakan *gap* rumah tangga golongan menengah dan atas. Pada Maret 2019, pengeluaran 40% masyarakat bawah mencapai 2,83%, sedangkan 0,71% untuk golongan menengah dan 0,95% untuk golongan atas (BPS, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok rumah tangga menengah sangatlah rentan terhadap goncangan ekonomi.

Selain itu, pengukuran rasio Gini di Indonesia masih belum sempurna. Pengukuran rasio Gini dapat diukur dengan menggunakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

indikator pendapatan atau konsumsi dengan standar pengukuran antarnegara yang berbeda-beda. Pengukuran rasio Gini di Indonesia menggunakan pengukuran konsumsi sehingga ketimpangan di Indonesia terlihat cenderung lebih rendah. Kelompok berpenghasilan tinggi biasanya menabung dengan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka dan kelompok berpenghasilan rendah umumnya menggunakan pendapatan mereka secara keseluruhan untuk konsumsi. Pengukuran ketimpangan perlu dilihat dari indikator lain, seperti seberapa besar akses masyarakat atas terhadap perbankan dan kepemilikan aset.

Dalam laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, 2019), simpanan rekening di atas 2 miliar rupiah pada Desember 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dari 8% ke 6,8%, sedangkan pertumbuhan rekening di bawah 2 miliar rupiah mengalami kenaikan dari 5,1% ke 6,3%. Namun, jika dilihat kembali, pertumbuhan rekening di atas 2 miliar rupiah tetap mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan rekening di bawah 2 miliar. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa ketimpangan di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu, tidak heran jika ketimpangan di Indonesia, terutama di perkotaan, mengalami peningkatan ketika terjadi krisis akibat pandemi Covid-19.

Pada Gambar 3.2 dan 3.3, ketimpangan lebih terlihat jelas di wilayah perkotaan, misalnya rasio Gini di perkotaan mencapai 0,392 hampir memasuki kategori sedang dengan distribusi pengeluaran 40% masyarakat bawah sebesar 16,93 pada Maret 2019, jauh dibandingkan pengeluaran golongan menengah dan golongan atas yang masing-masing 37,09 dan 45,98. Tingkat ketimpangan di pedesaan masih dalam kategori rendah, yaitu sebesar 0,317 dengan distribusi pengeluaran 40% masyarakat bawah sebesar 20,59 dan 39,67, serta 39,74 pengeluaran golongan menengah dan golongan atas.

Selain simpanan rekening, distribusi aset juga menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia masih sangat lebar. Selama empat dekade terakhir, rasio Gini kepemilikan lahan berfluktuasi pada rentang nilai 0,50–0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

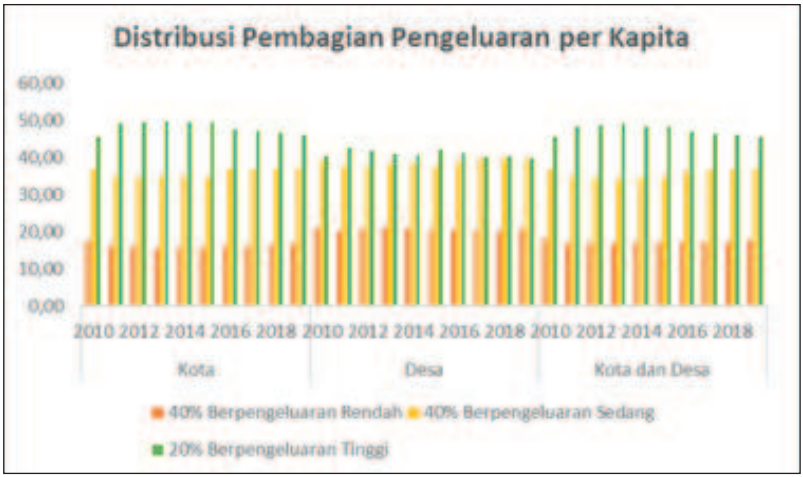

Sumber: BPS (2019)

Gambar 3.2 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

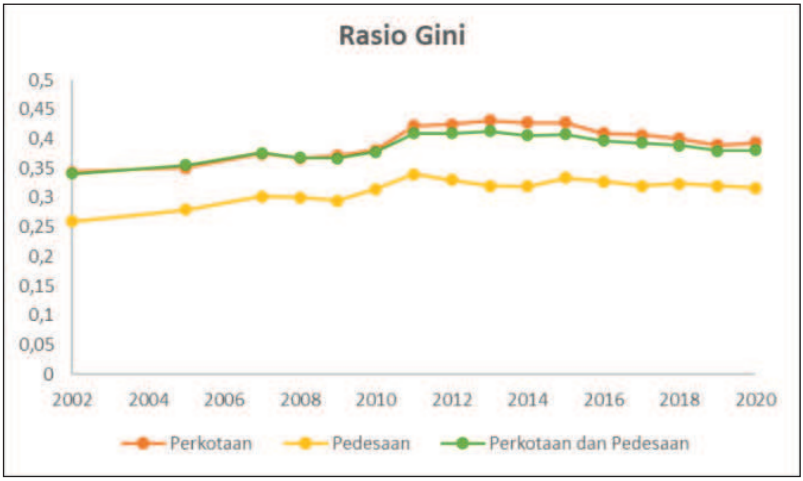

Sumber: BPS (2020)

Gambar 3.3 Perbandingan Rasio Gini Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sedang (0,4 ≤ G ≤ 0,5) dan tinggi (G < 0,5). Berdasarkan data BPS (2018), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya, hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan sehingga hal ini dapat membatasi kesempatan masyarakat bawah dalam pembelian dan kepemilikan lahan serta berdampak pada ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan semakin tertekan.

Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan dalam jangka panjang ketimpangan juga akan mengakibatkan gejolak sosial karena akses dan pemberdayaan manusia yang tidak merata serta dapat menjadi penghalang bagi program pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) (Dhanani & Islam, 2002). Konflik pun semakin parah akibat tidak meratanya kesejahteraan rakyat. Daerah dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki tingkat ketimpangan rendah (World Bank, 2016). Namun di sisi lain, ketimpangan juga merupakan imbalan bagi mereka yang bekerja keras dan berani mengambil risiko lebih banyak. Juga dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya sehingga menggertak masyarakat untuk lebih kompetitif dan kreatif.

Selain ketimpangan, kemiskinan juga merupakan isu lain yang harus diperhatikan sehingga segala kebijakan mengenai peningkatan pemerataan dan kesejahteraan menjadi indikator yang penting dalam pengentasan kemiskinan (Suryahadi dkk., 2008). Selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997–1998, angka kemiskinan naik tajam dan rasio Gini juga turun. Semua orang terkena dampak krisis, terlebih segmen masyarakat kaya yang terhantam paling keras. Pertumbuhan berkelanjutan selama lima belas tahun telah membantu menciptakan pertumbuhan kelas sosial yang mapan secara ekonomi. Kemiskinan di Indonesia pun mengalami tren penurunan secara perlahan dan konsisten. Pada periode 2006–2016, jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami rata-rata penurunan sebesar 500 ribu orang per tahun, sementara persentase kemiskinan pada 2018 telah mencapai *single*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

digit dari yang sebelumnya 10,64% menjadi 9,82, berkurang 0,082% poin (*year-on-year*). Penyebaran pandemi Covid-19 dan perlambatan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal pertama menyebabkan persentase kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar 9,78% pada Maret 2020 (BPS, 2020b).

Dalam kasus ini, peningkatan anggaran dan alokasi dana bantuan sosial (bansos) sangat berdampak baik dalam meredam kemiskinan walaupun masih belum dapat teredam seluruhnya. Berdasarkan skenario SMERU, sebuah lembaga penelitian independen terkait penelitian dan kebijakan publik, tingkat kemiskinan pada 2020 akan melonjak hingga 12,4% (skenario paling berat). Akan tetapi, dengan adanya peningkatan alokasi dana bansos, persentase kenaikan kemiskinan dapat sedikit teredam hingga 9,7% dari 9,2% pada 2019 (Al Izzati, 2020).

Kendati demikian, garis kemiskinan nasional masih berada di bawah standar internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai definisi dari pengukuran garis kemiskinan yang dikelompokkan atas ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kcal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Pada Maret 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp454.652 per kapita per bulan atau tidak jauh dari standar internasional, yaitu pada paritas daya beli sebesar USD 1,9 per kapita per hari (Sumner & Edward, 2014; Halaman dkk., 2014). Hal ini merupakan garis *purchasing power parity* bagi negara *lower income*. Negara *lower middle income* memiliki pendapatan per kapita sebesar USD 3,1 per hari. Jika Indonesia yang sudah memasuki negara *lower middle income*, tentu hal ini sangat di bawah standar. World Bank (2016) mencatat selama lima belas tahun terakhir Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan hingga berada di bawah 10% dan kelas menengah tumbuh dari 7% menjadi 20%. Namun, sangat disayangkan bahwa 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman karena masih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rentan terhadap kemiskinan terutama ketika terjadi guncangan dalam perekonomian seperti kenaikan harga pangan dan krisis ekonomi.

Pengukuran kemiskinan dengan pendapatan (pendekatan moneter) masih dianggap kurang ideal. Pengukuran kemiskinan dengan pendekatan multidimensi juga diperlukan. Karena kemiskinan lebih dari sekadar kekurangan uang. Kurangnya akses pendidikan, akses kesehatan, tempat tinggal, sanitasi, dan lain sebagainya merupakan permasalahan yang lebih sensitif terhadap fluktuasi ekonomi. United Nations Development Programme (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) mengembangkan konsep pengukuran kemiskinan dengan mendasarkan tiga indikator, yaitu pendidikan dengan mengukur lama sekolah serta akses terhadap pendidikan oleh setiap individu, kesehatan dasar yang diakses oleh rumah tangga dengan menitikberatkan indikator gizi dan kematian anak, serta standar hidup dengan mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat (Alkire & Foster, 2008).

Berdasarkan pendekatan Global Multidimensional Poverty Index (MPI), hasil survei (UNDP & OPHI, 2020) menunjukkan dalam jangka lima tahun terakhir, yaitu 2012–2017, Indonesia mampu mengurangi insiden kemiskinan sebesar 12,2% per tahun dan mengurangi setengah MPI di 17 wilayah dari 33 wilayah subnasional. Dari 75 negara, Indonesia merupakan negara tercepat dalam pengentasan kemiskinan multidimensional absolut tahunan setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dan juga dalam pengentasan kemiskinan multidimensional relatif setelah Macedonia Utara, Tiongkok, dan Armenia.

Akan tetapi, hal tersebut belum menumbuhkan kesejahteraan yang merata antarwilayah. Salah satunya diakibatkan oleh arus urbanisasi yang terus meningkat (Sagala dkk., 2014). Pada 2019, 55,8% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa tinggal di perkotaan. Meningkat 0,7% dari tahun sebelumnya sebesar 55,1% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 267,7 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat. Pada 2045 sekitar lebih dari 70% populasi akan tinggal di perkotaan (Roberts dkk., 2019).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menimbulkan masalah kemiskinan yang lebih kompleks (Hanandita & Tampubolon, 2016). Gambar 3.5 menunjukkan fokus pemerintah pada pembangunan perkotaan yang belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk. Jika dilihat sekilas, kemiskinan di perkotaan relatif kecil tapi diiringi dengan pertumbuhan kemiskinan yang sangat pesat dan kesenjangan yang semakin luas.

Gambar 3.4 menunjukkan kemiskinan di pedesaan masih relatif lebih tinggi dari di perkotaan. Pada 2019, tercatat sebanyak 12,95% penduduk desa hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase ini 50% lebih tinggi dari kemiskinan perkotaan, yaitu sebesar 6,69%. Walaupun jika dilihat dalam dekade terakhir perhitungan tingkat kemiskinan multidimensi dan moneter di pedesaan hampir sejalan, yang artinya pembangunan akses di pedesaan sudah mengalami sedikit peningkatan, tetapi skala pertumbuhan ekonomi di pedesaan masih rendah.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di pedesaan sangat tinggi jika dibandingkan perkotaan. Salah satu faktor pemicunya adalah rendahnya akses kesehatan yang dapat dilihat

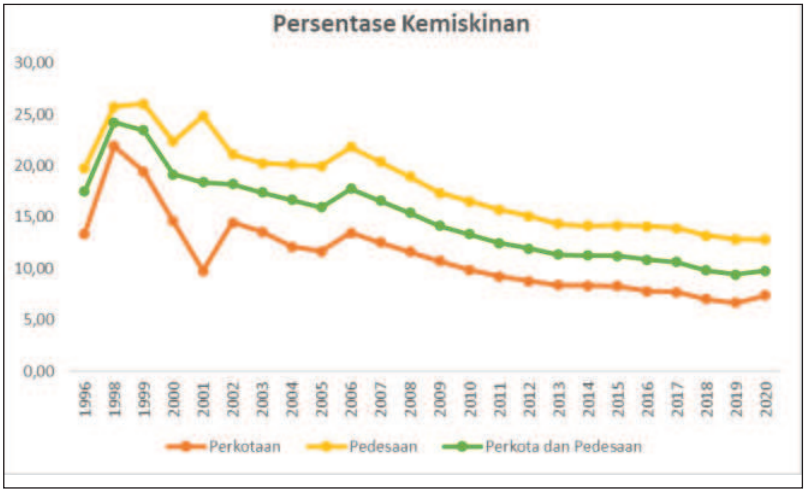

Sumber: BPS (2020)

Gambar 3.4 Persentase Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

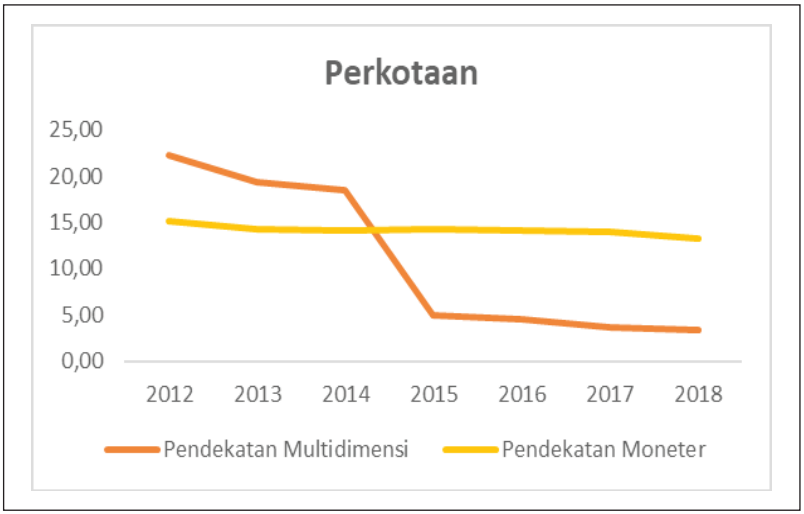

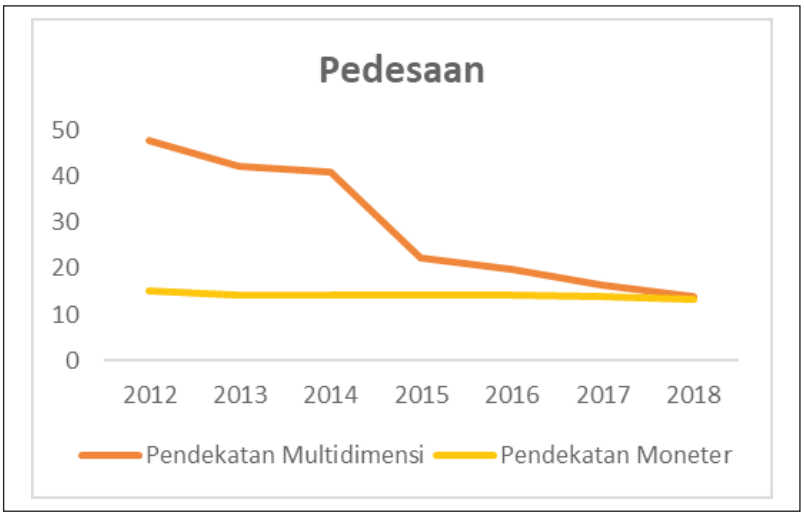

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020); Alkire dkk. (2018)

Gambar 3.5 Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan dengan Pendekatan Multidimensi dan Moneter

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 3.3 Indeks Kemiskinan Multidimensi Perkotaan dan Pedesaan

Tahun 2017	Penduduk Miskin (%)	Rentan (%)	Keparahan Kemiskinan (%)	Persentase Kontribusi Deprivasi dari Setiap Dimensi Kemiskinan		
				Kesehatan	Pendidikan	Standar Kehidupan
Perkotaan	1,96	1,89	0,13	66,73	15,19	18,07
Pedesaan	5,25	7,56	0,75	23,91	30,69	45,40

Sumber: Alkire dkk. (2020)

oleh tingginya angka kematian anak. Perhitungan Tabel 3.3 ini menggunakan pendekatan indeks kemiskinan multidimensi pada 2017 dengan menyetarakan populasi perkotaan dan pedesaan 50:50.

Laju pengentasan kemiskinan juga cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2011–2014, rata-rata tahunan pengentasan kemiskinan turun 0,5 poin dari sebelumnya 1,2 poin persentase di 2007–2010. Laju pengentasan tahun 2014–2016 juga mengalami perlambatan, yaitu hanya turun mencapai 0,7 poin menjadi 10,6% pada September 2016. Sementara itu, koefisien gini atau tingkat ketimpangan pada periode 2005–2012 meningkat 6 poin dan kembali turun 1 poin pada September 2016 (World Bank, 2017). Jika tren ini terus berlanjut, dikhawatirkan target *zero poverty* dari agenda SDGs di tahun 2030 tidak tercapai.

Seperti yang terlihat saat ini, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) termasuk Pulau Jawa dan Sumatra memiliki dominansi pembangunan, baik dalam kegiatan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat dibandingkan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hingga kini, kondisi ketimpangan pembangunan antara kedua kawasan tersebut masih terjadi. Mobilitas pada KBI lebih lancar dibandingkan KTI. Hal ini salah satunya disebabkan oleh aspek infrastruktur yang kurang memadai. Pemerataan infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap pertambahan pendapatan faktor produksi suatu daerah serta pendapatan masyarakatnya. Karena dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Apabila mobilitas dalam perdagangan lancar, maka akan memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain infrastruktur, strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan membutuhkan sarana pendidikan yang dapat terdistribusi secara merata. Pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik juga diperlukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan wilayah. Adanya *over-education*, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (bidang studi) antarwilayah menyebabkan jurang ketimpangan semakin dalam. Berdasarkan data BPS (2015), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia pada 2019 adalah 8,34 tahun yang menunjukkan capaian wajib belajar selama dua belas tahun. Jika dilihat berdasarkan data provinsi, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan RLS tertinggi, yaitu 11,1 tahun, sangat kontras dengan Provinsi Papua yang masih menduduki sebagai provinsi yang memiliki RLS terendah, yaitu 6,65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang sangat tinggi antara keduanya, yaitu RLS Provinsi DKI Jakarta memiliki 1,67 lebih besar dari Provinsi Papua (BPS, 2020d).

Hal tersebut mengacu dengan adanya peranan penting pada pendidikan dalam menentukan tingkat upah dan distribusi pendapatan. Peningkatan biaya pendidikan setiap tahun membuat sebagian individu dalam masyarakat, terutama masyarakat miskin, memperoleh pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat kaya (Gordón & Resosudarmo, 2018; Wahyuni & Monika, 2016). Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok rumah tangga miskin yang pendidikannya memenuhi wajib belajar 12 tahun hanya sebesar 106,31, jauh jika dibandingkan rasio kelompok rumah tangga atas yang mencapai 93,28 (BPS, 2020c).

Jika dilihat berdasarkan upah atau pendapatan bersih yang diterima tenaga kerja per bulan, pada Februari 2020, tenaga kerja lulusan perguruan tinggi atau diploma diperkirakan memiliki rata-rata pendapatan tertinggi, yaitu 5 juta rupiah per bulan, sementara rata-rata pendapatan untuk lulusan SMA sebesar 2,9 juta rupiah per bulan. Namun, tenaga kerja yang tidak sekolah, belum tamat SD, atau tamat SD memiliki rata-rata pendapatan terendah, yaitu kurang dari 1,6 juta rupiah (BPS, 2020e). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan sangat mepengaruhi distribusi pendapatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain rata-rata pendapatan yang rendah, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah juga menghadapi situasi yang lebih sulit karena pertumbuhan pendapatannya relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi (ILO, 2015). Data tersebut dapat menjadi acuan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat upah dan distribusi pendapatan.

C. REKOMENDASI ARAH DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka membangun Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 dengan meningkatkan kesejahteraan yang merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, target pembangunan berkelanjutan sangatlah berperan penting. Berbagai upaya kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus mempertimbangkan dampak terhadap ketimpangan karena *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi tampaknya lemah untuk distribusi pengeluaran rumah tangga 40% terbawah. Dalam peta jalan SDGs Indonesia 2030, pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga termiskin yang saat ini berada di kisaran 17% menjadi lebih dari 20%. Pemerintah juga terus menekan redistribusi bantuan sosial yang lebih merata untuk masyarakat miskin dan rentan dengan menguatkan kebijakan fiskal serta meningkatkan kontribusi dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar global demi mencapai target penurunan indeks gini sebesar 0,34 pada tahun 2035 dengan melakukan peningkatan investasi pada sektor padat karya dan pengembangan kewirausahaan (Bappenas, 2020).

Strategi mendorong pengentasan kemiskinan dengan menaikkan anggaran dana bansos merupakan sebuah langkah yang tepat mengingat tren kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi dana bansos. Namun, alokasi tersebut harus tersebar dengan tepat sasaran agar ketimpangan tidak semakin melebar. Dana bansos yang telah dialokasikan, diharapkan juga dapat diawasi sebaik mungkin oleh pemerintah dengan mendata kembali penerima manfaat serta memastikan bahwa dana yang di-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berikan telah dimanfaatkan secara maksimal serta dikembangkan. Hal tersebut bermaksud untuk mendidik ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan demi menumbuhkan jiwa kaya pada masyarakat miskin sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang memiliki sistem perekonomian yang mandiri dan kreatif.

Modernisasi sistem pendidikan juga diperlukan. Pembelajaran dalam mengelola keuangan yang ditanamkan sejak dini merupakan salah satu upaya yang sangat penting. Literasi ekonomi dapat membantu masyarakat melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Bahkan, hal ini berpotensi dapat meningkatkan keinginan menabung yang tinggi di dalam negeri sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian bangsanya, baik melalui penyaluran modal maupun pengguna modal.

Dalam mengatasi padatnya penduduk di perkotaan serta timpangnya pertumbuhan ekonomi antara KBI dan KTI, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pendekatan dan strategi pembangunan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat untuk mewujudkan keunggulan yang kompetitif di berbagai wilayah. Upaya pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi terhadap wilayah luar Pulau Jawa, terutama KTI dari Jawa dan KBI, dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan pada Pulau Jawa. Target pembangunan ini mengacu pada sasaran yang tertuang di RPJMN 2015–2019, di antaranya dengan membentuk pembangunan daerah metropolitan baru, meningkatkan infrastruktur terhadap desa-desa tertinggal, khususnya di luar Pulau Jawa, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau Jawa. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara merata yang dapat dirasakan seluruh masyarakat dengan terus memperhatikan kondisi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

wilayah demi memperkecil bencana alam dan skala kemiskinan di Indonesia.

Namun, pemerataan infrastruktur bukanlah satu-satunya solusi untuk mengurangi ketimpangan. Pemerataan kesempatan terutama di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan poin yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan peran dalam mobilitas sosial pun memberikan dampak penting pada pertumbuhan yang tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi ditopang oleh produktivitas, sedangkan produktivitas ditopang oleh inovasi. Adapun inovasi didukung oleh keahlian dalam berbagai bidang. Semua ini dapat terjadi dengan adanya peningkatan investasi pada sumber daya manusia.

Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industri dan menguatkan transisi lapangan kerja, serta pelatihan berbasis kompetensi. Hal tersebut didasari oleh arah pembangunan wilayah RPJMN 2020–2024 dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan layanan dasar serta peningkatan produktivitas daya saing, seperti adanya subsidi program pelatihan dan bantuan dana pendidikan bagi masyarakat miski, serta peningkatan fasilitas sekolah dan perpustakaan. Selain menyediakan fasilitas sekolah yang memenuhi standar, perlu adanya peningkatan pada kualitas dan gaji pengajar. Gaji guru di Indonesia masih sangat rendah (sekitar 150 ribu hingga 6 juta rupiah per bulan) jika dibandingkan negara lain, seperti negara-negara di Eropa karena hal ini dapat mengurangi etos kerja guru.

Dilema lain yang dirasakan Indonesia adalah penguasaan aset dan pendapatan masyarakat golongan atas yang semakin meluas. Banyak masyarakat golongan menengah yang naik menjadi golongan atas diiringi dengan sebagian lain yang masih dalam kategori rentan miskin. Dalam hipotesis penelitiannya, Kuznets (dalam Nurazi & Usman, 2019) mengatakan semakin tinggi pertumbuhan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ekonomi maka tingkat ketimpangan pun semakin tinggi dan ketika pertumbuhan ekonomi sudah merata maka tingkat ketimpangan pun akan menurun. Demi menghindari ketimpangan yang semakin tinggi, pemerintah berupaya dalam melakukan perluasan basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Upaya tersebut diiringi dengan meningkatkan kemampuan untuk pengumpulan pajak dan menggenjot masyarakat dalam pembayaran pajak. Pemerintah juga telah menurunkan pajak UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM.

Demi hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, perlu adanya kebijakan pada sistem pajak yang lebih progresif, khususnya pada pajak penghasilan sehingga terjadi penekanan terhadap konsumsi rumah tangga atas. Pendistribusian pajak pun harus dilakukan secara adil demi meningkatkan rasa keadilan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia. Pemerintah juga harus cermat dalam mengelola anggaran pajak, salah satunya dengan mengurangi belanja perpajakan yang tidak efektif ke lebih selektif yang terukur dalam memberikan fasilitas pajak. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara optimal.

REFERENSI

Al Izzati, R. (2020). Estimasi dampak pandemi COVID-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia. http://smeru.or.id/id/content/estimasi-dampak-pandemi-covid-19-pada-tingkat-kemiskinan-di-indonesia

Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2020). *The global multidimensional poverty index (MPI) 2020* (OPHI MPI Methodological Notes 49). London: Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.

Alkire, S. & Foster, J. (2008). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, *95*(7–8), 476–487.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik 70 tahun Indonesia merdeka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. (2019). Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini, 2010–2019. https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/946/distribusi-pembagian-pengeluaran-per-kapita-dan-indeks-gini-2010-2019.html

Buku ini tidak diperjualbelikan.

_____. (2020a). Laju pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen), 2020. https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html

_____. (2020b). Persentase penduduk miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#:~:text=

_____. (2020c). Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki menurut kelompok pendapatan (pengeluaran) 2018–2020." https://www.bps.go.id/indicator/28/1608/1/rasio-angka-partisipasi-murni-apm-perempuan-laki-laki-menurut-kelompok-pendapatan-pengeluaran-.html

_____. (2020d). Rata-rata lama sekolah menurut provinsi [metode baru], 2010–2019. https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/18/1773/rata-rata-lama-sekolah-menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html

_____. (2020e). Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan pegawai menurut pendidikan tertinggi dan lapangan pekerjaan utama, 2020. https://www.bps.go.id/statictable/2020/07/07/2098/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-pendidikan-tertinggi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2020.html

Bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia? (2018, 1 Januari). Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia

BPS & Bappenas. (2020). *Peta jalan SDGs menuju 2030*.

BPS & Susenas. (2020). *Gini ratio provinsi 2002–2020*. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116

Brida, J. G., Carrera, E. J. S., & Segarra, V. (2019). Clustering and regime dynamics for economic growth and income inequality. *Structural Change and Economic Dynamics*, *52*, 99–108. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.09.010

Dhanani, S. & Islam, I. (2002). Poverty, vulnerability and social protection in a period of crisis: The case of Indonesia. *World Development*, *30*(7), 1211–1231. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00028-1

Gordón, I. G. & Resosudarmo, B. P. (2018). A sectoral growth-income inequality nexus in Indonesia. *Regional Science Policy and Practice*, *11*(1), 123–139. https://doi.org/10.1111/rsp3.12125

Halaman, A. A., Prastowo, Y., Yusuf, Kinasih, H. N., Tursia, Firdaus, M., Ahmady, I., Maftuchan, A., Tangka, M. V., & Tangka, M. V. (2014). *Ketimpangan pembangunan dari berbagai aspek*. Jakarta: Infid.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hanandita, W. & Tampubolon, G. (2016). Multidimensional poverty in Indonesia: Trend over the last decade (2003–2013). *Social Indicators Research*, *128*(2), 559–587. https://doi.org/10.1007/s11205-015-1044-0

IMF. (2018). *Laporan tahunan IMF 2018: Tinjauan umum membangun masa depan bersama*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

International Labour Organization. (2013). *Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2013*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Kementerian PPN & Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.

LPS. (2019). Data distribusi simpanan 2018–2019. https://www.lps.go.id/web/guest/data-distribusi-simpanan?p_p_id=101_INSTANCE_eN56&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_eN56_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_eN56_keywords=&_101_INSTANCE_eN56_delta=5&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_eN56_cur=3&_101_INSTANCE_eN56_andOperator=true

Ministry of Finance Republic of Indonesia, European Union, Swiss Confederation, Australian Government, The World Bank, & Governments of Canada. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/787371590233774656-0070022020/original/IDPER2020ESCh1Overview.pdf

Nurazi, R. & Usman, B. (2019). Impact of financial development on income inequality and poverty in ASEAN. *Institutions and Economies*, *11*(3), 1–38.

Roberts, M., Sander, F. G., & Tiwari, S. (2019). *Time to ACT*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Sagala, P., Akita, T., & Yusuf, A. A. (2014). Urbanization and expenditure inequality in Indonesia: testing the Kuznets hypothesis with provincial panel data. *Letters in Spatial and Resource Sciences*, *7*(3), 133–147. https://doi.org/10.1007/s12076-013-0106-7

Sumner, A. & Edward, P. (2014). Assessing poverty trends in Indonesia by international poverty lines. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *50*(2), 207–225. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938404

Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2008). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, *89*(1), 109–117. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.08.003

Buku ini tidak diperjualbelikan.

United Nations. (2020). *Inequality in a rapidly changing world*.
United Nations Development Programme and Oxford Poverty and Human Development Initiative. (2020). *Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf
Wahyuni, R. N. T. & Monika, A. K. (2016). Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *11*(1), 15. https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.63
World Bank. (2014). *Kajian Kebijakan Pembangunan 2014: Indonesia: Menghindari perangkap*. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/Indonesia-development-policy-review-2014-bahasa.pdf
_____. (2015, 8 Desember). *Indonesia's rising devide*. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide
_____. (2017). *Menuju sistem bantuan sosial yang menyeluruh, terintegrasi, dan efektif di Indonesia.* https://docplayer.info/64456369-Menuju-sistem-bantuan-sosial-yang-menyeluruh-terintegrasi-dan-efektif-di-indonesia.html
_____. (2018). Gini index world bank estimate. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV

Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ghibran Fahreza Dipayana

A. PENDAHULUAN

United Nation Development Program (UNDP) telah menyusun tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu negara menggunakan *human development index* (HDI), namun berkembangnya isu kesetaraan gender (*gender equality*) telah mendorong pembaruan pada tolok ukur. Hasil pembaharuan tersebut adalah *gender development index* (GDI) dan *gender empowerment measure* (GME). Kedua indeks tersebut memasukkan faktor kesetaraan gender pada perhitungannya, namun masih memiliki kekurangan, terutama nilai agregat yang tidak secara tajam menunjukkan ketimpangan gender yang terjadi. Indeks ini juga mengombinasikan pengukuran absolut dengan pencapaian relatif (Kiriti & Tisdell, 2003), serta kurang mampu untuk menggambarkan pembangunan secara keseluruhan, khususnya pada ketimpangan gender sehingga muncullah tolok ukur atau indeks baru, yaitu *gender inequality index* (GII). GII sendiri menggunakan tiga dimensi sebagai pengukuran, seperti kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja, khususnya kaum wanita.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sustainable Development Goals (SDGs) menyatakan pentingnya kesetaraan gender untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan dan mendorong peran wanita dalam sektor lebih strategis, serta menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan yang akan berkontribusi terhadap meningkatnya kesetaraan dan berkurangnya ketimpangan pendapatan pada pria dan perempuan. Sakernas (2012) menyatakan bahwa umumnya tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian. Tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian sebesar 34,48%, perdagangan sebesar 27,81%, dan jasa sebesar 19,17%. Sektor informal juga merupakan salah satu sektor bagi partisipasi angkatan kerja kaum perempuan, sedangkan sektor informal sendiri kurang memiliki jaminan serta kekuatan hukum yang kuat antara pekerja dan pemberi kerja. Hal tersebut juga tidak dibutuhkannya tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kualifikasi pendidikan tinggi, serta lebih fleksibel sehingga merupakan salah satu sektor yang hingga saat ini cukup banyak kaum wanita berpartisipasi.

Komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender, khususnya di bidang ekonomi, pun telah diwujudkan dengan diterbitkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan hal tersebut merupakan tujuan dari *Millennium Development Goals*. Bidang ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi atau PDB, tidak dapat dipisahkan dari pentingnya pembangunan gender. Klasen dan Lamanna (2009) menghitung konsekuensi secara kuantitatif yang harus ditanggung oleh sebuah negara ketika terdapat ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan di negaranya, yaitu perbedaan laju pertumbuhan ekonomi berkisar antara 0,9–1,7% di Timur Tengah dan Afrika Utara serta 0,1–1,6% di Asia Selatan jika dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Korelasi antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Peningkatan kesetaraan gender diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga efek turunan (*multiplier effect)* yang ditimbulkan. Harahap (2014) melaporkan bahwa biaya disparitas gender tinggi karena disparitas gender tidak hanya mengu-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rangi kesejahteraan perempuan, tetapi juga mengurangi kesejahteraan laki-laki dan anak-anak. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan rendahnya *human capital* perempuan rendah dan kualitas pelayanan untuk anak, serta percepatan penyebaran HIV. Berdasarkan laporan, diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja dan akses terhadap sumber daya menyebabkan terjadi inefisiensi dalam alokasi *input* dan hilangnya *output*. Pembangunan kesetaraan gender dalam indeks GDI, GEM maupun GII dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif perlu mempertimbangkan beberapa *variable*, seperti kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) serta pendidikan.

B. PENINGKATAN DAN PEMERATAAN AKSES KESEHATAN DAN LAYANAN BAGI KAUM WANITA

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek penting. Menurut World Health Organization (WHO) (2021), kesehatan adalah kondisi dinamis, meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, SDGs sektor kesehatan tingkat nasional disajikan dalam laporan *Voluntary National Review* (VNR) yang bertujuan untuk membahas salah satu indikator penting berkaitan dengan kaum wanita di bidang kesehatan, di antaranya adalah kematian ibu dan bayi serta pemerataan pelayanan.

Indikator pemerataan akses dan layanan kesehatan antara pria dan wanita masih menunjukkan celah (*gap*), yang berarti masih belum tercapainya pemerataan tersebut. Indikator tersebut adalah keluhan kesehatan, angka kesakitan, tempat berobat, dan rawat inap (Kemen PPPA, 2018). Keluhan kesehatan sendiri dapat menggambarkan pembangunan derajat kesehatan masyarakat. Secara nasional, persentase perempuan yang memiliki keluhan kesehatan sebesar 29,82%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 27,44% (Kemen PPPA, 2018).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pola tersebut tidak berbeda terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan, di mana perkotaan merupakan daerah dengan pembangunan yang lebih masif sehingga akses kesehatan yang merata antara kaum perempuan dan pria seharusnya dapat tercapai.

Angka kesakitan merupakan kondisi di mana keluhan mengganggu kegiatan sehari hari (Kemen PPPA 2018). Secara nasional, angka kesakitan perempuan sebesar 14,63% lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 13,99% (Kemen PPPA, 2018). Fenomena tersebut juga terjadi di perkotaan yang memiliki akses kesehatan lebih baik sehingga seharusnya diharapkan dapat merata dalam pelayanan, baik kaum perempuan maupun pria. Tempat berobat dan rawat inap menggambarkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Keterjangkauan layanan dan fasilitas kesehatan yang buruk akan berefek terhadap tidak maksimalnya dan tidak merata layanan kesehatan tersebut. Fasilitas kesehatan di antaranya terdapat praktik dokter atau bidan, puskesmas, dan klinik dokter bersama. Pada tahun 2017, sebagian besar perempuan berobat jalan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat di praktik dokter atau bidan (41,68%), puskesmas atau pustu (31,37%), dan klinik dokter bersama (13,68%). Demikian pula, sebagian besar laki-laki berobat jalan ke praktik dokter atau bidan (41,96%), di puskesmas/pustu (28,56%), dan klinik dokter bersama (14,81%) (Kemen PPPA, 2018). Pentingnya indikator tersebut menggambarkan secara garis besar keadaan kesehatan antara kaum wanita dan pria.

Di era seperti sekarang, pemerataan layanan kesehatan bagi kaum wanita merupakan hal yang penting dan wajib karena wanita tidak hanya didorong sebagai ibu rumah tangga, namun memiliki peran yang lebih strategis dengan taraf beban yang mungkin lebih berat ketimbang pria. Wanita tidak hanya akan berurusan dengan pekerjaan, tetapi urusan rumah tangga, anak, dan keluarga tentunya juga merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Dalam mendorong hal tersebut, kepemilikan akan jaminan sosial atau asuransi sangat penting. Indonesia memiliki beragam jaminan kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta, seperti BPJS Kesehatan, BPJS

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketenagakerjaan, Askes/Asabri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI, Jamkesda, asuransi swasta hingga jaminan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan/kantor. Kepemilikan jaminan kesehatan berupa BPJS antara kaum pria dan wanita berdasarkan kriteria kategori pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah hingga penerima bantuan iuran tidak menunjukkan ketimpangan yang amat besar (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pendekatan angka harapan hidup (AHH) merupakan salah satu komponen yang masuk dalam perhitungan GDI berdasarkan sektor kesehatan. Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) mengemukakan AHH mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terkait akses kesehatan dari aspek lama usia hidup. Tabel 4.1 menunjukkan pola peningkatan, baik kaum pria maupun kaum perempuan, yang membuktikan bahwa semakin baiknya akses, layanan, dan pemerataan fasilitas kesehatan. Semakin meratanya pelayanan dan akses kesehatan terhadap kaum wanita akan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) mengingat peningkatan kesehatan wanita akan berdampak pada peningkatan kesehatan dan produktivitas anak dan keluarga yang akan menghasilkan *output* yang lebih besar dan baik.

Tabel 4.1 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kaum Pria dan Wanita Periode 2017–2019

Provinsi	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Aceh	67,98	67,73	67,62	71,85	71,67	71,55
Sumatra Utara	67,07	66,73	66,49	70,92	70,52	70,29
Sumatra Barat	67,42	67,16	66,94	71,29	70,93	70,70
Riau	69,62	69,32	69,12	73,43	73,12	72,92

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Provinsi	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Jambi	69,11	68,89	68,75	72,97	72,80	72,67
Sumatra Selatan	67,78	67,52	67,29	71,63	71,40	71,17
Bengkulu	67,28	66,89	66,64	71,13	70,76	70,51
Lampung	68,64	68,27	68,04	72,48	72,14	71,91
Kep. Bangka Belitung	68,63	68,32	68,08	72,46	72,11	71,89
Kep. Riau	67,92	67,76	67,60	71,73	71,56	71,40
Dki Jakarta	70,96	70,87	70,78	74,68	74,56	74,41
Jawa Barat	71,03	70,76	70,58	74,81	74,62	74,42
Jawa Tengah	72,33	72,28	72,16	76,16	76,10	76,02
DI Yogyakarta	73,13	73,03	72,95	76,76	76,65	76,57
Jawa Timur	69,30	68,99	68,82	73,15	72,87	72,70
Banten	67,97	67,72	67,57	71,81	71,62	71,47
Bali	70,11	69,80	69,58	73,89	73,57	73,35
Nusa Tenggara Barat	64,32	63,88	63,57	68,16	67,75	67,42
Nusa Tenggara Timur	64,98	64,51	64,20	68,81	68,28	67,96
Kalimantan Barat	68,67	68,26	68,00	72,55	72,16	71,90
Kalimantan Tengah	67,79	67,74	67,69	71,60	71,55	71,50
Kalimantan Selatan	66,55	66,16	65,98	70,45	70,19	69,95
Kalimantan Timur	72,41	72,13	71,87	76,13	75,87	75,61
Kalimantan Utara	70,57	70,52	70,50	74,40	74,37	74,34
Sulawesi Utara	69,71	69,33	69,11	73,55	73,23	73,01
Sulawesi Tengah	66,32	65,86	65,40	70,26	69,75	69,29
Sulawesi Selatan	68,54	68,20	67,96	72,42	72,10	71,86
Sulawesi Tenggara	69,20	68,83	68,57	73,12	72,71	72,47
Gorontalo	66,01	65,51	65,22	69,94	69,53	69,20

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Provinsi	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Sulawesi Barat	62,96	62,76	62,52	66,78	66,47	66,23
Maluku	63,95	63,68	63,49	67,79	67,58	67,39
Maluku Utara	66,25	65,82	65,56	70,17	69,79	69,53
Papua Barat	64,01	63,57	63,34	67,78	67,43	67,19
Papua	63,87	63,67	63,45	67,51	67,22	67,00
Indonesia	69,44	69,30	69,16	73,33	73,19	73,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

C. PARTISIPASI WANITA DALAM PASAR TENAGA KERJA DAN EKONOMI

Partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Struktur angkatan kerja dan pasar tenaga kerja yang masih didominasi oleh pria, terutama untuk jabatan-jabatan strategis serta peran publik, telah mengurangi peran dan potensi kaum wanita. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu jalan yang perlu ditempuh, terutama dalam bidang ekonomi produktif keluarga, melalui penumbuhan minat dan motivasi di bidang usaha dengan proses pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan. Gambar 4.1 menggambarkan pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga yang digantikan oleh wanita seiring dengan perkembangan zaman. Persentase istri menjadi kepala rumah tangga dengan umur di bawah 20 tahun sebesar 45,44%, sedangkan laki laki dengan umur yang sama adalah sebesar 54,56% (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2019). Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan laki laki adalah sebagai kepala rumah tangga, sedangkan wanita adalah sebagai ibu rumah tangga. Pergantian tugas dan tanggung jawab tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ekonomi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

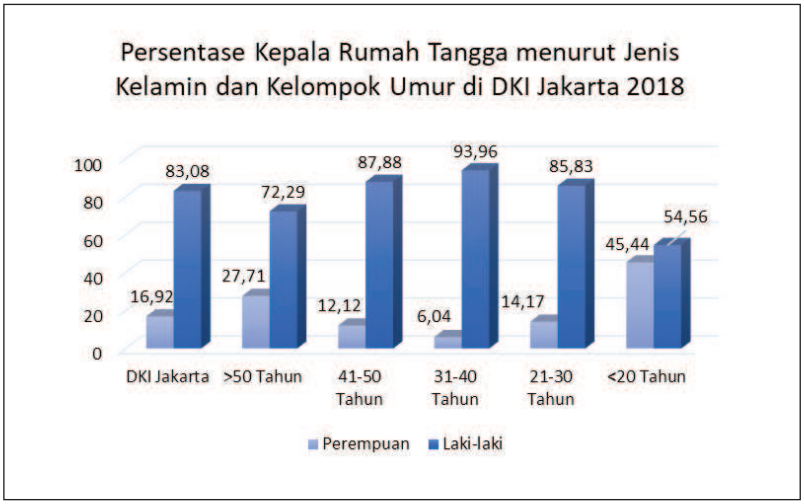

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019)

Gambar 4.1 Presentasi Kaum Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga di DKI Jakarta Tahun 2018

Secara global, terdapat sekitar 51% perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, dibandingkan laki-laki yakni sekitar 82%. Pada dasarnya, angka tersebut tidak mengalami perubahan dalam dua puluh tahun terakhir. Besarnya perbedaan gaji karena gender juga belum mengalami penurunan. Rata-rata, gaji yang diterima perempuan 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki (ILO, 2015). Masih terdapatnya ketimpangan cukup besar, di antaranya pada besaran upah antara kaum pria dan wanita. Tingginya partisipasi kaum wanita pada pasar tenaga kerja tidak hanya menggambarkan kemampuan wanita untuk beraktualisasi dan sebagai bentuk ekspresi potensialnya, namun juga menggambarkan kualitas modal produktivitas itu sendiri mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau *labour force participation rate* (LFPR) adalah indikator dari tingkat aktivitas pasar tenaga kerja. TPAK mencerminkan tingkatan penduduk usia kerja pada suatu negara yang aktif secara ekonomi (ADB, 2012). Perempuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja karena mereka biasanya menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh rumah tangganya sendiri, seperti menyiapkan dan menyajikan makanan atau merawat anak, orang sakit, atau orang tua yang terdapat di dalam rumah tangga (UNFPA, 2014). Pekerjaan rumah tangga yang sering kali menjadi tugas perempuan, memengaruhi ketersediaan seseorang untuk bekerja (ILO, 2012).

D. PERAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MODAL (*HUMAN CAPITAL*) KAUM WANITA

Masih besarnya ketimpangan gender, baik dalam hal penerimaan upah maupun posisi dan dalam pekerjaan, salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan kaum wanita di Indonesia. Indikator penting yang digunakan dalam mengukur hal tersebut adalah angka melek huruf, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, dan rata-rata lama sekolah (Kemen PPPA, 2016). Secara nasional, angka melek huruf penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas masih lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas, berturut-turut 93,76% dan 97,25% (BPS 2017). Angka melek huruf sendiri merupakan gambaran kemampuan untuk membaca dan menulis yang merupakan dasar dari segalanya. Celah besar antara kemampuan kaum pria dan wanita tersebut menandakan masih kurangnya pemerataan pembangunan pendidikan, terutama pada kaum wanita yang masih dianggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang mutlak dimiliki oleh wanita. APK SD sampai dengan perguruan tinggi (PT) perempuan secara nasional masing-masing sebesar 108,24%; 91,14%; 83,20%; dan 26,52% (Kemen PPPA, 2016). Persentase tersebut menggambarkan pola penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sulit akses kaum wanita untuk memperolehnya. Biaya tinggi dan kurangnya kesadaran diri sendiri kaum wanita, serta kurangnya dukungan, baik finansial maupun moral, pada kehidupan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat dan keluarga mengakibatkan pola yang menurun tajam hingga jenjang perguruan tinggi. Tabel 4.2 menunjukkan perbandingan antara kaum pria dan wanita yang menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Secara persentase, perbandingan dengan kaum pria, kaum wanita telah mengalami kemajuan dan berada sedikit di atas kaum pria, namun secara jumlah kaum wanita yang menempuh hingga perguruan tinggi harus didorong. Pendidikan merupakan salah satu jalan dalam pemenuhan keterampilan serta meningkatkan modal produktivitas manusia. Seiring meningkatnya jumlah kaum wanita berpendidikan tinggi maka dapat mendorong kaum wanita untuk lebih aktif mengambil peran strategis serta mampu bekerja produktif setara dengan kaum pria.

Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah dan Persentase Pria dan Wanita Berpendidikan Tinggi (2008–2012)

Komponen	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Jumlah	4.281.695	4.337.039	4.787.785	5.616.670	5.822.143
Laki laki	2.085.037	2.181.699	2.363.182	2.788.957	2.800.298
Perempuan	2.196.658	2.155.430	2.424.603	2.827.713	3.021.845
% Laki laki	48,70	50,30	49,63	49,65	48,10
% Perempuan	51,30	49,70	50,64	50,35	51,90

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud (2015)

APM tahun 2017 memiliki pola yang hampir sama dengan APK. APM SD perempuan sekitar 97,04%, sedikit lebih rendah dibandingkan APM SD laki-laki yang sekitar 97,34% (Kemen PPPA, 2016). APM sendiri berbeda dengan APK. Nilai APK akan selalu lebih tinggi ketimbang APM karena APK menggambarkan seluruh penduduk kelompok umur pada jenjang tertentu, sedangkan APM hanya penduduk kelompok umur tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Perbedaan APM yang cukup rendah menunjukkan mulai meratanya akses, kesempatan, dan layanan pendidikan. Hal tersebut juga menggambarkan pentingnya memperoleh pendidikan bagi kaum wanita. Secara nasional, penduduk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perempuan usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hanya sekitar 8,17 tahun, masih di bawah laki-laki yang mencapai 8,83 tahun (Kemen PPPA, 2016). Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan berdasarkan rata-rata jumlah tahun efektif. Oleh karena itu, RRLS kaum wanita masih lebih rendah dibandingkan kaum pria maka diperlukan akses dan kesempatan, serta pemupukan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pendidikan bagi kaum wanita.

Schultz (1995) menyatakan bahwa memperluas kesempatan pendidikan bagi wanita sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi karena empat alasan sebagai berikut.

1. Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan perempuan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki di negara berkembang.
2. Peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya menaikkan produktivitasnya di sektor pertanian dan industri, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan, serta gizi anak-anak.
3. Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi mendatang.
4. Perempuan memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara berkembang.

E. KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI KESETARAAN GENDER UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) maka pemenuhan indikator-indikator *Gender Empowerment Measure* (GME), *Gender Development Index* (GDI) hingga *Gender*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Inequality Index (GII). Ketiga indeks tersebut terkonsentrasi pada pembangunan tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi wanita pada ekonomi dan pasar tenaga kerja. Laporan World Bank telah menunjukkan bahwa biaya disparitas gender amat tinggi dan ketimpangan menyebabkan kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi. Akses, kesempatan, dan kesadaran kaum wanita untuk pemenuhan tiga hal tersebut menyebabkan wanita tidak mampu kompetitif dengan kaum pria, serta masih ada diskriminasi dan budaya hukum di masyarakat bahwa wanita adalah ibu rumah tangga haruslah diubah.

Dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas membuka peluang dan akses sebesar-besarnya bagi kaum wanita melalui teknologi informasi. Komitmen pemerintah diperlukan tidak hanya berupa Inpres No. 9 Tahun 2000, melainkan juga aturan turunan dan teknis yang lebih detail untuk mengakomodasi kepentingan dan potensi kaum wanita. Pemerataan asuransi dan jaminan sosial bagi kaum wanita sangat penting mengingat masih banyak wanita yang sampai hari ini masih bekerja di sektor informal dengan kurangnya jaminan dan perlindungan.

Menurut Parawansa (2006, 72), langkah dan kebijakan yang perlu didorong untuk pemerataan gender dalam segi perspektif gender adalah sebagai berikut.

1. Perlu ada jaminan konstitusional dari parlemen dan negara tentang persamaan upah perempuan dan laki-laki, pemberian hak untuk memperoleh akses, dan penghapusan peraturan yang mendiskriminasi perempuan.
2. Dari aspek pendidikan, perlu mendiseminasikan informasi yang mereka butuhkan, mengembangkan tenaga kerja dan informasi, serta memastikan perempuan miskin untuk memperoleh akses terhadap pelatihan di tempat kerjanya.
3. Perlu mengembangkan kebijakan dalam pendidikan, terutama untuk mengubah perilaku yang memperkuat pembagian kerja secara gender. Secara umum, peran domestik diasumsikan hanya sebagai tugas kaum perempuan. Oleh karena itu, pekerjaan perempuan akan bertambah berat ketika bekerja di ruang publik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang sensitif gender dan dalam rangka pemberdayaan perempuan maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut (Darwin, 2005). Pertama, prioritas pada kelompok perempuan pedesaan karena potensinya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan dan pemulihan ekonomi, yaitu penyediaan fasilitas modal bagi para perempuan yang mengelola usaha, baik kecil maupun menengah, terutama di pedesaan dan daerah pesisir atau nelayan. Peredaran uang di seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi perempuan di pedesaan dan membantu perempuan untuk memasuki pasar melalui aktivitas pertukaran yang mempergunakan uang.

Kedua, pelaksanaan penyediaan modal bagi kelompok perempuan dan besarnya fasilitas modal yang dapat diakses diharapkan cukup memadai sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh semua kelompok usaha perempuan.

Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi pedesaan yang menunjang perluasan akses terhadap informasi baru yang lebih akurat bagi perempuan pengusaha kecil dan menengah. Informasi terkini yang akurat akan membantu masyarakat pedesaan untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki bagi usaha produksi komoditas yang dapat memberikan imbalan memadai dan menguntungkan.

Terakhir, optimalisasi peran seluruh sumber daya manusia perempuan diharapkan makin dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Peningkatan perempuan dalam pasar diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan tingkat kesejahteraan masyarakat selain meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Aktaria, E. & Handoko, B. S. (2012). Ketimpangan gender dalam pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *13*(2), 194–206. http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/168/155

Asian Development Bank. (2016). FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN ASIA: KEY TRENDS, CONSTRAINTS, AND OPPORTUNITIES [E-book]. Asian Development Bank. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/209666/female-labor-force-participation-asia.pdf

Azira, I. (2019, September 20). Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga di DKI Jakarta. https://statistik.jakarta.go.id/persentase-perempuan-sebagai-kepala-rumah-tangga-di-dki-jakarta/

Badan Pusat Statistik. (2012). Keadaan Angkatan kerja di Indonesia: Agustus 2012. https://www.bps.go.id/publication/2012/11/30/ff39047672c89664271a9acd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2012.html

_____. (2019). Angka harapan hidup (AHH) menurut provinsi dan jenis kelamin (tahun), 2018–2020. https://www.bps.go.id/indicator/40/501/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html

_____. (2016). Statistical yearbook of Indonesia 2016. BPS.

_____. (2017). *Potret Pendidikan Indonesia.* Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTVmMWRlOWUwNmE2MmUzMzNiYzdhMzNj&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTcvMTIvMjkvYTVmMWRlOWUwNmE2MmUzMzNiYzdhMzNjL3BvdHJldC1wZW5kaWRpa2FuLWluZG9uZXNpYS1zdGF0aXN0aWstcGVuZGlkaWthbi0yMDE3Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wNi0wMSAxNjo1MDoxMw%3D%3D

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2019, September 20). Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga di DKI Jakarta. https://statistik.jakarta.go.id/persentase-perempuan-sebagai-kepala-rumah-tangga-di-dki-jakarta/

Cameron, L., Suarez, D. C., & Rowell, W. (2019). Female labour force participation in Indonesia: Why has it stalled? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *55*(2), 157–192. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1530727

Darwin, M. (2005). *Negara dan perempuan*. Graha Guru.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Harahap, Rahmi F. A. (2014). *Analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.* [Skripsi, Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro]. http://eprints.undip.ac.id/44692/1/11_HARAHAP.pdf

International Labour Organization. (2015). World employment and social outlook: Trends 2015 (January edition). International Labour Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_337069.pdf

_____. (2012). Pekerja rumahan di Indonesia. ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_438251.pdf

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Profil perempuan indonesia 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d9495-buku-ppi-2018.pdf

Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. *Feminist Economist, 15*(3), 91–132

Kriti, T., Tisdell, C. (2003). *Gender inequality, poverty, and human development in Kenya: Main indicators, trends and limitations* (No. 1745-2016-141001).

Lloyd, C. B. (1995). Review of investments in women's human capital by T. P. Schultz. *Population and Development Review, 21*(4), 887–890. https://doi.org/10.2307/2137782

Parawansa, K. I. (2006). *Mengukir paradigma menembus tradisi: Pemikiran tentang keserasian jender*. LP3ES.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015, November). Statistik pendidikan dan indikator berwawasan gender. https://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/5.%20Statatistik%20Gender.pdf

Sakernas. (2012). *Analisis mobilitas tenaga kerja: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2012*. Badan Pusat Statistik. https://media.neliti.com/media/publications/49072-ID-analisis-mobilitas-tenaga-kerja-hasil-sakernas-2012.pdf

Schultz, T. P. (1995). *Investment in women's human capital*. Amsterdam University Press.

Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Sosio Informa*, *2*(1), 89–101. https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.190

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sohn, K. (2015). Gender discrimination in earnings in Indonesia: A fuller picture. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *51*(1), 95–121. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016569

Syukri, M. (2013). Women's empowerment in poverty reduction programs: How effective is it in addressing gender equality? *SMERU*, *34*, 40. Jakarta: The SMERU Research Institute.

United Nation Population Fund. (2014). A year of renewal. UNFPA. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_annual_report_2014_en.pdf

World Health Organization. (2021). Constitution. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tumbuh Bersama Lingkungan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB V

Manifestasi Resiliensi terhadap Bencana: Dari Lawan Menjadi Kawan

Inaz Yasmine

A. PENDAHULUAN

Sebutan *the ring of fire* yang dinisbatkan kepada Indonesia merupakan satu bukti betapa negara yang subur ini sangat rawan terhadap bencana. Hal ini selaras dengan pernyataan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) yang menyebutkan dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang ada di daerah yang mungkin kehilangan nyawa akibat bencana, risiko bencana yang dihadapi Indonesia sangat tinggi (BNPB, t.t.).

Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan Indonesia masuk dalam daftar 35 negara di dunia dengan tingkat ancaman bencana tertinggi (Doni Monardo: RI, 2020) dengan empat klaster pengategorian bencana, yaitu

1. klaster geologi dan vulkanologi berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi;
2. klaster hidrometeorologi I jenis kering yang berupa kebakaran hutan dan kekeringan;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3. klaster hidrometeorologi II jenis basah yang berupa banjir, banjir bandang, longsor, gelombang ekstrem, dan angin puting beliung; dan
4. klaster bencana nonalam, seperti limbah, epidemi, pandemi, hingga gagal teknologi.

Klaster ketiga mendominasi bencana di Indonesia selama kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya pada triwulan terakhir tahun 2020. Hal ini disebabkan Indonesia mulai memasuki musim penghujan serta diperparah dengan fenomena La Nina, yaitu periode saat suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik berada di bawah rata-rata (NOAA, 2021) sehingga memicu peningkatan curah hujan dan mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Jenis bencana berikutnya adalah klaster pertama yang terlihat dari peningkatan aktivitas vulkanik di sejumlah wilayah Indonesia. Percepatan pembangunan dan perubahan iklim menyebabkan peningkatan paparan dan kerentanan terhadap risiko bencana, terutama banjir dan risiko seismik (vulkanologi) (World Bank, 2019)

Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) merupakan dua 'aktor utama' bencana di Indonesia. Untuk *natural hazards* sendiri, kedatangannya memang tidak dapat dicegah, namun risiko yang timbul masih dapat diminimalisasi, sementara *man-made hazards* kebalikannya, penerapan pendekatan pencegahan bencana yang tepat dapat mengurangi kuantitas bencana yang mungkin terjadi. Untuk itu, diperlukan strategi tepat sasaran dan langkah aplikatif demi terwujudnya resiliensi negara terhadap bencana.

Pembangunan ketahanan terhadap bencana adalah salah satu indikator yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) target pertama dengan beberapa sasaran, di antaranya mengurangi jumlah korban meninggal, hilang, dan terdampak per 100.000 orang, mengurangi kerugian ekonomi nasional yang berimbas pada produk domestik bruto, serta meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana pengurangan risiko bencana (PRB). Risiko

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi dari bahaya kerentanan dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan (P2MB UPI, 2020).

B. FENOMENA RISIKO BENCANA DI INDONESIA

Data kolektif dari Voluntary National Reviews (Kementerian PPN/Bappenas, 2019) menunjukkan fluktuasi jumlah korban meninggal dan hilang, serta masyarakat terdampak per 100.000 orang akibat bencana selama kurun waktu delapan tahun dari tahun 2010–2017.

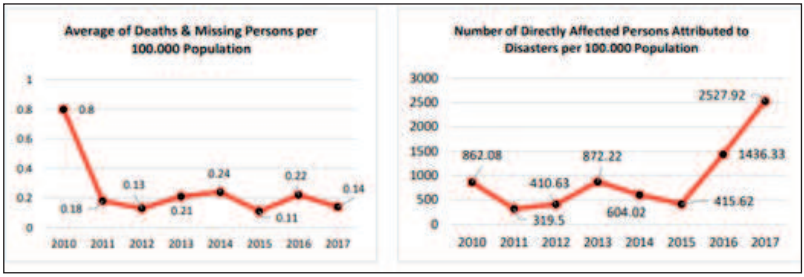

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2019)

Gambar 5.1 Grafik Rata-Rata Korban Hilang dan Meninggal, serta Masyarakat Terdampak

Terlihat bahwa tahun 2010 berada di posisi puncak untuk jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang dengan perolehan rata-rata 0,8. Rata-rata korban meninggal dan hilang akibat bencana pada tahun-tahun berikutnya berfluktuasi di kisaran 0–0,3 dan tidak pernah mendekati apalagi menyentuh angka 0,8 sebagaimana yang terjadi di tahun 2010. Sementara itu, keadaan yang berbeda ditunjukkan kurva jumlah masyarakat terdampak akibat bencana per 100.000 orang. Tahun 2017 berada di titik tertinggi dengan perolehan 2.527,92; angka ini meningkat drastis jika dibandingkan perolehan angka pada tahun 2010, yaitu 862,08.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

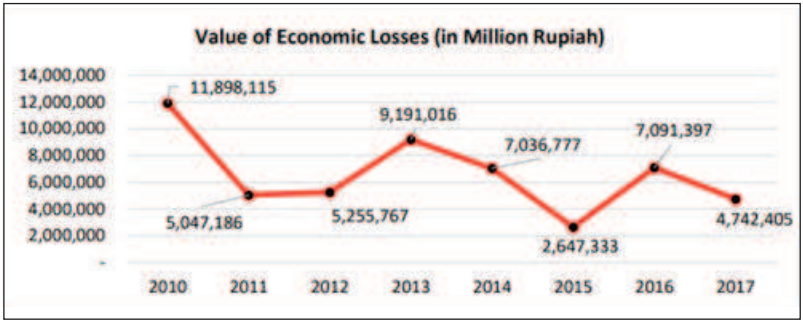

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2019)

Gambar 5.2 Kerugian Ekonomi Akibat Bencana

Sejalan dengan keadaan jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana, kerugian ekonomi tertinggi dampak dari bencana selama rentang tahun 2010–2017 juga terjadi pada tahun 2010 sebesar 11,9 triliun atau 0,17% dari GDP. Angka ini menurun di tahun 2017 menjadi 4,7 triliun atau 0,05% dari GDP sehingga kerugian ekonomi akibat bencana turun sebesar 7 triliun selama kurun waktu delapan tahun, sementara rata-rata kerugian yang dialami per tahun sebesar 6,6 triliun.

Total bencana yang terjadi dalam rentang delapan tahun tersebut menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun dengan jumlah kejadian bencana tertinggi dan memperlihatkan kapabilitas Indonesia dalam mengurangi risiko bencana, terutama pada kategori jumlah korban meninggal dan hilang semakin menurun. Hal yang sama juga terjadi pada kategori kerugian ekonomi yang disebabkan bencana nilainya juga ikut menurun. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama adalah jumlah masyarakat terdampak akibat bencana yang masih tergolong tinggi.

Penggolongan risiko bencana diukur melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang disusun oleh BNPB dan bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan memerhatikan faktor bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

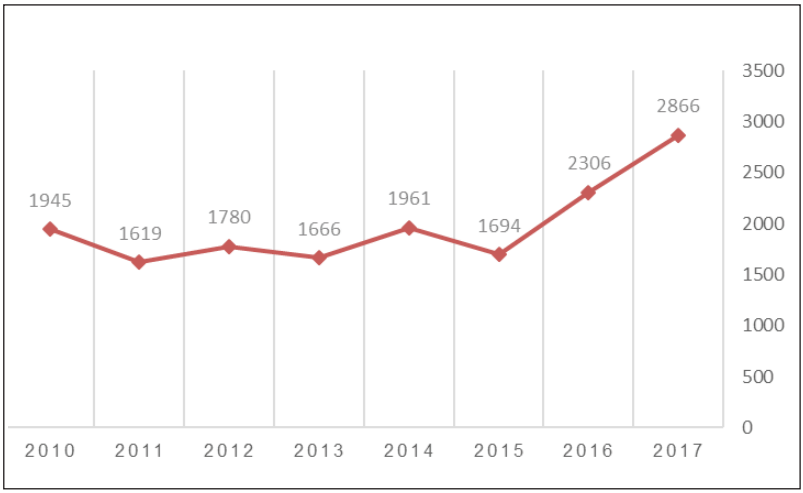

Sumber: BNPB (2021)

Gambar 5.3 Total Bencana Indonesia 2010–2017

Tabel 5.1 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2015–2018

The Indonesian Risk Disaster Index (IRBI)	Year
169.4	2015
149	2016
142.2	2017
128.8	2018

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2019)

IRBI dapat digunakan dalam memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana per tahun maupun per daerah (BNPB, 2018)

Tabel 5.1 memperlihatkan penurunan capaian IRBI setiap tahunnya, bahkan IRBI pada 136 kabupaten/kota yang merupakan pusat pertumbuhan pada tahun 2018, mencapai 128,8 atau berkurang 23,97% dari 169,4 pada tahun 2015 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Namun di sisi lain, hasil perhitungan indeks risiko bencana pada tahun 2018 menunjukkan 16 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 18 provinsi berada pada kelas risiko bencana

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sedang, serta tidak ada provinsi yang berada pada kelas risiko bencana rendah (BNPB, 2018). Dengan demikian, terlihat bahwa capaian penurunan indeks risiko bencana berdasarkan tahun sudah menunjukkan progresivitas, namun untuk indeks risiko tiap daerah masih membutuhkan upaya lanjutan.

C. DIVERSITAS BAHAYA SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB BENCANA

Letak strategis Indonesia di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, melahirkan hasil yang menakjubkan. Indonesia memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika dan bersalju abadi (Pegunungan Tengah Papua). Selain itu, satu-satunya negara di dunia yang memiliki laut antarpulau yang sangat dalam, yaitu Laut Banda (lebih dari 5.000 meter), dan laut sangat dalam antara dua busur kepulauan, yaitu Palung Weber (lebih dari 7.000 meter).

Dua jalur gunung api besar dunia dan beberapa jalur pegunungan lipatan dunia pun saling bertemu di Indonesia. Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api (*volcanic arc*) di sepanjang pulau Sumatra, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Deret gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunung api sepanjang Asia-Pasifik yang sering di sebut sebagai *ring of fire* atau deret sirkum pasifik.

Zona atau wilayah yang berada di antara pertemuan lempeng dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan (*fore arc*). Di wilayah ini umumnya banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi, misalnya wilayah bagian barat dari Bukit Barisan, pesisir selatan Jawa, dan pesisir pantai utara Papua. Sementara itu, zona atau wilayah yang berada di sisi setelah deret gunung api yang dapat dikenal sebagai busur belakang (*back arc*) cenderung lebih jarang dijumpai patahan aktif dan biasanya banyak dijumpai endapan aluvial dan rawa, seperti wilayah pesisir timur Sumatra, pesisir utara Jawa, dan pesisir selatan Papua (Jati & Amri, 2016).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

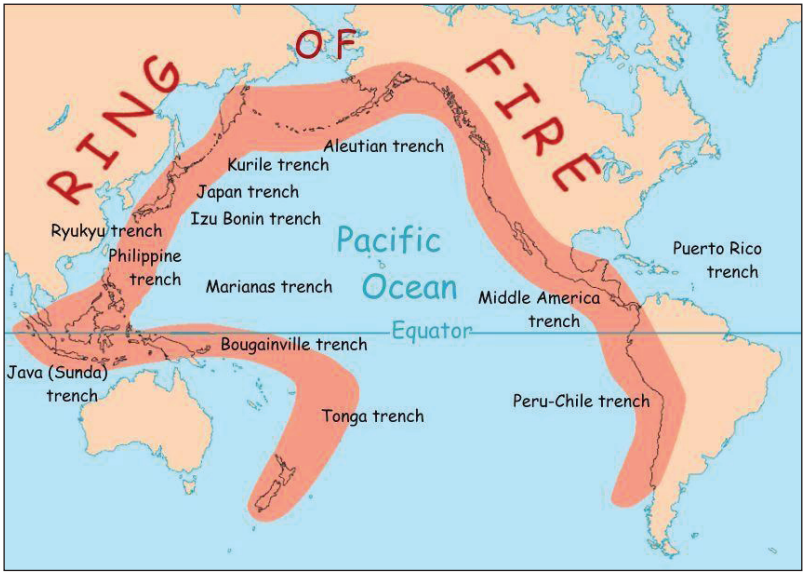

Sumber: National Geographic Society (2015)

Gambar 5.4 Peta Cincin Api Dunia

Fakta geologi inilah yang menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana klaster pertama. Tidak berhenti sampai di situ, bencana klaster ketiga juga turut berkontribusi aktif dalam meningkatkan intensitas bencana di Indonesia.

Menurut data yang terhimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, terdapat lebih dari 15.000 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015. Lebih dari 78% (11.648) kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 22% (3.810) merupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrem, sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Jumlah kejadian bencana yang disebabkan oleh faktor geologis tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah kejadian bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi (Jati & Robi Amri, 2016).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

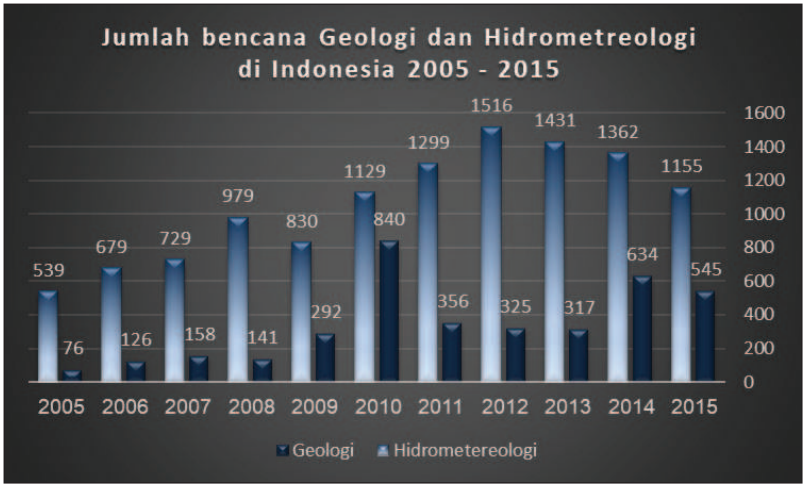

Sumber: BNPB (2016)

Gambar 5.5 Grafik Bencana Geologi dan Hidrometereologi Indonesia

Meskipun demikian, bencana geologis, khususnya gempa bumi dan tsunami, pada kenyataannya banyak menimbulkan dampak yang cukup besar, baik dari sisi korban dan kerugian ekonomi. Pengaruh perubahan iklim juga ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Dengan frekuensi kejadian yang banyak, kelompok bencana ini juga memberikan dampak yang sangat besar, terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan, baik dampak langsung kejadian bencana maupun dampak tidak langsung. Aktivitas manusia juga ikut memperburuk kondisi lingkungan, seperti perambahan hutan untuk perkebunan sebanyak 1,5 hektare per tahun, permukiman, atau aktivitas pembangunan yang memengaruhi ekosistem dan ekologi di daerah penyangga, rusaknya daerah aliran sungai (DAS) dan tercemarnya sungai-sungai akibat limbah domestik. Keadaan memprihatinkan ini harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan efek jangka panjang.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) yang merupakan panduan UNISDR dalam melancarkan misi *Disaster Risk Reduction* (DRR) telah diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melalui BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam memanajemen masalah kebencanaan. BNPB yang menaungi BNPD telah berupaya mengurangi tingkat risiko bencana yang terlihat dengan persentase 34 pemerintah provinsi yang telah mengadopsi dan mengimplementasikan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) mencapai 100%. Sementara itu, tingkat proporsi kabupaten/kota sebanyak 30% atau setara dengan 118 kabupaten/kota yang sedang mengadopsi RPB. Cakupan RPB terdiri atas pengidentifikasian dan penilaian terhadap ancaman, pemahaman kerentanan masyarakat, analisis dampak bencana, penentuan pilihan PRB, mekanisme perjanjian terhadap persiapan dan respons dampak bencana, serta pengalokasian tugas, wewenang, dan sumber yang tersedia.

D. STRATEGI RESILIENSI TERHADAP BENCANA

Dalam membangun ketahanan terhadap bencana, baik yang berasal dari bidang hidrometereologi maupun geologi, dibutuhkan cara dan penanganan tersendiri. Akar masalah dari terjadinya bencana hidrometeorologi itu adalah isu lingkungan yang sejatinya dibuat sendiri oleh tangan-tangan manusia tidak bertanggung jawab, seperti penebangan pohon yang masif di hutan Indonesia dan pencemaran sungai, hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia (Pawestri, 2020).

Pemahaman terkait psikologi sosial dan lingkungan berkelanjutan perlu dilakukan secara lebih intensif untuk memengaruhi pola perilaku masyarakat agar dapat lebih ramah dalam berinteraksi dengan alam melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya terhadap lingkungan, pembangunan kesadaran penggunaan energi dalam bentuk visualisasi angka, dan pembuatan norma publik dan kebijakan yang memotivasi.

Norma publik sudah terealisasi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah daerah yang bahkan juga dipasang di baliho sekitar fasilitas publik, namun sampai saat ini peraturan hanya sekadar peraturan dan belum ada tindak lanjut yang diberikan bagi para pelaku pencemaran lingkungan. Untuk itu, diharapkan sinergitas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pemerintah dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk memberikan hukuman agar timbul efek jera karena peraturan baru dapat benar-benar dipatuhi setelah ada hukuman yang diberikan kepada para pelanggarnya.

Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan menimbulkan kognitif disonansi, yaitu psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Penerapannya dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan adalah membiasakan setiap individu untuk berperilaku ramah lingkungan. Jika hal tersebut telah diterapkan secara menyeluruh, setiap orang yang berperilaku di luar norma akan terdisonansi secara otomatis dan akhirnya kembali berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, persuasi massa juga dapat dilakukan dengan menggambarkan berbagai kemungkinan terburuk di masa depan yang dapat terjadi jika perilaku ramah lingkungan belum dapat diterapkan. Misi-misi tersebut dapat diimplementasikan dengan mengerahkan agen perubahan lingkungan yang akan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat.

Jepang yang merupakan salah satu negara paling rentan terhadap bencana geologi, terutama gempa bumi dan tsunami telah menerapkan berbagai langkah antisipasi dan siap siaga bencana. Banyak tindakan PRB Jepang yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Dengan merujuk pada sembilan poin kegiatan manajemen bencana yang dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Setyandy, 2020) yang tepat akan mewujudkan resiliensi negara terhadap bencana.

Pertama, pencegahan, sikap tegas para pemangku kebijakan untuk memberikan sanksi bagi setiap korporat, terutama yang berfokus pada pengerukan dan pengolahan sumber daya alam yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya dapat memberikan efek pengurangan bahaya bencana yang mungkin terjadi. Hal lain

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang juga dapat dilakukan adalah dengan memastikan pendirian bangunan, terutama bangunan publik, telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dibangun dengan struktur beton bertulang yang mampu menahan gempa meski tidak mengurangi risiko getaran (Firman, 2018). Kearifan lokal yang merupakan *brilliant legacy* yang dimiliki Indonesia perlu dioptimalisasi, tentunya dengan diiringi pengetahuan ilmiah terkait cara pencegahan dan penanggulangan bencana. Cara ini juga telah diterapkan Jepang yang terinspirasi dari bangunan kuil-kuil tradisional para arsitek di Jepang berinovasi mengembangkan teknik yang bernama *goju-no-to* dalam merancang bangunan (Matsutani, 2015).

Kedua, mitigasi yang dapat ditempuh dengan melakukan serangkaian sosialisasi kebencanaan dan praktik langsung pada berbagai kalangan agar lebih mengetahui dan memahami tindakan yang harus dilakukan saat bencana datang. Hal ini sangat dibutuhkan karena berdasarkan laporan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan bahwa banyak dari warga Lombok yang belum memahami status waspada tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (Firman, 2018). Banyak pula yang mengungsi hanya di depan rumah masing-masing. Kebiasaan ini jelas berbahaya karena pengungsi masih belum berada di zona aman (Firman, 2018) dan fenomena ini menunjukkan tingkat pemahaman terhadap risiko bencana masyarakat Indonesia masih rendah.

Di Jepang, pendidikan mitigasi bencana telah dimulai dari siswa sekolah dasar. Anak-anak di Jepang telah diajarkan cara melakukan penyelamatan dini saat gempa terjadi, misalnya dengan sembunyi di bawah kolong meja dan jika berada di luar bangunan harus segera lari ke tempat terbuka untuk menghindari reruntuhan puing-puing bangunan. Pendidikan kebencanaan ini tidak hanya sekadar teori karena pemerintah rutin menyelenggarakan praktik mitigasi bencana serupa setiap bulan dan kegiatan ini pun memperlihatkan tingkat kematian akibat bencana menurun drastis.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketiga, kesiapsiagaan, yaitu antisipasi bencana dengan melakukan rangkaian kegiatan terorganisasi yang tepat serta berdaya guna, antara lain dengan penentuan lokasi evakuasi, pos komando, penyusunan rencana kontijensi, serta pemasangan rambu-rambu evakuasi dini.

Keempat, peringatan dini. Perkembangan teknologi telah menghasilkan inovasi dalam berbagai bidang termasuk dalam masalah kebencanaan. Kinerja BNPB yang berkolaborasi dengan Kominfo dalam menyebarluaskan informasi bencana terkini patut diacungi jempol. *Emergency alert system* tersebut sangat bernilai guna bagi masyarakat yang telah tersentuh teknologi, namun kenyataannya belum semua daerah di Indonesia memperoleh akses teknologi yang memadai, misalnya pada daerah 3T. Meskipun demikian, masih ada cara lain yang dapat dikembangkan, yakni dengan pemberdayaan kearifan lokal setempat dalam mendeteksi tanda dini terjadinya bencana yang lagi-lagi harus dibarengi dengan pemberian pengetahuan ilmiah terkait cara penyelamatan saat bencana terjadi.

Kelima, tanggap darurat. Saat bencana terjadi, kolaborasi *pentahelix* atau keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan. Sinergi pemerintah, dalam hal ini Tim SAR, TNI, relawan, dan pihak lainnya, dalam menindaklanjuti risiko bencana akan berdampak besar pada jumlah korban dan masyarakat terdampak. Untuk itu, perlu dipastikan setiap elemen ini selalu siap sedia terjun langsung kelapangan saat bencana terjadi agar dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

Keenam, bantuan darurat. Akses terhadap kebutuhan pokok akan sulit didapat saat bencana terjadi karena mengandalkan bantuan sembako dari Tim SAR saja tidak akan cukup. Untuk itu, *survival kits* perlu disiapkan, setidaknya untuk permukiman dengan kerentanan yang tinggi.

Ketujuh, pemulihan. Setelah bencana berakhir, ada dua tugas utama yang harus segera dilakukan, yakni pemulihan fisik dan mental. Pemulihan fisik sebagian besar akan diselesaikan pemerintah dengan memberikan dana bantuan dan donasi bagi masyarakat terdampak untuk dapat kembali menata tempat tinggal mereka yang hancur. Sementara itu, pemulihan mental atau yang dikenal juga dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

trauma healing sampai saat ini masih berasal dari inisiatif para relawan dan akan menjadi cerita yang lebih indah jika kegiatan ini dilakukan atas dasar kerja sama relawan dan pemerintah. Pemerintah perlu menyediakan wadah khusus untuk menghimpun para relawan yang siap sedia menjadi tenaga atau agen dalam menyelesaikan misi *trauma healing* ini. Terlebih lagi, pemerintah juga perlu menyelenggarakan berbagai pelatihan terkait topik tersebut untuk mempermudah para relawan dalam melancarkan misinya.

Kedelapan, rehabilitasi. Perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat (UU No. 24/2007). Aksi cepat tanggap perlu dilakukan dalam merehabilitasi semua aspek yang terdampak bencana, meliputi perbaikan lingkungan bencana, perbaikan sarana prasarana publik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kantor dan rumah sakit). Terkait rehabilitasi, pemerintah Jepang sangat tanggap dalam hal menanggulangi risiko pascabencana, misalnya pada saat gempa berkekuatan 9,0 SR menggoyang negeri sakura pada 2011 lalu yang memicu terjadinya tsunami dan banjir besar. Satu minggu setelah kejadian, jalanan menuju pesisir kota sudah bersih, 14 pelabuhan telah diperbaiki untuk menerima berbagai bantuan, serta 90% layanan listrik untuk pemukiman penduduk telah kembali pulih (Ride, 2019).

Terakhir, rekonstruksi, program jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk membangun kembali semua sarana prasarana dan kelembagaan pada wilayah pascabencana agar perekonomian, hukum, dan peran serta masyarakat dapat kembali tumbuh. Pada tahap ini, pemerintah dapat menyusun laporan dan rencana ke depan. Delapan poin yang telah dijelaskan di atas dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana resiliensi terhadap bencana karena sadar betul akan dampak destruktif dari bencana dan evaluasi besar-besaran agaknya perlu dilakukan. Memang sulit rasanya membayangkan ada sebuah teknologi yang mampu menghentikan aktivitas lempeng bumi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang terus aktif bergerak. Namun, dengan pemahaman terhadap siaga bencana yang memadai tentu menjadi salah satu cara paten untuk dapat menekan jumlah korban dan kerusakan.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pada Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada tahun 2022 merupakan momentum emas untuk membenahi tata kelola risiko bencana yang sampai saat ini sudah dijalani. Indonesia dapat berkaca dan mengadopsi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara lain dalam mengelola risiko bencana agar kedepannya bencana tidak lagi menjadi lawan melainkan kawan.

REFERENSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.). Definisi bencana. https://bnpb.go.id/definisi-bencana

BNPB. (2018). *Buku IRBI 2018*. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU_IRBI_2018.pdf.

BNPB. (2021). Info grafis bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/infografis

Doni Monardo: RI masuk 35 negara rawan bencana di dunia. (2020, Desember 15). *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201215141037-20-582358/doni-monardo-ri-masuk-35-negara-rawan-bencana-di-dunia

Firman, T. (2018, Agustus 8). Bagaimana Jepang bersahabat dengan gempa bumi dan tsunami? *Tirto.id*. https://tirto.id/bagaimana-jepang-bersahabat-dengan-gempa-bumi-dan-tsunami-cQDa

Jati, R. & Robi Amri, M. (Eds.). (2016). *Risiko bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Voluntary National Reviews (VNR): Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*. https://drive.google.com/file/d/1Dq8Z7jIEALaAmBMcctlG9q7FgtlEYSLa/view

_____. (2019). *Narasi RPJMN IV 2020–2024 Revisi 14 Agustus 2019*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. https://www.scribd.com/document/432347734/Narasi-RPJMN-IV-2020-2024-Revisi-14-Agustus-2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Matsutani, M. (2015). Using technology to lessen disaster risk. *The Japan Times*. https://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/14/national/using-technology-lessen-disaster-risk/#.VQQzQY54oro

National Geographic, society. (2015, January 6). Plate tectonics and the ring of fire. *National Geographic Society*. http://www.nationalgeographic.org/article/plate-tectonics-ring-fire/

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (6 April 2021, terakhir dimutakhirkan) What are El Niño and La Niña? *National Ocean Service*. https://oceanservice.noaa.gov/facts/ninonina.html

Pawestri, N. (2020, 1 Februari). Isu lingkungan jadi akar masalah terjadinya bencana alam di Indonesia. *Tribun Jogja*. https://jogja.tribunnews.com/2020/02/01/isu-lingkungan-jadi-akar-masalah-terjadinya-bencana-alam-di-indonesia

P2MB UPI. (2020). Apakah mitigasi bencana itu?. Bandung: Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana, Universitas Pendidikan Indonesia. http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html

Ride, K. (2019, May 8). 2011 Japan earthquake and tsunami: Facts, FAQs, and how to help. *World Vision*. https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2011-japan-earthquake-and-tsunami-facts

Septyandy, M. R. [Geosains FMIPA UI]. (2020, April 29). *Kuliah geologi kebencanaan (SCGL604737) mitigasi bencana geologi* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=07bgG3kyL88

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf

World Bank. (2019). Strengthening the disaster resilience of indonesian cities: A policy note. *Open Knowledge Repository*. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32459

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VI
Implikasi *Ecological Footprint*: Sebuah Studi Berkelanjutan *Economic Growth* (GDP) Menuju SDGs Indonesia

Enny Susilowati Mardjono

A. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan universal yang di dalamnya ada beberapa prinsip yang telah disepakati dan diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality* yang mengacu bahwa penerapan SDGs di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Prinsip kedua adalah *integration*, SDGs terintegrasi dan terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ketiga adalah *no one left behind* yang berarti bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi jaminan manfaat bagi semua dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Isu lingkungan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi, bahkan lingkungan menjadi perhatian penting dan tujuan utama dari berbagai kebijakan pembangunan, baik dalam tingkat global maupun nasional. Laporan *World Commission for Environment and Development* (United Nations, 1987) memaparkan bahwa lingkungan merupakan hal penting bagi pembangunan dan sebagai tujuan sekaligus sebagai suatu kerangka dalam proses pembangunan. Terjadinya degradasi lingkun-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

gan merupakan masalah penting dan serius yang perlu ditangani sedini mungkin sebagai dasar pemerintah menentukan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kepedulian publik atas masalah lingkungan muncul atas kesadaran karena dampak degradasi lingkungan menuntut semakin pentingnya melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan lingkungan mengakibatkan ekstraksi yang dapat melebihi ambang batas daya dukung lingkungan yang memunculkan masalah baru pada lingkungan, seperti peningkatan polusi, penurunan beban pada kandungan air, dan kekeringan berkepanjangan. Pembangunan ekonomi semata-mata hanya merujuk kepada sebuah keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan alam dan lingkungan membawa dampak negatif bagi alam juga manusia.

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan tolok ukur tingkat kesejahteraan dan taraf hidup yang layak suatu penduduk. Sasaran kedelapan SDGs adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. PDB tahunan mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dengan pertumbuhan riil, sedangkan PDB tahunan per kapita atau per jumlah pekerja mencerminkan produktivitas.

Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB per kapita Indonesia sebesar 3,5%, bergerak tumbuh positif di tahun 2016 sebesar 3,72% dan terus meningkat di tahun 2017 menjadi 3,79%, dan meningkat lagi di tahun 2019 sebesar 3,9%. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat ke kondisi yang lebih baik. Pertumbuhan PDB per kapita yang positif membawa energi positif Indonesia menuju ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pendapatan per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang semakin baik. PDB per kapita Indonesia menunjukkan kenaikan dalam lima tahun terakhir. Gambar 6.1 menunjukkan laju pertumbuhan PDB riil per kapita, di mana pada tahun 2030 menunjukkan angka 4,4% laju pertumbuhan PDB riil per kapita tahun 2030 dengan skenario BAU dan 5,4% laju pertumbuhan PDB riil per kapita tahun 2030 dengan skenario intervensi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

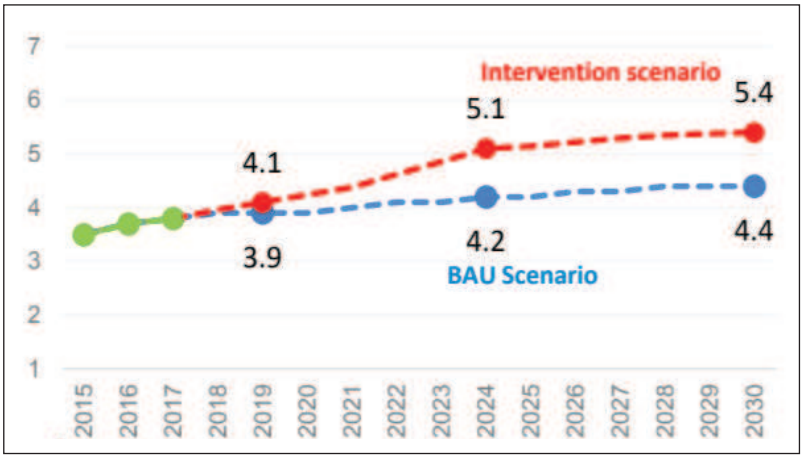

Sumber: Bappenas (2020)

Gambar 6.1 Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita 2015–2019 (Model *Oxford Economics*)

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan PDB riil per kapita. Secara garis besar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Keduanya harus sejalan karena semakin cepat laju pertumbuhan penduduk daripada pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita semakin menurun dan penurunan angka kesejahteraan masyarakat.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan adalah adanya transformasi struktural dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi, yaitu sektor pertanian ke sektor manufaktur dan sektor jasa. PDB Indonesia sampai 2045 ditargetkan untuk tumbuh sebesar rata-rata 6%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6% seperti yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sangat diperlukan agar dapat mencapai angka pertumbuhan PDB riil per kapita hingga 5,4% dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,7%.

Untuk mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi (GDP) 6%, diperlukan pendekatan transformasi multisektoral, salah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

satunya dengan meningkatkan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur dan melakukan diversifikasi produk dengan tujuan berkurangnya ketergantungan terhadap komoditas bahan mentah. Selain itu, perlunya strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Studi ini memfokuskan kepada tiga sektor utama yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor pertanian, industri, dan transportasi. Ketiga sektor tersebut saling memiliki *trickle down effect* dan *backs wash effect* dari proses kegiatan ekonomi dan berkaitan satu dengan yang lain.

Tabel 6.1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dengan tren positif. Hal yang sama juga terlihat pada Tabel 6.2 bahwa tren pertumbuhan pendapatan dari ketiga sektor, yaitu pertanian, industri, dan transportasi, menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Data mengenai kondisi lingkungan hidup yang dijabarkan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan sebagai data pembanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. IKLH sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat tiga indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH, yaitu Indikator Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indikator

Tabel 6.1 Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	3,50%	3,50%
2016	3,72%	3,80%
2017	3,79%	4,00%
2018	3,93%	4,10%
2019	3,97%	4,10%
2024	4,20%	5,10%
2030	4,40%	5,40%

Sumber: Bappenas (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.2 PDB Sektor Pertanian, Industri, Transportasi Menurut Lapangan Usaha 2011–2019

PDB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian									
1. Tanaman Hortikultura	8,77	-2,21	0,67	5,15	2,26	2,93	3,68	6,99	5,53
2. Tanaman Perkebunan	4,94	6,95	6,15	5,94	1,97	3,47	4,5	3,83	4,56
B. Industri Pengolahan									
1. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,49	6,04	6,58	1,56	4,79	0,09	3,83	8,73	15,35
2. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,89	-2,89	-0,53	3,58	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
3. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,66	12,78	5,1	4,04	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
4. Industri Furnitur	9,93	-2,15	3,64	3,6	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
5. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin, Peralatan	-1,09	-0,38	-0,7	7,65	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17
C. Transportasi dan Pergudangan									
1. Angkutan Darat	7,04	7,47	7,51	7,64	6,8	7,05	7,94	7,15	9,99
2. Angkutan Laut	8,41	8,75	6,92	7,68	2,38	1,25	4,64	7,22	10,56
3. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir	7,12	6,48	7,98	6,99	6,38	7.51	8,52	7,94	10,33

Sumber: BPS (2020), diolah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 6.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Air, dan Udara 2015–2019 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,96	81,61	87,03	84,74	86,56
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,10	50,20	53,20	51,01	52,62
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,55	57,83	56,88	61,03	62,00
Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	64,55	65,73	66,46	71,67	66,55

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019; 2020)

Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2; Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). IKLH disusun sebagai instrumen indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data pada Tabel 6.2, dapat dijelaskan bahwa tingginya tingkat pendapatan tidak dapat menjamin membaiknya kualitas lingkungan. Jika dilihat dari data, nilai IKA pada tahun 2017 merupakan indeks tertinggi sebesar 53,33% dan kemudian turun menjadi 52,62% pada tahun 2019, sedangkan IKLH mengalami tren yang konstan terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai IKA berada pada kisaran 50,20–53,10 dan jika dianalisis dengan regresi linear, tren IKA nasional menunjukkan kecenderungan turun sebesar 0,015 poin per tahun.

B. PERKEMBANGAN EKOLOGI INDONESIA: ANCAMAN DEGRADASI LINGKUNGAN

Salah satu sasaran kedelapan SDGs adalah pembangunan berwawasan lingkungan dengan adanya misi perbaikan secara progresif hingga tahun 2030. Hal-hal seperti efisiensi sumber daya global dalam hal konsumsi dan produksi serta memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan harus diupayakan. Degradasi lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan yang biasanya ditandai dengan kemunculan emisi karbon dioksida (CO_2)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akibat aktivitas manusia dari pemakaian bahan bakar fosil serta penggunaan tanah dan lahan. Degradasi lingkungan dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti bencana alam, perubahan iklim secara drastis, munculnya penyakit, dan pencemaran lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan yang digunakan sebagai dasar ambang batas yang ditetapkan. Nilai yang diperoleh dijadikan indikator tolok ukur dalam penentuan kebijakan yang berkaitan pengolahan dan perlindungan kualitas lingkungan. Kegiatan ekonomi untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan memberi dua dampak, yaitu meningkatkan pendapatan yang diakibatkan dari aktivitas ekonomi dan biaya sosial yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun memuat bahwa peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai bidang tertentu mengakibatkan adanya kecenderungan peningkatan penggunaan bahan berbahaya dan beracun, terutama di bidang industri dan perdagangan.

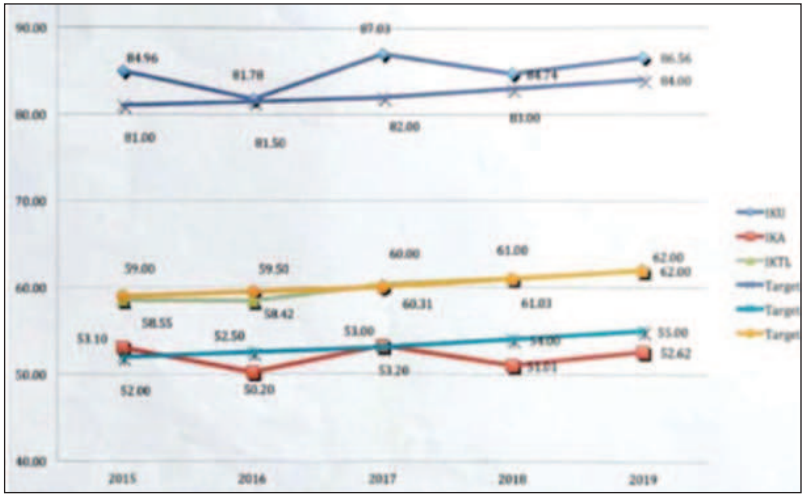

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020)

Gambar 6.2 Indikator Kualitas Lingkungan Nasional 2015–2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup Indonesia dan dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan.

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2018 adalah 71,67 dengan nilai IKU sebesar 84,74, nilai IKA sebesar 72,77, dan nilai IKTL sebesar 61,03. Situasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Pada tahun 2018, nilai IKLH Nasional adalah sebesar 71,67 yang dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 72,77 dan nilai IKTL sebesar 61,03. Satu tahun setelahnya, nilai IKLH Nasional menurun hingga 66,55 yang dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 52,62, nilai IKU sebesar 86,56, dan nilai IKTL sebesar 61,03. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKLH pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,12 poin.

Ecological Footprint Dunia dan Permasalahan Ekologi di Indonesia: *Causal Relationship* antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan

Aktivitas ekonomi dalam melaksanakan pembangunan membawa dampak adanya pemakaian bahan bakar fosil dan penggunaan tanah. *Causal relationship* antara perkembangan ekonomi dan berbagai indikator kualitas lingkungan dapat ditunjukkan dalam *Environmental Kuznets Curve* (EKC). Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan peningkatan pendapatan tanpa disertai kesadaran tentang lingkungan dan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi biaya dan merupakan kendala dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan hipotesis EKC yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan aktivitas ekonomi dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Teori ini dikembangkan atas dasar permintaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lingkungan sehingga adanya peningkatan pengawasan sosial dan regulasi pemerintah (Safriawan & Idris, 2020).

Environmental Kuznet Curve

Teori EKC menggambarkan hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan dan menyatakan bahwa ketika pendapatan suatu negara masih tergolong rendah, perhatian negara cenderung fokus ke produksi dengan mengutamakan investasi yang dapat mendorong terjadinya peningkatan pendapatan dengan mengesampingkan masalah lingkungan. Selanjutnya, pertumbuhan pendapatan yang terbentuk diikuti dengan tingkat polusi dan kemudian polusi menurun seiring dengan pertumbuhan yang tetap berjalan. Grossman dan Krueger (1993) pertama kali mengemukakan hipotesis EKC yang berbentuk U terbalik dengan memperkenalkan hubungan berbagai indikator, seperti pendapatan per kapita dan indikator kualitas lingkungan (termasuk emisi karbon dioksida atau CO_2). Kurva lingkungan Kuznet menunjukkan bahwa degradasi dan polusi meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan per kapita yang bervariasi dengan indikator yang berbeda pada titik tertentu berdampak pada tren berbalik. Tren berbalik yang dimaksud adalah pada saat tingkat pendapatan tinggi, terjadi suatu perbaikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, indikator dampak lingkungan merupakan fungsi yang berbentuk U terbalik terhadap pendapatan per kapita.

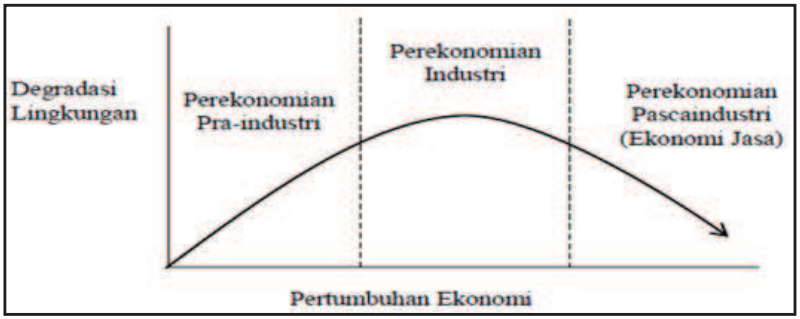

Sumber: Oanayotou (2003)

Gambar 6.3 *Environmental Kuznet Curve*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana industri sedang bertumbuh dengan dukungan lahan yang cukup luas dan lingkungan hidup yang memadai, degradasi lingkungannya pada posisi yang mengkhawatirkan. Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti dan perlu ditemukan solusinya agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sehingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetap berjalan.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan kualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah menangani degradasi lingkungan dan emisi CO_2 yang ditimbulkan. Trujilo dkk. (2013) meneliti hubungan antara degradasi lingkungan dan pendapatan per kapita dan hasil dari penelitian membuktikan kebenaran teori hipotesis EKC bahwa hubungan degradasi lingkungan dan pendapatan per kapita mengikuti jalur U terbalik. Penelitian ini menggunakan limbah padat dari tempat pembuangan sampah 707 kota di Kolombia.

Penelitian Gao (2011) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa PDB Provinsi Henan akan mencapai 1,225 triliun Yuan diikuti dengan intensitas emisi sulfur dioksida provinsi akan dikontrol pada 6,0 kg/juta PDB. Selain itu, pada tahun 2020, PDB Provinsi Henan akan mencapai 2,68 triliun Yuan dengan intensitas emisi sulfur dioksida provinsi akan dikendalikan pada 2,5 kg/juta PDB. Efek akibat kumulatif perlu dipertimbangkan oleh pemerintah mengenai masalah keterbatasan daya dukung sumber daya dan lingkungan, sumber daya takterbarukan, serta kurangnya tata kelola pemerintah yang semuanya ada dalam masalah ekologi dan lingkungan. Hasil penelitian ini memberi pertimbangan langkah kebijakan yang harus diambil Pemerintah Provinsi Henan sebagai dampak hubungan pertumbuhan pendapatan dan dampak limbah yang dihasilkan. Keterlambatan pengambilan kebijakan strategis dan langkah penyelamatan ekologi akan berdampak pada perkembangan masa depan perlindungan lingkungan dan ekologi Henan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, pentingnya penerapan ekonomi sirkuler jauh lebih penting.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hasil penelitian dari Udemba (2020) menyimpulkan bahwa mitigasi kinerja ekonomi Nigeria dan jejak ekologi dengan variabel lain untuk mendapatkan hasil yang memberikan kontribusi kepada Nigeria yang sedang berusaha untuk mengurangi pemanasan global di tengah operasi ekonomi yang kompetitif. Perekonomian negara tersebut sebagian besar bertumpu pada dua sektor utama, yaitu perminyakan dan pertanian yang dicirikan oleh penggunaan berbagai sumber energi takterbarukan yang berlebihan dalam kegiatan operasionalnya. Permasalahan yang dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi dan jejak ekologi meningkat dalam kecepatan yang sama. Temuan dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara pendapatan (PDB per kapita) dan variabel independen terpilih (jejak ekologi, pertanian, FDI, dan penggunaan energi). Temuan dari uji kausalitas adalah transmisi satu arah (*unidirectional*) diteruskan dari pertumbuhan ekonomi (PDB per kapita) ke jejak ekologi, dari penggunaan energi ke jejak ekologi, dari populasi hingga jejak ekologi, dari pertumbuhan ekonomi hingga penggunaan energi, dan dari populasi hingga pertumbuhan ekonomi. Hampir semua variabel menyebabkan jejak ekologi. Penelitian ini telah membuka jalan bagi kerangka kebijakan yang diartikulasikan dengan baik dari otoritas Nigeria dengan fokus pada operasi perminyakan dan pertanian. Dari temuan studi ini, diharapkan kebijakan yang terstruktur dengan baik dapat dibingkai untuk mengurangi emisi berbasis pertumbuhan di Nigeria.

Lalu, bagaimana penerapannya di Indonesia? Hasil penelitian Udemba dkk. (2019) menyelidiki pertumbuhan GDP per kapita dan kualitas lingkungan di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara implikasi lingkungan dari kegiatan ekonomi lepas pantai, pertumbuhan ekonomi, penggunaan energi, dan lingkungan (CO_2) dengan integrasi investasi langsung asing (FDI) dan keterbukaan perdagangan selama beberapa waktu terakhir. Dengan menggunakan data seri di Indonesia dari 1980 hingga 2017, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan berhubungan positif dengan karbon emisi, hubungan positif yang signifikan terlihat antara pertumbuhan ekonomi dan FDI. Selain itu, hubungan yang positif

Buku ini tidak diperjualbelikan.

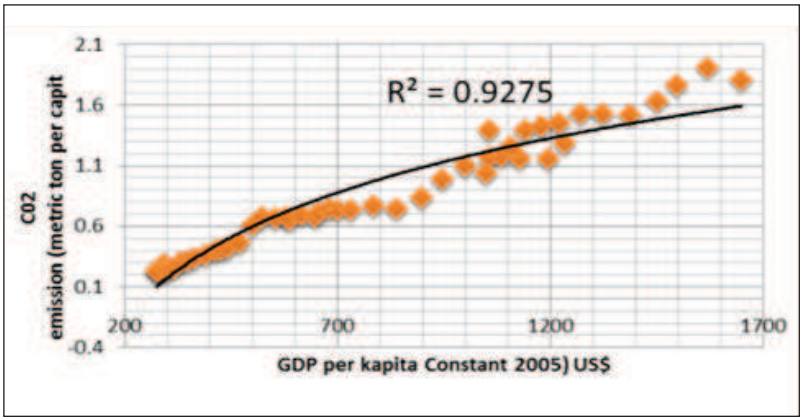

Sumber: Panayotou (2003)

Gambar 6.4 Kurva Lingkungan Kuznets Indonesia

secara statistik diamati antara pertumbuhan ekonomi dan penggunaan energi. Temuan studi ini berimplikasi pada kualitas lingkungan Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semakin tinggi dan lebih baik pertumbuhan ekonomi negara, semakin rendah emisi karbon dan semakin baik kualitas lingkungan.

Gambar 6.4 menunjukkan kurva yang berhubungan positif antara PDB per kapita dan emisi CO_2 masih meningkat. EKC berbentuk logaritma dan R2 sebesar 0,9275 berarti EKC di Indonesia masih berada pada tahap awal dan biasanya pertumbuhan ekonomi masih berdampak buruk pada lingkungan. Gambar 6.4 juga menunjukkan hubungan pembangunan dan emisi CO_2 masih positif dan jika diplot pada EKC, pembangunan Indonesia termasuk kategori belum ramah lingkungan.

Strategi Menuju Keseimbangan Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Di Indonesia, pembangunan (indikator investasi, keterbukaan, modal manusia, dan tingkat kesempatan kerja) dan emisi karbon dioksida CO_2 memiliki hubungan positif pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, PDB per kapita, banyaknya kendaraan per 1.000 penduduk, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

investasi berdampak positif bagi emisi CO_2. Jika dilihat dari EKC, Indonesia berada pada sisi sebelah kiri titik balik yang mengindikasikan degradasi lingkungan masih terjadi dampak dari pembangunan ekonomi. Hal ini berarti adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon dioksida.

Strategi Kebijakan untuk Percepatan Transformasi Struktural Melalui Modernisasi Pertanian, Reindustrialisasi, dan Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Baru

Dilihat dari Kurva Lingkungan Kuznets, teknologi produksi (dengan indikator emisi CO_2) berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia perlu memperbaiki teknologi produksi dalam industri agar degradasi lingkungan dapat berkurang serta mengupayakan pemakaian lahan yang ramah lingkungan. Pemerintah perlu membuat kebijakan mengenai kendaraan di Indonesia berteknologi ramah lingkungan dan hemat energi karena semakin banyak jumlah kendaraan, semakin banyak dampak emisi CO_2.

Dampak dari aktivitas pembangunan memberi hasil bahwa PDB per kapita dan investasi berdampak positif pada emisi CO_2 di Indonesia. Pemerintah perlu mengupayakan penyelamatan investasi yang diikuti aktivitas ramah lingkungan agar pembangunan tetap berjalan dan emisi CO_2 berkurang secara terus-menerus serta efek rumah kaca dapat dikurangi. Perlu juga dilakukan peningkatan skala usaha pertanian, peningkatan standardisasi, serta kualitas produk pertanian kewirausahaan dan manajemen pertanian karena sektor pertanian merupakan sektor kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi

Penguatan basis industri, perlu dilakukan penerapan industri 4.0 serta peningkatan ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi. Selain itu, pemerintah juga perlu menginisiasi pemanfaatan pasar domestik sebagai sumber pertumbuhan dan inovasi produk dan menjaga stabilitas harga domestik dan daya saing internasional. Koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data, serta upaya peningkatan IKA antarpemerintah (Ditjen di lingkungan KLHK) dan pemerintah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

daerah (pemprov, pemkab/pemkot) sangat perlu dilakukan. Dunia usaha dapat berperan dalam melaksanakan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan yang ditetapkan, sementara pemerintah berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik, dan usaha skala kecil (USK)

REFERENSI

Bappenas. (2020). Peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030. http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

BPS. (2020). Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen). https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html

Gao, B. (2011). The impacts of economic growth on resources and environment in Henan Province. *Procedia Environmental Sciences*, *11*(Part B), 810–816. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2011.12.124

Grossman, G. M. &. Krueger, A. B. (1993). Environmental impacts of a North American free trade agreement. Dalam P. Garber (Ed.), *The U.S.-Mexico free trade agreement*. Cambridge, MA: MIT Press.

Safriawan & Idris (2020). Pengaruh globalsasi kepadatan penduduk dn pertumbuhan ekonomi terhadap degradasi lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. 2*(4), 1–8. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/10384/4229

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019, November 14). Indeks kualitas lingkungan hidup 2018. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2516/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-2018

_____. (2020). Indeks kualitas lingkungan hidup 2019. https://www.menlhk.go.id//site/download_file?file=1609312579.pdf

Panayotou. T. (2003). Economic growth and the environment. *Economic Survey of Europe*, *2*, 45–72. https://unece.org/fileadmin/DAM/ead/pub/032/032_c2.pdf

Said, A. & Budiati, I. (Eds.). (2016). *Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) di Indonesia* (Katalog BPS: 3102028). Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Trujillo, J. C., Carrillo B., Charris, C. A., & Iglesias, W. I. (2013). The environmental Kuznets curve (EKC): An analysis landfilled solid waste in Colombia. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, *XXI*(2), 7–16. https://www.redalyc.org/pdf/909/90930501002.pdf

Udemba, E. N, Gungor H., & Bekun, F. V. (2019). Environmental implication of offshore economic activities in Indonesia: A dual analyses of cointegration and causality. *Environmental Science and Pollution Research*, *26*(31), 32460–3247. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06352-y

Udemba, E. N. (2020). A sustainable study of economic growth and development amidst ecological footprint: New insight from Nigerian Perspective. *Science of the Total Environment*, *732*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139270

United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VII

Kolaborasi Kemenparekraf dan *Super App* untuk Menciptakan Pemasaran Inovatif Destinasi dan Usaha Pariwisata di Indonesia

Agung Maulana & Abdurrahman

A. URGENSI, KONDISI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian dunia. Pada tahun 2019, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 10,3% atau sekitar 8,9 triliun USD dari total produk domestik bruto (PDB) global. Sektor pariwisata tumbuh 3,5% (YoY) di tahun 2019 melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya sebesar 2,5%. Selain itu, pariwisata juga masih menjadi salah satu sektor pendorong penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Pada tahun 2019, terdapat 330 juta pekerjaan di sektor pariwisata atau 10% dari total seluruh pekerjaan yang ada di dunia. Pariwisata juga telah menjadi salah satu sektor perekonomian inklusif dengan menciptakan seperempat lapangan pekerjaan baru di dunia selama lima tahun terakhir. Pariwisata juga memiliki tingkat diversitas gender yang sangat besar, di mana wanita di negara G20 menempati setengah (50%) posisi pekerjaan di sektor ini melebihi rata-rata lebih besar dari rata-rata perekonomian global secara umum yang hanya 43% (World Travel and Tourism Council, 2020).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Di Indonesia, pariwisata merupakan salah sektor perekonomian yang diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah mengingat Indonesia dianugerahi panorama alam dan budaya yang amat sangat kaya yang dapat mendatangkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara dan masyarakat Indonesia. Sektor pariwisata berkontribusi setidaknya 4,8% atau 197 triliun dari total PDB Indonesia pada tahun 2019. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebesar 12,9% dari total tenaga kerja di Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara dan lokal yang mengeksplorasi dan menikmati destinasi, produk, dan jasa pariwisata masing-masing sebesar 16,1 juta dan 290 juta wisatawan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Tabel 7.1 Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata Indonesia dan Dunia 2019

Dunia		Indonesia	
Kontribusi	**Jumlah (%)**	**Kontribusi**	**Jumlah (%)**
PDB (US Dollar)	8,9 triliun (10,3%)	PDB	4,8%
Kontribusi Lapangan Kerja	330 juta (10%)	Lapangan kerja	12,9 juta
Lapangan Kerja Baru	10% dari total pekerjaan baru	Wisatawan asing	16,1 Juta
Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan (pria : wanita)	50:50	Wisatawan lokal	290 juta
Pertumbuhan	3,5%	Devisa (Rupiah)	197 triliun

Sumber: World Travel and Tourism Council (2020)

Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia di urutan 40 dalam *Tour and Travel Index* World Economic Forum (WEF) di tahun 2019. Hasil ini sebenarnya masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Kemenparekraf dan Kementerian PPN/BAPPENAS, yaitu peringkat 30. Tidak tercapainya target pemerintah disebabkan masih banyaknya masalah kultural dan struktural yang dianggap menjadi penghambat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya dalam indeks daya saing pariwisata, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara tersebut masing-masing memiliki peringkat indeks daya saing di atas Indonesia yaitu 17, 29, dan 31 (World Economic Forum, 2019).

Tabel 7.2 *Travel and Tourism Competitiveness Index* Kawasan ASEAN

Negara	Skor	Peringkat Dunia	Peringkat ASEAN	Perbedaan dari Rata-Rata Global
Singapura	4.8	17	1	23.7
Malaysia	4.5	29	2	17.3
Thailand	4.5	31	3	16.9
Indonesia	4.3	40	4	11.0
Vietnam	3.9	63	5	1.7
Brunei	3.8	72	6	-1.7
Filipina	3.8	75	7	-2.5
Laos	3.4	97	8	-11.2
Kamboja	3.4	98	9	-11.8

Sumber: World Economic Forum (2019)

Dalam indeks tersebut, tercatat bahwa dari 14 indikator yang diukur, ada 5 indikator dengan skor dan peringkat rendah yang masih menjadi masalah klasik bagi pariwisata Indonesia. Indikator tersebut, yaitu infrastruktur pariwisata (skor 3.1–3.9, peringkat 60 dan 98), kesiapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) (skor 4.7, peringkat 67), keberlanjutan lingkungan (skor 3.5, peringkat 135), keamanan dan keselamatan pariwisata (skor 5.4, peringkat 80), dan terakhir adalah kesehatan dan kebersihan (skor 4.5, peringkat 102). Dibandingkan dengan ketiga negara tetangga ASEAN di atas, skor indikator tersebut selalu lebih rendah (World Economic Forum, 2019). Sadar akan permasalahan ini, pemerintah telah menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan prioritas pariwisata Indonesia. Agenda tersebut dijabarkan pada strategi pengembangan ekonomi pariwisata pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Induk Pem-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 7.3 Capaian *Travel Competitiveness Index* (TTCI) Indonesia

Indikator	Skor	Peringkat Dunia
Keterbukaan Internasional	4.3	16
Pariwisata dan Perjalanan sebagai Prioritas	5.9	10
Kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.7	67
Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja Pariwisata	4.9	44
Kesehatan dan Kebersihan	4.5	102
Keselamatan dan Keamanan	5.4	80
Lingkungan Bisnis	4.7	50
Daya Saing Harga	6.2	6
Keberlanjutan Lingkungan	3.5	135
Infrastruktur Perjalanan Udara	3.9	38
Infrastruktur Darat dan Pelabuhan	3.3	60
Infrastruktur Jasa Pariwisata	3.1	98
Sumber Daya Alam	4.5	17
Sumber Daya Budaya dan Bisnis Perjalanan	3.2	24

Sumber: World Economic Forum (2019)

bangunan Kepariwisataan Nasional 2010–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Salah satu agenda prioritas pembangunan pariwisata yang dilakukan pemerintah adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya di sepuluh destinasi wisata prioritas yang menghabiskan dana kurang lebih 8 triliun rupiah (Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Tanjung Kelayang, Morotai, dan Wakatobi) (Handoyo, 2019). Sepuluh destinasi wisata prioritas ini akan menjadi 'Bali Baru' yang diharapkan akan menjadi senjata utama untuk menarik minat wisatawan mancanegara dan devisa yang mereka bawa. Mengingat sebagian besar destinasi prioritas ini terletak di *remote area*, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar untuk pergi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ke sepuluh destinasi ini. Untuk itu, destinasi tersebut diproyeksikan akan menyasar pasar turis lokal dari kalangan menengah ke atas yang jumlahnya lebih dari 20,5% atau sekitar 56 juta dari total populasi di Indonesia, serta wisatawan mancanegara (World Bank dalam Lidwina, 2020).

Pembangunan destinasi wisata prioritas ini diprediksi akan sedikit sekali menyentuh peranan partisipasi masyarakat dan komunitas lokal sebagaimana yang terjadi di Bali (Putra, 2017). Alasannya adalah karena pengelolaan layanan dan jasa pariwisata di tempat ini menuntut adanya sumber daya manusia profesional dan berpengalaman sesuai yang telah ditetapkan oleh badan standarisasi pariwisata nasional dan internasional sehingga minim partisipasi masyarakat lokal di dalamnya, terutama dalam usaha layanan hotel dan penginapan wisata. Untuk menjaga keberlangsungan aspek kesehatan, keselamatan, kebersihan, keamanan, dan ketangkasan SDM di sepuluh destinasi wisata ini, pemerintah dan pihak swasta yang menaruh minat untuk berinvestasi harus menyediakan sumber daya manusia tersebut dari luar daerah destinasi, bahkan asing.

B. PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED TOURISM*) DAN DESA WISATA SEBAGAI ALTERNATIF DESTINASI

Menjaga keberlangsungan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas lokal, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di sektor pariwisata adalah tujuan utama dibentuknya cita-cita *sustainable tourism* (Harris dkk., 2012). Mengandalkan destinasi prioritas skala besar yang dikelola oleh pemerintah pusat saja tidak cukup untuk meningkatkan lapangan usaha baru bagi masyarakat lokal dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Ada ratusan, bahkan ribuan, panorama alam natural dan artifisial beserta objek dan atraksi wisatanya di berbagai penjuru negeri ini yang sedang dan akan dikelola oleh pemerintah daerah dan komunitas lokal agar menjadi destinasi dan layanan pariwisata.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menangkap peluang ini, pemerintah pusat melalui PP Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010–2025 telah menetapkan 50 destinasi pariwisata nasional (DPN) dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional yang terdiri atas 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

Mengembangkan destinasi dan usaha pariwisata di titik-titik kawasan tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sendiri mengingat keterbatasan gerak pemerintah. Butuh adanya partisipasi masyarakat dan komunitas lokal di *rural area* dalam seluruh tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Pakpahan, 2018). Kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal adalah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Bahkan, di banyak destinasi wisata daerah, inisiasi pengembangan destinasi serta pengelolaanya dilakukan oleh masyarakat dan komunitas lokal secara penuh dengan bantuan pemerintah daerah tentunya.

Beberapa contoh destinasi wisata berbasis masyarakat adalah Desa Sukajadi (Kecamatan Carita, Banten), Desa Bedulu Blahbatuh (Gianyar, Bali), desa nelayan Dusun Ngentak Poncosari Srandakan (Bantul, Yogyakarta), wisata Desa Wanagiri (Buleleng, Bali), desa wisata Grogol Margodadi (Sleman, Yogyakarta), desa wisata (Nglinggo, Yogyakarta), wisata pantai Desa Sahu (Halmahera Barat), dan masih banyak destinasi wisata di *rural area* lainnya (Hasanah dkk., 2019; Pantiyasa, 2011; Ringa dkk., 2018; Susfenti, 2016). Sebagian besar destinasi wisata berbasis masyarakat juga dirancang dengan konsep desa wisata, sebagian lainnya bahkan luput dari perhatian pemerintah daerah mengenai keberadaannya. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat setidaknya ada 1.734 desa wisata yang ada di Indonesia, di antaranya 857 desa berada di Jawa dan Bali, 355 di Sumatra, 189 di Nusa Tenggara, 119 di Sulawesi, 117 di Kalimantan, 74 di Papua, dan 23 di Maluku (Putra, 2018).

Sesuai dengan RPJMN 2020–2024, pemerintah akan membantu masyarakat membangun 224 desa wisata mandiri tersertifikasi oleh pemerintah, 150 desa wisata di antaranya berada di 5 destinasi super-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

prioritas. Keberadaan desa wisata di sekitar destinasi wisata prioritas akan menjadi destinasi 'satelit' yang memperkaya tujuan wisata turis lokal dan mancanegara sehingga dapat meningkatkan jumlah hari berlibur mereka. Selain itu, keberadaan desa wisata dan wisata di *rural area* lainnya juga dapat menjadi sumber pendapatan baru masyarakat lokal di area wisata yang notabene adalah wilayah tertinggal dan terpencil (Komarudin, 2021).

Destinasi desa wisata dan wisata lainnya di *rural area* sangat bergantung pada keterampilan manajemen dari masyarakat dan komunitas lokal. Untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan mereka dalam aktivitas ekonomi pariwisata di berbagai daerah, pemerintah telah menyiapkan kebijakan sistematis untuk mendukung pembangunan destinasi pariwisata berbasis komunitas (CBT) dan desa wisata. Dalam konteks finansial, bantuan pendanaan telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui dua saluran fiskal, yaitu Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata (Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2019) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011).

Selain itu, pemerintah juga membebaskan aparat desa untuk menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata di desanya masing-masing. Salah satu kisah sukses desa yang berhasil mengembangkan destinasi wisata mengoptimalkan dana desa adalah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang dikenal sebagai 'desa kaya' karena berhasil mengelola keuangan desanya hingga menghasilkan keuntungan berkali lipat (Alamsyah & Taufiq, 2020). Dalam konteks edukasi, pemerintah pusat dan daerah sejak tahun 2019 telah membentuk program pendampingan dengan menyediakan fasilitator pendamping desa wisata. Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat dan daerah ini sebenarnya cukup untuk membantu masyarakat dan komunitas lokal untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata dan unsur penting lainnya, seperti pembangunan *homestay*, kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan pengembangan SDM lokal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. VISIBILITAS DAN SARANA PEMASARAN DESTINASI *RURAL AREA* DAN DESA WISATA

Sayangnya, temuan beberapa studi justru menyatakan bahwa masyarakat lokal masih kesulitan untuk mengembangkan destinasi wisata di *rural area* dan desa wisata. Masalahnya lagi-lagi kembali pada empat indikator yang belum berkembang baik, yaitu soal infrastruktur yang belum tertata rapi, kesiapan digitalisasi dan proses pemasaran, SDM yang kurang kompeten, dan keberlanjutan lingkungan yang masih terancam karena kurangnya komitmen dari warga sekitar (Hasanah dkk., 2019; Nurhidayati, 2015; Pakpahan, 2018; Rahmawati & Wijana, 2019). Padahal, pemerintah pusat dan daerah sudah memberikan fasilitas pendanaan dan pendampingan yang cukup baik. Keempat masalah di atas saling berkaitan dan membentuk efek domino yang berkesinambungan.

Infrastruktur wisata (air bersih, *homestay*, jalanan, tempat ibadah, dan tempat makan) dan keberlanjutan lingkungan yang asri dan dikelola dengan baik adalah dua modal penting bagi masyarakat lokal untuk memasarkannya kepada para turis (Hasanah dkk., 2019). Di sisi yang lain, SDM dari masyarakat lokal pun harus pintar memasarkan apa yang mereka miliki dan tidak hanya bergantung dengan 'mulut ke mulut' saja. Pantiyasa (2011) dalam temuan studinya mengatakan bahwa kompetensi komunitas lokal dalam memasarkan dan mengelola sarana dan prasarana destinasi pariwisata menjadi faktor utama yang harus dibenahi. Lemahnya kompetensi komunitas lokal dalam memasarkan dan menyediakan sarana prasarana yang layak dan aman akan berpengaruh dengan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke kawasan wisata.

Lemahnya kemampuan pemasaran mereka menyebabkan sepinya pengunjung. Hal ini menyebabkan komunitas lokal pengelola desa wisata tersebut justru kebingungan dan putus semangat dalam proses perjalanannya, padahal sebagian dari desa wisata ini mendapatkan pendanaan dari program PNPM pariwisata pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya kunjungan dan pemasukan dari turis membuat mereka ragu apakah proses perbaikan infrastruktur dan akomodasi layanan perlu dikembangkan (Pantiyasa, 2011; Susfenti, 2016).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Komunitas lokal pengelola desa wisata ini justru meletakkan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah di bank dan tidak didayagunakan yang berdampak pada citra negatif oleh pemerintah karena ketidakmampuan masyarakat lokal mengelola dana PNPM. Citra negatif ini akan memberatkan pemerintah untuk memberikan bantuan PNPM di tahun anggaran berikutnya. Jika hal ini terjadi, komunitas lokal akan semakin sulit mengembangkan destinasi desa wisata mereka karena minimnya dana dan akhirnya perkembangannya menjadi terhambat terutama dalam peningkatan kualitas infrastruktur (Pantiyasa, 2011; Rahmawati & Wijana, 2019).

Visibilitas dan sarana pemasaran, baik fisik (*offline*) maupun digital, merupakan salah satu kunci kesuksesan pengelolaan desa wisata dan destinasi *rural area* (Josiassen & Assaf, 2013; Xiang dkk., 2010). Tingginya tingkat visibilitas dan *brand image* suatu destinasi pariwisata akan meningkatkan minat dan perhatian turis yang pada akhirnya berujung pada keputusan untuk menikmati destinasi pariwisata tersebut. Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa unsur visibilitas sangat penting dalam memasarkan destinasi dan layanan wisata. Terlihatnya objek wisata secara jelas dari tepi jalan, pemasangan

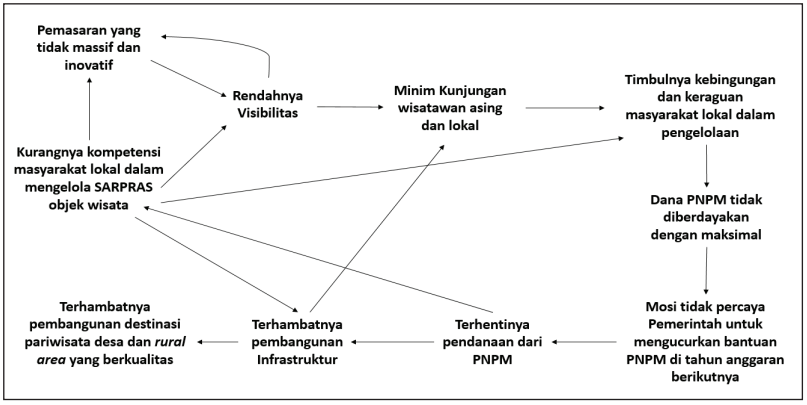

Sumber: Hasanah dkk. (2019); Nurhidayati (2015); Pakpahan (2015); Rahmawati dan Wijana (2019)

Gambar 7.1 Siklus Permasalahan Pembangunan Destinasi di *Rural Area* atau Desa Wisata

Buku ini tidak diperjualbelikan.

petunjuk jalan menuju objek wisata, atau adanya sebuah peta yang menggambarkan kondisi detail objek wisata merupakan salah satu contoh unsur visibilitas fisik. Di era disruptif saat ini, unsur visibilitas bahkan semakin fleksibel dengan adanya media sosial dan platform digital lain yang memungkinkan calon wisatawan merasakan sensasi menikmati indah dan serunya objek wisata hanya dari genggaman gawai mereka (Xiang dkk., 2010).

Sarana pemasaran yang efektif melalui media sosial, pemanfaatan *influencer* lokal, atau melalui media cetak dan platform iklan lainnya juga memegang peranan sangat penting dalam perjalanan mengelola suatu desa wisata atau destinasi di *rural area*. Visibilitas dan sarana pemasaran merupakan dua unsur yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan di era teknologi saat ini. Metode pemasaran konvensional dan tradisional akan sangat sulit untuk mendongkrak jumlah wisatawan untuk datang ke desa wisata dan destinasi di *rural area.* Untuk itu, diperlukan adanya suatu terobosan cara pemasaran digital yang baru untuk membumikan jenis wisata ini (Komalasari dkk., 2020).

D. SOLUSI DIGITALISASI PEMASARAN

Pemerintah Indonesia baru saja menjalin kerja sama strategis jangka panjang bersama 'Grab', salah satu perusahaan digital *super app* asal Singapura, pada Juni 2020. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia setelah terdampak oleh pandemi Covid-19 (CNBC Indonesia, 2020). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Grab akan merancang dan mengimplementasikan gerakan membeli produk kreatif lokal sebagai bagian dari kampanye *#BanggaBuatanIndonesia* yang diinisiasi oleh Kemenparekraf. Dalam inisiasi tersebut, Grab dan Kemenparekraf akan menyusun kebijakan dan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM lokal, khususnya yang memiliki produk kerajinan kreatif agar dapat memasarkan produknya melalui GrabFood dan GrabMart di aplikasi gawai *super app* Grab.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Program kerja sama ini bertujuan agar visibilitas dan komunikasi pemasaran mitra UMKM dan pelaku usaha kreatif lain dapat meningkat. Para pengrajin produk lokal dan pemilik usaha makanan tradisional khas nusantara dapat memasarkan hasil kerajinan kreatifnya di fitur GrabMart dan GrabFood. Kerja sama ini penulis pandang memiliki potensi dan dampak pemasaran yang lebih luas daripada hanya memasarkan kerajinan lokal nusantara di kedua platform tersebut. Platform *super app*, seperti Gojek dan Grab, juga dapat menciptakan ruang untuk berkolaborasi dengan pengusaha destinasi dan layanan wisata di Indonesia yang tentu akan sangat menguntungkan kedua belah pihak.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2019, perusahaan digital *Daily Super App* Gojek dan Grab telah meluncurkan fitur reservasi hotel yang bekerja sama dengan perusahaan digital pemesanan hotel dan penginapan sebagai pihak ketiga (Isna, 2019). Terobosan ini berdampak positif pada semakin kompetitifnya harga hotel dan penginapan yang akan meningkatkan antusiasme wisatawan untuk berlibur. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah sudah ada aplikasi digital yang dapat menjual tiket objek wisata di *rural area* atau desa wisata serta atraksi dan layanan akomodasinya? Fitur pemesanan hotel dan penginapan oleh Grab dan Gojek masih terbatas pada penyediaan jasa penginapan yang memiliki valuasi aset ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Traveloka, salah satu perusahaan digital penyedia layanan pembelian tiket akomodasi pariwisata, memiliki fitur bernama *Xperience* yang dapat memesan tiket wahana dan objek wisata di Indonesia (Setiawan, 2019). Sayangnya, fitur ini sangat terbatas karena produk yang ditawarkan dalam fitur ini masih bercampur dengan produk nonpariwisata lain, seperti salon, rumah makan, perawatan kecantikan, dan sebagainya. Selain itu, jangkauan produknya juga masih terbatas di beberapa objek dan wahana wisata yang sudah memiliki nama besar serta belum ada aplikasi, situs internet, atau platform digital lain yang memudahkan pihak pengelola desa wisata dan objek pariwisata di *rural area* lainnya memasarkan usahanya secara digital.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GoVac/GrabVac sebagai Output Kerja Sama Strategis antara Kemenparekraf dan Perusahaan Digital *Super App* di Indonesia

Untuk meningkatkan visibilitas dan menciptakan sarana pemasaran digital desa wisata dan destinasi di *rural area* lainnya, pemerintah dapat melanjutkan kerja sama strategis bersama Grab atau Gojek untuk membuat suatu fitur di aplikasi *super app* yang memungkinkan pengelola destinasi wisata dan hiburan lainnya memasarkan layanan mereka secara digital. Penulis namakan fitur ini dengan GoVac atau GrabVac (*vacation*). Di fitur ini, pengelola wisata di seluruh area, baik di pedesaan dan perkotaan, dapat melakukan reservasi layanan dan menjual tiket masuk atau produk jasa mereka secara daring (*online*) melalui aplikasi. Setidaknya, ada lima jenis usaha pariwisata yang dapat berpartisipasi memasarkan produk dan layanannya dalam platform ini, yaitu Usaha Daya Tarik Wisata (Buatan, Alam, dan Budaya), Usaha Kawasan Pariwisata (kegiatan taman bertema atau taman hiburan), Usaha Spa, Usaha Wisata Tirta (arung jeram, selam, dermaga marina, air terjun, dan lainnya), serta Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (wisata liburan dan rekreasi, arena permainan, aktivitas olahraga ekstrem dan nonekstrem).

Fitur baru di aplikasi *super app* ini akan menjadi hasil kerja sama yang saling menguntungkan antara Kemenparekraf, pelaku usaha wisata, dan perusahaan digital *super app*, seperti Gojek dan Grab. Sebagaimana mekanisme dalam fitur GoFood dan GrabFood, Gojek dan Grab dapat menetapkan potongan 20% untuk setiap reservasi, penjualan tiket, dan penjualan produk jasa lainnya yang akan menjadi sumber pemasukan. Di sisi lain, Grab dan Gojek tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang banyak untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi tenaga pemasaran yang akan mengajak dan menjalin kerja sama para pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usaha mereka agar dapat menjual produknya di platform ini. Kemenparekraf dapat menyiapkan seribu fasilitator pendamping desa wisata dan UMKM pariwisata lainnya di 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia untuk memberikan pendampingan sosialisasi pengembangan destinasi dan usaha pariwisata sekaligus

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam program pemasaran digital melalui platform GoVac atau GrabVac.

Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku dan pengelola usaha dan destinasi pariwisata di Indonesia yang tergabung dengan program pemasaran daring ini adalah meningkatnya visibilitas produk jasa dan layanan wisata mereka. Calon wisatawan dapat melihat daftar destinasi dan objek wisata apa saja yang dapat mereka nikmati berdasarkan sortiran pencarian baik berdasarkan daerah, tingkat harga, maupun jenis usaha pariwisata sehingga destinasi dan usaha pariwisata yang mereka kelola dapat dengan mudah ditemukan oleh calon wisatawan. Selain itu, pemesanan reservasi dan penjualan tiket atau produk jasa wisata lainnya secara daring akan memperluas pangsa pasar dan memudahkan proses transaksi antara pengelola dan calon wisatawan.

Calon wisatawan juga dapat melihat kualitas dari usaha pariwisata yang terdaftar di GoVac dan GrabVac dengan melihat rating dan testimoni dari wisatawan yang telah berkunjung melalui fitur ini. Selain itu, mereka dapat merasakan sensasi berlibur di setiap destinasi wisata dengan melihat foto aktivitas dan atraksi objek wisata pada platform yang akan memengaruhi keputusan calon wisatawan untuk berlibur ke tempat tersebut. Terlebih lagi, keuntungan lain pemasaran sistem daring seperti ini akan melindungi harga produk dan jasa wisata dari intervensi 'calo' di daerah wisata yang kerap menentukan harga di atas harga pasar sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat lebih ditingkatkan.

Selain dukungan fasilitator tenaga pendamping desa wisata yang akan disebar untuk menyosialisasikan pentingnya pemasaran digital melalui platform *super app*, Kemenparekraf juga dapat mendorong terwujudnya fitur ini dengan memberikan insentif pajak PPN bagi setiap layanan dan produk yang terjual dari sistem ini. Dengan *output* dan mekanisme kolaborasi yang lebih detail, diharapkan bahwa pelaku usaha pariwisata dan pengelola desa wisata di *rural area* akan semakin adaptif terhadap transformasi teknologi dalam bisnis pariwisata dan membuat proses pemasaran destinasi wisata semakin efektif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Alamsyah, A. & Taufiq, M. (2020, November 18). Menengok "desa kaya" di Gresik, Jawa Timur. *Lokadata*. https://desa.lokadata.id/artikel/menengok-desa-kaya-di-gresik-jawa-timur

Dob. (2020, Mei 29). Grab & Kemenparekraf kerja sama pulihkan pariwisata. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200529162806-37-161880/grab-kemenparekraf-kerjasama-pulihkan-pariwisata

Handoyo. (2019, Oktober 26). Pemerintah akan percepat proyek infrastruktur wisata super prioritas. *Kontan*. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-percepat-proyek-infrastruktur-wisata-super-prioritas

Harris, R., Williams, P., & Griffin, T. (2012). *Sustainable tourism*. London: Routledge.

Hasanah, B., Annisarizki, A., & Surahman, S. (2019). Pemberdayaan dan pendampingan pengembangan Desa Wisata Sukaratu Kabupaten Serang berbasis public private partnership. *Prosiding konferensi nasional pengabdian kepada masyarakat dan corporate social responsibility (PKM-CSR)*, *2*(August), 580–590. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.557

Isna, T. D. (2019, Mei 20). Susul Go-Jek, Grab Indonesia rilis layanan pesan hotel. *Warta Ekonomi*. https://www.wartaekonomi.co.id/read228607/susul-go-jek-grab-indonesia-rilis-layanan-pesan-hotel.html

Josiassen, A. & Assaf, A. G. (2013). Look at me-I am flying: The influence of social visibility of consumption on tourism decisions. *Annals of Tourism Research*, *40*(1), 155–175. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.08.007

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Rencana strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020–2024. https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1598887965_Rencana_strategis_2020-2024.pdf

Komalasari, R., Pramesti, P., & Harto, B. (2020). Teknologi informasi e-tourism sebagai strategi digital marketing pariwisata. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, *2*(2), 163–170. https://doi.org/10.37253/altasia.v2i2.559

Komarudin. (2021, Januari 23). Sandiaga Uno: Kemenparekraf siap kembangkan 244 desa wisata. *Liputan6*. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4464672/sandiaga-uno-kemenparekraf-siap-kembangkan-244-desa-wisata#:~:text=

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lidwina, A. (2020, Januari 2020). Kelompok penduduk indonesia terbesar dilihat dari tingkat pengeluarannya. *dataloks*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/masyarakat-menuju-kelas-menengah-kelompok-terbesar-penduduk-indonesia#

Nurhidayati, S. E. (2015). Studi evaluasi penerapan community based tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, *28*(1), 1. https://doi.org/10.20473/mkp.v28i12015.1-11

Pakpahan, R. (2018). Implementasi prinsip pariwisata berbasis komunitas di desa wisata Nglinggo Yogyakarta. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, *05*, 129. https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p07

Pantiyasa, I. W. (2011). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, *1*(2).

Putra, D. A. (2018, Desember 10). Data BPS: Indonesia miliki 1.734 desa wisata. *Merdeka*. https://www.merdeka.com/uang/data-bps-indonesia-miliki-1734-desa-wisata.html

Putra, I. G. P. A. (2017). Model pengelolaan pariwisata Kota Denpasar. *Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota*, 43–50.

Rahmawati, P. I. & Wijana, N. (2019). Pelatihan pengembangan desa wisata dan pendampingan penataan homestay dan objek daya tarik wisata di Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng, Bali. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*, 252–263.

Ringa, M. B., Setiawina, N. D., & Dewi, M. H. U. (2018). Peran pemerintah, sektor swasta dan modal sosial terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen*, *3*(02) 1–9. http://www.jurnal.pnk.ac.id/index.php/bisman/article/view/351

Setiawan, B. (2019, Juni 15). Aneka hiburan di fitur Traveloka Xperience. *Tempo*. https://travel.tempo.co/read/1214846/aneka-hiburan-di-fitur-traveloka-xperience

Susfenti, N. E. M. (2016). Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (community based tourism-cbt) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *2*(1), 75–86.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tjiptono, F. (2008). *Strategi pemasaran* (Edisi 3). Yogyakarta: Andi.

World Economic Forum. (2019). *The travel and tourism competitiveness report 2019*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

World Travel and Tourism Council. (2020). *Travel and tourism global economic impact and trends 2020: Travel and tourism at a tipping point*. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwqLng-MntAhWioFwKHRMeBugQjBAwAXoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwttc.org%2FResearch%2FEconomic-Impact%2FmoduleId%2F1445%2FitemId%2F91%2Fcontroller%2FDownloadRequest%2Faction%2FQuickDownl

Xiang, Z., Pan, B., Law, R., & Fesenmaier, D. R. (2010). Assessing the visibility of destination marketing organizations in google: A case study of convention and visitor bureau websites in the United States. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, *27*(7), 694–707. https://doi.org/10.1080/10548408.2010.519672

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Peran Institusi dalam Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VIII

Sentralitas Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Irma Tsuraya Choirinnida, Dimas Fadhillah Ramadhan, & Krisna Gupta

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sejatinya adalah untuk kesejahteraan manusia. Memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan yang cukup adalah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada manusia. Secara peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang cukup baik dalam hal proteksi tenaga kerja, perlindungan sosial dan keamanan dan kecelakaan kerja (Setiyono & Chalmers, 2018). Di sisi lain, implementasi berbagai kebijakan tersebut masih terganjal oleh berbagai permasalahan, terutama kapasitas institusi.

Ada dua indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pembahasan bab ini, yaitu penekanan jumlah pekerja informal di sektor nonpertanian dan pengurangan jumlah kecelakaan kerja. Keduanya merupakan indikator yang sangat sentral dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pekerja karena tanpa kesejahteraan pekerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak akan tercapai.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai permasalahan di sektor informal dan dilanjutkan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Kita akan melihat betapa pentingnya ketersediaan data sebagai panduan untuk mengirimkan bantuan dan layanan ketenagakerjaan secara umum. Di sinilah peran penting BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan sebanyak mungkin pekerja Indonesia menjadi anggotanya (dengan kata lain menjadi formal) serta memastikan bahwa pekerja Indonesia terlindung dari berbagai macam risiko kesehatan dan kecelakaan kerja.

B. KONDISI SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA

Negara tidak dapat melindungi warga yang tidak terlihat. Salah satu masalah dari sistem jaminan ketenagakerjaan di Indonesia adalah besarnya sektor informal, sektor yang tidak terdata dalam sistem jaminan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, menekan jumlah tenaga kerja informal adalah salah satu target di dalam SDGs. Tenaga kerja informal tidak terdaftar di dalam sistem ketenagakerjaan suatu negara yang mengakibatkan sulitnya mengakses bantuan pemerintah, seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dan fasilitas dana pensiun. Dapat dilihat pada Gambar 8.1 bahwa pekerja informal di Indonesia di sektor nonagrikultura sangat tinggi jika dibandingkan Thailand dan Vietnam.

Sektor informal yang berpotensi tinggi menjadi penyebab rendahnya kepesertaan pekerja di dalam jaminan sosial pekerja. Tabel 8.1 merupakan rangkuman jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang aktif berpartisipasi di dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2017; 2018; 2019; 2020). Tabel di bawah ini juga menunjukkan kecepatan pertumbuhan peserta aktif yang cukup tinggi, sebuah prestasi yang patut dirayakan. Meskipun demikian, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 masih cukup rendah, sekitar 25% dari total angkatan kerja (World Bank, t.t.).

Keterbatasan institusional ini mengakibatkan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Hal ini semakin krusial di masa pandemi, di mana jutaan orang kehilangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

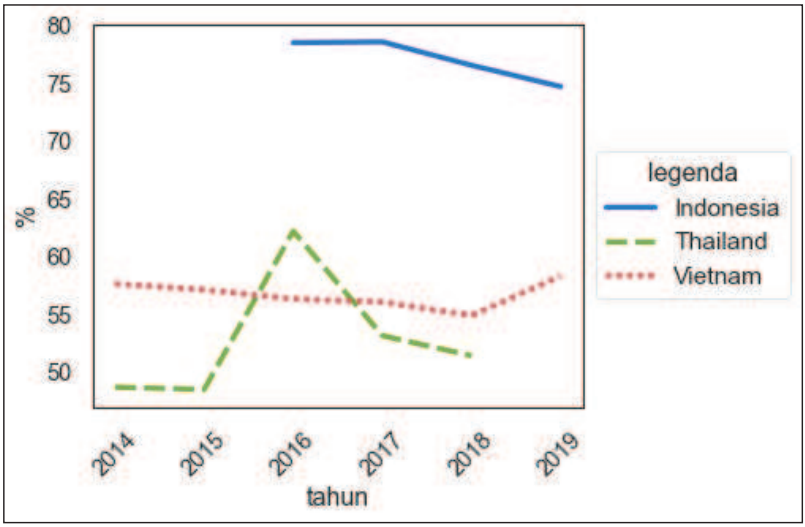

Sumber: World Bank (t.t.)

Gambar 8.1 Persentase Jumlah Pekerja Informal Sektor Nonagrikultura

Tabel 8.1 Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pemberi Kerja	216.593	296.791	361.972	488.188	560.730	681.429
Tenaga Kerja	16.791.397	19.275.061	22.633.082	26.242.032	30.460.072	34.166.257

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2020); World Development Indicator (t.t.)

pekerjaannya atau setidaknya mengalami penurunan pemasukan. Pemerintah hanya dapat membantu pekerja yang terdaftar di dalam sistem berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang digelontorkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang memanfaatkan basis data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan (Aria, 2020).

Sektor informal memang dapat menjadi salah satu alternatif orang miskin untuk memperoleh kesempatan kerja, seperti yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadikan sektor informal sebagai peluang untuk membantu menciptakan kesempatan kerja baru bagi penduduk usia produktif yang tidak terserap sektor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

formal. Hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020 meningkat sebesar 1,31 kali. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini diikuti dengan penyerapan pekerja di sektor informal nonpertanian yang semakin meningkat pula sebesar 4,73% dan di sektor informal pertanian meningkat sebesar 0,98% pada tahun 2020. Jika pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan peningkatan lapangan usaha di sektor informal ini tidak ditekan, negara akan kehilangan pendapatan potensial dari pajak karena sektor informal biasanya tidak terdaftar (World Bank, 2014).

Pekerja di sektor informal dan pekerja informal (seperti pekerja lepas, jangka pendek, dan musiman) juga biasanya tidak memiliki status hukum, perlindungan sosial, jaminan kesehatan, atau dana pensiun (World Bank, 2014). Berdasarkan proyeksi BPS tahun 2020 hingga 2035, rasio dependensi penduduk akan mengalami kenaikan. Di tahun 2035, rasio dependensi Indonesia diperkirakan naik 0,4 poin menjadi 47,3 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 48 orang yang tidak produktif. Hal ini mempertegas pentingnya para pekerja terdaftar secara formal di dalam sistem ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, agar para pekerja memiliki dana pensiun yang dapat menjamin keperluannya ketika purna dari masa kerjanya dan tidak bergantung pada kelompok pekerja usia produktif.

Sektor informal juga menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk mengontrol terjadinya praktik-praktik kerja yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, seperti jam kerja dan upah minimum yang tidak sesuai standar. Sektor informal melahirkan pekerja informal juga yang justru mempersulit pemerintah untuk mendeteksi penduduk dengan penghasilan rendah untuk diberi bantuan sosial. Secara statistik, banyak industri di sektor informal yang tidak memberikan upah minimum sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah kepada pekerjanya (Maike & Jann, 2015). Padahal, upah minimum yang ditetapkan ini telah disesuaikan dengan biaya hidup minimal rata-rata yang dibutuhkan masyarakat wilayah tertentu. Keberadaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sektor informal yang sebenarnya memiliki peluang untuk menyediakan lapangan kerja, dalam hal ini malah membuat rakyat miskin tidak dapat meningkatkan standar hidupnya. Bagi negara secara keseluruhan, sektor informal kurang mampu menurunkan angka kemiskinan dan menghapus jurang kesenjangan sosial.

Jumlah sektor informal yang besar juga tidak baik untuk iklim persaingan bisnis negara dan memengaruhi produktivitas usaha (World Bank, 2014). Persaingan pasar dapat dikatakan sempurna jika informasi tersedia secara adil dan merata. Keberadaan sektor informal sendiri dapat menjadi salah satu faktor terjadinya informasi asimetri dan ketimpangan pendistribusian sumber daya. Pelaku usaha yang secara formal sudah terdaftar merasa dirugikan oleh keberadaan pesaingnya yang masih berstatus informal karena mereka dapat terlepas dari biaya pengurusan dan aturan terkait sistem usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rothernberg dkk., 2015). Sementara itu, pelaku usaha informal memiliki hambatan dalam hal pendanaan dan terbatasnya kesempatan untuk memperluas koneksi untuk memperoleh proyek besar atau memperoleh informasi mengenai bantuan yang mungkin diberikan oleh pemerintah (World Bank, 2014). Sebagai dampaknya, sektor informal akan lebih sulit untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas ukuran usahanya.

Kondisi sektor informal nonpertanian didominasi oleh usaha ukuran kecil hingga menengah saja serta kurangnya insentif untuk meningkatkan usahanya menjadi skala besar (Rothernberg dkk., 2015). Jika pelaku usaha tidak mampu meningkatkan produktivitas maupun memperluas pangsa pasarnya, Indonesia akan terjebak pada kondisi penduduk dengan pendapatan menengah (*middle-income trap*). Produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri informal hanya dapat dipasarkan dalam lingkup yang terbatas, maksimal hanya berkutat di pasar dalam negeri. Pelaku bisnis di sektor informal sulit untuk melakukan ekspansi bahkan menjangkau pasar global. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi untuk membantu menggenjot pendapatan Indonesia melalui ekspor.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dari segi kualitas sumber daya manusia, sektor informal lebih banyak menyerap tenaga dengan tingkat pendidikan rendah (Rothernberg dkk., 2015). Program pelatihan pengembangan diri hampir tidak mungkin tersedia bagi pekerja di sektor informal. Terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akhirnya menghambat munculnya ide, kreativitas, dan inovasi baru yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia maupun kualitas produk yang dihasilkan. Sektor informal hanya akan menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Sektor informal bagaikan bunga es di mesin pendingin yang jika energi listrik dipadamkan, es akan mencair dan membanjiri seisi kulkas. Analogi ini cocok dengan situasi tahun 2020 ketika krisis pandemi menimpa hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan ruang lingkup gerak di luar ruangan hingga jam operasional kerja untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat berkurang. Industri pariwisata pun ikut lesu. Sektor informal yang bergerak di bidang jasa penginapan, rumah makan, dan transportasi umum pun tidak lolos dari dampak pandemi ini. Mereka mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat efek turunan dari berkurangnya pendapatan masyarakat secara umum maupun pembatasan ruang gerak dan waktu mobilitas masyarakat di tempat terbuka. Tidak heran jika untuk mengurangi beban biaya, pemutusan hubungan kerja dilakukan, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa menutup usahanya secara sementara atau permanen.

Kelompok berpenghasilan menengah ke bawah di sektor informal lebih terguncang akibat krisis pandemi karena pendapatan dan tabungan mereka belum tentu cukup untuk memenuhi keperluan di masa mendatang yang serba tidak pasti. Kondisi ini diperparah dengan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah sangat kecil karena mereka tidak terdaftar dalam basis data program perlindungan sosial pemerintah (Rahman dkk., 2020). Akan tetapi, krisis pandemi dapat dijadikan sebagai momentum pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan sektor informal. Bantuan yang diberikan dapat dijadikan acuan bagi pelaku bisnis khususnya di sektor informal yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semula tidak terdaftar harus mendaftar terlebih dahulu sebagai syarat untuk memperoleh bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kualitatif Rothernberg dkk. (2015) yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong pebisnis mendaftarkan usahanya adalah *reward* berupa bantuan pemerintah.

Tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan pembaruan data ini adalah perbedaan sumber data dan cakupan geografis. Melihat kondisi wilayah Indonesia yang luas, pengintegrasian data dalam satu basis sistem di pusat akan sulit untuk diakomodasi dalam waktu dan biaya yang efisien. Menyurvei unit produksi informal membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya daripada perusahaan biasa atau survei rumah tangga (Asian Development Bank, 2010). Oleh karena itu, sebaiknya eksekusi pembaruan data ini menjadi otonomi daerah yang dibantu oleh BPS kantor wilayah daerah, dan tentu di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Pembaruan data yang diserahkan otonomi daerah ini dapat mencegah terjadinya pemberian bantuan yang tumpang-tindih dan tidak tepat sasaran, seperti munculnya orang kaya baru, namun masih menerima bantuan. Selain itu, pekerja informal yang sebelumnya tidak terdaftar akan lebih mudah untuk memperoleh perlindungan kerja. Dengan adanya data yang lebih terstruktur dan terintegrasi, solusi ini dapat membantu pemerintah untuk menekan sektor informal dan membantu pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diatur oleh negara. Pembaruan data ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena data yang lebih rapi dan berkelanjutan akan lebih memudahkan pemerintah untuk melindungi setiap warga negara dari praktik kerja yang tidak sesuai.

C. KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA (K3) DI INDONESIA

Kecelakaan kerja merupakan satu lagi indikator yang dipantau untuk memastikan pekerja Indonesia memiliki kualitas bekerja yang baik. Program Kesehatan dan Kecelakaan Kerja (K3) yang baik memastikan bahwa para pekerja dapat menjalani pekerjaannya dengan aman,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sehat, dan berkelanjutan. Jika terjadi kecelakaan, para pekerja terjamin kehidupannya sampai dapat bekerja kembali. Jaminan tersebut sedapat mungkin cukup untuk melindungi keluarga pekerja apabila terjadi masalah yang permanen.

Setiap tahun, total sebanyak 2,78 juta pekerja di dunia meninggal karena cedera dan sebanyak 380 juta orang mengalami beberapa cedera karena pekerjaan dan tidak sampai ke dalam cedera yang serius (International Labour Organization, t.t.). Banyak dari mereka tergolong dalam kategori usia muda dalam bekerja. Data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 telah melaporkan beberapa kecelakaan kerja yang berada di Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 2020). Pada tahun 2018, sebanyak 157 ribu kasus kecelakaan kerja dengan persentase kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 1,6% atau sebanyak 4678 kasus dan 3% atau 2349 kasus kecelakaan kerja mengalami kecacatan fisik. Satu tahun setelahnya, terdapat 77.295 kasus kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sebesar 33,05% daripada tahun sebelumnya (Tanjung, 2020).

Hal ini membuat semakin pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memiliki program bernama Jaminan Kecelakaan Kerja *Return to Work* (JKK-RTW), sebuah program pendampingan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan sampai ia dapat bekerja kembali (Imansyah 2017). Peserta yang mengalami kecelakaan akan diberikan santunan dan pendampingan jika peserta terpaksa harus berganti pekerjaan.

Tabel 8.2 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja

	2016	2017	2018	2019
Jumlah kasus kecelakaan kerja	101.367	123.040	173.415	182.835
Jumlah peserta JKK-RTW	-	-	716	901
Jumlah peserta yang bekerja kembali	-	-	583	758

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2017; 2018; 2019; 2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 8.2 menunjukkan jumlah total kasus kecelakaan kerja, jumlah pekerja yang memanfaatkan program JKK-RTW, dan jumlah peserta JKK-RTW yang akhirnya bekerja kembali (BPJS Ketenagakerjaan, 2017; 2018; 2019; 2020). Kasus kecelakaan kerja yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian, perlu diingat bahwa peningkatan ini juga disumbang oleh meningkatnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tabel ini menunjukkan pentingnya program JKK-RTW dalam melakukan pendampingan dengan sekitar 70% pesertanya akhirnya berhasil kembali bekerja.

Penerpan K3 di Indonesia terganjal masalah pendataan. Sakernas dan BPJS Ketenagakerjaan masih merupakan sumber data utama tentang penerapan K3, itu pun hanya mencakup sektor formal (ILO, 2018). Pembuatan basis data penerapan K3 untuk sektor informal merupakan hal yang sangat sulit, namun mempercepat peningkatan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan akan jauh lebih efisien.

Formalisasi pekerja tidak hanya memudahkan memberikan bantuan, namun juga memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik kerja yang tidak sesuai dengan penerapan K3. BPJS Ketenagakerjaan dapat menganalisis hasil pengajuan klaim JKK-RTW serta melihat pola karakteristik pekerja dan perusahaan seperti apa yang cenderung memiliki klaim dan probabilitas kecelakaan yang tinggi. Hasil analisis ini dapat menjadi penanda pekerjaan, daerah, atau perusahaan dengan risiko kerja tinggi untuk kemudian diinvestigasi lebih lanjut.

Namun, penerapan K3 memiliki permasalahan di luar formalisasi pekerja. Kesadaran masyarakat akan pentingnya K3 di Indonesia masih sedikit, baik di kalangan pemberi kerja maupun pekerja itu sendiri (ILO, 2018). Salah satu cara pemerintah Indonesia mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan audit sertifikasi K3 dan penghargaan kepada perusahaan dengan praktik K3 terbaik. Sertifikasi K3 didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan ini memberikan panduan atau kriteria penerapan K3 yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

baik di perusahaan. Namun, fitur paling penting dari peraturan ini adalah kewajiban bagi perusahaan dengan tenaga kerja seratus orang atau lebih, atau perusahaan yang bergerak di industri yang memiliki risiko tinggi. Kewajiban tersebut harus memiliki pegawai khusus di bidang K3 (memiliki sertifikasi K3), memiliki peta jalan penerapan K3, dan memiliki prosedur serta anggaran K3 yang memadai.

Pengawasan penerapan K3 dilakukan pemerintah, namun jumlah tenaga pengawas yang dimiliki dirasa belum cukup untuk mengawasi penerapan K3 di lingkungan perusahaan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan terluar (ILO, 2018). Di samping itu, peraturan ini hanya mencakup perusahaan formal dan besar saja, namun tidak meliputi pengusaha informal maupun kecil. Batas seratus pekerja juga menjadikan disinsentif perusahaan untuk memperbesar jumlah pegawainya kecuali benar-benar perlu. Seperti hanya memancing pekerja untuk mau menjadi formal, ada kemungkinan perusahaan juga memerlukan sedikit dorongan untuk menjadi formal, atau dengan kata lain perusahaan memiliki keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP.

D. KESIMPULAN

Pekerja yang terlindungi adalah salah satu syarat utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sementara itu, melindungi pekerja akan sulit selama para pekerja tersebut tidak terdata di dalam sistem jaminan ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, mengurangi jumlah tenaga kerja informal menjadi salah satu indikator penting di dalam SDGs.

Bergabung dengan sistem jaminan ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan juga turut melindungi pegawai dari kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan memiliki program JKK-RTW, yaitu program perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan pekerja tersebut harus berhenti bekerja. Program ini tidak hanya mengganti pendapatan yang hilang, namun juga mendampingi pekerja selama proses pemulihan hingga dapat bekerja kembali.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan modal awal yang sangat baik bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan perlindungan pekerja dari risiko. BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menjadi sumber data utama bagi pemerintah untuk menganalisis kebutuhan pendanaan untuk jaminan sosial dan mengirimkan bantuan sosial. Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan terbukti sangat membantu pemerintah dalam memberikan bantuan semasa krisis pandemi Covid-19.

REFERENSI

Aria, P. (2020, Oktober 27). Subsidi gaji capai 78,98% dari target, menjangkau 12,4 juta pekerja. *Katadata.co.id*. https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5f97fda4283c0/subsidi-gaji-capai-78-98-dari-target-menjangkau-12-4-juta-pekerja

Asian Development Bank. (2010). *The informal sector and informal employment in Indonesia*. Mandaluyong, Filipina: Country Report.

Badan Pusat Statistik. (2020a). *Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian menurut kelompok umur 2018–2020.* https://www.bps.go.id/indicator/6/1165/1/proporsi-lapangan-kerja-informal-sektor-non-pertanian-menurut-kelompok-umur.html

_____. (2020b). *Laju pertumbuhan penduduk menurut provinsi* https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1268/rata-rata-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-provinsi-1971---2019.html

_____. (2020c). *Dependency ratio hasil proyeksi penduduk 2025–2035*. https://www.bps.go.id/indicator/12/120/1/dependency-ratio-hasil-proyeksi-penduduk.html

BPJS Ketenagakerjaan. (2017). *Andal dan unggul melayani pekerja Indonesia* (Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, 430). Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.

_____. (2018). *Memperkuat kapabilitas dalam mendukung perluasan kepesertaan (laporan tahunan BPJS Kesehatan), 430.* [Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan]. BPJS Ketenagakerjaan.

_____. (2019). *Unggul dalam layanan, kuatkan operasional andal (laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan)* [Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan]. BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id//assets/uploads/laporan_tahunan/BPJS19_LO23_FS.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

_____. (2020). *Pertumbuhan agresif untuk perlindungan berkelanjutan* (laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan) [Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan]. BPJS Ketenagakerjaan.

Biro Humas Kemnaker. (2020). *Menaker: Jadikan K3 sebagai prioritas dalam bekerja*. Pekanbaru: Kementerian Ketenagakerjaan. https://kemenaker.go.id/news/detail/menaker-jadikan-k3-sebagai-prioritas-dalam-bekerja

Imansyah (Ed.). (2017, Januari 24). Program return to work BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/13925/Program-Return-To-Work-BPJS-Ketenagakerjaan

International Labour Organization. (t.t.). *Summary report of research products developed within the SafeYouth@Work Project* (Report no. GLO/18/65/USA). Jenewa: International Labour Organization.

_____. (2018). *National occupational safety and health (OSH) profile in Indonesia*. Jenewa: International Labour Organization.

Maike, H. & Jann, L. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. *Journal of Labor and Development*, *4*.

Rahman, A. R., Kusuma, A. Z. D., & Arfyanto, H. (2020). *Situasi ketenagakerjaan di lapangan usaha yang terdampak pandemi covid-19*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Rotherberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2015). Rethinking Indonesia's Informal Sector. *World Development*, *80*, 96–113.

Setiyono, B. & Chalmers, I. (2018). Labour protection policy in a third world economy: The case of Indonesia. *Development and Society*, *47*(1), 139–158. https://doi.org/10.21588/dns/2018.47.1.006

Tanjung, C. A. (2020, Februari 14). Ada 77.295 kasus kecelakaan kerja di 2019. *detikFinance*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada-77295-kasus-kecelakaan-kerja-di-2019

World Bank. (2014). *Informal economy and the world bank* (Policy research working paper). http://documents1.worldbank.org/curated/en/416741468332060156/pdf/WPS6888.pdf

_____. (t.t.). *World development indicators*. https://data.worldbank.org/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IX

Mikroprudensial dan Inklusivitas Sektor Keuangan

Denny Irawan

A. PENDAHULUAN

Terdapat dua aspek penting dalam sektor keuangan Indonesia yang perlu mendapat perhatian, terutama seiring dengan perkembangan Indonesia menuju negara maju di 2045, yaitu mikroprudensial, spesifik pada ketahanan sektor keuangan Indonesia terhadap kejutan (*shock*), baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, dan inklusivitas sektor keuangan.

Mikroprudensial

Daya dukung regulasi menjadi kunci untuk aspek mikroprudensial yang mengacu pada target 10.5 dalam kerangka SDGs (United Nations [UN], 2021). Tolok ukur keberhasilannya adalah indikator kesehatan finansial (*Financial Soundness Indicators*, FSIs) sebagaimana mengacu pada definisi dari International Monetary Fund (IMF).

Rangkaian indikator dalam FSIs dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu FSIs inti untuk perbankan (*deposit takers*), FSIs yang disarankan untuk perbankan, dan FSIs yang disarankan untuk sektor keuangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lainnya. Ketiga kelompok ini memiliki berbagai indikator turunan sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 9.1 dan 9.2.

Tabel 9.1 Indikator FSIs Inti Sektor Perbankan Indonesia

No	Indikator (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020Q3
1	Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets	21.3	22.7	23	22.9	23.3	23.4
2	Regulatory Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets	18.8	22.2	22.7	21.2	21.8	21.7
3	Non-performing Loans Net of Provisions to Capital	5.9	5.7	5	4.4	5	4.5
4	Non-performing Loans to Total Gross Loans	2.4	2.9	2.6	2.3	2.4	2.9
5	Sectoral Distribution of Total Loans: Residents	99.5	99.5	99.4	99.5	99.3	99.3
6	Sectoral Distribution of Total Loans: Deposit-takers	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4
7	Sectoral Distribution of Total Loans: Central bank	0.1	0.4	1	0.8	1.6	6.9
8	Sectoral Distribution of Total Loans: Other financial corporations	4.9	4.6	4.7	4.8	4.5	3.8
9	Sectoral Distribution of Total Loans: General government	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9
10	Sectoral Distribution of Total Loans: Nonfinancial corporations	47.8	47.5	46.9	48.5	47.8	45.1
11	Sectoral Distribution of Total Loans: Other domestic sectors	44.4	44.8	44.7	43.3	43.3	41.3

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Indikator (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020Q3
12	Sectoral Distribution of Total Loans: Nonresidents	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7
13	Return on Assets	2.2	2.1	2.4	2.5	2.5	1.7
14	Return on Equity	17.3	14.5	15.8	16.7	16	11.3
15	Interest Margin to Gross Income	70.3	68	69.3	69.8	65.3	61.4
16	Non-interest Expenses to Gross Income	50	46.6	49.7	48.1	46.3	46.5
17	Liquid Assets to Total Assets (Liquid Asset Ratio)	23.9	22.4	21.7	21.9	20.9	20.1
18	Liquid Assets to Short Term Liabilities	35	32.6	31.7	32	30.8	29
19	Net Open Position in Foreign Exchange to Capital	0.9	1.8	1.6	1.7	1.6	0.8

Sumber: IMF (2021)

Tabel 9.2 Indikator FSIs Inti Sektor Perbankan Indonesia dan Negara Pembanding

No	Indikator (%)	Amerika Serikat	Australia	Indonesia	Jepang	Malaysia	Singapura	Tiongkok
1	Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets	15.8	16.2	23.4	16.4	18.4	17	14.2
2	Regulatory Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets	14.1	13.2	21.7	14.4	15.2	15.3	11.6
3	Non-performing Loans Net of Provisions to Capital	4.9	8.9	4.5	8.2	4.5	6.4	-9.8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Indikator (%)	Amerika Serikat	Australia	Indonesia	Jepang	Malaysia	Singapura	Tiongkok
4	Non-performing Loans to Total Gross Loans	1	1.2	2.9	1.1	1.4	1.3	1.9
5	Sectoral Distribution of Total Loans: Residents	96.5	93.9	99.3	89.1	97.4	45	98.7
6	Sectoral Distribution of Total Loans: Deposit-takers	6.4	0.1	1.4	4.7	0	8.3	2.2
7	Sectoral Distribution of Total Loans: Central bank		0	6.9	2.1	0		0
8	Sectoral Distribution of Total Loans: Other financial corporations	7.8	3.6	3.8	9.5	3.5		4.9
9	Sectoral Distribution of Total Loans: General government	1.4	0.2	0.9	7.9	1.9		0
10	Sectoral Distribution of Total Loans: Nonfinancial corporations	37.4	23.3	45.1	35.7	34.7		52
11	Sectoral Distribution of Total Loans: Other domestic sectors	43.5	66.6	41.3	29.2	57.4	36.6	39.7

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Indikator (%)	Amerika Serikat	Australia	Indonesia	Jepang	Malaysia	Singapura	Tiongkok
12	Sectoral Distribution of Total Loans: Non-residents	3.5	6.1	0.7	10.9	2.6	55	1.3
13	Return on Assets	0.1	0.8	1.7	-0.1	1.2	1.3	0.8
14	Return on Equity	1	10.2	11.3	-1.3	10.1	14.1	10.3
15	Interest Margin to Gross Income	64	67.7	61.4	60.3	57	63.5	76.3
16	Non-interest Expenses to Gross Income	59.7	50.5	46.5	73.5	42.6	44.3	26.9
17	Liquid Assets to Total Assets (Liquid Asset Ratio)	17.1	18.7	20.1	29.5	24	66.9	24.4
18	Liquid Assets to Short Term Liabilities	146.5	37.1	29	47.4	156.2	73.8	58.2
19	Net Open Position in Foreign Exchange to Capital			0.8		4.6		2.7

Sumber: IMF (2021)

Terkait dengan karakteristik sektor keuangan Indonesia yang didominasi perbankan, tulisan ini hanya berfokus pada FSIs perbankan (*deposit takers*). Secara umum, indikator yang ada terbagi ke dalam lima kelompok, yaitu kecukupan modal (*capital adequacy*) (indikator

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1–3), kualitas aset (*asset quality*) (indikator 4–12), pendapatan dan profitabilitas (indikator 13–16), likuiditas (*liquidity*) (indikator 17–18), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (indikator 19).

Tabel 9.1 berfokus pada perkembangan FSIs Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dari sisi kecukupan modal (1–3), secara umum sektor perbankan Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan yang terlihat dari *regulatory capital to risk-weighted assets* yang terus naik dari 16,2% pada tahun 2010 menjadi 23,4% di tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, *regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets* juga mengalami kenaikan berkala dari 15,1% pada tahun 2010 menuju 21,7% di tahun 2020, begitu pun dengan *non-performing loans net of provisions to capital* yang terus membaik dari 6,1% pada tahun 2010 menjadi 4,5% di tahun 2020.

Sementara itu, *non-performing loans to total gross loans* dapat dikatakan cukup stagnan berada di kisaran 2–3% dalam satu dekade terakhir (Tabel 9.1). Dari sisi distribusi sektoral pinjaman, sebesar lebih dari 99% disalurkan kepada penduduk dan hanya kurang dari 1% kepada nonpenduduk.

Satu poin krusial yang perlu mendapat perhatian adalah dari sisi pendapatan dan profitabilitas (poin 13–16 Tabel 9.1). *Returns on assets* mengalami penurunan dari 2,5% pada tahun 2010 dan stabil di kisaran tersebut, dengan paling tinggi berada pada 3,1% di tahun 2012 dan 2013, lalu turun menjadi 1,7% di tahun 2020 yang diyakini karena dampak pandemi. Sementara itu, *return on equity* mengalami tren penurunan drastis, dari 25,9% pada tahun 2010 menjadi 16% di tahun 2019 dan anjlok ke 11,3% di tahun 2020. Sementara itu, *interest margin to gross income* berada cukup stabil di kisaran 60% dan *non-interest expenses to gross income* berada di kisaran 45–46%.

Secara likuiditas, terjadi tren penurunan *liquid asset ratio* dari 27,2% pada tahun 2010 menjadi 20,1% di tahun 2020 (Tabel 9.1). Sementara itu, *liquid asset to short term liabilities* cukup stabil berada di kisaran 30% dan *net open position in foreign exchange to capital* mengalami penurunan drastis dari 3,1% di 2020 menjadi 1,6% di 2019 dan kemudian anjlok ke 0,8% di 2020.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa FSIs sektor perbankan (*deposit takers*) Indonesia mengalami perbaikan dari sisi kecukupan modal yang diiringi oleh tren penurunan profitabilitas sehingga dapat dikatakan seiring dengan eksposur risiko yang semakin terkontrol maka terjadi penurunan imbal hasil di sektor perbankan. Secara sederhana, hal ini sejalan dengan prinsip *risk-return trade-off* atau yang juga dikenal sebagai *high risk high return*. Perlu melihat kondisi negara lain untuk menjawab pertanyaan penting terkait *stance* kebijakan sektor keuangan yang mengutamakan keamanan (*low risk*) sudah cukup baik atau belum.

Tabel 9.2 membandingkan FSIs Indonesia dengan beberapa negara maju dan tetangga yang layak menjadi acuan, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Data yang disajikan adalah data termutakhir setiap negara periode 2019–2020Q3. Dari sisi kecukupan modal, Indonesia merupakan yang paling aman secara umum yang tampak dari *regulatory capital to risk-weighted assets* paling tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Hal serupa juga dapat dilihat dari *regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets*. Dari sisi *non-performing loans to total gross loans*, Indonesia pun tampak sebagai salah yang paling terjaga risikonya. Akan tetapi, dari sisi NPL to *total gross loans*, Indonesia merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Indonesia tetap perlu berhati-berhati dalam mengelola angka NPL-nya, sementara distribusi sektoral tidak dapat secara spesifik dibandingkan satu sama lain mengingat hal ini sangat bergantung dengan lingkungan bisnis sektor keuangan masing-masing negara.

Dari sisi pendapatan dan profitabilitas, sektor perbankan Indonesia juga tampak merupakan salah satu yang berperforma paling baik. Dari sisi *return on assets*, Indonesia merupakan yang paling tinggi di angka 1,7%, begitu pula dari sisi *Return on Equity*, Indonesia pun termasuk yang paling baik dan hanya dikalahkan oleh Singapura. Indonesia berada di posisi kedua setelah Tiongkok jika ditinjau dari sisi *interest margin to gross income* dan secara umum likuiditasnya masih cukup stabil meskipun tidak setinggi negara lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa FSIs Indonesia termasuk cukup terjaga jika dibandingkan negara-negara maju. Bahkan, dalam beberapa indikator, Indonesia masih memiliki ruang untuk terus mendorong perbankan untuk tumbuh dan bermain lebih 'berani'. Hal ini paling jelas terlihat dari sisi kecukupan modal, di mana secara persentase, sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.2, Indonesia berada pada level yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, dari sisi mikroprudensial sektor keuangan, khususnya perbankan, tantangan utama Indonesia adalah bagaimana memberikan relaksasi dan ruang gerak yang lebih bebas bagi sektor keuangan. Namun, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap tentunya, dengan turut menjaga agar tingkat risiko tidak secara mendadak naik.

Inklusivitas

Fokus aspek mikroekonomi berada pada akses masyarakat terhadap sektor keuangan dengan acuan utama target 8.10 dalam kerangka SDGs (UN, 2021). Singkat cerita, penetrasi sektor keuangan secara luas dan menyeluruh.

Secara spesifik dijabarkan bahwa ada tiga indikator terkait target ini, yaitu jumlah cabang bank komersial per 100 ribu penduduk (8.10.1.a) dan jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) per 100 ribu penduduk (8.10.1.b) serta proporsi penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening keuangan, baik di bank, digital, maupun penyedia layanan keuangan lainnya. Di satu sisi, seiring maraknya arus digitalisasi, perlu diakui ketiga indikator ini terasa agak kaku. Hadirnya perusahaan teknologi finansial (tekfin/*fintech*) membuat kehadiran fasilitas fisik tidak lagi menjadi kewajiban. Perbankan beradaptasi pula mengikuti hal ini dengan melahirkan berbagai inovasi digital meskipun ketiga indikator ini tetap memiliki relevansi, namun peranannya sebagai tolok ukur inklusivitas perlu diberi catatan, bahkan perlu disarankan untuk disesuaikan dalam waktu dekat.

Tabel 9.3 menjabarkan perkembangan ketiga indikator tersebut untuk Indonesia. Dari sisi jumlah kantor cabang bank komersial per

Buku ini tidak diperjualbelikan.

100 ribu penduduk, Indonesia mengalami kenaikan pesat dari 5,16 (2004) menjadi 14,71 (2011) dan kemudian 16,14 (2018). Dengan demikian, totalnya naik lebih dari tiga kali lipat. Dari sisi jumlah ATM per 100 ribu penduduk, kenaikannya jauh lebih signifikan, yaitu enam kali lipat dari 8,56 (2004) menjadi 16,45 (2011) dan kemudian 54,38 (2018). Sementara itu, jumlah proporsi penduduk dewasa yang memiliki rekening keuangan juga mengalami kenaikan signifikan dengan persentase 19,58% (2011), naik lebih dari tiga kali lipat ke 36,06% (2014) menjadi 48,86% (2017).

Proses perkembangan inklusi keuangan di Indonesia, sebagaimana data di Tabel 9.3, menunjukkan perbaikan yang signifikan. Akan tetapi, posisi terakhir Indonesia, jika dibandingkan negara-negara maju, masih perlu pembenahan seiring mempersiapkan Indonesia sebagai negara maju. Tabel 9.4 menjabarkan perbandingan ketiga indikator inklusivitas dengan beberapa negara maju dan tetangga. Dari sisi jumlah kantor cabang komersial per 100 ribu penduduk, angka Indonesia berada cukup jauh di bawah AS, Jepang, dan Australia, meskipun berada di atas Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Berdasar-

Tabel 9.3 Indikator Inklusi Finansial Indonesia Periode 2011–2018

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kantor cabang bank komersial per 100.000 penduduk	14.71	16.87	17.64	17.83	17.64	17.26	16.75	16.14
2	Jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) per 100.000 penduduk	16.45	35.73	42.02	49.21	52.97	54.34	55.14	54.38
3	Proporsi orang dewasa (15 tahun dan lebih tua) dengan rekening di lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan seluler, berdasarkan kelamin (% jumlah dewasa usia 15 tahun atau lebih tua)	19.58			36.06			48.86	

Sumber: UN Statistics (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 9.4 Indikator Inklusi Finansial Indonesia dan Negara Pembanding

No	Indikator	Amerika Serikat	Australia	Indonesia	Jepang	Malaysia	Singapura	Tiongkok
1	Jumlah kantor cabang bank komersial per 100.000 penduduk (2018)	31.21	28.21	16.14	34.01	10.24	8.13	8.88
2	Jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) per 100.000 penduduk (2018)	-	146.12	54.38	127.38	46.60	64.59	97.12
3	Proporsi orang dewasa (15 tahun dan lebih tua) dengan rekening di lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan seluler, berdasarkan kelamin (% jumlah dewasa usia 15 tahun atau lebih tua)	93.12	99.52	48.86	98.24	85.34	97.93	80.23

Sumber: UN Statistics (2021)

kan jumlah ATM per 100 ribu penduduk, Indonesia hanya berada di atas Malaysia dan sedikit di bawah Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya berdasarkan indikator ini, Indonesia masih dapat mengikuti standar di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan negara maju lainnya, angka Indonesia masih tertinggal jauh, misalnya dengan Australia (146,12) atau Jepang (127,38).

Dari sisi proporsi penduduk dewasa yang memiliki rekening finansial, Indonesia merupakan yang paling rendah dan dapat dikatakan tertinggal jauh. Barangkali pekerjaan rumah terbesar dalam membenahi inklusivitas keuangan bagi Indonesia ada dalam poin ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia berada di angka 48,86% di tahun 2018, sementara negara maju lainnya berada di atas 90%, bahkan beberapa negara mendekati 100%. Oleh karena hal ini menyangkut akses setiap penduduk terhadap layanan keuangan, Indonesia perlu terus meningkatkan capaiannya hingga mendekati angka 100%. Dalam kerangka waktu 25 tahun, hal ini masih sangat mungkin dilakukan, khususnya melihat pertumbuhan angka ini di tahun 2011, 2014, dan 2017.

B. DINAMIKA DAN BAURAN KEBIJAKAN

Secara mandiri, aspek mikroprudensial maupun inklusivitas memiliki tantangan masing-masing untuk sampai pada target yang mendefinisikan bahwa Indonesia sudah berada pada level negara maju karena kedua aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling mendukung. Namun, keduanya dapat saling bertentangan di beberapa sisi lainnya sehingga timbul dinamika dalam memformulasikan regulasi untuk menunjang keduanya.

Sebagai contoh, secara mikroprudensial, sektor perbankan Indonesia didorong untuk meningkatkan efisiensi, misalnya dengan melakukan merger. Salah satu argumen utamanya adalah mengurangi redundansi jumlah kantor cabang atau mesin ATM. Dari sudut pandang inklusi keuangan, hal ini tentunya bertentangan dengan semangat menjangkau lebih banyak masyarakat, bahkan menariknya bertentangan dengan indikator inklusivitas yang dibahas dalam tulisan ini. Perlu diakui bahwa salah satu kelemahan dari indikator ini adalah hanya berfokus pada jumlah agregat. Padahal, bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan sebaran penduduk yang luas, faktor ketersediaan, ketersebaran, dan akses setiap pelosok lebih penting daripada sebatas jumlah agregat.

Dari sisi kebijakan, khususnya institusi yang menaungi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga yang paling berwenang dalam formulasi kebijakan terkait mikroprudensial dan inklusivitas sektor keuangan. Persoalan ini tidak menjadi tanggung jawab OJK tunggal karena dilihat dari sisi edukasi, masyarakat diimbau untuk terlibat secara aktif dan memiliki akses terhadap sistem keuangan membutuhkan peranan banyak pihak.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. KESIMPULAN

Pembahasan yang disajikan dalam tulisan ini menunjukkan dinamika tantangan peningkatan ketahanan dan inklusivitas. Dari sisi mikro-prudensial, Indonesia tampak tidak memiliki masalah yang terlalu besar, bahkan jika dilihat dari sisi kecukupan modal dan performa bisnis, sektor keuangan Indonesia termasuk yang sangat baik. Oleh karena itu, tantangan dari aspek ini lebih kepada bagaimana secara bertahap sektor keuangan (terutama perbankan) dapat diberikan ruang gerak yang lebih besar seiring dengan tetap menjaga prinsip prudensial untuk mencegah risiko naik secara tidak terkontrol.

Dari aspek inklusivitas, satu tantangan besar yang perlu dibenahi adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem keuangan, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan rekening bagi penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Melihat pertumbuhan angka ini di tahun 2011, 2014, dan 2017, Indonesia dapat optimis mendorong angka ini berada di atas 90% pada tahun 2045. Akan tetapi, perlu diingat bahwa untuk dapat mencapai target tersebut, peranan aktif tidak hanya perlu dimainkan oleh regulator dan pelaku pasar sektor keuangan, masyarakat secara umum juga perlu terlibat.

REFERENSI

International Monetary Fund. (2021). International financial statistics (IFS) [Dataset]. https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b

UN Statistics. (2021). United nations global SDG database. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

United Nations. (2021). United Nations Department of Economic and Social Affairs – Sustainable Development. https://sdgs.un.org/goals

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB X

Perlindungan Sosial di Indonesia: Optimisme Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Masyarakat

Putri Haryani

A. PENDAHULUAN

Perlindungan sosial nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1946 Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) mengenai hak terhadap jaminan sosial. Secara internasional, perlindungan sosial juga diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952 yang menyatakan bahwa setiap negara wajib memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Peraturan tersebut yang menjadi latar belakang transformasi jaminan sosial di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa kepemimpinannya, muncul sebuah inisiasi untuk mereformasi perlindungan sosial melalui sistem jaminan sosial di Indonesia sehingga di tahun 2004 disahkan Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan secara merata.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Melalui berbagai program jaminan sosial nasional, pemerintah berupaya menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau kurangnya pendapatan, baik yang disebabkan oleh kecelakaan, sakit, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, maupun pensiun. Proses penyelenggaraan jaminan sosial diserahkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Berbeda jenis layanan jaminan sosial berbeda pula penyelenggaraannya. Adapun badan penyelenggaraan jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN, di antaranya Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Untuk menunjang program perlindungan sosial, pemerintah juga memberikan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Program perlindungan sosial ini diharapkan dapat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata di seluruh penjuru Indonesia semakin aktif dan masif. Hal ini patut diapresiasi mengingat sebelum masa reformasi Indonesia sangat kurang dalam membangun bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi (OECD, 2019).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (2009–2014), tepatnya di tahun 2011, terbitlah Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Melalui undang-undang ini, terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk perbaikan dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada. Ada dua bentuk BPJS, yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari Askes dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wujud baru dari Jamsostek, ASABRI, dan TASPEN. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ruang lingkup BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan jaminan kesehatan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jaminan kematian. Pembentukan BPJS merupakan upaya mencapai tujuan *universal health coverage* (UHC) yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO). BPJS Kesehatan beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai terealisasi di awal Juli 2015 (Habibullah, 2017). Melalui BPJS, jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap (Rasnawati & Suhirman, 2018).

Pemerintah juga mengeluarkan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Secara umum, bantuan sosial ini merupakan jaminan sosial bagi penduduk miskin sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, baik dengan bantuan tunai maupun pemberdayaan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan usaha (Habibullah, 2017). Bantuan sosial merupakan wujud dari keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan UUD tahun 1945 bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka dan keluarga.

Inisiasi bantuan sosial di Indonesia dimulai sejak terjadinya krisis keuangan di Asia. Krisis keuangan menyebabkan banyak masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan sehingga ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia meningkat tajam. Untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi dan menekan angka kemiskinan, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial yang pendanaannya berasal dari lintas kementerian (OECD, 2019). Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial semakin aktif menjangkau jutaan keluarga fakir miskin melalui berbagai program yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

B. PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia menemui banyak tantangan yang harus segera dituntaskan. Oleh karena itu, program-program perlindungan sosial dari pemerintah diharapkan dapat memperlambat peningkatan keluarga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

miskin baru, anak putus sekolah, tuna wisma, lansia terlantar, dan lain sebagainya dengan memberi bantuan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ada beberapa program yang telah dijalankan, antara lain Jaminan Sosial Nasional (*Social Protection*) dan Bantuan Sosial Nasional (*Social Assistance*).

Program Jaminan Sosial Nasional mengacu pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Secara khusus, Indonesia menerapkan asuransi sosial yang bersifat permanen dengan tujuan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi risiko sosial (kesehatan) dan risiko hidup, yaitu jaminan hari tua dan jaminan kematian (Arifianto, 2004; OECD, 2019). Pada pelaksanaannya, setidaknya ada dua BPJS yang menjadi prioritas utama, yaitu BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. UU No. 24/2011 Pasal 59 dan Pasal 60 menyatakan bahwa BPJS mulai beroperasi pada tanggal 1 januari 2014, dengan demikian secara resmi PT Askes tidak lagi beroperasi dan seluruh asetnya dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diikuti dengan dihentikannya program kesehatan dari PT Jamsostek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia (kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden) sehingga penyelenggaraan program asuransi kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Jangkauan peserta BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 mencapai 82% dengan total 222.461.906 peserta (BPJS Kesehatan, 2020). Jenis kepesertaan BPJS terbagi dua, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). PBI merupakan fakir miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS sehingga dibantu oleh pemerintah, baik melalui dan APBN maupun melalui dana APBD. Berdasarkan angka statistik BPJS Kesehatan, sebanyak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

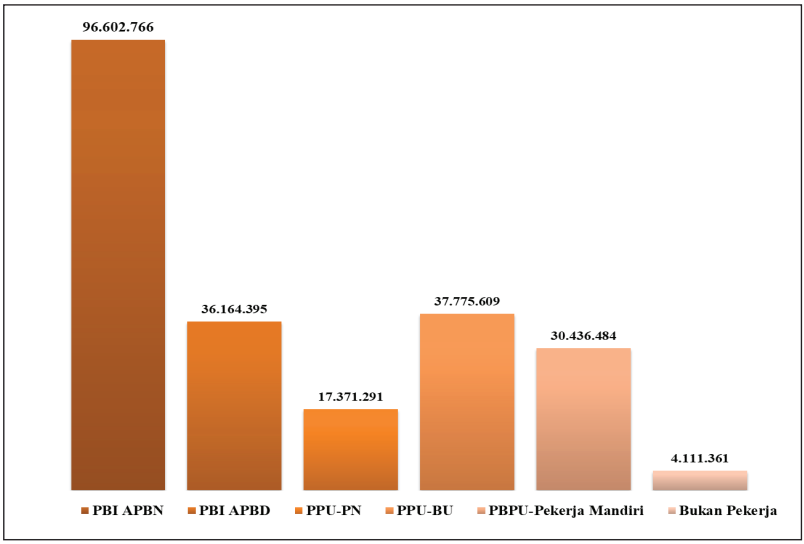

Sumber: BPJS Kesehatan (2020)

Gambar 10.1 Jumlah Peserta BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020

96.602.766 peserta merupakan PBI jaminan kesehatan dari dana APBN, sedangkan PBI dari dana APBD sebanyak 36.164.395 peserta. Selain itu, peserta BPJS Kesehatan dari kelompok pekerja terbagi menjadi Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN), Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara (PPU-BU), dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) masing-masing sebanyak 17.371.291, 37.774.609, dan 30.436.484 peserta, sementara peserta Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4.111.361 masuk ke dalam golongan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran.

BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan beroperasi satu tahun lebih lambat dari BPJS Kesehatan, yaitu paling lambat mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015, karena proses pengalihan aset, liabilitas, dan program jaminan sosial dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan waktu lebih panjang. Berdasarkan Pasal 62 UU No.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

24/2011, PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 sehingga seluruh aset, liabilitas, dan seluruh pegawai PT Jamsostek dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk PT ASABRI dan PT Taspen masih diperbolehkan beroperasi melayani peserta yang sudah terdaftar, namun untuk penerimaan peserta baru dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, keduanya diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh pengalihan program asuransi sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Untuk itu, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, baik untuk PNS maupun masyarakat secara luas, nantinya diselenggarakan secara terintegrasi dan terpusat oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menariknya, di tahun 2020, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menurun sebanyak 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah 51,75 juta orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sebagai salah satu bentuk implementasi terhadap undang-undang ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial kepada warga yang miskin dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengatur segala bentuk dan upaya pemerintah dalam menstimulasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial nasional, pemerintah wajib memperhatikan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalitas. Untuk menstimulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 11/2009 adalah makanan pokok, pakaian, tempat tinggal sementara, dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dasar (kesehatan dan pendidikan), bimbingan teknis, serta penyediaan pemakaman.

Program bantuan sosial ini merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos), namun sumber daya untuk dana bantuan sosial dibantu oleh kementerian atau lembaga lain yang terkait. Adapun fungsi dari bantuan sosial ini adalah untuk melindungi, mencegah dan menangani risiko kerentanan sosial antarindividu/keluarga/kelompok/komunitas agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, membantu merehabilitasi orang dengan kemampuan disfungsional untuk pulih, memenuhi kebutuhan dasar seluruh penduduk melalui skema yang dilembagakan, memberdayakan individu dengan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mengentaskan kemiskinan di antara orang/keluarga/kelompok/komunitas yang tidak bekerja atau pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka serta kebijakan kesiapsiagaan dan manajemen bencana (OECD, 2019).

Salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan oleh Kemensos untuk menurunkan angka putus sekolah adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Program ini merupakan program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Siswa didik yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari program ini akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Melalui program ini, setiap siswa (usia 6–21 tahun) akan menerima bantuan biaya pendidikan berkisar antara Rp450.000–Rp1.000.000 per tahun. Sementara itu, untuk tingkat perguruan tinggi, Beasiswa Bidikmisi diadakan untuk membantu mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik, namun berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Penerima manfaat beasiswa tersebut akan menerima bantuan biaya pendidikan dan uang saku sebesar Rp750.000 setiap bulannya.

Untuk membantu keluarga yang tergolong miskin atau berpendapatan rendah, program bantuan langsung tunai (BLT) diluncurkan dan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Program Keluarga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) untuk lansia berumur 70 tahun atau lebih, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial untuk Korban Penyalahgunaan Napza, Perlindungan Sosial untuk Tuna Sosial, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Bantuan Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan sosial untuk perkembangan anak dan keluarga sebagai program lanjutan dari penerima manfaat PKH, serta Kelompok Usaha Bersama (KUBe) khusus bagi keluarga yang sudah lulus dari program PKH (setelah maksimal enam tahun menerima PKH).

Untuk menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu, pemerintah meluncurkan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terintegrasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program ini adalah asuransi kesehatan khusus diberikan kepada warga negara yang tidak mampu dan terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta. Oleh karena itu, penerima manfaat KIS merupakan keluarga atau perorangan yang tidak mampu membayar iuran BPJS sehingga untuk dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

C. PERMASALAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

Pelaksanaan program perlindungan sosial yang baik dan tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, realisasi program perlindungan sosial tidak selalu berjalan dengan baik. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam proses penyelenggaraan program jaminan sosial dan bantuan sosial nasional di Indonesia. Tantangan terbesar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia adalah persoalan data dan pengelolaan keuangan. Data yang tidak diperbarui setiap tahun menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, di mana yang seharusnya mendapatkan bantuan malah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak menerima bantuan atau sebaliknya. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak efisien menyebabkan banyak terjadinya kecurangan dan korupsi yang menghambat penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia.

Proses identifikasi calon penerima manfaat perlindungan sosial masih menjadi tantangan utama. Di akhir 2020, jangkauan BPJS Kesehatan baru mencapai 82% dari total penduduk di Indonesia, artinya masih ada 12% masyarakat Indonesia yang belum memiliki asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan, t.t.). BPJS Ketenagakerjaan mengalami kondisi lebih buruk karena terjadi penurunan peserta secara drastis dampak dari pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pada saat rapat kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 menurun 4,9% dari tahun 2019 (Pratama, 2021). Hal ini terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya karena kondisi perusahaan yang tidak stabil di masa pandemi Covid-19. Proses penyaluran bantuan sosial masih memiliki beberapa masalah karena data terpadu bantuan sosial yang sudah ada masih belum menggambarkan keadaan di lapangan sehingga *inclusion error* dan *exclusion error* tidak dapat dihindari. *Inclusion error* adalah kondisi di mana masuknya orang yang tidak layak menerima bantuan sosial ke dalam data penerima manfaat bantuan sosial, sedangkan *exclusion error* adalah tidak masuknya orang yang layak menerima bantuan sosial ke dalam data terpadu sehingga pada saat pembagian bantuan sosial orang yang benar-benar miskin tidak menerimanya sama sekali (Halim, 2020).

Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan bantuan sosial. Pada Desember 2020, laporan keuangan BPJS Kesehatan masih mengalami defisit keuangan hingga 15,5 triliun rupiah meskipun sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah (Fauzia, 2020). Defisit keuangan juga diindikasi oleh pendapatan yang diterima lebih rendah dari beban yang dikeluarkan. Hal ini merupakan dampak dari iuran peserta yang rendah dan belum sesuai dengan perhitungan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

aktuaria yang faktual. Perilaku tidak disiplin peserta dalam membayar iuran dapat memperlambat penerimaan uang masuk yang berdampak pada banyak fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut, enggan memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta BPJS.

Sementara itu, beberapa kasus korupsi di badan penyelenggaraan perlindungan sosial telah masuk proses penyelidikan lebih lanjut pada awal 2021. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa potensi kerugian yang terjadi akibat korupsi dana investasi di PT Asabri pada periode 2012–2019 adalah sebesar 22 triliun rupiah (Harianja, 2021). Kasus ini juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan investasi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan (Wibowo, 2021). Bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial juga tidak luput dari kasus korupsi. Upaya pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang menurun pendapatannya akibat pandemi Covid-19 tidak dapat berjalan dengan baik karena dana bantuan sosial ini dikorupsi oleh penyelenggara. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana perlindungan sosial di Indonesia menyebabkan efektivitas dan efisiensi program perlindungan sosial menjadi terhambat.

Upaya perbaikan pengelolaan dan penyelenggaraan program perlindungan sosial

Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia terus dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat, terutama bagi masyarakat yang berkurang atau bahkan kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Angka kemiskinan terus meningkat dan pemerintah harus terus bergerak menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. Peristiwa ini juga memungkinkan terjadinya perubahan, seperti ada penduduk yang jatuh ke dalam kriteria sosial penerima manfaat perlindungan sosial atau sebaliknya sudah keluar dari kriteria penerima manfaat perlindungan sosial. Oleh karena itu,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki pemerintah harus segera diperbarui untuk menuntaskan permasalahan *inclusion* dan *exclusion error* dalam program perlindungan sosial. Selanjutnya, pendataan penduduk dilakukan secara terintegrasi untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penyaluran bantuan sosial sehingga memungkinkan semua keluarga mendapatkan bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Perlindungan sosial dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah memiliki kemampuan pendanaan yang baik. Kemandirian dari sisi pendanaan menjadi salah satu indikator penting yang harus diutamakan oleh pemerintah. Saat ini, sebagian besar pembiayaan perlindungan sosial berasal dari dana APBN dan APBD. Pemerintah disarankan untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu efektivitas dan efisiensi penerimaan dana. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan adalah dengan memperluas jangkauan peserta BPJS kesehatan sehingga iuran peserta akan bertambah, menaikkan nominal iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria yang faktual, serta mengoptimalisasi pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS kesehatan sehingga menarik minat peserta untuk disiplin membayar iuran.

Program perlindungan sosial lainnya perlu mendapatkan pendanaan alternatif dari sumber lain yang dapat digunakan secara langsung. Pemerintah dapat menarik pihak swasta untuk saling bahu-membahu mendanai program perlindungan sosial melalui dana CSR. Selain itu, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan kenaikan pajak atas barang kena cukai yang pemanfaatannya berdampak buruk bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kenaikan pajak akan meningkatkan pendapatan negara yang dapat dialokasikan ke program perlindungan sosial. Bagian terpenting dari pendanaan ini adalah pengelolaannya yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi sehingga seluruh dana yang dikerahkan untuk program perlindungan sosial dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Arifianto, A. (2004). *Social security reform in Indonesia: An analysis of the national social security bill (RUU Jamsosnas)*. Jakarta: SMERU Research Institute

BPJS Kesehatan. (2020). BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/

Fauzia, M. (2020, Februari 18). Sri Mulyani: BPJS Kesehatan masih defisit Rp 15,5 triliun. *KOMPAS.com*. https://money.kompas.com/read/2020/02/18/170600926/sri-mulyani--bpjs-kesehatan-masih-defisit-rp-15-5-triliun

Habibullah. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, *3*(1), 1–14. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492

Halim, I. A. (2020, Mei 15). Problematika antara bansos dan data. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/ibrohimabdulhalim/5ebd44ef097f3615ce1bec12/problematika-antara-bansos-dan-data

Harianja, A. J. (2021, Januari 26). Jaksa agung: Kasus korupsi asabri diduga rugikan negara Rp22 triliun. *IDN Times*. https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/jaksa-agung-kasus-korupsi-asabri-diduga-rugikan-negara-rp22-triliun

OECD. (2019). *Social protection system review of Indonesia*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/788e9d71-en

Pratama, W. P. (2021, Januari 18). Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan digerogoti corona, susut 2,7 Juta. *Bisnis Indonesia*. https://finansial.bisnis.com/read/20210118/215/1344507/jumlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-digerogoti-corona-susut-27-juta

Rasnawati, M. & Suhirman. (2018). Upaya yang dilakukan badan penyelenggara jaminan sosial dalam penjaminan kesehatan tenaga kerja. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *2*(1), 1–6.

Wibowo, E. A. (2021, Januari 22). Dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung periksa deputi direktur penyertaan. *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/1425550/dugaan-korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-kejagung-periksa-deputi-direktur-penyertaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XI

Perdagangan Internasional dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Permasalahan dan Solusi

Malik Cahyadin

A. PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan momentum global yang mendorong komitmen semua negara di dunia untuk menyempurnakan agenda pembangunan global dari *Millennium Development Goals* (MDGs) menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2030. United Nations (2015) menetapkan bahwa SDGs memiliki lima pilar, meliputi manusia (*people*), planet (*planet*), kesejahteraan (*prosperity*), perdamaian (*peace*), dan kemitraan (*partnership*), serta 17 tujuan. Tujuan SDGs yang relevan dengan konteks perdagangan internasional adalah (a) Tujuan 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, (b) Tujuan 10, mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, dan (c) Tujuan 17, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bappenas (2019) telah mengidentifikasi beberapa isu krusial perdagangan internasional Indonesia dalam merealisasikan tujuan SDGs, antara lain (a) ekspor nonmigas mempunyai kontribusi terbesar dalam transaksi perdagangan yang dapat memberi peluang lapangan pekerjaan, pemanfaatan teknologi dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara signifikan serta (b) komoditas ekspor berbasis sumber daya alam yang sensitif terhadap volatilitas harga. Selain itu, beberapa literatur telah mencatat bahwa implementasi perjanjian perdagangan juga menjadi isu penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara (United Nations [UN], 2015; Andreoni & Miola, 2016; UNDESA & The World Bank Group, 2019). Lebih lanjut, dinamika ekonomi global dan perubahan kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti perubahan teknologi, perubahan iklim dan bencana, krisis ekonomi dan keuangan, serta konflik antarnegara, juga dapat mendorong keterbukaan akses dan kerja sama antarnegara (UNDESA & The World Bank Group, 2019) menuju kesejajaran dan kesejahteraan kehidupan global.

Tulisan ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci, antara lain

1. bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia mengatur dan memfasilitasi peningkatan perdagangan internasional dalam kerangka TPB?
2. apa saja permasalahan atau kendala pencapaian realisasi perdagangan internasional dalam kerangka TPB? dan
3. apa saja jalan keluar yang dapat dipilih oleh Pemerintah Indonesia?

Pertanyaan tersebut mengarah pada beberapa kontribusi tulisan ini meliputi identifikasi kebijakan yang dapat merangsang peningkatan transaksi perdagangan internasional menuju TPB tahun 2030. Kebijakan perdagangan ini diharapkan dapat bersifat integratif, transparan, efisien, dan dinamis. Kontribusi lain ditunjukkan dalam bentuk beberapa permasalahan kunci sebagai landasan rekomendasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun menengah dalam proses perdagangan internasional. Terakhir, tulisan ini akan berkontribusi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terhadap perumusan jalan keluar atas permasalahan kunci transaksi perdagangan internasional dalam jangka pendek dan menengah. Dengan demikian, beberapa pemangku kepentingan kunci yang akan menerima implikasi kebijakan atas hasil tulisan ini, antara lain kementerian bidang ekonomi, asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan lembaga riset.

Lebih lanjut, Bappenas (2019) telah menyusun Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030 dengan salah satu penekanan pada peningkatan ekspor nonmigas sebagai perwujudan Tujuan 17 SDGs. Gambar 11.1 mengilustrasikan kondisi terkini pertumbuhan ekspor nonmigas selama tahun 2014–2019 dan proyeksi tahun 2020–2030. Periode proyeksi mengekspresikan dua pendekatan, yaitu *business-as-usual* (BAU) dan intervensi pemerintah. Pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan selama periode proyeksi untuk merealisasikan tingkat pertumbuhan ekspor nonmigas pada tingkat intervensi, seperti kebijakan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa melalui pemanfaatan rantai produksi, pasar, dan daya saing global. Dengan demikian, target pertumbuhan ekspor nonmigas pada tahun 2030 ditetapkan sebesar 5,39% (pendekatan BAU) dan 11,78% (pendekatan intervensi).

Secara khusus, praktik perdagangan bebas dalam kawasan ASEAN dapat menjadi pertimbangan Indonesia untuk memperoleh dominasi pasar serta mengendalikan rantai pasokan regional dan daya saing perdagangan internasional. Perdagangan bebas di kawasan ASEAN bermula dari perjanjian *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 menuju *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015. AFTA menekankan aliran bebas barang dan jasa termasuk pengurangan tarif perdagangan yang disempurnakan dengan aliran bebas barang dan jasa termasuk bebas tarif perdagangan dalam skema AEC. Secara empiris, AFTA dapat berimplikasi positif dan signifikan terhadap transaksi perdagangan Indonesia di kawasan ASEAN (Fitrio, 2019).

Pemerintah juga telah memberi perhatian lebih terhadap permasalahan biaya logistik dan proses industrialisasi substitusi impor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

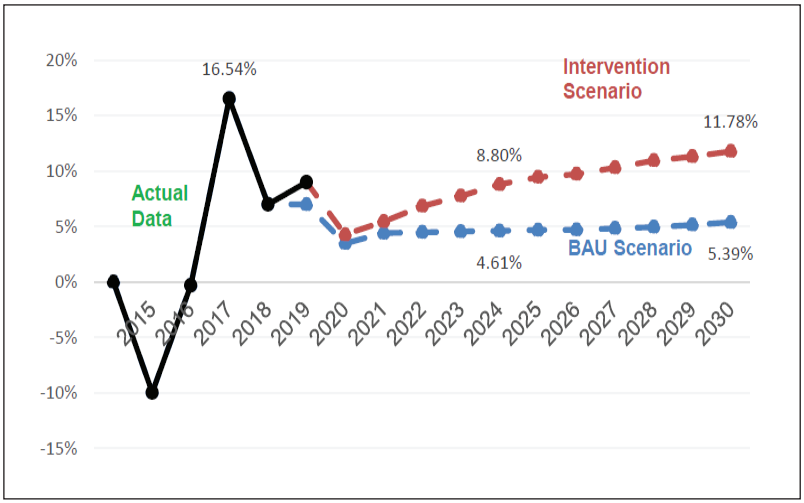

Sumber: Bappenas (2019)

Gambar 11.1 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (%)

(ISI). Keduanya dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kondisi transaksi perdagangan internasional Indonesia. Beberapa literatur telah mengungkapkan bahwa biaya logistik di Indonesia relatif tinggi (Hanafi, 2018), tetapi ada indikasi positif dari sisi proses ISI pada industri barang modal (elektronik) dan perluasan ekspor pada industri bahan baku/penolong (suku cadang dan lainnya) serta industri barang konsumsi (pangan segar, pangan olahan, otomotif, dan lainnya) (Kementerian Perdagangan, 2014).

Tulisan ini akan dijabarkan kedalam beberapa bagian. Bagian pertama mendeskripsikan pendahuluan yang membahas beberapa isu tentang perdagangan internasional Indonesia dalam kerangka TPB. Bagian kedua menjelaskan identifikasi permasalahan dan tujuan penulisan yang menginformasikan identifikasi permasalahan kunci dan tujuan penulisan tentang perdagangan internasional Indonesia. Bagian ketiga menunjukkan analisis penyelesaian permasalahan (pembahasan) dan penjabaran tujuan penulisan yang memfokuskan pada beberapa permasalahan kunci dan jalan keluar. Terakhir, kesim-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pulan dan rekomendasi kebijakan yang akan ditutup dengan informasi referensi penulisan.

B. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENULISAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Aktivitas ini tidak terlepas dari aspek kebijakan pemerintah dan beberapa permasalahan kunci yang menjadi potret dinamika ekspor dan impor setiap tahun. Oleh karena itu, beberapa jalan keluar sepatutnya dirumuskan sebagai arah peningkatan transaksi perdagangan internasional Indonesia dalam kerangka SDGs (TPB). Dengan demikian, bagian ini akan memberikan penjelasan beberapa permasalahan kunci dan tujuan penulisan.

Permasalahan pertama menekankan pada kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional. Secara umum, kelemahan kebijakan pemerintah terletak pada belum terlaksananya integrasi dan sinkronisasi kebijakan dan program antarkementerian. Pada konteks ini, Kementerian Koordinator Perekonomian dapat menjadi koordinator sekaligus pengawas pelaksanaan kebijakan dan program kementerian bidang ekonomi. Integrasi dan sinkronisasi kebijakan dan program yang relatif lemah akan mempersulit dan memperlambat aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa kebijakan yang sebaiknya menjadi prioritas kementerian bidang ekonomi adalah pelaksanaan industrialisasi substitusi impor (ISI), penguatan rantai pasokan produksi dalam negeri, dan peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030.

Permasalahan kedua memfokuskan identifikasi kendala kunci pelaksanaan perdagangan internasional dalam kerangka SDGs (TPB). Secara umum, permasalahan perdagangan internasional terletak pada integrasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan dan promosi ekspor, realisasi industrialisasi substitusi impor, biaya logistik, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur pendukung, kesenjangan pendapatan masyarakat, serta tingkat remitansi yang belum optimal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Permasalahan ketiga adalah merumuskan jalan keluar seperti apa yang dapat dipilih oleh para pemangku kepentingan dalam proses perdagangan internasional dalam kerangka TPB dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan perdagangan internasional menuju TPB 2030.

Lebih lanjut, tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memfasilitasi dan mempercepat pencapaian perdagangan internasional dalam kerangka TPB, mengidentifikasi permasalahan atau kendala pencapaian realisasi perdagangan internasional, dan merumuskan beberapa jalan keluar menuju TPB 2030.

C. PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah menekankan beberapa kebijakan tentang industrialisasi substitusi impor (ISI), penguatan rantai pasokan dalam negeri, dan peta jalan SDGs menuju 2030. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap sinkronisasi program kerja kementerian bidang ekonomi sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pada kondisi pandemi Covid-19, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan, seperti Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan perundang-undangan yang juga diharapkan berimplikasi signifikan terhadap perekonomian dalam negeri adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Implementasi peraturan perundang-undangan di atas memerlukan jalur koordinasi yang tepat, efisien, dan cepat dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Hal ini mengisyaratkan bahwa proses

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pencapaian dan peningkatan transaksi perdagangan internasional Indonesia dalam kerangka TPB diarahkan untuk menghasilkan proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan terakselerasi. Dengan demikian, kerja sama lintas sektor atau kementerian diharapkan meningkat signifikan dan 'ego' sektoral adalah terhindarkan. Pada level daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat diterjemahkan oleh para kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah dan dapat melibatkan para pemangku kepentingan dalam implementasinya.

Permasalahan Kunci dan Solusi

Beberapa permasalahan kunci yang menjadi perhatian dalam tulisan ini terkait perdagangan internasional Indonesia adalah penguatan dan promosi ekspor, realisasi industrialisasi substitusi impor, biaya logistik, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur pendukung, kesenjangan pendapatan masyarakat, dan tingkat remitansi yang belum optimal. Permasalahan tersebut juga relevan dengan beberapa tujuan TPB sebagaimana telah diidentifikasi oleh Apostolov (2017) sebagai berikut.

1. Tujuan 8 yang menekankan keberlanjutan produksi dan konsumsi, pasar yang terbuka dengan produk ramah lingkungan, asistensi teknis sistem perdagangan terintegrasi, dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan hijau.
2. Tujuan 17 yang menekankan sistem perdagangan yang seimbang dan tidak diskriminatif (Tujuan 17.10), meningkatkan nilai transaksi ekspor di negara-negara berkembang secara signifikan (Tujuan 17.11), dan menerapkan pasar bebas (Tujuan 17.12).
3. Tujuan 2.b tentang perbaikan dan pencegahan pembatasan dan distorsi perdagangan pertanian serta Tujuan 3.b tentang mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk tujuan kesehatan publik.

Pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia cenderung berfluktuasi selama beberapa tahun (Gambar 11.2). Hal ini tidak terlepas dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

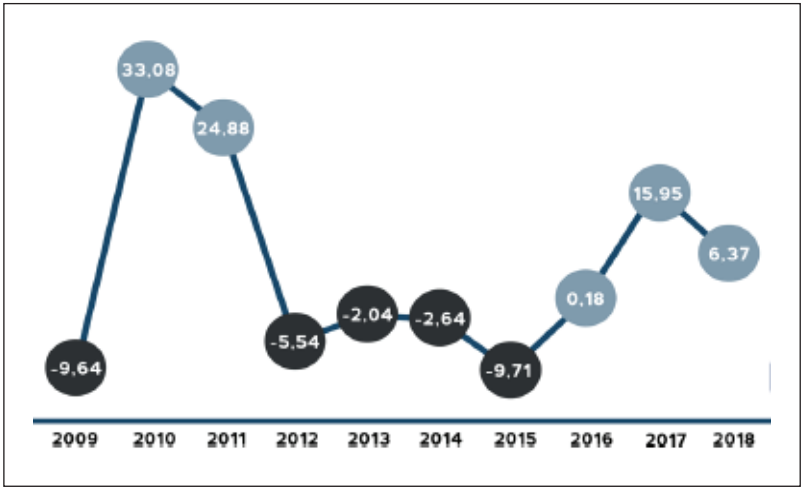

Sumber: BPS (2019)

Gambar 11.2 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Indonesia Tahun 2009-2018 (%)

kondisi industri nasional yang belum mampu mendominasi rantai pasokan global dan proses substitusi impor yang belum terealisasi secara maksimal. Sebagai contoh, pada tahun 2009 pertumbuhan ekspor nonmigas berada pada kisaran -9,64%, tetapi pertumbuhannya mencapai 6,37% pada tahun 2018.

Lebih lanjut, kondisi perdagangan internasional Indonesia dapat dikaitkan dengan peta diplomasi perdagangan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan (2015) telah mengidentifikasi sebanyak 165 negara yang telah dan akan melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia. Selain itu, beberapa negara mitra dagang utama dapat diklasifikasikan sebagai (a) tiga negara prioritas tujuan ekspor, meliputi Jepang, Cina dan Amerika Serikat, serta (b) tiga negara prioritas rencana kerja sama perdagangan internasional secara intensif yang terdiri atas Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia. Kerja sama perdagangan ini diharapkan tidak hanya memfokuskan pada perdagangan barang, tetapi juga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jasa karena kontribusinya relatif signifikan terhadap perdagangan internasional Indonesia (Nurindra dkk., 2016) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Fiorini & Hoekman, 2018). Jalan keluar yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait kondisi perdagangan di atas adalah implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Implementasi ini memerlukan integrasi dan sinkronisasi kebijakan dan program antarkementerian bidang ekonomi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Secara khusus, rekomendasi kebijakan dijabarkan pada Tabel 11.4.

Permasalahan kunci selanjutnya adalah industrialisasi substitusi impor (ISI). ISI dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya bahan baku dan industri nasional. Selain itu, Indonesia juga berorientasi untuk memaksimalkan kemampuan dalam penguasaan rantai pasokan global. Kementerian Perdagangan (2014) telah melaporkan bahwa industri yang mengarah pada tahap ISI selama tahun 2004–2013 adalah barang modal (elektronik). Sementara itu, pada periode yang sama, industri yang mengarah pada perluasan ekspor pada industri bahan baku/penolong (suku cadang dan lainnya) dan industri barang konsumsi (pangan segar, pangan olahan, otomotif, dan lainnya). Dua jenis industri yang masuk tahap pengenalan adalah alat berat dan transportasi. Keduanya termasuk kelompok barang modal yang dapat didorong untuk masuk pada tahap ISI.

Jalan keluar yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait realisasi ISI adalah implementasi UU No. 3/2014 dan Perpres No. 59/2017. Implementasi kedua peraturan perundang-undangan ini diharapkan melibatkan kementerian-kementerian bidang ekonomi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menyatukan proses bisnis dari hulu sampai hilir.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 11.1 Biaya Logistik di Indonesia Periode 2013–2019

Tahun	Biaya Logistik (Triliun Rupiah)	Biaya Logistik/GDP (%)
2013	1,62	25,7
2014	1,81	25,7
2015F	2,08	25,0
2016F	2,40	24,0
2017F	2,70	23,5
2018F	3,18	22,1
2019F	3,67	21,0

Sumber: Hanafi (2018)
Keterangan: F adalah hasil *forecast*

Keterlibatan semua para pemangku kepentingan dalam ISI juga terkait dengan tingkat biaya logistik di Indonesia. Hanafi (2018) telah memaparkan bahwa tingkat biaya logistik cenderung tinggi (Tabel 11.1). Kondisi ini mengakibatkan daya saing produk dan proses distribusi barang tidak berjalan secara efisien. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Implementasi peraturan ini memerlukan sinergi dan kontribusi aktif antarkementerian bidang ekonomi dan asosiasi usaha.

Jalan keluar yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait permasalahan biaya logistik nasional adalah mengimplementasikan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Pada era digitalisasi (internet) seperti sekarang, proses implementasi sistem logistik nasional sepatutnya disinergikan dengan implementasi UU No. 3/2014. Secara empiris, keterkaitan antara logistik dengan TIK dan rantai pasokan telah ditemukan oleh Wilson dkk. (2015) dan Hye dkk. (2020).

Data pada Gambar 11.3 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia cenderung meningkat signifikan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 81,53% (21,98% menjadi 39,90%) selama periode

Buku ini tidak diperjualbelikan.

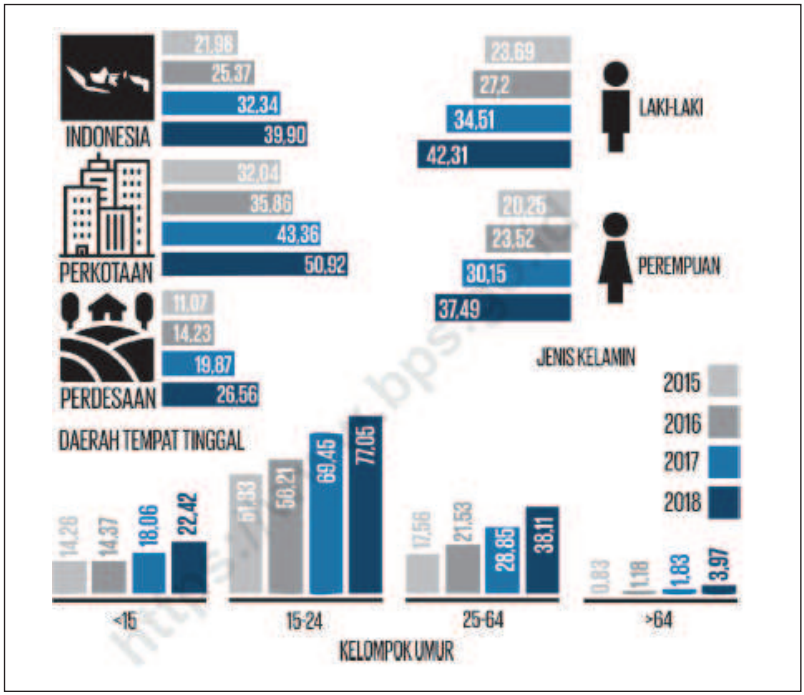

Sumber: BPS (2019)

Gambar 11.3 Proporsi Penduduk Pengguna Internet Periode 2015–2018 (%)

tersebut. Selain itu, penduduk di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi literasi internet dibandingkan pedesaan dan begitu pula penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Secara umum, penduduk usia antara 15-64 tahun memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan internet. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong tercapainya akselerasi TIK di Indonesia dan mendukung sistem logistik nasional dan industrialisasi secara digital.

Permasalahan lain yang dapat terkait dengan dinamika perdagangan internasional Indonesia dalam kerangka TPB adalah kesenjangan pendapatan dan remitansi. Kesenjangan pendapatan menjadi bagian krusial dalam Tujuan 10 TPB. Semakin tinggi kesenjangan pendapatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 11.2 Koefisien Gini Indonesia Periode 2015–2019

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Indonesia
2015	0,428	0,334	0,408
2016	0,410	0,327	0,397
2017	0,407	0,320	0,393
2018	0,401	0,324	0,389
2019	0,392	0,317	0,382

Sumber: BPS (2019)

antarpenduduk dan antarnegara, transaksi perdagangan internasional tidak akan mampu menciptakan keadilan dan kesejajaran ekonomi global. Secara empiris, kesenjangan pendapatan antarnegara dalam kerangka TPB telah dikaji oleh Chancel dkk. (2017), sedangkan ketidakadilan perdagangan global terhadap Indonesia telah dijelaskan oleh Sood (2013). Sementara itu, remitansi merupakan transfer uang dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara ke dalam negeri. Peningkatan remitansi akan mendorong peningkatan (surplus) neraca pendapatan sekunder (NPS) yang berakhir pada peningkatan neraca transaksi berjalan (NTB).

Pada level nasional, tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan (Tabel 11.2). Sebagai contoh, pada tahun 2019, koefisien Gini perkotaan dan pedesaan masing-masing adalah 0,392 dan 0,317. Sementara itu, pada periode yang sama, koefisien Gini nasional adalah 0,382. Sinyal positif atas pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan telah nampak pada penurunan koefisien Gini selama tahun 2015–2019.

Tabel 11.3 mendeskripsikan tingkat remitansi TKI selama tahun 2015 hingga 2018 yang mengindikasikan bahwa tingkat remitansi cenderung berfluktuasi. Namun demikian, ada indikasi peningkatan yang signifikan tingkat remitansi pada tahun 2018 (1,05%) dibandingkan tahun 2016 (0,93%) dan 2017 (0,86%). Secara empiris, tata kelola

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 11.3 Proporsi Volume Remitansi Terhadap PDB Indonesia Periode 2015–2018 (%)

Tahun	Remitansi/GDP
2015	1,10
2016	0,93
2017	0,86
2018	1,05

Sumber: BPS (2019)

remitansi di Indonesia telah dikaji oleh Dewi dan Yazid (2017). Fluktuasi volume remitansi tidak terlepas dari kualitas (pendidikan, keterampilan, dan produktivitas) sumber daya manusia dan jenis pekerjaan. Selain itu, tingkat nilai tukar rupiah juga dapat berkontribusi terhadap nilai remitansi.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pembahasan penting dalam TPB terutama Tujuan 8, 10, dan 17. Makalah ini membahas tiga tujuan, yaitu kebijakan perdagangan internasional Indonesia, kendala proses perdagangan, dan beberapa jalan keluar. Temuan penting menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi dan mendorong peningkatan perdagangan internasional Indonesia di pasar global, seperti penguasaan rantai pasokan global dan industrialisasi substitusi impor. Temuan lainnya menunjukkan bahwa Indonesia sepatutnya menurunkan tingkat biaya logistik, mempercepat realisasi TIK, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, dan mendorong peningkatan volume remitansi.

Rekomendasi kebijakan ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam proses perdagangan internasional di bawah kerangka TPB meliputi kementerian-kementerian bidang ekonomi, asosiasi usaha, dinas teknis bidang ekonomi di daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset yang akan dijabarkan dalam Tabel 11.4.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 11.4 Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Kerangka TPB di Indonesia

Pemangku Kepentingan	Jangka Pendek	Jangka Menengah
Kementerian-kementerian Bidang Ekonomi	1. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. 2. Transparansi kebijakan dan pengendalian praktik korupsi. 3. Promosi, diplomasi, dan stimulus ekspor ke pasar global secara terintegrasi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. 4. Integrasi program antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM untuk memfasilitasi transaksi ekspor produk-produk UMKM. 5. Integrasi program antara Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi & UKM untuk membangun dan mengoptimalkan klaster usaha berorientasi ekspor. 6. Integrasi program pencitraan global produk dalam negeri berstandar internasional di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. 7. Integrasi program antar-kementerian bidang ekonomi dalam penyediaan modal usaha dan penguatan kapasitas sumber daya manusia UMKM.	1. Penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi bagi *Indonesia National Single Window* (INSW). 2. Peran dan kontribusi aktif pemerintah dalam *ASEAN Single Window* (ASW) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 3. Peran dan kontribusi aktif pemerintah dalam implementasi kerja sama ekonomi kawasan. 4. Integrasi program antar-kementerian bidang ekonomi dalam mengoptimalkan nilai tambah ekonomi pada setiap transaksi perdagangan industri jasa dan kreatif. 5. Integrasi program antarkementerian bidang ekonomi dalam rangka substitusi impor produk-produk strategis nasional. 6. Integrasi program antarkementerian bidang ekonomi dalam diversifikasi produk ekspor dan penguasaan rantai pasok global. 7. Penguatan kelembagaan, sumber daya sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur pelabuhan dan bandara berstandar internasional. 8. Implementasi Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. 9. Implementasi Peta Jalan Substitusi Impor. 10. Implementasi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemangku Kepentingan	Jangka Pendek	Jangka Menengah
Asosiasi Usaha	1. Integrasi rantai pasokan bahan baku dan produk dalam klaster usaha, baik di pasar domestik maupun internasional. 2. Optimalisasi pengelolaan klaster usaha dalam pemanfaatan pembiayaan usaha, teknologi, dan promosi dagang. 3. Peran aktif klaster usaha dalam penguasaan informasi pasar ekspor. 4. Kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi.	1. Melakukan kemitraan dalam promosi ekspor dengan Kementerian Luar Negeri. 2. Melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga riset dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan peluang ekspor di pasar global. 3. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset dalam rangka mendukung industrialisasi substitusi impor. 4. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong sistem logistik nasional yang efisien dan terintegrasi. 5. Implementasi Peta Jalan Substitusi Impor. 6. Implementasi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
Dinas-dinas Teknis Bidang Ekonomi di Tingkat Daerah	1. Layanan satu atap dan efisiensi prosedur layanan usaha. 2. Transparansi kebijakan usaha dan penghapusan pungutan illegal dalam proses layanan usaha. 3. Penguatan klaster UMKM berorientasi ekspor. 4. Mengadakan pelatihan dan pendampingan UMKM berbasis klaster usaha berorientasi ekspor dan substitusi impor. 5. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menciptakan sistem logistik nasional yang efisien dan terintegrasi.	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam fasilitasi dan pendampingan UMKM berbasis klaster berorientasi ekspor dan substitusi impor. 2. Memfasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha UMKM berorientasi ekspor dengan eksportir. 3. Fasilitasi industri-industri strategis dalam skema industrialisasi subsitusi impor.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemangku Kepentingan	Jangka Pendek	Jangka Menengah
Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	1. Hilirisasi riset dan teknologi bagi UMKM berbasis klaster usaha berorientasi ekspor dan substitusi impor. 2. Pelatihan dan pendampingan penguasaan pasar global. 3. Bekerja sama dengan asosiasi usaha dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan kelembagaan, proses produksi, dan jaminan kualitas produk berstandar nasional dan internasional.	1. Melakukan kemitraan berdasarkan skema bisnis yang saling menguntungkan dengan asosiasi (pelaku) usaha berorientasi ekspor dan substitusi impor. 2. Melakukan pendampingan klaster UMKM untuk mendorong penguatan kelembagaan, penguasaan rantai pasokan, teknologi produksi dan standarisasi produk, baik nasional maupun internasional.

REFERENSI

Andreoni, V. & Miola, A. (2016). *Competitiveness and sustainable development goals* (JRC Technical Reports, JRC103576, EUR 28316 EN). Luxembourg: Publication Office of The European Union. doi:-10.2788/64453

Apostolov, M. (2017). *Principles of trade and sustainable development* [PowerPoint slides]. Montenegro: United Nations Economic Commission for Europe. https://unece.org/DAM/trans/main/SDGs/Workshop_1_-_October_2017/I_-_Principles_of_Trade_and_Sustainable_Development__UNECE_.pdf

Bappenas (2019). *Peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030*.

BPS (2019). *Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Indonesia 2019*.

Chancel, L., Hough, A., & Voituriez, T. (2017). Reducing inequalities within countries: Assessing the potential of the sustainable development goals. *Global Policy*, *9*(1), 1–12. doi: 10.1111/1758-5899.12511

Dewi, E. & Yazid, S. (2017). Tata kelola remitansi buruh migran indonesia oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan akar rumput: Praktik baik, peluang dan tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*, *6*(2), 177–187. doi:10.18196/hi.61114

Fiorini, M. & Hoekman, B. (2018). Services trade policy and sustainable development. *World Development*, *112*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.015

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Fitrio, R. A. (2019). The effect of joining free trade union on export and import in ASEAN countries. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, *5*(2), 227–235. https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap

Hanafi, Y. N. (2018). *Indonesian logistics overview* [PowerPoint slides]. Jakarta: Asosiasi Logistic dan Forwarder Indonesia. http://ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/Indonesian-Logistics-Overview.pdf

Hye, A. K. M., Miraz, M. H., Sharif, K. I. M., & Hassan, M. G. (2020). Factors affecting on e-logistic: Mediating role of ICT & technology integration in retail supply chain in Malaysia. *TEST Engineering & Management*, *82*, 3234–3243.

Kementerian Perdagangan. (2014). *Kajian penyusunan strategi pengendalian impor Indonesia 2015–2019*.

_____. (2015). *Peta diplomasi perdagangan internasional*.

Nurindra, P., Prahasta, I., & Sumarjono, B. (2016). *Pentingnya jasa dalam perdagangan Indonesia* (Laporan penelitian). Jakarta: The Conference Board of Canada dan Kementerian Perdagangan RI.

Sood, M. (2013). Peranan pemerintah menghadapi ketidakadilan perdagangan global. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *I*(1), 152–167.

UNDESA & The World Bank Group (2019, April 2–3). Sustainable development goal 10–reduced inequalities: Progress and prospects. *An Expert Group Meeting in Preparation for HLPF 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* [Group meeting], Jenewa. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21453SDG_10_EGM_2019_concept_note_30Jan_consolidated.pdf

United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development." https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E Wilson, M. N., Iravo, N. A., Ondabu, I. T., & Ombui, K. (2015). Effects of information technology on performance of logistics firms in Nairobi County. *International Journal of Scientific and Research Publications*, *5*(4), 1–21.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tenaga Kerja yang Produktif dan Sejahtera

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XII

Migrasi: Peluang Hidup Mengatasi Rintangan Keterbatasan Ekonomi

Irma Tsuraya Choirinnida &
Nabilah Deskisphaputri Kusuma Wardhani

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk dinamis, manusia memiliki acuan dan alasan tersendiri untuk bermigrasi. Migran, para pelaku migrasi, tidak hanya bergerak menuju tempat baru tanpa suatu harapan. Tidak sedikit yang rela meninggalkan keluarga dan orang tercinta ke tempat yang sama sekali asing untuk mereka demi mendapatkan penghidupan yang dianggap lebih baik. Salah satu acuan manusia bermigrasi adalah acuan perilaku ekonomi dan bisnis. Acuan ekonomi memberikan pilihan kepada manusia untuk berpindah akibat dari keterbatasan sumber daya di tempat asalnya. Kata ekonomi sendiri sangat erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya yang mendorong manusia untuk melakukan pilihan. Hal ini dibuktikan pula dengan hasil studi kualitatif bahwa terdapat fenomena struktural dari mayoritas tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia bermigrasi ke negara dengan kemampuan industrialisasi lebih tinggi, seperti Singapura, Tiongkok, dan Taiwan, atas acuan ekonomi karena dianggap mampu membantu meningkatkan standar hidup mereka (Ford, 2001; Van Hear dkk., 2012).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketika seseorang merasa semakin sulit merajut asa atau tidak memperoleh hak atas rasa aman dan nyaman di dalam negara sendiri, upaya untuk mengungsi atau bahkan berpindah secara permanen ke negara lain menjadi salah satu alternatif solusi. Seperti isu hangat gelombang migrasi yang terjadi di Indonesia, yaitu etnis Rohingya, baik dari Bangladesh maupun Myanmar, yang masuk dalam kondisi ketakutan dan kelaparan. Jangankan sumber daya finansial untuk bertahan hidup, perasaan aman di tanah air sendiri saja sulit untuk mereka dapat sehingga terpaksa mereka berpindah ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, acuan bisnis dilandasi keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti pertukaran pelajar antarnegara maju dan berkembang atau kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru yang belum tentu diperoleh jika hanya belajar di negara sendiri. Migrasi internasional membantu mengurangi kesenjangan global baik dari kesempatan kerja, kemampuan produksi, dan kecepatan rantai pasokan hingga gaya hidup manusia (World Development Report, 2005).

Berdasarkan kedua contoh faktor pemicu yang mendorong manusia bermigrasi, dapat dikatakan bahwa proses migrasi tidak hanya melibatkan penduduk sebagai makhluk individu saja, namun manusia sebagai agen utama proses migrasi akan membawa informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya yang dapat memengaruhi kepentingan ekonomi dan politik lintas negara. Hal ini didukung dengan salah satu target *Sustainability Development Goals* (SDGs) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem migrasi yang terkelola dengan baik akan membantu mengikis jurang kesenjangan ekonomi di suatu negara.

Migrasi total Indonesia menurut data terakhir Bank Dunia di tahun 2017 masih menunjukkan angka negatif, yaitu sebesar -494,777. Net migrasi yang bernilai positif secara ekonomi lebih memberi keuntungan bagi negara karena penduduk asing yang masuk memiliki hubungan erat dengan penggunaan fasilitas dan peraturan negara, serta mampu mendorong daya tarik investor asing untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masuk ke dalam negara dibandingkan suatu negara yang memiliki jumlah imigran lebih sedikit yang arus pendapatan negara hanya dari remitansi (Migration Policy Institute, 2019).

Mayoritas migran Indonesia memutuskan untuk bekerja di negara lain dilatarbelakangi motif ekonomi (Van Hear dkk., 2012), seperti terbatasnya lapangan kerja dalam negeri dan harapan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini didukung dengan data dari Migration Policy Institute yang menunjukkan tiga negara dengan persentase jumlah imigran terbesar, yaitu Uni Emirat Arab (88%), Kuwait (72%), dan Saudi Arabia (38%). Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketiga negara tersebut merupakan negara dengan sumber daya minyak melimpah sehingga tidak heran jika mereka mampu menyediakan kesempatan kerja dan kualitas hidup yang menjanjikan bagi sebagian warga di negara berkembang.

Selain itu, kebanyakan negara maju memiliki migrasi total bernilai positif, seperti Amerika, Jerman, Australia, Jepang, dan Korea. Negara di Asia Tenggara yang total migrasinya positif ada Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sebelumnya, Thailand memiliki total migrasi negatif, namun sejak tahun 2013 hingga saat ini nilai total migrasinya positif yang menandakan arus imigran lebih besar dibandingkan emigran. Hal ini tentu menjadi cambuk bagi Indonesia agar menciptakan tata kelola sistem migrasi yang baik untuk menjadi negara yang memperoleh lebih banyak keuntungan dari proses migrasi dan menuju negara maju tahun 2045.

Salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil mengambil peluang dari proses migrasi adalah Filipina. Berdasarkan data di atas, Filipina memiliki presentasi remitansi paling tinggi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun 2000 hingga 2019 dibandingkan empat negara ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia (World Bank Data, 2019). Selain karena jumlah emigran yang tinggi, para pekerja migran Filipina juga paling banyak mengirimkan sebagian pendapatan mereka ke kampung halaman untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Uang yang dikirimkan para pekerja imigran merupakan salah satu arus uang terbesar di negara berkembang,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

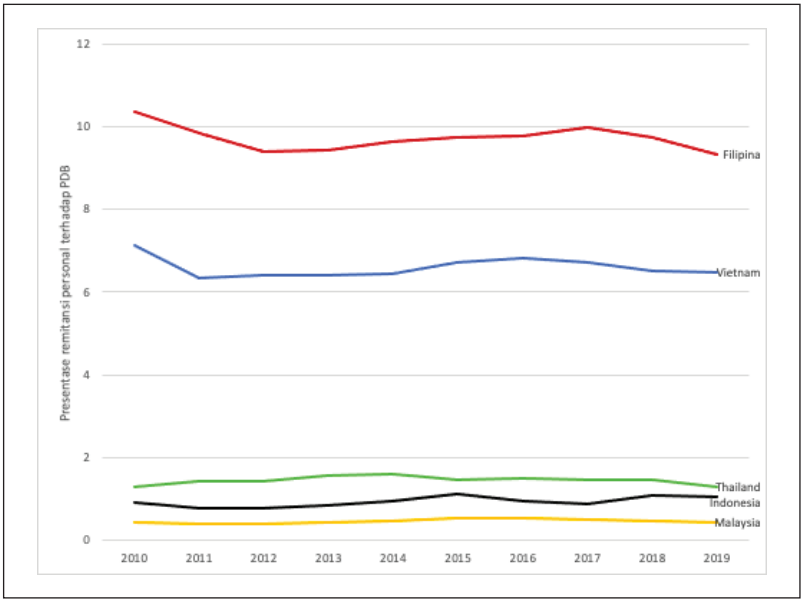

Sumber: The World Bank Data (2019)

Gambar 12.1 Remitansi per PDB Periode 2010–2019

salah satunya Indonesia. Akan tetapi, Indonesia termasuk negara di ASEAN yang memiliki remitansi rendah karena tidak terlalu banyak penghasilan dari para imigran dikirimkan ke kampung halamannya karena mereka menggunakan penghasilannya di negara tempat mereka bekerja (Bachtiar, 2011).

B. TANTANGAN PROSES MIGRASI DI INDONESIA

Masyarakat ASEAN telah berupaya melaksanakan agenda integrasi dengan melakukan beberapa rangkaian perjanjian mengenai tarif hingga kesenjangan standar pasar regional tunggal. Perjanjian tersebut diadakan karena adanya penyebab utama dalam migrasi, seperti intraregional mengalami penurunan yang signifikan dan perdagangan intraregional mengalami peningkatan dari 17% nilai perdagangan ASEAN di tingkat dunia pada tahun 1990 menjadi sekitar 30% saat ini (OECD, 2020).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Migrasi intraregional di ASEAN meningkat secara signifikan antara 1995 dan 2015, menjadikan Malaysia, Singapura, dan Thailand sebagai pusat migrasi regional dengan 6,5 juta migran 96% dari total jumlah pekerja migran di ASEAN. Sebagian besar migrasi di kawasan ASEAN dilakukan oleh imigran berketerampilan rendah dan sering kali tidak berdokumen resmi untuk mencari pekerjaan dengan upah yang lebih baik dari sebelumnya. Para migran ASEAN bergerak untuk mencari peluang hidup untuk pertumbuhan perekonomian, terutama di sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa domestik. Bermigrasi memberikan peluang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang membahas tentang tantangan yang dihadapi para pekerja migran dengan fokus pada hambatan keuangan dan mobilitas yang ada.

Kesenjangan substansial terjadi di kawasan ASEAN, di mana negara terkaya mencapai 25 kali lebih kaya daripada yang termiskin (World Bank, 2017). Beberapa negara mengalami kekurangan tenaga kerja, sedangkan negara lainnya berjuang untuk membangun lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduknya yang terus bertambah jumlahnya dan masih berusia muda. Singapura, Thailand, dan Vietnam akan menghadapi penyusutan tenaga kerja, sedangkan Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tenaga kerja yang akan menjadi pengirim pekerja migran regional utama dalam dua dekade mendatang. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja ini akan mendorong penduduk siap kerja untuk mencari pekerjaan di berbagai bagian wilayah lain. Para migran dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dengan pindah ke negara lain.

Indonesia, negara keempat terbanyak penduduknya di dunia, selama beberapa dekade telah menjadi negara asal utama migrasi tenaga kerja dengan para pekerjanya menyebar ke berbagai negara. Rumah bagi beragam budaya dan terletak di sepanjang beberapa rute perdagangan dan transportasi utama dengan enggan mendapati dirinya dalam peran negara transit dan tujuan baru-baru ini. Meskipun pembuat kebijakan Indonesia telah membuat kemajuan dalam melindungi pekerja migran di luar negeri, negara ini terus mengha-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapi tantangan terkait dengan identitas migrasi yang bersaing, seperti perlindungan korban perdagangan manusia dan pencari suaka.

Di awal tahun 2020, telah terjadi musibah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia yang membuat beberapa negara mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran pandemi, seperti karantina, penutupan perbatasan, dan pembatasan imigran yang masuk ke negaranya, salah satunya imigran dari Indonesia. Lebih lanjutnya lagi, secara umum, prosedur migrasi di ASEAN masih bersifat membatasi dengan hambatan, seperti proses rekrutmen yang mahal dan panjang serta terbatasnya kuota pekerja asing yang dibolehkan suatu negara.

Di seluruh kawasan ASEAN, banyak organisasi bisnis dan organisasi lain, termasuk layanan dukungan migran dan perempuan, harus menghentikan operasi atau mengurangi jam kerja. Beberapa negara juga telah melonggarkan pembatasan, berdasarkan kewaspadaan terhadap gelombang infeksi kedua mengingat beberapa asrama para imigran yang padat, akomodasi lainnya dan pusat-pusat penahanan yang rentan terhadap pandemi Covid-19 tersebut. Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis yang memiliki dampak merugikan pada kebebasan dari kekerasan dan pelecehan, pekerjaan, pendapatan, perlindungan sosial, serta akses ke layanan dan peradilan.

Selama pandemi, banyak imigran yang dipulangkan oleh negara tujuan dan terpaksa harus bekerja dari jarak jauh atau secara daring. Bekerja jarak jauh di masa pandemi akan memengaruhi keadaan di masa yang akan datang, di mana banyak perusahaan yang akan menerapkan sistem daring dalam melakukan pertemuan jarak jauh maupun *work from home* untuk mengurangi beban perusahaan yang begitu besar. Para pekerja tidak lagi perlu datang ke tempat kerja dan membuat banyak imigran tidak akan mengeluarkan uang mereka di negara tersebut. Inilah yang membuat pendapatan negara akan berkurang drastis dalam perekonomiannya.

Pada era 90-an, Indonesia mengalami kondisi yang buruk, di mana stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik mengalami permasalahan yang cukup besar yang berdampak pada migrasi besar-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

besaran warga negara Indonesia dengan bermodalkan visa turis ke negara-negara ASEAN atau negara maju, seperti Australia dan Amerika. Hal ini dikarenakan mereka merasa kehidupan di sana lebih aman dan lebih terjamin sehingga banyak dari warga Indonesia yang tidak ingin kembali (BBC, 2019). Banyak hal yang perlu diketahui, salah satunya adalah banyaknya para penduduk asli dari negara yang dituju oleh para imigran dari Indonesia yang tidak menyukai tindakan para imigran tersebut karena itu merupakan tindakan ilegal sehingga menyebabkan nama Indonesia menjadi buruk di kancah internasional.

Para imigran yang menjalani kehidupan di negara tersebut juga memiliki kesulitan serta kendala dalam bertahan hidup. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan yang terbatas, berisiko tinggi, upah rendah, dan harus hidup secara bersembunyi untuk menghindari otoritas pemerintah setempat guna mencegah agar mereka tidak tertangkap dan dideportasi ke negara asal. Bahkan, mereka juga sangat waspada dalam menjalani kehidupan sosial untuk menghindari kawan atau kerabat mereka yang merasa iri dan ingin melaporkan mereka kepada otoritas pemerintah setempat (Perburuhan Internasional Organisasi, 2004)

Jika para imigran mampu bertahan hidup secara bertahun-tahun tanpa terdeteksi oleh otoritas pemerintah setempat, mereka akan merasa kesulitan ketika ingin kembali ke Indonesia. Jika mereka kembali ke Indonesia, paspor mereka akan masuk daftar hitam oleh negara tempat mereka bermigrasi sehingga mereka tidak akan dapat kembali lagi ke negara tempat tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan berat bagi para imigran gelap di negara tersebut dan membuat mereka tidak dapat merasa bebas untuk bertemu keluarga. Kesanggupan mereka untuk beradaptasi kembali di Indonesia setelah lama tinggal di luar negeri juga menjadi pertimbangan jika mereka menyatakan diri ingin kembali ke Indonesia atau tertangkap sehingga harus dideportasi atau visa mereka ditolak. Banyak di antara mereka yang memiliki modal miliaran rupiah mencoba untuk membuat bisnis dan tidak berhasil karena memiliki modal dan kemampuan berbisnis adalah dua hal berbeda. Bahkan, kita saja yang hidup di Indonesia tidak mudah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk berbisnis karena banyak risiko yang dapat terjadi, salah satunya tidak dibayar orang, tidak laku, ditipu, perpajakan, dan sebagainya.

Para imigran ilegal mengambil tindakan untuk bermigrasi ke negara lain didasarkan pada keputusan pribadi mereka tanpa adanya saran dari pihak ketiga untuk memberikan pertimbangan terbaik sebelum mengambil keputusan menjadi imigran gelap di negara lain. Kebanyakan dari mereka mengambil keputusan karena merasa susahnya hidup di Indonesia (padahal di sana juga sama susahnya). Banyak para imigran yang sudah tiba di negara tujuan lalu mengajak sanak saudaranya, atau bahkan tetangganya, untuk ikut bekerja di luar negeri dengan cara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi.

Gelombang migrasi Indonesia sendiri dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama, yaitu dominasi TKW dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak di sektor informal, seperti buruh dan asisten rumah tangga (Bachtiar, 2011). Arus migrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik, seperti moratorium yang pernah ditetapkan Malaysia dan beberapa negara di Timur Tengah untuk menangguhkan masuknya tenaga kerja asing pada tahun 2009 (BNP2TKI, 2013). Padahal, Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang dipilih sebagian besar tenaga kerja Indonesia selain Arab Saudi. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan permintaan di pasar tenaga kerja internasional yang sangat memengaruhi pula peluang migran Indonesia untuk memperoleh pekerjaan.

Di lain sisi, TKI memiliki permasalahan sendiri dalam hal kualitas sumber daya manusia. Keterampilan, kemampuan, dan bahasa menjadi kendala yang menghambat penerimaan tenaga kerja Indonesia (Missbach & Palmer, 2018). Bahkan, tidak sedikit kasus kekerasan yang dialami emigran asisten rumah tangga terjadi karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan majikannya. Hal ini akan berdampak pada penilaian tenaga kerja dari Indonesia yang kurang kompetitif di pasar tenaga kerja internasional.

Stabilitas politik negara tujuan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan migran Indonesia di negara lain. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, ketegangan politik di Hongkong akibat dari RUU

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ekstradisi membuat warga negara Indonesia yang bermigrasi di sana ikut terdampak. Protes besar-besaran merusak fasilitas umum, seperti sarana transportasi maupun komunikasi. Ketenangan, keamanan, dan kenyamanan WNI yang menetap di sana mengkhawatirkan. Tentu beberapa negara termasuk Indonesia, sementara membatasi akses keluar masuk ke Hongkong (CNN Indonesia, 2019).

C. PELUANG MIGRASI INTERNASIONAL BAGI INDONESIA

Migrasi internasional bagai dua sisi mata uang. Tidak semua negara memandang fenomena migrasi ini sebagai salah satu sarana untuk berhubungan dengan negara lain yang mendatangkan keuntungan untuk negaranya sendiri. Ada pula negara yang menganggap migrasi sebagai sebuah ancaman keamanan karena menimbulkan konflik sosial, ekonomi, dan politik antarnegara yang menjadi lebih sulit diprediksi. Sebagai contoh, anggapan bahwa semakin ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja dalam negeri akibat dari bertambahnya pesaing dari tenaga kerja asing serta risiko bentrok antarpenduduk pendatang dan penduduk asli yang mungkin saja terjadi akibat perbedaan latar belakang bahasa, kebiasaan, dan budaya. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak dapat hanya berpangku tangan dengan menjadi negara yang terus-menerus mengirim tenaga kerja di pasar internasional, tetapi juga harus melakukan revolusi untuk menjadi negara penerima tenaga kerja asing dan mengembangkan citra sebagai pengirim tenaga kerja dengan kualitas keterampilan dan kemampuan yang lebih kompetitif. Saat ini, tidak sedikit dari pekerja asing di dalam negeri menduduki jabatan sebagai jajaran atas manajemen perusahaan, sedangkan tenaga kerja Indonesia menjadi buruh di negara orang.

Solusi yang dapat diambil pemerintah adalah dengan memanfaatkan peluang sistem migrasi internasional, salah satunya dengan remitansi. Remitansi adalah transfer uang oleh pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Remitansi membantu memperbaiki kesejahteraan keluarga TKI di kampung halamannya untuk memenuhi kebutuhan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

primer, membayar utang, membiayai pendidikan, dan kesehatan sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Selain itu, pengeluaran TKI dengan membelanjakan penghasilannya selama bekerja di luar negeri juga membantu mendongkrak penghasilan para pelaku usaha di lingkungan asal TKI tinggal.

Selain membantu meningkatkan IPM, remitansi juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Remitansi menyumbang 1,05% terhadap total PDB keseluruhan, namun angka ini relatif kecil dan lebih volatil dibandingkan pendapatan dari sektor industri keuangan lainnya. Pada tahun 2020, Bank Indonesia merilis data jumlah remitansi Indonesia mengalami penurunan signifikan akibat dari Covid-19. Pandemi ini menyebabkan para pekerja Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian, bahkan kehilangan pekerjaan. Selain mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan primer dan sekunder, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga di kampung halaman, mereka perlu menanamkan pola pikir investasi sejak dini. Tidak banyak dari mereka yang sadar untuk aktif mengembangkan sebagian pendapatannya ke dalam hal yang lebih produktif, seperti memperbaiki rumah, membeli tanah, lahan, emas, kendaraan, dan modal usaha sehingga peningkatan taraf hidup TKI dapat jadi hanya berlangsung di satu generasi. Setelah TKI purna atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan terpaksa kembali ke tanah air, mereka dan keluarganya kehilangan sumber pendapatan sepenuhnya. Oleh karena itu, sebagai refleksi atas apa yang telah terjadi dan upaya preventif di masa depan, perlu dilakukan pengelolaan remitansi TKI yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendidikan mengenai literasi keuangan dapat menjadi awal untuk mengubah pola pikir TKI dari yang semula bersifat konsumtif menjadi lebih produktif. Program pendidikan literasi keuangan yang saat ini sudah dilakukan pemerintah dibantu dengan pihak-pihak eksternal, seperti diaspora, namun hanya dalam bentuk pelatihan kewirausahaan. Pemerintah dapat menambah pengetahuan literasi keuangan bagi para TKI terkait investasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selanjutnya, pemerintah, melalui BKPM, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendukung sekaligus menjembatani TKI yang tertarik untuk menginvestasikan sebagian pendapatannya dapat membentuk bidang khusus yang mengelola sebagian dari pendapatan remitansi untuk disalurkan ke instrumen keuangan. Selain ada perputaran dana yang membantu proyek pembangunan negara, hasil investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan para TKI dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti memberi bantuan TKI di negara yang sedang mengalami konflik dan menebus denda TKI bermasalah. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengadakan kegiatan usaha produktif untuk membantu pasangan TKI agar mampu untuk membangun usaha yang produktif dengan keterampilan yang mumpuni, meliputi pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif, dan pemasaran usaha tersebut. Program ini menitikberatkan pada penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga dapat menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah (Kurniawan, 2017).

Sebelum berangkat ke negara tujuan, para emigran diberikan pelatihan atau pembekalan terlebih dahulu oleh agen-agen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah memberikan berbagai macam program kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas para imigran. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan para imigran agar tidak terjebak pada pola konsumtif serta mampu memanfaatkan hasil kerjanya di luar negeri dan juga untuk keluarga di Indonesia. Selama ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) juga sudah banyak menyelenggarakan berbagai macam pelatihan kerja untuk para imigran. Bahkan, pemerintah terus membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program desmigratif membangun pusat layanan migrasi agar setiap warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan berupa pengetahuan mengenai informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri, serta tata cara pengurusan dokumen awal untuk bekerja di luar negeri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam melakukan pengayoman terhadap anak-anak TKI, pemerintah membentuk *community parenting* yang bertujuan untuk mengasuh para anak-anak TKI oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Masyarakat diberikan pelatihan tentang bagaimana mengasuh para anak TKI secara baik agar mampu melanjutkan pendidikan formal mereka serta mengembangkan kreativitasnya.

Upaya pemerintah untuk mengambil peluang migrasi dapat juga dilakukan melalui kerja sama dengan diaspora—migran yang tinggal secara permanen di luar negara tempat kelahirannya—namun tetap mempertahankan hubungan sentimental dengan negara asalnya. Diaspora telah lama menetap dan mengetahui seluk-beluk kondisi negara tempat mereka tinggal sehingga dapat membantu untuk memberikan informasi mengenai negara tujuan dan memfasilitasi proses migrasi para imigran dari negara mereka. Indonesia sendiri sudah memiliki Indonesia Diaspora Network (IDS) sebagai perkumpulan diaspora Indonesia yang telah melakukan berbagai macam agenda, seperti pelatihan kerja dan seminar untuk migran Indonesia. Pemerintah dapat menggandeng IDS untuk menjembatani pemanfaatan investasi asing langsung (FDI) yang ingin masuk ke Indonesia. Selain itu, diaspora juga dapat membantu percepatan transfer teknologi di tempat negara mereka tinggal.

India dan Tiongkok adalah dua negara yang berhasil memberdayakan perserikatan diaspora mereka untuk membawa investasi masuk ke dalam negaranya (Zhu, 2007). Sama seperti Indonesia, migran kedua negara ini dahulu didominasi dengan para pekerja buruh berupah rendah yang kemudian sifat pekerja keras dan predikat andal dalam berdagang yang melekat pada etnis Tiongkok membuat tidak sedikit dari mereka menetap dan sukses di negara lain. Pemerintah Indonesia dapat mengupayakan hal yang sama dengan mendorong etos kerja migran melalui fasilitas pelatihan keterampilan, pendidikan, dan wadah untuk mendirikan usaha bersama. Hal ini adalah bentuk investasi Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk hasil di masa yang akan datang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemerintah Indonesia mengadakan program yang bagus mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) dan TKW. Mayoritas masyarakat dari kota kecil atau kabupaten dengan UMR masih rendah (sekitar 1–2 juta rupiah) tertarik dengan program ini dan negara tujuan favorit adalah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Timur Tengah karena dengan upah sekitar 7–8 juta rupiah setelah dipotong agen, mereka masih mendapat 3–4 juta rupiah, tiga kali lipat dari UMR yang biasa mereka dapatkan di desa. Pemerintah juga terus melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan kerja (*vocational training*) di balai latihan kerja (BLK). Saat ini, ada 301 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia, 17 di antaranya adalah BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan, dan dapat diakses masyarakat secara gratis.

D. PEMANFAATAN PELUANG MIGRASI SEBAGAI SOLUSI KETERBATASAN EKONOMI

Migrasi internasional dipandang sebagai salah satu alternatif solusi bagi seseorang untuk memperbaiki taraf sosial dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, negara yang memiliki bonus demografi dengan angka usia produktif tinggi, namun ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas, dapat memanfaatkan peluang migrasi internasional untuk mengurangi angka pengangguran dam mengikis jurang ketimpangan sosial. Melalui remitansi, negara juga memperoleh pendapatan sekunder yang berkontribusi pada produk domestik bruto. Bagi pelaku bisnis, migrasi internasional dapat membantu mereka untuk memperoleh sumber daya manusia yang lebih kompetitif serta mempercepat proses produksi dan distribusi di arus perdagangan internasional. Lahirnya diaspora juga diawali dengan perpindahan penduduk ke negara lain. Oleh karena itu, migrasi dapat berkontribusi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan indeks pembangunan manusia hingga memperkuat hubungan diplomasi antarnegara.

Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih memiliki rintangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang perlu diselesaikan dari proses migrasi ini, seperti pendapatan remitansi yang relatif rendah karena kurangnya motivasi TKI untuk membelanjakan dan mengirim uangnya ke dalam negeri, kurangnya pengetahuan akan pentingnya investasi hingga pasar tenaga kerja Indonesia yang dinilai kurang bersaing akibat tingkat pendidikan, keterampilan, dan komunikasi yang lebih rendah dibandingkan negara pengirim migran lainnya di ASEAN, seperti Filipina. Sepanjang tahun 2019, permasalahan geopolitik hingga kesehatan internasional juga membuktikan keuntungan Indonesia dari proses migrasi ini sangat volatil, seperti konflik politik di Hongkong dan pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan remitansi Indonesia, jaminan kesehatan dan keamanan migran di luar negara, hingga potensi berkurangnya permintaan tenaga kerja Indonesia dan pembatasan arus migrasi Internasional di masa depan sebagai dampak normal baru yang saat ini terbiasa dengan penggunaan teknologi.

Untuk menjawab tantangan migrasi, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus menggalakkan investasi asing masuk ke dalam negeri, namun juga dapat menggalakkan investasi pada sumber daya manusia negara sendiri. Investasi modal asing yang masuk dalam negeri dapat memberikan daya serap tenaga kerja yang lebih besar, baik di dalam maupun luar negeri sehingga Indonesia dapat aktif berkontribusi untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial sebagai masalah bersama dunia. Sementara itu, investasi sumber daya manusia dapat diberikan dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan, bahasa, pengetahuan literasi keuangan bagi migran dan calon migran. Pendidikan literasi keuangan yang efektif sehingga memperluas tingkat inklusi keuangan juga perlu peran pemerintah untuk menyediakan wadah bagi para migran untuk berinvestasi secara aman. Dari sisi rantai distribusi tenaga kerja asing, perbaikan alur tenaga kerja asing juga penting karena pekerja, penyalur hingga penerimanya harus memiliki birokrasi lebih jelas sebagai upaya preventif terjadinya kasus penyaluran tenaga kerja secara ilegal. Data jumlah migran hingga diaspora pun perlu rutin diperbarui dengan memberdayakan diaspora untuk membantu migran asal Indonesia di negaranya, bahkan mem-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berikan peluang untuk adanya investasi masuk dari tempat mereka tinggal. Dengan kondisi demografi Indonesia saat ini yang memiliki surplus tenaga kerja, solusi yang dapat dilakukan adalah perbaikan dan penguatan potensi sumber daya manusia. Manusia dikatakan kuat pada pasar tenaga kerja bukan dilihat dari kemampuan fisiknya saja, melainkan juga kekuatan intelektual agar lebih bersaing di pasar global. Walaupun masih banyak rintangan yang mengadang, namun kami yakin lebih banyak peluang migrasi yang ada untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

REFERENSI

Annur, C. M. (2020, September 7). Remitansi pekerja migran Indonesia terbesar berasal dari 5 negara. *databoks*. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/07/remitansi-pekerja-migran-indonesia-terbesar-berasal-dari-5-negara

Bachtiar, P. P. (2011). Migration outflow and remittance patterns in Indonesia: National as well as subnational perspectives. *Philippine Journal of Development*, *37*(1&2), 1–29.

Badan Pusat Statistik. (2019). Proporsi volume remitansi (dalam US dollars) terhadap total PDB 2017–2019. Diakses dari https://www.bps.go.id/indicator/13/1258/1/proporsi-volume-remitansi-dalam-us-dollars-terhadap-total-pdb.html_

BBC News Indonesia. (2019). Diakses dari Negara- negara mana saja yang paling banyak menampung imigran? https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47614008

BNP2TKI. (2013). Data penempatan dan perlindungan TKI. Diakses dari: http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks

Ford, M. (2001). Indonesian women as export commodity: notes from Tanjung Pinang, *Labour Management in Development Journal, 2*(5): 2–9.

Kementerian Perdagangan. (2017). Analisis peningkatan Intra ASEAN dalam rangka peningkatan ekspor nasional. Diakses dari http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Peningkatan_Intra_ASEAN_dalam_Rangka_Peningkatan_Ekspor_Nasional.pdf

Kurniawan, H. (2017, Agustus 15). Mengenal program desa migran produktif. *Merdeka.com*. https://www.merdeka.com/uang/mengenal-program-desa-migran-produktif.html

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Migration Policy Institute. (2019). Top 25 destinations of international migrants. https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/top-25-destinations-international-migrants?width=1000&height=850&iframe=true

Missbach, A. & Palmer, W. (2018). Indonesia: A country grappling with migrant protection at home and abroad. *Migration Policy Institute*. https://www.migrationpolicy.org/article/indonesia-country-grappling-migrant-protection-home-and-abroad

OECD Development Centre. (2020). Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020. https://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2020_PRELIMINARY_VERSION_FOR_WEB.pdf

Organisasi Perburuhan Internasional. (2004). Bekerja dan tinggal di luar negeri. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123267.pdf

Pemerintah minta WNI tunda perjalanan ke Hong Kong. (2019). *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190815115216-106-421558/pemerintah-minta-wni-tunda-perjalanan-ke-hong-kong

Romdiati, H. (2015). Globalisasi migrasi dan peran diaspora: Suatu kajian pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *10*(2), 89–100.

The World Bank. (2017). *Net migration: Indonesia*. Diakses dari https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?locations=ID

UN Migration. (2020). *World migration report*. Switzerland: International Organization for Migration.

United Nations. (2020). *International migration: A force for equality, under the right conditions* (UNDESA world social report). Diakses dari https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html

Van Hear., N., Bakewell, O., & Long, K. (2012). *Drivers of migration* (Research Program Consortium, Working paper I). Falmer, Brighton: University of Sussex.

Woetzel, J., Madgavkar, A., Rifai, K., Mattern, K., Bughin, J., Manyika, J., Elmasry, T., Di Lodovico, A., & Hasyagar A. (2016). *People on the move: Global migration's impact and opportunity*. New York: McKinsey Global Institute.

World Development Report. (2005). *Migration and inequality*. London: Development Research Center on Migration, Globalisation and Poverty.

Zhu, Z. (2007). Two diasporas: Overseas Chinese and non-resident Indians in their homelands' political economy. *Journal of Chinese Political Science*, *12*, 281–296.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XIII

Menciptakan Pekerjaan yang Layak

Riandy Laksono

A. PENDAHULUAN

Salah satu target di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Secara spesifik, SDGs tujuan kedelapan poin lima menyatakan bahwa di tahun 2030 diharapkan tercipta pekerjaan produktif dan layak, utamanya dalam bentuk pekerjaan penuh (*full employment*) bagi seluruh kalangan, baik pria, wanita, maupun penyandang disabilitas, serta kesetaraan upah bagi level pekerjaan yang sama (United Nations, t.t.). Hal yang penting untuk dicermati di sini adalah SDGs tidak hanya tentang mengurangi pengangguran dan menciptakan pekerjaan, tetapi juga memastikan pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan yang layak (*decent work*) bagi seluruh golongan masyarakat. Meskipun tidak ada definisi baku mengenai standar pekerjaan layak, menurut Fields (2002), terminologi pekerjaan layak mencakup pekerjaan penuh waktu (*full employment*) serta dapat memberikan perlindungan sosial dan mengakui hak-hak pekerja. Jenis dan sektor lapangan kerja, lama waktu bekerja, stabilitas pendapatan, serta status pekerjaan (formal atau informal) adalah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

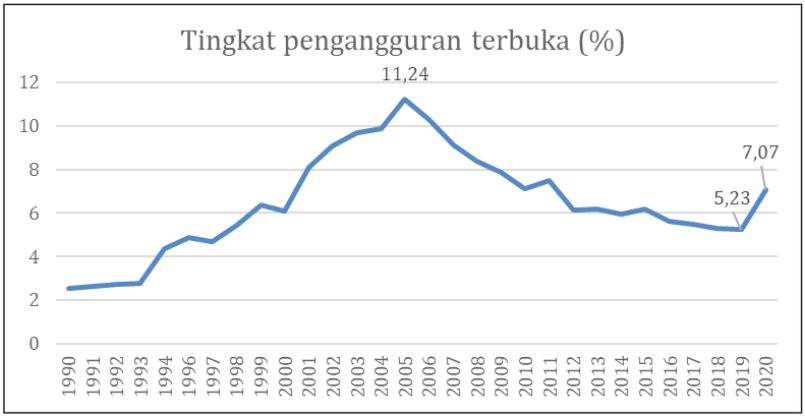

Sumber: BPS (2020c)

Gambar 13.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Periode 1990–2020

beberapa indikator yang sering dipakai untuk menganalisis tingkat pekerjaan layak di suatu negara (Badan Pusat Statistik, 2020a).

Secara umum, sebelum pandemi Covid-19, tingkat pengangguran di Indonesia relatif cukup rendah, yaitu 5,2% di tahun 2019 (BPS, 2020c). Angka ini merupakan tingkat pengangguran terendah yang pernah Indonesia catat sejak era reformasi (Gambar 13.1). Level pengangguran di Indonesia di tahun 2019 juga relatif setara dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan lebih baik, meskipun masih lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya (Gambar 13.2). Namun, resesi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi telah menambah lebih dari dua juta pengangguran baru di dalam perekonomian sehingga tingkat pengangguran Indonesia tahun 2020 meningkat tajam menjadi 7% (BPS, 2020c). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengangguran di Indonesia sudah relatif rendah, namun tantangan saat ini menjadi lebih berat karena pengangguran pun juga turut meningkat seiring siklus bisnis yang sedang mengalami penurunan.

Walaupun pada waktu normal tingkat pengangguran sudah relatif rendah, kelayakan pekerjaan masih menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia. Mayoritas pekerja Indonesia adalah pekerja

Buku ini tidak diperjualbelikan.

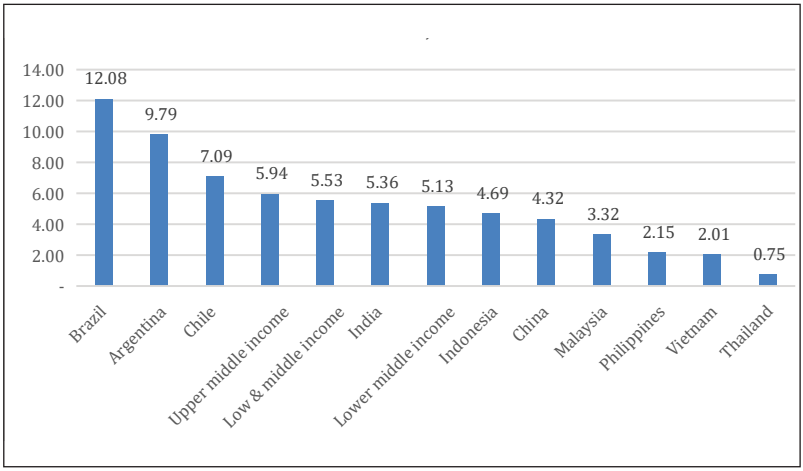

Sumber: World Bank (2020)

Gambar 13.2 Tingkat Pengangguran Negara Berkembang

informal, termasuk mereka yang bekerja di sektor nonpertanian. Di tahun 2020, hampir setengah pekerja di sektor nonpertanian adalah pekerja informal, sedangkan di sektor pertanian jumlahnya mencapai lebih dari 80% (BPS, 2020c). Jumlah setengah penganggur di Indonesia juga masih cukup besar, di mana sekitar 10% dari mereka yang memiliki pekerjaan masih bekerja di bawah jam kerja normal. Besarnya aktivitas informal ini merupakan tantangan yang umum bagi mayoritas negara berkembang (Ulyssea, 2020), namun tingkat informalitas di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya (Gambar 13.3) dan sifatnya yang cenderung persisten. Ketimpangan pendapatan antara pria dan wanita juga masih cukup lebar, di mana wanita secara rata-rata menerima upah 13% lebih rendah dari pria (BPS, 2020c). Beberapa bukti tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketersediaan pekerjaan yang layak masih cukup rendah di Indonesia sehingga tantangan kebijakan bukan hanya terkait penyediaan pekerjaan yang masif, tetapi juga penciptaan pekerjaan yang layak.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

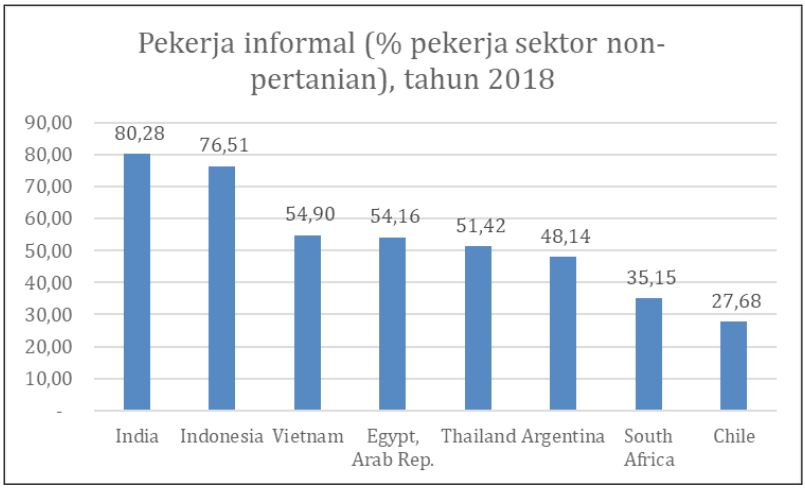

Sumber: World Bank (2020)

Gambar 13.3 Tingkat Pekerja Informal Beberapa Negara Berkembang

Tulisan ini berpendapat bahwa rendahnya ketersediaan pekerjaan layak di pasar tenaga kerja Indonesia bersumber dari produktivitas perekonomian yang rendah, transformasi struktural yang tidak sempurna, serta agenda pembangunan yang bias kota dan gender. Untuk menciptakan pekerjaan yang layak sesuai dengan tujuan SDGs, diperlukan kombinasi yang seimbang antara kebijakan makro jangka pendek untuk menstabilkan siklus bisnis, kebijakan transformasi struktural jangka panjang, serta kebijakan ketenagakerjaan yang lebih afirmatif dan mendorong partisipasi pekerja wanita di dalam perekonomian utamanya melalui subsidi pemerintah bukan menambah regulasi untuk sektor swasta.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pekerjaan informal, sebagai indikator utama dari pekerjaan yang kurang layak, terjadi bukan hanya karena mahalnya biaya administrasi untuk menjadi formal. Rothenberg dkk. (2016) berpendapat bahwa informalitas di Indonesia merupakan bagian dari dualisme perekonomian (*dual economy*) yang kerap menjangkiti negara-negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berkembang dan strategi umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mungkin akan lebih efektif untuk mendorong formalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penciptaan kerja yang layak, kita perlu pergi lebih jauh dari sekadar kebijakan administratif, dan menuju pemahaman yang lebih baik terhadap isu struktural.

Penciptaan pekerjaan yang layak perlu dilihat dari perspektif struktural dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sangat krusial untuk memfasilitasi tumbuhnya pekerjaan yang layak paling tidak karena dua hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan karena tidak akan ada pekerjaan yang layak tanpa pekerjaan itu sendiri (Fields, 2002). Kedua, mungkin yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi mengandung proses yang kondusif terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuhkan peningkatan produktivitas. McMillan dkk. (2014) menekankan bahwa peningkatan produktivitas ini dapat dicapai melalui dua cara, yaitu melalui pertumbuhan produktivitas pekerja di sektor tertentu dan perpindahan pekerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi atau yang biasa disebut transformasi struktural. Saat produktivitas meningkat, pendapatan pekerja juga akan terdorong naik.

Di Indonesia, produktivitas pekerja nasional relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia, relatif terhadap produktivitas Amerika Serikat (AS), secara kumulatif hanya bertumbuh 35% lebih besar dari levelnya di tahun 1980 (Gambar 13.4). Hal ini cukup jauh dengan negara berkembang baru di kawasan, yaitu Vietnam, di mana produktivitasnya (secara relatif terhadap AS) tumbuh 140% secara kumulatif sejak 1980. Pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia termasuk salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara, hanya lebih baik dari Filipina. Produktivitas tumbuh lambat seiring dengan kelayakan pekerjaan dan kesejahteraan pekerjanya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun demikian, produktivitas tenaga kerja yang rendah ini bukan hanya refleksi dari lemahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. de Vries dan Erumban (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja bergantung dari pertumbuhan tiga faktor utama, yaitu pendalaman modal (*capital deepening*), perbaikan kualitas tenaga kerja, serta perkembangan teknologi (yang ditunjukkan oleh indikator *total factor productivity* (TFP)). Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendorong pertumbuhan produktivitas pekerja, kebijakan perlu diarahkan tidak sekadar pada perbaikan kualitas pekerjanya itu sendiri, tetapi juga pada peningkatan akumulasi modal dan inovasi teknologi. Hal ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), di mana pertumbuhan akumulasi kapital dan inovasi teknologi secara bersama-sama menentukan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional secara jangka panjang (Romer, 2012).

Di sisi lain, transformasi struktural di Indonesia berjalan lambat. Safira dkk. (2014) menggunakan metode yang digunakan oleh

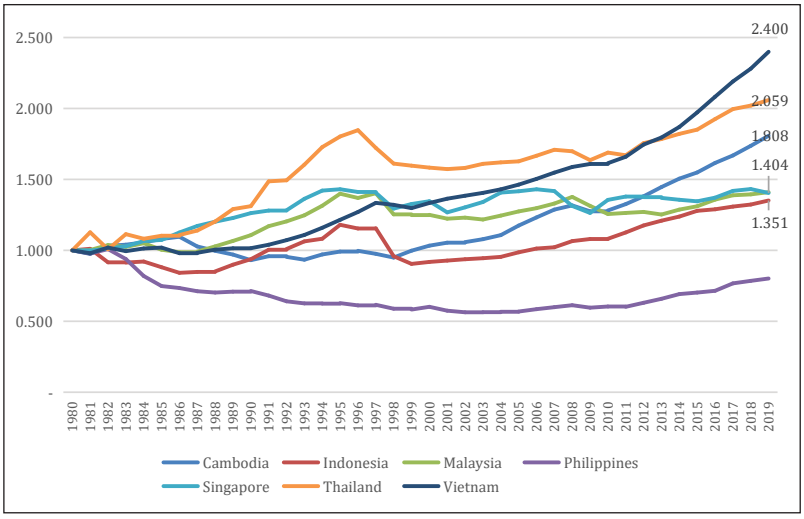

Sumber: de Vries dan Erumban (2017)

Gambar 13.4 Pertumbuhan Produktivitas Pekerja Negara ASEAN Periode 1980–2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.

McMillan and Rodrik (2011) dan menemukan bahwa kecepatan perekonomian Indonesia dalam mengalokasikan pekerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi memperlihatkan kecenderungan yang melambat. Pada periode 1971–2000, komponen transformasi struktural menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan produktivitas tenaga kerja nasional secara rata-rata, yaitu antara 1,3%–1,4% per tahun. Namun, komponen transformasi struktural hanya bertumbuh 0,96% per tahun dan menyumbang kurang dari sepertiga pertumbuhan produktivitas tenaga kerja nasional rata-rata pada periode 2001–2011.

Transformasi struktural tidak hanya berjalan lambat, tetapi juga bergerak ke arah yang salah. Dari tahun 1971 hingga 2012, perekonomian Indonesia bertransformasi dari perekonomian yang didominasi oleh sektor tradisional, yaitu pertanian, menjadi perekonomian yang lebih mengandalkan sektor modern, seperti sektor industri pengolahan atau manufaktur dan jasa (Gambar 13.5). Namun demikian, transformasi yang cukup dominan bukan mengarah ke sektor dengan produktivitas tinggi, seperti industri pengolahan atau jasa keuangan dan komunikasi, tetapi lebih ke sektor jasa berproduktivitas rendah, seperti jasa perdagangan (Gambar 13.6).

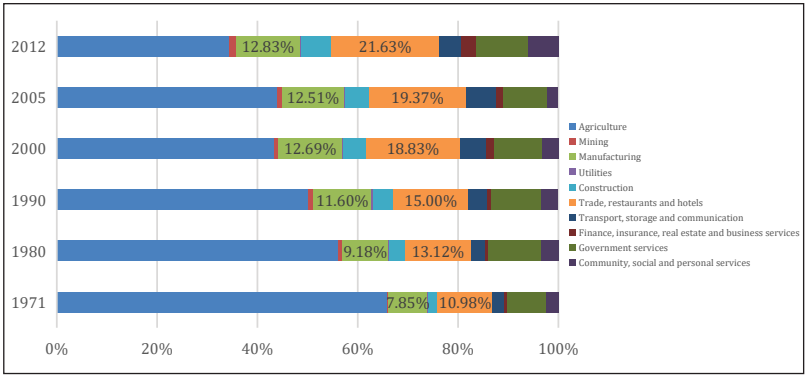

Sumber: Timmer dkk. (2015)

Gambar 13.5 Pola Transformasi Perekonomian Indonesia Jangka Panjang Periode 1971–2012

Buku ini tidak diperjualbelikan.

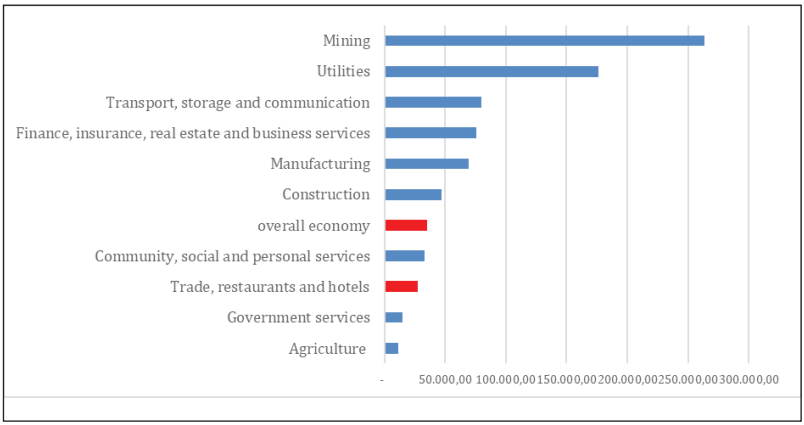

Sumber: Timmer dkk. (2015)

Gambar 13.6 Produktivitas Rata-Rata Per Sektor Tahun 2012

Pada tahun 2020, pekerja Indonesia mayoritas berada di sektor berproduktivitas rendah, seperti sektor pertanian (30%) dan jasa perdagangan (26%) (BPS, 2020b). Karakteristik sektor jasa perdagangan tersebut, selain memiliki produktivitas yang rendah, didominasi oleh pekerjaan berkualitas rendah karena hampir 70% dari pekerja di sektor jasa perdagangan adalah pekerja informal (Gambar 13.8). Hal ini sangat berbeda dengan sektor berproduktivitas tinggi, seperti industri pengolahan dan jasa keuangan, dengan mayoritas pekerja adalah pekerja formal yang jika dilihat dari sisi perlindungan sosial dan upah memiliki kelayakan lebih baik. Beberapa bukti tersebut mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Indonesia saat ini belum memiliki kemampuan yang baik dalam mengalokasikan pekerja ke sektor yang lebih produktif yang cenderung memiliki tingkat kelayakan pekerjaan lebih baik.

Beberapa studi menemukan bahwa kecepatan dan arah transformasi struktural dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, transformasi struktural yang melambat ini erat kaitannya dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang terjadi di negara berkembang dewasa ini. Rodrik (2016) menemukan bahwa banyak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

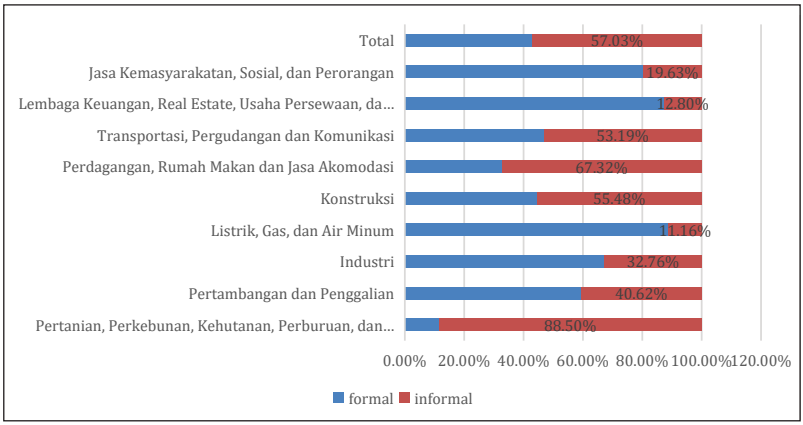

Sumber: BPS (2020c)

Gambar 13.7 Sektor Lapangan Kerja dan Status Pekerjaan Tahun 2017

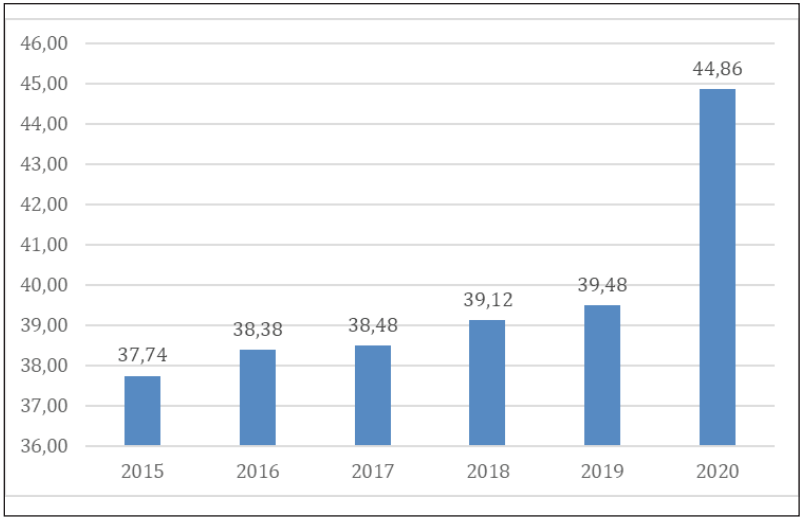

Sumber: BPS (2020c)

Gambar 13.8 Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Nonpertanian di Perkotaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negara berkembang, kecuali beberapa negara berkembang di Asia, bertransformasi menuju sektor jasa tanpa mengalami proses industrialisasi yang sempurna. Lebih lanjut, McMillan dkk. (2014) berpendapat bahwa persaingan impor yang semakin intensif di satu sisi telah meningkatkan produktivitas sektor manufaktur, namun perusahaan dan pekerja yang paling tidak produktif akan keluar dari industri tersebut. Menggunakan kasus negara Amerika Latin, studi tersebut menemukan dugaan awal bahwa pekerja yang tergeser akibat persaingan impor tersebut kemungkinan berpindah ke sektor-sektor yang lebih rendah produktivitasnya, seperti sektor *non-tradable*, yaitu jasa retail dan perdagangan atau pekerjaan informal lainnya. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Dix-Carneiro dan Kovak (2019) juga menemukan bahwa liberalisasi tarif impor di Brazil mendorong pekerja berpindah ke sektor jasa produktivitas rendah dan membawa kepada peningkatan pekerja sektor informal, di mana kedua jenis pekerjaan tersebut memiliki tingkat kelayakan pekerjaan yang relatif rendah.

Belum ada bukti kuat bahwa deindustrialisasi prematur ini juga terjadi secara kuat di Indonesia, namun ada indikasi awal bahwa *share* pekerja Indonesia yang bekerja di sektor manufaktur mengalami stagnasi (Grabowski & Self, 2020). Beberapa studi lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang cenderung berorientasi ke dalam negeri (*inward-looking policy*), khususnya melalui proteksi impor cenderung tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Proteksi perdagangan sektor pertanian, khususnya beras, berhasil menaikkan harga beras di atas harga internasional, namun gagal meningkatkan kesejahteraan rata-rata pekerja (Siregar, 2020) dan justru menghambat transformasi ke sektor manufaktur berproduktivitas tinggi dikarenakan tingginya biaya unit tenaga kerja (*unit labor cost*) yang didorong oleh peningkatan harga pangan yang semu (Grabowski & Self, 2020). Proteksi impor di sektor manufaktur juga dapat berbahaya karena banyak perusahaan industri pengolahan mengandalkan bahan baku dan barang setengah jadi (*intermediate goods*) yang berasal dari impor. Secara rata-rata, hampir seperempat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahan baku yang digunakan oleh perusahaan industri pengolahan berasal dari impor. Perusahaan yang bergerak di sektor berorientasi ekspor seperti pakaian jadi dan elektronik bahkan mengandalkan sekitar 40%–65% bahan baku dan penolongnya dari sumber impor (BPS, 2015). Mengingat perusahaan yang berpartisipasi di pasar internasional, baik sebagai eksportir maupun importir, cenderung membayar pekerja dengan gaji lebih tinggi (Javorcik dkk., 2012), kebijakan proteksi perdagangan kemungkinan akan kontraproduktif terhadap upaya penciptaan pekerjaan yang layak.

Faktor utama lainnya yang menentukan kecepatan transformasi struktural adalah tingkat fleksibilitas pasar tenaga kerja. Regulasi ketenagakerjaan yang kaku, khususnya karena tingginya biaya pemecatan, justru akan menghambat perusahaan untuk menyerap pekerjaan sehingga menghambat proses transisi ke sektor dan/atau pekerjaan yang lebih produktif dan modern (McMillan dkk., 2014). Indonesia memiliki regulasi ketenagakerjaan yang cukup kaku. Narjoko dan Putra (2015) menemukan bahwa regulasi ketenagakerjaan Indonesia berubah secara drastis dari sangat fleksibel sebelum krisis finansial Asia 1998 menjadi sangat kaku setelah krisis tersebut. Lebih lanjut, mereka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tenaga kerja yang kaku tersebut berkontribusi terhadap turunnya sensitivitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada periode 1996–2006. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk memastikan regulasi tenaga kerja yang fleksibel tidak hanya agar mendorong penciptaan lapangan kerja yang semakin meningkat, tetapi juga untuk melancarkan pergerakan pekerja dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang berproduktivitas tinggi sehingga kelayakan pekerjaan pun meningkat.

Selain faktor struktural, berbagai pekerjaan yang kurang layak juga dapat terakumulasi sebagai akibat ketimpangan kebijakan yang terlalu berfokus kepada perkotaan. Model Harris-Todaro (1970) dan Fields (1975) (Kucera & Roncolato (2008)) memprediksi bahwa pembangunan ekonomi dan ekspansi sektor modern di perkotaan sebagai konsekuensinya akan melahirkan migrasi pekerja dari desa ke kota yang utamanya didorong oleh probabilitas mendapatkan pekerjaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang lebih layak di perkotaan. Migrasi desa-kota ini jumlahnya lebih besar daripada jumlah pekerjaan yang tersedia di perkotaan karena perbedaan gaji kota dan desa yang cukup besar yang didorong oleh peraturan upah minimum di perkotaan.

Pekerja yang bermigrasi dari desa ke kota tersebut tidak semuanya dapat menemukan pekerjaan di sektor modern di perkotaan dan akhirnya bekerja di sektor informal dan/atau menganggur. Berdasarkan Gambar 13.8 tingkat pekerjaan informal nonpertanian di perkotaan menunjukkan peningkatan sepanjang 2015–2019, khususnya meningkat cukup tajam di 2020 di saat masa pandemi. Pembangunan yang cenderung terlalu fokus ke perkotaan hanya akan meningkatkan migrasi desa-kota yang pada gilirannya justru akan menambah permasalahan pengangguran dan informalitas.

Tidak hanya kelayakan pekerjaan secara umum yang masih menjadi isu besar bagi Indonesia, kesenjangan pekerja wanita dan pria juga masih besar. Kelayakan pekerjaan erat kaitannya dengan kesetaraan akses terhadap pekerjaan dan tingkat pendapatan bagi seluruh kalangan. Dalam hal ini, wanita berada di posisi yang lebih buruk dari pria. Di tahun 2020, secara rata-rata pekerja wanita Indonesia menerima pendapatan 23% lebih rendah daripada rata-rata pekerja pria (International Labour Organization, 2020). Schaner dan Das (2016) menemukan bahwa walau kesenjangan upah antara wanita dan pria Indonesia cenderung menurun di periode 1990–2011 yang besar kemungkinan kesenjangan tersebut didorong faktor-faktor diskriminatif di luar karakteristik pekerja, seperti level pendidikan. Tingkat partisipasi kerja wanita juga jauh lebih rendah dibandingkan pria. Hanya separuh dari penduduk wanita usia kerja yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja pria lebih dari 80%.

Terlepas dari faktor budaya, hambatan terbesar wanita dalam berpartisipasi di pasar tenaga kerja adalah keperluan untuk membesarkan anak (*child rearing*). Hal ini disebabkan wanita masih dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu antara membesarkan anak dan berpartisipasi di pasar tenaga kerja (Posadas & Vidal-Fernandez, 2013). Kebijakan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapat membuat *child rearing* berjalan tanpa mengorbankan partisipasi tenaga kerja wanita diperlukan untuk mendorong kesetaraan kesempatan lebih baik terhadap pekerjaan yang layak bagi wanita.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk menciptakan pekerjaan yang layak, sebagai bagian dari proses mencapai tujuan SDGs khususnya tujuan kedelapan poin lima, diperlukan kombinasi antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan siklus bisnis akan tetap krusial bagi Indonesia, baik selama masa pandemi maupun waktu normal. Pada waktu normal, visi kebijakan makro perlu dijaga agar terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas karena pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja dan tidak ada pekerjaan yang layak tanpa lapangan pekerjaan itu sendiri. Di lain sisi, pada masa pemulihan pascapandemi, fokus kebijakan makro, khususnya fiskal, perlu beralih secara gradual dari penjagaan terhadap daya beli pekerja ke penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini, program bantuan langsung, seperti Subsidi Bantuan Upah (SBU), dapat dimodifikasi menuju subsidi bagi perusahaan agar dapat menerima lebih banyak pekerja. Skema subsidi ini diberikan sebagai insentif bagi perusahaan yang bersedia mempekerjakan karyawan dengan persyaratan tertentu atau sering disebut juga dengan *employment subsidy*. Skema ini juga diadopsi oleh Australia dengan program JobMaker sebagai kelanjutan dari program JobKeeper yang saat itu diimplementasikan, khususnya selama masa *lockdown* (Davidson, 2020). Skema *employment subsidy* dapat diteruskan setelah masa pandemi untuk mengurangi tingkat pengangguran atau setengah pengangguran jika diperlukan.

Penciptaan pekerjaan yang layak tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kebijakan administratif yang bersifat *quick win,* seperti peningkatan kemudahan berusaha, cenderung tidak efektif untuk mendorong penciptaan pekerjaan formal dan mengurangi sektor informal yang memiliki kelayakan pekerjaan yang rendah (Rothenberg dkk., 2016; Ulyssea, 2020). Karena formalisasi sektor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

informal melibatkan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan transformasi struktural secara jangka panjang, kebijakan yang saat ini dapat dipertimbangkan pemerintah untuk memastikan kelayakan pekerjaan adalah dengan skema jaminan pendapatan layak (*Livable Income Guarantee*, LIG). Program LIG ini menjamin seluruh pekerja di sektor mana pun untuk mendapatkan level minimum upah yang memenuhi standar hidup layak. Tidak seperti upah minimum, sumber peningkatan upah dibiayai oleh anggaran pemerintah sehingga lebih tidak distortif bagi pertumbuhan dunia usaha. Seperti jaminan pendapatan universal (*Universal Basic Income*, UBI), LIG juga bersifat universal, tetapi kondisional terhadap partisipasi di pasar tenaga kerja dan/atau kegiatan sosial dalam bentuk apa pun (Quiggin, 2021).

Mengandalkan subsidi untuk memastikan ketersediaan pekerjaan layak bukanlah strategi yang berkelanjutan mengingat anggaran pemerintah yang terbatas akibat tingginya informalitas itu sendiri sehingga basis pajak (*tax base*) kita cukup rendah (Rocha dkk., 2018). Peningkatan pekerjaan berkelanjutan hanya dapat bersumber dari peningkatan produktivitas perekonomian secara umum dalam jangka panjang. Peningkatan produktivitas nasional dapat bersumber dari peningkatan produktivitas sektoral dan transformasi struktural dari sektor pekerjaan berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi (McMillan dkk., 2014). Untuk meningkatkan produktivitas sektoral (*within sector productivity*), penting untuk mengubah narasi bahwa lemahnya produktivitas pekerja di sektor tertentu tersebut merupakan isu kualitas tenaga kerja semata. Faktanya, produktivitas pekerja tidak terlepas dari komponen inovasi teknologi dan pendalaman modal atau kapital. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui kebijakan insentif pelatihan dan program *reskilling* melalui kartu prakerja perlu dikombinasikan dengan strategi inovasi nasional dan pendalaman modal yang solid.

Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan inovasi teknologi serupa dengan skema insentif bagi perusahaan yang memberikan program

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pelatihan kepada karyawannya yang saat ini sudah berjalan. Di lain sisi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang menghambat perusahaan untuk menambah permesinan dan teknologi. Sebagai contoh, kebijakan perdagangan, seperti pembatasan impor barang modal tidak baru, berpotensi menghambat pendalaman kapital oleh perusahaan. Peningkatan fleksibilitas regulasi pasar tenaga kerja oleh pemerintah melalui undang-undang cipta kerja secara substansi adalah langkah ke arah yang tepat. Namun, peraturan turunannya perlu untuk dibuat dan dibahas secara komprehensif, khususnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan pekerja, seperti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kemampuan perekonomian dalam melakukan transformasi struktural adalah pembeda utama antara negara maju dan tertinggal (McMillan dkk., 2014). Pemerintah Indonesia perlu berfokus terhadap pembangunan sektor jasa modern dan berproduktivitas tinggi, seperti keuangan, serta informasi dan jasa profesional dan tetap memperkuat basis sektor manufaktur. Kebijakan jangka pendek untuk memproteksi impor tidak efektif untuk mendorong pembangunan sektor tersebut secara berkelanjutan, terlebih lagi proteksi perdagangan tidak pernah memberikan jaminan bahwa sektor tersebut akan memiliki daya saing yang baik dalam waktu tertentu. Di era rantai pasok global atau fragmentasi produksi lintas negara, Indonesia tidak perlu membangun seluruh industri tersebut di dalam negeri dan dapat lebih mudah untuk melakukan industrialisasi atau pembangunan sektor jasa dengan berpartisipasi ke dalam rantai pasok global (*global value chain*) dengan berfokus kepada tugas tertentu (Baldwin, 2011). Walaupun ada risiko bahwa keterbukaan dapat berakibat buruk bagi sebagian pekerja, namun bukti menunjukkan bahwa kisah sukses negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tiongkok, mayoritas berkat peran dari perdagangan dan partisipasi di dalam rantai pasok global (Ravallion, 2011).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kesetaraan pembangunan wilayah desa-kota dan gender merupakan salah satu dimensi yang menentukan akses terhadap pekerjaan yang layak. Pembangunan yang bias kota akan menimbulkan ekses kepada informalitas, khususnya di sektor perkotaan. Dalam hal ini, strategi pembangunan yang terintegrasi dan seimbang antara desa dan kota perlu untuk menjadi agenda utama pemerintah. Agar migrasi desa-kota tidak melahirkan setengah penganggur dan informalitas di perkotaan, pemerintah perlu berfokus untuk meningkatkan kesempatan pekerjaan di pedesaan. Kebijakan pembangunan infrastruktur desa yang saat ini telah berjalan perlu untuk terus ditingkatkan, tidak hanya infrastruktur fisik, seperti jalan dan irigasi, tetapi juga *soft infrastructure*, seperti sekolah dan rumah sakit. Modernisasi sektor pertanian dan diversifikasi ke *non-farm sector* di pedesaan juga perlu mendapat perhatian karena sektor tersebut dapat menjadi penyangga di luar masa panen atau ketika panen pertanian menghasilkan pendapatan yang kurang menguntungkan.

Kesetaraan akses mendapat pekerjaan layak, khususnya dari perspektif gender, akan sulit tercapai jika pemerintah tidak mengatasi hambatan utama yang menghalangi partisipasi wanita di dalam pasar tenaga kerja. pemerintah perlu mempertimbangkan akses dan subsidi *childcare* bagi rumah tangga yang berkeluarga dan telah memiliki anak yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, Pemerintah Australia memberikan subsidi hingga 85% bagi keluarga yang memiliki anak berumur prasekolah dengan batas maksimum durasi waktu tertentu setiap dua minggu. Dengan akses terhadap *childcare* yang terjangkau, wanita tidak lagi dihadapkan pada pilihan berat, yaitu membesarkan anak dan bekerja karena dua hal tersebut dapat berjalan seiring. Banyak studi telah menunjukkan bahwa subsidi dan akses terhadap *childcare* berhasil membawa peningkatan terhadap partisipasi wanita di pasar tenaga kerja (Berger & Black, 1992; Bick, 2016; Viitanen, 2005).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik industri besar dan sedang*.

_____. (2020a). *Indikator pasar tenaga kerja Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2020/12/07/3f3f21ffa24ef6adc7ef2ee8/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-agustus-2020.html

_____. (2020b). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/307a288d678f91b9be362021/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2020.html

_____. (2020c). Statistik tenaga kerja. Diakses dari https://www.bps.go.id/indicator/6/529/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kegiatan.html

Baldwin, R. (2011). *Trade and industrialisation after globalisation's 2nd unbundling: How Building and joining a supply chain are different and why it matters* (National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 17716). doi:10.3386/w17716

Berger, M. C. & Black, D. A. (1992). Child care subsidies, quality of care, and the labor supply of low-income, single mothers. *The review of economics and statistics*, *74*(4), 635. doi:10.2307/2109377

Bick, A. (2016). The quantitative role of child care for female labor force participation and fertility. *Journal of the European Economic Association*, *14*(3), 639–668. doi:10.1111/jeea.12143

Davidson, P. (2020, Oktober 16). In defence of JobMaker, the replacement for JobKeeper: Not perfect, but much to like. *The Conversation*. Diakses dari https://theconversation.com/in-defence-of-jobmaker-the-replacement-for-jobkeeper-not-perfect-but-much-to-like-147898

De Vries, K., & Erumban, A. A. (2017). Total economy database: A detailed guide to its sources and methods. *The Conference Board*. https://www.conference-board.org/data/economydatabase/total-economy-database-productivity

Dix-Carneiro, R. & Kovak, B. K. (2019). Margins of labor market adjustment to trade. *Journal of International Economics*, *117*, 125–142.

Fields, G. S. (2002). Towards a policy framework for decent work. *International Labour Review*, *141*, 161–174.

Grabowski, R. & Self, S. (2020). Industrialization and deindustrialization in Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, *7*(1), 95–111. doi:10.1002/app5.295

Buku ini tidak diperjualbelikan.

International Labour Organization. (2020). *Statistics: Gender pay gaps in Indonesia*. Diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_755543.pdf

Javorcik, B., Fitriani, F., Iacovone, L., Varela, G., & Duggan, V. (2012). *Productivity performance in Indonesia's manufacturing sector*. Washington, D.C.: World Bank.

Kucera, D. & Roncolato, L. (2008). Informal employment: Two contested policy issues. *International Labour Review*, *147*(4), 321–348. doi:-10.1111/j.1564-913x.2008.00039.x

McMillan, M. & Rodrik, D. (2011). *Globalization, structural change and productivity growth* (National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 17143). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w17143

McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, Í. (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. *World Development*, *63*, 11–32. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012

Narjoko, D. & Putra, C. T. (2015). Industrialization, globalization, and labor market regime in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, *20*(1), 57–76. doi:10.1080/13547860.2014.974321

Posadas, J. & Vidal-Fernandez, M. (2013). Grandparents' childcare and female labor force participation. *IZA Journal of Labor Policy*, *2*(1), 14. doi:10.1186/2193-9004-2-14

Quiggin, J. (2021). The economy can't guarantee a job. It can guarantee a liveable income for other work. *The Conversation*. https://theconversation.com/the-economy-cant-guarantee-a-job-it-can-guarantee-a-liveable-income-for-other-work-153444

Ravallion, M. (2011). A comparative perspective on poverty reduction in Brazil, China, and India. *The World Bank Research Observer*, *26*(1), 71–104. http://www.jstor.org/stable/41261423

Rocha, R., Ulyssea, G., & Rachter, L. (2018). Do lower taxes reduce informality? Evidence from Brazil. *Journal of Development Economics*, *134*, 28–49. doi:10.1016/j.jdeveco.2018.04.003

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of economic growth*, *21*(1), 1–33.

Romer, D. (2012). *Advanced macroeconomics* (Edisi keempat.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*, *80*, 96–113. doi:10.1016/j.worlddev.2015.11.005

Safira, M., Laksono, R., Anandhika, M. R., Simamora, S. D., & Rahayu, N. (2014). *Labor movement from low to high productivity sectors: evidence from Indonesia's provincial data* (Apindo Policy Series Vol. P.001/DPN-EUKAJ-II/2014). http://apindo.or.id/id/publikasi/makalah-penelitian/labour-movement-from-low-to-high-productivity-sectors-evidence-from-indonesias-provincial-data

Schaner, S. & Das, S. (2016). *Female labor participation in Asia: Indonesia country study* (*DB Economics working paper series No. 474*). Filipina: Asian Development Bank. Diakses dari https://www.adb.org/sites/default/files/publication/180251/ewp-474.pdf

Siregar, R. N. (2020). *Global prices , trade protection , and internal migration: Evidence from Indonesia* (Working paper, Department of Economics, University of California, Davis). California: University of California, Davis.

Timmer, M. P., de Vries, G., de Vries, K., Weiss, J., & Tribe, M. (2015). Routledge handbook of industry and development. In J. Weiss & M. Tribe (Eds.), *Routledge chapter patterns of structural change in developing countries*. London: Routledge.

Ulyssea, G. (2020). Informality: Causes and consequences for development. *Annual Review of Economics*, *12*(1), 525–546. doi:10.1146/annurev-economics-082119-121914

United Nations. (t.t.). *Goals8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all*. https://sdgs.un.org/goals/goal8

Viitanen, T. K. (2005). Cost of childcare and female employment in the UK. *Labour*, *19*(s1), 149–170. doi:10.1111/j.1467-9914.2005.00325.x

World Bank. (2020). *World development indicators*. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XIV

Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Berkelanjutan: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Pengangguran Usia Muda

Krisna Gupta & Malik Cahyadin

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kunci menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di jangka panjang (Hanushek dkk., 2017; Hanushek & Woessmann, 2008). Membangun angkatan kerja yang tangguh dan berdaya saing harus dimulai sejak usia sekolah. Pendidikan dasar adalah faktor yang sangat penting karena pendidikan dasar mengajarkan hal-hal yang sangat diperlukan untuk mempelajari keahlian yang nantinya akan diperlukan di dunia kerja dan di pendidikan yang lebih terspesialisasi. Di samping itu, pendidikan dasar juga mengajarkan pondasi tatanan sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat, yang akan memudahkan koordinasi dan kerja sama.

Jumlah anak yang mengenyam pendidikan dasar di Indonesia melesat dengan cepat pada pertengahan 1980-an. Saat ini, meski sedikit tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN, proporsi anak yang menjalani pendidikan dasar (pendidikan dasar dua belas tahun) sudah sangat tinggi (Gambar 14.1). Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja yang sangat baik dalam meningkatkan *school enrollment*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan memastikan sebagian besar warganya memiliki kemampuan dasar untuk bekerja, belajar lebih lanjut, dan bersosialisasi. Beberapa program, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan sangat menolong dalam meningkatkan jumlah siswa.

Tantangan saat ini adalah soal kualitas. Indonesia telah meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan hingga 20% dari total APBN sejak tahun 2014. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai beberapa program, seperti program sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru. Namun, kualitas program yang saat ini dilakukan masih belum cukup untuk meningkatkan kualitas pengajaran (Kurniawati dkk., 2019) karena absensi dan pemerataan jumlah guru masih merupakan masalah serius di Indonesia (McKenzie dkk., 2014). Jika hal ini dibiarkan, akan semakin sulit mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia yang akan semakin kompetitif ke depannya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah jumlah pengangguran usia muda (*youth unemployment*) berusia antara 15 sampai 24 tahun yang tidak sedang mengenyam pendidikan dan tidak bekerja. Gambar 14.2 menunjukkan proporsi pengangguran usia muda di Indonesia dan beberapa negara pembanding dari tahun 2010 sampai 2019. Panel

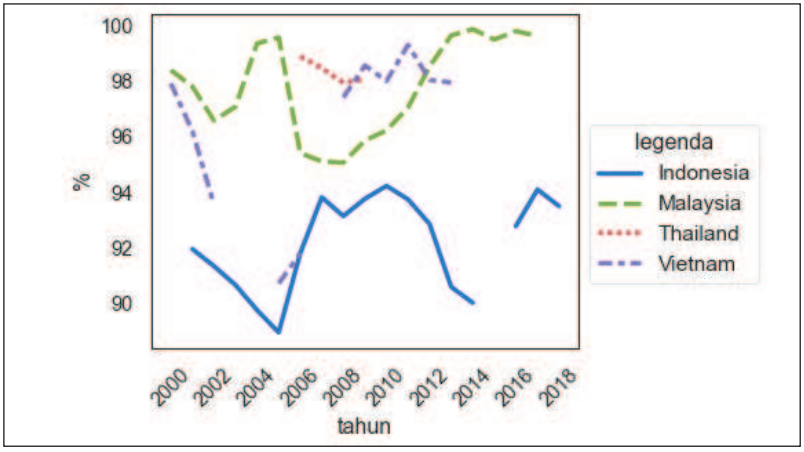

Sumber: The World Bank (2014)

Gambar 14.1 Proporsi Anak Bersekolah Dasar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebelah kiri adalah perempuan, sementara panel sebelah kanan adalah laki-laki.

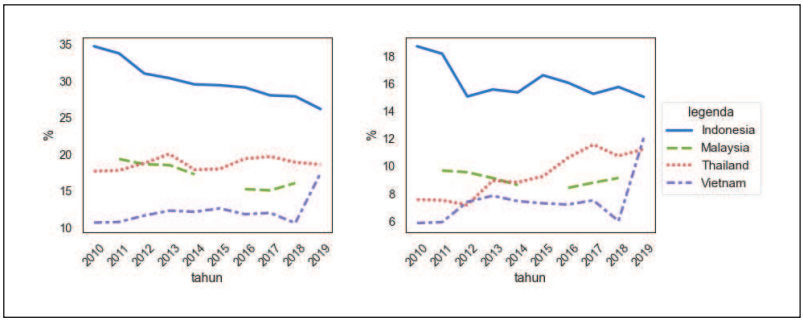

Sumber: The World Bank (2014)

Gambar 14.2 Proporsi Pengangguran Usia Muda

Indonesia memiliki proporsi pengangguran usia muda yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena pengangguran usia muda berpotensi kehilangan kesempatan yang diciptakan oleh sekolah maupun pengalaman kerja (Allen, 2016; The World Bank, 2014). Hal ini dapat disebabkan oleh aksesibilitas institusi pendidikan lanjut, atau kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan profil pengangguran usia muda Indonesia pada umumnya.

Perubahan dunia yang sangat cepat memaksa Indonesia untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini, hanya 20% produk ekspor-impor di pasar dunia adalah hasil industri padat karya (Manyika dkk., 2016). Teknologi seperti otomasi yang memerlukan keahlian tinggi dapat mengakibatkan pengangguran tanpa intervensi dan *reskilling* yang baik (Acemoglu & Restrepo, 2019; Dauth dkk., 2019). Bahkan, di tatanan sosial, teknologi yang mempercepat arus informasi dapat menjadi pedang bermata dua tanpa diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi secara independen dari masyarakat (Oktaviansyah & Rahman, 2020).

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan sumber daya manusia di Indonesia (Alifia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dkk., 2020; Dzulfikar, 2020). Belajar dari rumah memaksa setiap anak menggunakan fasilitas pribadi yang mengamplifikasi dampak ketimpangan. Tenaga kependidikan tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk memberikan materi dari jarak jauh sehingga kualitas pembelajaran akan sangat tergantung kualitas tenaga kependidikan. Covid-19 mengurangi kesempatan kerja secara signifikan sehingga pemuda berusia di atas lima belas tahun ke atas tidak punya pilihan untuk bekerja atau memulai usaha (International Labour Organization & Asian Development Bank [ILO-ADB], 2020). Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin sulit bagi para pemuda untuk mengejar ketertinggalan mereka di masa depan.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan adalah syarat mutlak untuk pertumbuhan produktivitas di jangka panjang. Progres pemerintah Indonesia yang baik telah berhasil menyekolahkan hampir 100% penduduknya, namun tantangan ke depan tidak semakin mudah. Kualitas pendidikan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Di samping itu, tingginya pengangguran usia muda berpotensi membatasi kapabilitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Melalui tulisan ini, kami mencoba mengelaborasi berbagai tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan. Kami membahas beberapa program pemerintah yang telah dilakukan dan mengelaborasi beberapa program yang dianjurkan oleh literatur.

B. DATANG KE SEKOLAH TIDAK SAMA DENGAN BELAJAR

Selama lima tahun terakhir, pendidikan di Indonesia diarahkan pada dua orientasi pendidikan nasional, meliputi perluasan, pemerataan, dan keadilan akses pendidikan, serta pencapaian mutu pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud], 2017). Orientasi ini berimplikasi terhadap upaya perbaikan beberapa indikator pendidikan nasional, yaitu kualitas guru, kualitas proses dan hasil pembelajaran, partisipasi aktif siswa, dan kualitas infrastruktur pen-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

didikan. Selain itu, kondisi geografis dan demografis Indonesia juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan pendidikan dalam merealisasikan orientasi pendidikan nasional.

Beberapa literatur telah menemukan kondisi riil akses layanan pendidikan dan mutu pendidikan nasional. Sebagai contoh, Suyanto (2012) mengidentifikasi penyebab anak rentan putus sekolah adalah faktor pihak sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan kebijakan yang cenderung ahistoris. Implikasinya adalah para anak yang berangkat ke sekolah tidak memahami eksistensi sekolah sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki masa depannya.

Di sisi lain, para guru sebagai tenaga pendidik yang profesional telah mendapatkan insentif dari pemerintah dalam bentuk sertifikasi profesi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005. Studi empiris tentang implikasi kebijakan sertifikasi guru telah menunjukkan bahwa alokasi sertifikasi guru dari pemerintah tidak dapat mendorong kualitas anak sekolah, tetapi lebih cenderung pada peningkatan kehidupan layak bagi para guru (Fahmi dkk., 2012). Artinya, insentif sertifikasi guru cenderung tidak sinkron (berdiri sendiri) dengan upaya peningkatan kualitas anak sekolah. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya merumuskan indikator sertifikasi guru yang terintegrasi dengan indikator kualitas anak sekolah.

Lebih lanjut, rumusan indikator kualitas anak sekolah, seperti kualitas proses pembelajaran dan partisipasi aktif anak sekolah, dapat menjadi indikator evaluasi kebijakan sertifikasi guru. Proses pengawasan yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis di daerah dapat difokuskan pada indikator tersebut sebagai bahan rekomendasi pembayaran insentif sertifikasi guru. Proses pengawasan berkualitas akan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para guru untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama (Kemenag) sebaiknya tidak hanya memfokuskan pada realisasi insentif sertifikasi guru, tetapi lebih menekankan evaluasi dampak realisasi sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan anak di sekolah,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

baik pada level nasional maupun daerah, dan hasil pengawasan oleh para pengawas sekolah yang berasal dari dinas-dinas teknis di daerah.

Fenomena di atas dapat memunculkan sebuah pertanyaan, apakah berangkat ke sekolah berarti melakukan proses pembelajaran sesuai standar pendidikan nasional? Standar sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah diterjemahkan kedalam berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Agama.

Badan Pusat Statistik telah memublikasikan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SM/SMK/MA/Paket C masing-masing adalah 97,69%; 80,12%; dan 61,25%. APM mengukur persentase jumlah anak yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat partisipasi anak cenderung lebih rendah. Sementara itu, pada periode yang sama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, 16–18 tahun, dan 19–24 tahun masing-masing adalah 99,26%, 95,74%, 72,72%, dan 25,56%. APS menjelaskan persentase jumlah anak sekolah berdasarkan kelompok usia terhadap jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Data APS mengekspresikan bahwa semakin tinggi usia anak sekolah, maka ada kecenderungan semakin rendah partisipasinya ke sekolah.

Fenomena APM dan APS yang konsisten seharusnya membuat pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap anak pada usia jenjang sekolah menengah atas. Mereka akan menghadapi pasar tenaga kerja setelah lulus sekolah atau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Jika banyak anak usia sekolah menengah atas yang tidak mempunyai kualitas yang memadai dalam pasar tenaga kerja dan perguruan tinggi maka Indonesia akan menghadapi permasalahan signifikan terkait kompetensi dan daya saing sumber daya manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lebih lanjut, Indonesia juga masih menghadapi permasalahan kualitas infrastruktur pendidikan. Rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan semakin nampak selama pandemi Covid-19 (Ulya, 2020;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Fisipol UGM, 2020; Pramana, 2020). Kualitas infrastruktur tersebut tidak hanya bangunan dan peralatan pendukung pembelajaran, tetapi juga fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, sinergi antarkementerian selayaknya dilakukan dalam jangka pendek, baik penyediaan fisik maupun akses TIK.

Pada tingkat internasional, pengukuran kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dipublikasikan oleh Organisation for Economic for Cooperation and Development (OECD) sejak tahun 2000. PISA menekankan pengukuran literasi membaca, matematika, dan sains anak usia lima belas tahun. Semakin tinggi skor PISA maka sistem pendidikan di sebuah negara semakin baik karena kompetensi anak sekolah pada tiga komponen PISA semakin baik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud (2019) melaporkan bahwa ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, yaitu siswa cenderung kesulitan memahami dan menginterpretasikan isi bacaan panjang, kemampuan matematika relatif rendah, disparitas kualitas pendidikan antardaerah dan antarjenjang pendidikan relatif tinggi, serta ketersediaan akses TIK relatif rendah dan tidak merata. Kondisi ini menghasilkan skor PISA tahun 2018 dengan rincian hanya sebanyak 30% siswa memenuhi kompetensi minimal untuk kategori membaca, 29% siswa memenuhi kompetensi minimal untuk kategori matematika, dan 40% siswa memenuhi kompetensi minimal untuk kategori sains. Secara umum, di kawasan ASEAN, kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2018.

C. PENDIDIKAN VOKASI SEBAGAI SOLUSI PENGANGGURAN USIA MUDA

Lemahnya kompetensi dasar berakibat pada lemahnya pembelajaran keahlian dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Survei yang dilakukan oleh The World Bank pada tahun 2008 menemukan bahwa sekitar 70% perusahaan manufaktur di Indonesia kesulitan menda-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

patkan tenaga profesional di bidang teknik dan manajemen (The World Bank, 2014). Fenomena ini disebut sebagai ketidakcocokan (*mismatch*) antara kompetensi yang didapat dari pendidikan dan kebutuhan industri yang merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran usia muda di Indonesia (Dong & Manning, 2017).

Ketidakcocokan ini juga dapat dilihat dari lulusan pendidikan yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Sebuah studi mengestimasi bahwa terdapat sekitar 51,5% pekerja yang *under-qualified* dan sekitar 8% pekerja yang *over-qualified* (Allen, 2016). Ketidakcocokan bahkan mengakibatkan lebih tingginya pengangguran bergelar daripada pengangguran tanpa gelar (The World Bank, 2014). Perusahaan lebih baik mempekerjakan pegawai tanpa gelar yang gajinya lebih murah, namun masih dapat diarahkan ketimbang mempekerjakan pegawai dengan gelar dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Permasalahan di pasar pelatihan kerja yang tidak sempurna semakin memperparah masalah ketidakcocokan ini (Dong & Manning, 2017).

Salah satu solusi yang digagas oleh pemerintah adalah memperkuat pendidikan vokasi. Pemerintah memiliki target meningkatkan rasio siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi 70:30 dibandingkan Sekolah Menengah Umum (SMU) (Manning & Purnagunawan, 2011). Pemerintah juga mencoba menerapkan sistem pendidikan vokasi di Jerman, yaitu *dual system*, di mana siswa dan mahasiswa vokasi tidak hanya dididik di sekolah, pendidikan tinggi vokasi, dan Balai Latihan Kerja (BLK), namun juga ditempatkan di industri secara bergantian dengan proporsi waktu yang seimbang (Dong & Manning, 2017).

Indonesia bukanlah Jerman. Tradisi hubungan antara pendidikan dan dunia kerja yang sangat kuat yang ada di Jerman tidak semudah itu ditiru oleh Indonesia (Dong & Manning, 2017; Manning & Purnagunawan, 2011). Selama tidak ada pengakuan dari dunia usaha, pendidikan vokasi akan kesulitan dalam membangun kerja sama dengan dunia usaha. Insentif perlu diberikan untuk mempercepat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perbaikan hubungan dunia usaha dengan dunia pendidikan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang memberikan pemagangan dan memiliki kerja sama dengan dunia pendidikan. Berbagai fasilitasi juga dilakukan pemerintah untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri, terutama oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

Untuk memperbaiki keberterimaan kualitas lulusan dunia pendidikan dan pelatihan, pemerintah memperkenalkan suatu sistem sertifikasi bernama Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikawal oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Manning & Purnagunawan, 2011). Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah telah menerbitkan total 911 SKKNI untuk berbagai bidang pekerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan, t.t.). Sistem sertifikasi ini diharapkan akan mendorong berbagai BLK untuk memberikan layanan pelatihan yang memiliki sertifikasi yang diakui oleh dunia industri. Proses sertifikasi SKKNI merupakan ide baik, namun penerapannya perlu ditingkatkan lagi. Proses pembuatan sertifikasi SKKNI, pada awal penerapannya, malah mempersulit standar kualifikasi yang seharusnya hanya tinggal menggunakan standar internasional yang sudah ada (Manning & Purnagunawan, 2011). Selain itu, sertifikat keluaran BNSP masih memiliki keberterimaan yang kurang baik di dunia usaha, terutama bagi perusahaan multinasional.

D. KEBIJAKAN PENDORONG PERBAIKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perbaikan terhadap mutu sekolah dan guru adalah kunci utama memperbaiki pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah dapat menetapkan standar minimal kualifikasi penerimaan guru, baik di bawah kewenangan Kemendikbud maupun Kemenag. Standar minimal tersebut dapat ditentukan dari indikator jenjang pendidikan, seperti sarjana dan skor minimal ujian penerimaan guru. Selain itu, proses penerimaan guru dilakukan secara terbuka dan daring sehingga dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas program sertifikasi guru perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pengajaran. Sertifikasi guru merupakan sebuah basis data yang sangat kaya dan dapat dimanfaatkan. Pemerintah dapat melakukan program observasi ruang kelas dan audit untuk kemudian mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru tersertifikasi. Kemendikbud dapat menggunakan alat yang sudah ada, seperti CERDAS yang dikembangkan oleh SMERU, sebuah lembaga penelitian di Indonesia.

Kemendikbud dan Kemenag perlu mengevaluasi rasio jumlah sekolah dengan rasio guru dan siswa. Penetapan rasio ini diarahkan pada standar ideal yang ditetapkan oleh kedua kementerian tersebut untuk menjamin tercapainya dua orientasi pendidikan nasional, meliputi perluasan, pemerataan, dan keadilan akses pendidikan serta pencapaian mutu pendidikan (Kemendikbud, 2017). Kedua kementerian juga dapat menetapkan kualitas minimal infrastruktur sekolah, termasuk pendukung pembelajaran daring. Kualitas minimal infrastruktur sekolah ini dapat menjadi penentu dan penetapan akreditasi sekolah. Artinya, sekolah dengan infrastruktur yang belum memadai akan mendapat akreditasi rendah sehingga akan menjadi prioritas bagi kedua kementerian untuk melakukan intervensi alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ataupun program lain yang mendukung pembangunan infrastruktur sekolah. Selain itu, keduanya juga dapat mendorong dan memfasilitasi kegiatan produktif sekolah sebagai bagian dari sumber pendapatan sekolah. Kegiatan produktif ini dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penetapan dan pengaturan kegiatan produktif sekolah ini dapat dirumuskan dan ditetapkan secara bersama-sama oleh beberapa pihak meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan asosiasi usaha.

Mengukur keluaran pembelajaran dengan tepat perlu dilakukan demi mengetahui dengan lebih akurat pembenahan yang perlu dilakukan dengan mengkaji kembali pembuatan soal-soal tes terstandar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kompetensi internasional dapat menjadi cara yang baik. Kemendikbud dan Kemenag dapat merumuskan standar pembelajaran yang dapat meningkatkan skor PISA sebagai indikator kualitas pendidikan di tingkat internasional. Pemerintah dapat mengadopsi alat evaluasi siswa yang dikembangkan oleh lembaga lain, seperti CERMAT.

Program pelatihan kerja memiliki peran yang sama pentingnya dengan pendidikan dasar. Insentif fiskal untuk program magang dapat menjadi awal yang baik untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program ini untuk memastikan bahwa perusahaan ikut terlibat di dalam pembelajaran peserta didik, bukan sekadar memanfaatkan insentif atau buruh murah (Dong & Manning, 2017). Data tentang kemitraan ini akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi tersebut dan dapat dikumpulkan dengan mudah oleh Kementerian Keuangan.

Skema pendidikan kembali (*retraining* atau *reskilling*) adalah salah satu aspek yang juga penting. Pekerja yang memilih untuk melakukan pendidikan kembali harus mengorbankan alokasi waktu untuk bekerja. Hal yang telah diantisipasi oleh pemerintah melalui skema kartu prakerja ini dapat mengurangi pendapatan dan mengakibatkan kurangnya minat pekerja untuk melakukan pendidikan kembali. Pada prinsipnya, kartu prakerja memiliki skema yang baik dengan memberikan insentif kepada pekerja yang melakukan pelatihan sampai selesai. Saat tulisan ini dibuat, skema ini masih berfokus kepada pelatihan berbasis daring (*online*). Prinsip yang sama dapat diterapkan untuk pelatihan berbasis luring yang dilakukan oleh BLK atau penyedia jasa pelatihan lain. Jika pelatihan tersebut telah berhasil disesuaikan dengan sertifikasi yang diakui oleh dunia usaha, skema kartu prakerja akan menjadi solusi yang sangat komprehensif dan memberikan data yang sangat baik untuk evaluasi program pemerintah.

Memiliki usaha sendiri adalah salah satu jalan yang baik untuk mengurangi pengangguran usia muda. Di samping itu, mengurus usaha sendiri dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi setiap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

orang. Jika usahanya gagal pun, seseorang dapat memilih untuk bekerja di perusahaan lain. Pemerintah dirasa perlu mendorong hal ini sebagai salah satu opsi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berjalan dengan cukup baik (Dong & Manning, 2017). Dengan ekspansi yang baik dan kredit macet yang sangat kecil, KUR dapat dikatakan sebagai program yang berhasil. Namun, syarat dua tahun usaha dan jaminan membuat program ini kurang cocok untuk orang yang baru memulai usaha (Dong & Manning, 2017).

E. KESIMPULAN

Pembangunan sumber daya manusia dapat direalisasikan melalui indikator pendidikan. Proses pendidikan dimulai dari anak usia sekolah dasar sampai pendidikan tinggi yang bersifat kontinu dan jangka panjang. Perkembangan indikator pendidikan di Indonesia mengindikasikan kemajuan yang signifikan, baik dari aspek partisipasi anak sekolah, kualitas guru dan proses pembelajaran maupun infrastruktur pendidikan. Selain itu, berbagai program insentif pendidikan juga telah berimplikasi signifikan, seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOS), sertifikasi guru, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Meskipun demikian, peningkatan indikator pendidikan Indonesia sebaiknya tidak hanya menekankan pada jumlah partisipasi anak sekolah, tetapi juga kualitas dan daya saing anak sekolah baik di tingkat regional maupun internasional.

Temuan utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan jumlah alokasi dana pendidikan setiap tahun. Berbagai indikator kualitas pendidikan di Indonesia dapat menjadi tolok ukur, seperti akreditasi sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, skor PISA, dan indikator kesesuaian kompetensi/keterampilan anak sekolah dengan pasar tenaga kerja. Secara umum, indikator tersebut mengarahkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih harus ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Beberapa kebijakan dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan di Indonesia, antara lain:

1. peningkatan mutu sekolah, anak sekolah, dan guru,
2. peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
3. realisasi sertifikasi guru secara berkelanjutan,
4. program pelatihan kerja dan skema pendidikan kembali (seperti program prakerja), serta
5. inovasi kegiatan produktif sekolah sebagai salah satu pendapatan sekolah dan laboratorium latihan kerja bagi anak sekolah.

REFERENSI

Acemoglu, D. & Restrepo, P. (2019). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, *128*(6), 57.

Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R. P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020). *Learning from home: A portrait of teaching and learning inequalities in times of the COVID-19 pandemic*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Allen, E. R. (2016). Analysis of trends and challenges in the Indonesian labor market. *ADB Papers on Indonesia*, *16*, 38.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud (2019). *Akses meluas, saatnya meningkatkan kualitas*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2019). The adjustment of labor markets to robots, *Journal of the European Economic Association*, *jvab012*, 1–43.

Dong, S. X. & Manning, C. (2017). Labour-market developments at a time of heightened uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *53*(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1326201

Dzulfikar, L. T. (2020). How the COVID-19 pandemic will leave more young people unemployed in Indonesia. *The Conversation*. http://theconversation.com/how-the-covid-19-pandemic-will-leave-more-young-people-unemployed-in-indonesia-141781

Fahmi, M., Maulana, A., & Yusuf, A.A. (2012). Teacher certification in Indonesia: A confusion of means and ends. Dalam *Prosiding riset kebijakan pendidikan anak di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, UNICEF Indonesia, dan Lembaga Penelitian SMERU.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Fisipol UGM. (2020, 6 Juli). *Pandemi Memperjelas Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan di Indonesia*. Pusat Kajian Departemen Manajemen Kebijakan Publik (Puska MKP), Fisipol UGM. https://fisipol.ugm.ac.id/pandemi-memperjelas-keterbatasan-infrastruktur-pendidikan-di-indonesia/

Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessmann, L. (2017). Coping with change: International differences in the returns to skills. *Economics Letters*, *153*(Journal Article), 15–19. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.01.007

Hanushek, E. A. & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. *Journal of Economic Literature*, *46*(3), 607–668. https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607

International Labour Organization & Asian Development Bank. (2020). *Tackling the COVID-19 youth employment crisis in Asia and the Pacific* (ILO-ADB Report). Jenewa: International Labour Organization.

Kementerian Ketenagakerjaan (t.t.). Rekapitulasi SKKNI. Diakses 25 Februari 2021 dari https://skkni.kemnaker.go.id/rekapitulasi-skkni/.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). *Profil pendidikan dasar dan menengah tahun 2016/2017*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurniawati, S., Suryadarma, D., Bima, L., & Yusrina, A. (2019). *Education in Indonesia: A white elephant?* (Working paper). Jakarta: The SMERU Research Institute.

Manning, C. & Purnagunawan, R. M. (2011). Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *47*(3), 303–332. https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619048

Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Woetzel, J., Stamenov, K., & Dhingra, D. (2016). *Digital globalization: The new era of global flows*. New York: McKinsey Global Institute

McKenzie, P., Nugroho, D., Ozolins, C., McMillan, J., Sumarto, S., Toyamah, N., Febriany, V., Sodo, R. J., Bima, L., & Sim, A. A. (2014). *Study on teacher absenteeism in Indonesia 2014* (Research report). Jakarta: The SMERU Research Institute. https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/acdp011_eng_9_jan_2015.pdf

Oktaviansyah, E. & Rahman, A. (2020). Predicting hoax spread in Indonesia using SIRS model. *Journal of Physics: Conference Series*, *1490*, 012059. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1490/1/012059

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. (2019). https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2019/128~PMK.010~2019Per.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pramana, E. (2020, 31 Desember). Infrastruktur Menjadi Masalah Utama Dunia Pendidikan di Era Pandemi. *Jawa Pos*. https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/31/12/2020/infrastruktur-menjadi-masalah-utama-dunia-pendidikan-di-era-pandemi/

Suyanto, B. (2012). Penyusunan kebijakan dan program untuk mengeliminasi angka putus sekolah dan siswa rawan *drop out* di Provinsi Jawa Timur. Dalam *Prosiding riset kebijakan pendidikan anak di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, UNICEF Indonesia, dan Lembaga Penelitian SMERU.

The World Bank. (2014). Indonesia: Avoiding the trap. *Development Policy Review*, 167.

Ulya, F. N. (2020, 24 Juni). Infrastruktur Sekolah di Indonesia Dianggap Kurang, Ini Penyebabnya Menurut Bank Dunia. *Kompas*. https://money.kompas.com/read/2020/06/24/183500426/infrastruktur-sekolah-di-indonesia-dianggap-kurang-ini-penyebabnya-menurut?page=all.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XV

Menuju Indonesia Emas 2045, Bersama-sama

Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 bukanlah visi yang dapat dicapai dengan mudah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk kesejahteraan. Ekonomi yang tumbuh dengan produktif akan memberikan lapangan kerja yang memadai dan memastikan kehidupan yang layak bagi para pekerja dan pengusaha. Kebutuhan fiskal dan penyaluran yang tepat sasaran adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan yang inklusif karena memastikan bahwa *no one left behind*.

Buku ini mengidentifikasi beberapa masalah mendasar pada perekonomian Indonesia. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini sangat tertolong oleh situasi di luar kendali, seperti ledakan harga komoditas. Sayangnya, hal ini mendorong Indonesia untuk semakin proteksionis. Siklus ini menjadi berbahaya untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, informalitas menjadi akar dari berbagai permasalahan lainnya. Sektor informal memaksa para pekerja untuk menerima upah di bawah standar dan berada di luar jangkauan sistem jaminan sosial di Indonesia. Fakta bahwa banyak pekerja berada di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

luar sistem jaminan sosial mengakibatkan pemerintah tidak memiliki data yang menyeluruh dan representatif terhadap kondisi ekonomi mereka. Hal ini sangat terlihat ketika terjadi kejutan (*shock*) yang besar, seperti Covid-19, bagaimana pemerintah kesulitan memberikan bantuan kepada warganya.

Permasalahan lain yang diangkat di buku ini adalah bagaimana kualitas institusi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena mengelola sistem jaminan sosial bukanlah perkara mudah. Indonesia memiliki rekam jejak yang kurang baik soal pemberantasan korupsi dan ini akan menjadi salah satu hambatan utama untuk membangun institusi yang baik. Di samping itu, manajemen data akan sangat diperlukan. Pentingnya meningkatkan kualitas institusi juga diperlukan untuk menjamin perdagangan internasional barang dan jasa yang lancar. Pengaturan institusi yang cenderung proteksionis mencegah integrasi dengan rantai pasok global dan mendorong berkurangnya kinerja sektor manufatur. Dalam perdagangan jasa, institusi yang baik juga penting untuk mendorong tumbuhnya sektor pariwisata yang baik serta rasa aman bagi para TKI.

Dalam jangka panjang, institusi pendidikan dan pengawasan terhadap lingkungan akan memiliki dampak yang sangat signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berlandaskan kepada pemeliharaan lingkungan akan memberi dampak buruk dalam jangka panjang. Sementara itu, institusi pendidikan yang mampu menciptakan lulusan yang siap kerja akan menekan pengangguran usia muda dan membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk lapangan kerja di masa depan.

Penggunaan SDGs sebagai kerangka pembuatan buku ini memberikan kami rambu-rambu yang jelas dan mudah diikuti perihal pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di saat yang sama, indikator SDGs yang kami pilih sedikit membatasi ruang gerak dalam membahas berbagai permasalahan lain yang sangat penting dan krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Beberapa hal yang dirasa sangat penting, namun berada di luar cakupan buku ini adalah, pertama, penanganan Covid-19. Buku ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mencoba menawarkan pandangan jangka panjang Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Dalam perspektif jangka panjang, *shock* seperti Covid-19 dapat memiliki dampak jangka panjang seperti halnya krisis ekonomi 1998. Perbedaannya adalah penyelesaian Covid-19 kemungkinan akan membutuhkan waktu lama. Beberapa pengamat bahkan mengatakan bahwa ada kemungkinan kita masih harus hidup bersama Covid-19 dalam beberapa tahun ke depan seperti halnya kita harus hidup dengan influenza. Hal ini membuat Covid-19 bukan hanya *shock* jangka pendek, seperti krisis ekonomi 1998, namun juga menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan sampai bertahun-tahun ke depan. Dengan kata lain, Covid-19 berpotensi menjadi suatu normal baru yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan sesama manusia dan mengubah bagaimana kita bekerja. Sektor-sektor jasa, seperti pendidikan dan pariwisata, harus memikirkan kembali bagaimana cara beradaptasi dengan situasi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Perkantoran mungkin akan dilakukan secara daring secara *full-time* dan memberikan tekanan pada real estate gedung perkantoran, namun berpotensi memberikan peluang bagi pekerja untuk tinggal di daerah yang masih murah biaya hidupnya. Hal-hal seperti ini akan mengubah bentuk dari Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 yang sayangnya tidak dibahas secara mendalam di buku ini.

Perubahan besar yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 membuat peran teknologi tinggi menjadi semakin signifikan.Covid-19 dikatakan mendorong perusahaan untuk memikirkan kembali rantai pasok (*supply chain*) masing-masing dan mempercepat digitalisasi dan adaptasi otomasi bagi perusahaan. Peran teknologi konektivitas yang cepat dan reliabel, seperti internet, untuk interaksi antarmesin dan antarmanusia mendapat peranan yang semakin sentral pada perubahan teknologi ke depannya. Hal yang sangat penting ini sayangnya tidak juga dibahas di buku ini.

Kondisi global yang semakin tidak menentu merupakan faktor yang sangat penting untuk Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Seperti dibahas di beberapa bab di buku ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat tergantung dengan kondisi di luar Indonesia, seperti ledakan harga komoditas minyak atau ledakan harga komoditas yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diakibatkan oleh permintaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kondisi perpolitikan baik di dalam dan luar negeri juga berada di luar cakupan buku ini.

Meskipun pendidikan sedikit disinggung, namun buku ini tidak memberikan prioritas yang cukup layak bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Peranan pendidikan sangat penting untuk tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga pendewasaan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berlandaskan demokrasi, *bhinneka tunggal ika*, dan kepastian hukum. Pendidikan di Indonesia, baik pendidikan umum, vokasi maupun riset, memiliki permasalahan yang kompleks, beragam, dan mengakar yang mungkin memerlukan buku sendiri untuk membahasnya.

Buku ini memberikan sedikit pembahasan tentang permasalahan institusional di Indonesia, meskipun kepastian hukum tidak dibahas lebih lanjut. Institusi yang baik tidak dapat dibentuk tanpa kepastian hukum yang baik. Seperti halnya pendidikan, kepastian hukum adalah hal yang sangat mendasar untuk pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Tanpa kepastian hukum, Indonesia akan terus bergantung pada harga komoditas yang akan membuat manufaktur dan jasa akan sulit berkembang.

Hal-hal di atas adalah beberapa topik yang bagi kami sangat berpengaruh dan harus dipikirkan seraya melihat analisis yang ada di dalam buku ini. Pada kesempatan yang lain, PPID juga menulis buku dengan topik yang cukup relevan dengan hal-hal di atas sehingga kami mendorong para pembaca yang budiman untuk turut melihat hasil karya PPID yang lain, seperti buku di bidang hubungan internasional, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Selain itu, topik dalam buku ini juga memberikan ruang bagi kami untuk terus berkarya dan menulis untuk Indonesia. Ke depannya, kami berharap untuk terus meneliti dan menghasilkan karya tulis ilmiah lainnya yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menatap ke depan dan mencari solusi bagi negeri Indonesia kita tercinta.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Singkatan

AEC	:	ASEAN Economic Community
AFTA	:	*ASEAN Free Trade Area*
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM	:	Angka Partisipasi Murni
ASABRI	:	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASKES	:	Asuransi Kesehatan Indonesia
ASLUT	:	Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
ASPDB	:	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
ASW	:	*ASEAN Single Window*
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	:	*Business-as-usual*
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDT	:	Basis Data Terpadu
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BP	:	Bukan Pekerja
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPS	:	Badan Pusat Statistik
C.O.	:	Carbon Monoxide
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EKC	:	*Environmental Kuznets Curve*
FDI	:	*Foreign Direct Investment* (Penanaman Modal Asing Langsung)
GDP	:	*Gross Domestic Product* (Produk Domestik Bruto)
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKTL	:	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
ILO	:	*International Labour Organization*
INSW	:	*Indonesia National Single Window*
ISI	:	Industrialisasi Substitusi Impor
JAMSOSTEK	:	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KAT	:	Bantuan Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil
KBI	:	Kawasan Barat Indonesia
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KIS	:	Kartu Indonesia Sehat
KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
KUBe	:	Kelompok Usaha Bersama
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
MDGs	:	*Millennium Development Goals*
MEA	:	Masyarakat Ekonomi ASEAN
NPS	:	Neraca Pendapatan Sekunder
NSB	:	Negara Sedang Berkembang
NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PPU-BU	:	Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara
PPU-PN	:	Penerima Upah Penyelenggara Negara
RLS	:	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RS-RTLH	:	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
TASPEN	:	Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UHC	:	*Universal Health Coverage*
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UUD	:	Undang-Undang Dasar
WHO	:	*World Health Organization*
GII	:	*Gender Inequality Index*
GEM	:	*Gender Empowerment Index*
GDI	:	*Gender Development Index*
UNDP	:	United Nation Development Program
AHH	:	Angka Harapan Hidup
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
ADB	:	*Asian Development Bank*
Fintech	:	*Financial Technology*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PKH	:	Program Keluarga Harapan
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
SPP	:	Simpan Pinjam untuk Perempuan
PT	:	Perguruan Tinggi
Kemen PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
LFPR	:	*Labour Force Participation Rate*
GVC	:	*Global Value Chain*
RPG	:	Rantai Pasok Global
WTO	:	World Trade Organization

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Istilah

Brand image	:	Keyakinan, ide, atau kesan seseorang terhadap sebuah merek.
Calo	:	Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.
Degradasi lingkungan	:	Degradasi lingkungan hidup adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan.
Digital platform	:	Tumpukan *software* (perangkat lunak) dan beberapa aplikasi.
Ecological footprint	:	Pendekatan yang menjadi alat ukur dalam mengkaji tingkat konsumsi manusia serta penggunaan sumber daya terhadap kemampuan lingkungan untuk menampung limbahnya, biasanya dinyatakan dalam satuan global hektare (gha).
Emisi karbon dioksida (CO_2)	:	Emisi senyawa yang erat hubungannya dengan era industri sebagai dampak dari pembakaran fosil untuk batu bara, gas alam, dan minyak bumi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Environmental Kuznets Curve (EKC)	:	Hubungan antara pendapatan ekonomi dan emisi CO2 melalui pembuktian hipotesis *inverted U-shaped* yang menjelaskan bahwa degradasi lingkungan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, tetapi pada tahap puncak pertumbuhannya justru akan mengurangi emisi CO_2 bagi lingkungan.
Homestay	:	Rumah warga lokal yang disewakan untuk tempat menginap para turis.
Industri padat karya	:	Industri yang memanfaatkan banyak pekerja dan sedikit aset atau kapital.
Influencer	:	Seseorang yang dapat memberikan pengaruh di masyarakat melalui aktivitasnya di media sosial (*social media*)
Kompetensi	:	Kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai ekspektasi pemberi kerja atau atasan.
Rantai Pasok Global	:	Proses manufaktur yang dipecah-pecah di berbagai negara, misalnya sebuah sepeda tidak dibuat di satu negara saja karena setiap bagiannya dibuat oleh berbagai negara lalu diekspor ke satu negara tujuan akhir untuk kemudian dirakit dan mengekspor sepeda ke seluruh dunia.
Remote area	:	Kawasan terpencil.
Reskilling	:	Pelatihan bagi orang yang sudah memiliki pekerjaan, biasanya karena pekerjaannya sudah tidak ada lagi dan ia harus memulai pekerjaan baru.
Rural area	:	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan dan pemerintahan desa.
School enrollment	:	Rasio jumlah anak yang terdaftar di sekolah dibandingkan total anak sekolah seusianya.
Super App	:	Aplikasi yang memungkinkan semua transaksi dan layanan dilakukan dalam satu pintu.
Super prioritas	:	Destinasi wisata yang diutamakan pembangunannya sesuai dengan rencana jangka menengah dan panjang yang telah dibuat oleh pemerintah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sustainable tourism	:	Kegiatan pariwisata yang menghormati masyarakat lokal, para wisatawan, warisan budaya, serta lingkungan.
Transformasi ekonomi struktural	:	Perubahan pola pertumbuhan ekonomi dari berbasis agrikultura dan ekstraktif menjadi berbasis manufaktur dan jasa.
Youth unemployment	:	Pemuda berusia antara 15 sampai 24 tahun yang tidak bersekolah, tidak dalam pelatihan, dan tidak bekerja.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks

Amerika Serikat, 255
Aset, 18, 35, 36, 48, 113, 140, 154

Bali Baru, 107
Bantuan sosial, 21, 151, 158

Community based tourism, 117, 118
Covid-19, 1, 20, 21, 25, 26, 36, 39, 48, 112, 126, 131, 157, 158, 159, 168, 188, 192, 196, 202, 224, 227, 233, 234, 238, 239

Distribusi pendapatan, 33, 44, 45

Informal, 2, 6, 24, 26, 54, 64, 122–28, 130, 131, 132, 133, 190, 201, 203, 204, 208, 210, 212, 213, 214, 218, 237

Jaminan Sosial, 150, 151, 152, 241, 242

Ketimpangan pendapatan, 31, 34, 51, 54, 174, 175
Kuznets, 48, 50, 95, 99, 101, 242

Ledakan harga komoditas, 15, 18, 20, 237, 240

Pemasaran, 110–18, 193
Pembangunan, 1, 3, 24, 33, 41, 43–8, 50, 53–6, 62, 64, 65, 72, 78, 79, 87, 88, 90, 93–5, 98–101, 106, 109, 110, 118, 163, 164, 171, 178, 193, 196, 204, 205, 211, 215, 216, 221, 230, 232
Pengangguran usia muda, 6, 223, 224, 228, 232, 238

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengentasan kemiskinan, 33, 34, 38, 40, 43, 45
Perlindungan sosial, 2, 121, 124, 127, 149, 150, 152, 154, 156–60, 188, 201, 208

Rantai pasok global, 3, 6, 16, 176, 215, 238
Rasio Gini, 1, 2, 31, 32, 34–6, 38
Rekening, 36, 142–46
Super app, 112–14, 116
Sustainable tourism, 116
UMKM, 24, 45, 48, 113, 115, 167, 176, 177, 178, 231, 243

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biografi Editor

KRISNA GUPTA

Mahasiswa pascasarjana bidang ekonomi di Crawford School of Public Policy, The Australian National University (ANU). Pria yang akrab disama Imed ini meneliti tentang dampak kebijakan perdagangan, industri, dan investasi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan industri, terutama manufaktur. Di Indonesia, ia bekerja sebagai dosen di Politeknik APP Jakarta, sebuah politeknik di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Studinya di Australia disponsori oleh beasiswa Australia Awards Indonesia. Di samping itu, ia mendapatkan bantuan dana riset dari Pemerintah Australia berupa Hadi Soesastro Prize. Krisna juga cukup aktif menulis di situs pribadinya dan beberapa portal *peer review* daring. Kontak: krisna.gupta@outlook.com

ENNY SUSILOWATI MARDJONO

Mahasiswi Ph.D. (candidate) dengan topik disertasi tentang *Strategic Management in Audit Firm* di National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan. Ia memegang sertifikat ASEAN CPA *certificate* (ACPACC), *Chartered Accountant* (CA Indonesia), and Certified

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Financial Management Analyst (CFMA), dan pengalaman profesional di industri keuangan, industri jasa, dan industri pendidikan. Di Indonesia, perempuan yang memenangkan hibah dari Ditjen Dikti Indonesia ini bekerja sebagai dosen di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Studinya di Taiwan disponsori oleh beasiswa Ministry of Education Taiwan (MOE). Selain itu, ia merupakan penulis jurnal Scopus dan beberapa SSCI jurnal internasional dan nasional lainnya di bidang akuntansi dan manajemen. Kontak: ennyyoi@yahoo.co.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biografi Penulis

ABDURRAHMAN

Awardee Beasiswa Pemerinah Rusia untuk berkuliah di Kazan Federal University, Russia, dengan program studi Bachelor of Degre Economy. Ia bersertifikasi delegasi partisipan Indonesia Harvard Medical School dan Asia Pacific Youth Symposium. Ia juga merupakan inisiator Asosiasi Pelajar Banua Internasional, inisiator MES Rusia, *task executer* mentor PPID Komisi Ekonomi-Champion (Pelatihan Bisnis) 2018/2019, Koordinator Santri Mendunia Rusia, dan *founder* Tempat Pelajar. Selain itu, dia juga sudah memiliki publikasi jurnal internasional dengan judul "Reaksi Perekonomian Rusia di tengah Pandemi Covid-19" dan "Government Policy in Public Services in the Republic of Tatarstan, Russia". Kontak: abdurrahmansy7@gmail.com.

AGUNG MAULANA

Asisten peneliti di bawah supervisi Dr. Thanyaporn 'Main' Soontornthum dari Thammasat Institute for Area Studies. Menyelesaikan studi master pada Februari 2021 dalam program multidisipliner Asia-Pacific Studies Thammasat University, Thailand, Agung mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Agung juga aktif dalam menulis artikel ilmiah selama kuliah dan telah me-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menangi sepuluh gelar Islamic Economic Paper and Essay Championship tingkat nasional dan regional. Hingga saat ini, Agung telah memublikasikan dua artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Spesialisasi risetnya adalah keuangan dan ekonomi syariah, perilaku konsumen muda, dan filantropi digital. Kontak: agungmaulana893@gmail.com.

DENNY IRAWAN

Mahasiswa doktoral bidang Ilmu Ekonomi di The Australian National University (ANU), Australia. Sebelum menempuh pendidikan doktoral, Denny berpengalaman enam tahun sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI) terhitung sejak semester akhir S1-nya di FEB UI. Denny berpengalaman terlibat dalam lebih dari 40 penelitian dan konsultasi yang sebagian besar berfokus di bidang makrofinansial dan sumber daya alam. Pria kelahiran Jakarta, 16 November 1992 ini menjabat sebagai direktur penelitian dan kajian di PPI Dunia 2020–2021 setelah sebelumnya mengemban jabatan yang sama di PPI Australia 2019–2020. Kontak: denny.irawan@anu.edu.au/denny.denny.irawan@gmail.com.

DIMAS RAMADHAN

Lahir di Yogyakarta pada 21 Desember 1999. Anak sulung dari dua bersaudara ini memiliki ketertarikan di dunia sepak bola dan dunia pendidikan sejak kecil. Ia mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan sering mengikuti lomba penelitian ketika sekolah menengah. Setelah lulus, ia melanjutkan studi di Uniti College, Malaysia, dengan mengambil jurusan Manajemen Industri Halal dan saat ini ia ingin menjadi seorang eksportir dan pengusaha di bidang makanan, mengubah cita-citanya yang dulu menjadi pesepak bola. Kontak: dimasfadhillah199@gmail.com

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GHIBRAN FAHREZA DIPAYANA

Lahir di Semarang, 15 Juli 2000, menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 11 Semarang, dan lulus di tahun 2018. Sewaktu menempuh pendidikan SMA, ia aktif dalam beberapa kompetisi serta olimpiade mewakili sekolah di bidang fisika, matematika, dan kimia. Ketertarikannya dalam bidang ilmu mendorongnya untuk memilih jurusan teknik, khususnya yang berkaitan dengan migas. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan sarjana di jurusan Teknik Minyak dan Gas, Ufa State Petroleum Technological University, Rusia. Ia memperoleh beasiswa dari Pemerintah Rusia angkatan tahun 2019. Sebagai seorang mahasiswa yang masih cukup belia, ia belum memiliki pengalaman publikasi sehingga penulisan buku Ekonomi PPID merupakan pengalaman pertama baginya. Kontak: dipayanaghibran@yahoo.com.

HILDAYATI MOEHAMMAD LOEKMAN

Seorang alumni Pondok Pesantren Al-Iman Ponorogo dan sempat menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kini, ia sedang menempuh pendidikan S1 Syariah Islamiyah (Hukum Islam) di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ketertarikannya di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya ekonomi Islam, mendorongnya untuk aktif dalam kajian ekonomi Islam (PAKEIS) di bawah naungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kairo (ICMI ORSAT Kairo). Di sana, ia terus belajar meningkatkan kualitas kepenulisan karya ilmiah dan mengkaji penerapan ekonomi kontemporer dalam dunia keislaman. Selain itu, ia juga aktif di beberapa organisasi Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Mesir (PPMI Mesir) dalam bidang perbendaharaan. Kontak: Shidqia97@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INAZ YASMINE

Awardee beasiswa Al-Qasimia University yang diberikan oleh Raja Sharjah HH Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qassimi di Sharjah, Uni Emirat Arab. Saat ini, ia sedang menempuh studi Economics and Management Program. Sebagai seorang *freshwoman*, belum ada publikasi atau jurnal ilmiah yang telah ia terbitkan. Keikutsertaannya dalam penulisan Buku Ekonomi PPID ini menjadi publikasi ilmiah pertamanya sekaligus menjadi langkah awal dalam memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia melalui jalur intelegensi. Ketertarikannya dengan bidang ekonomi dimulai saat ia memutuskan untuk fokus mendalami ilmu ekonomi di bangku sekolah dulu, ia juga aktif mengikuti berbagai olimpiade ekonomi dan akuntansi. Kontak: inazyasmine27@gmail.com.

IRMA TSURAYA CHOIRINNIDA

Lahir di Demak, 27 Maret 1998. Setelah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2019, ia melanjutkan studi program master pada bidang yang sama di Higher School of Economics, Russia. Selama kuliah hingga lulus, ia memiliki minat dan aktif di bidang penulisan. Salah satu karya tulis ilmiahnya pernah dipublikasikan di Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities tahun 2020 yang membahas mengenai financial technology. Kontak: irmatsuraya27@gmail.com.

MALIK CAHYADIN

Lahir di Tulungagung pada 29 Juli 1981. Pendidikan sarjana dan magister telah diperoleh dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dalam bidang riset makroekonomi. Sejak tahun 2009, dia telah menjadi staf pengajar (dosen) di FEB Universitas Sebelas Maret dalam bidang riset makroekonomi serta ekonomi moneter dan internasional. Sementara itu, sejak tahun 2019, dia menempuh studi lanjut Program Doktor di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) Universiti Kebangsaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Malaysia dalam bidang riset makroekonomi (kebijakan fiskal). Sebagai seorang dosen, dia telah aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kontak: malik.cahyadin@gmail.com.

NABILAH DESKISPHAPUTRI

Nabilah Deskisphaputri adalah mahasiswa pascasarjana bidang International Trade and Entrepreneurship di Ural Federal University, Russia. Penerima beasiswa Pemerintah Rusia ini mendapatkan gelar sarjanaya dari Jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti. Ia merupakan seorang entrepreneur dan seorang guru. Salah satu tujuan akan ketertarikannya dalam bidang bisnis adalah ingin membangun startup company untuk membantu para mahasiswa di luar negeri. Hobi travelling dan fotografi yang menjadi alasan untuk membangun bisnis tersebut. Kontak: wardhaninabilah@gmail.com.

PUTRI HARYANI

Penerima beasiswa SLAB, yaitu beasiswa khusus alumni terpilih dari Jurusan Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Negeri Sriwijaya, untuk melanjutkan pendidikan master di Management and Science University, Shah Alam, Malaysia. Ia menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Master of Accounting/Finance (by research) dalam jangka waktu satu tahun. Ia juga pemegang sertifikasi teaching skill (CTS) dari MSU Malaysia. Setelah menyelesaikan studi, ia mengabdi sebagai dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan. Sebagai dosen muda, ia terlibat aktif di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya untuk bidang akuntansi. Kontak: Putrihr18@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

RIANDY LAKSONO

Mahasiswa doktoral bidang ekonomi di Crawford School of Public Policy, The Australian National University (ANU). Fokus penelitiannya adalah perdagangan internasional dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Ia menempuh pendidikan S1 di Departemen Ilmu Ekonomi, IPB University, dan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia. Riandy memiliki pengalaman bekerja sebagai peneliti dan konsultan bidang ekonomi serta mengajar di beberapa universitas. Ia adalah salah satu penerima Australia Award Scholarship (AAS) untuk menempuh studi doktoral di Australia. Riandy aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan dipercaya sebagai Direktur Bidang Akademik dan Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) periode 2020–2021. Kontak: riandy.laksono@anu.edu.au.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Koordinator PPI Dunia	:	Choirul Anam, Charles University, Ceko
Direktur	:	Denny Irawan, The Australian National University, Australia
Wakil Direktur		
1. Bidang Khusus	:	Gresika Bunga Sylvana, City University of New York, Amerika Serikat
2. Bidang Sosial	:	Radityo Dharmaputra, University of Tartu, Estonia
3. Bidang Sains dan Teknologi	:	Oscar Karnalim, University of Newcastle, Australia
4. Bidang SDM dan Lingkungan Hidup	:	Muhammad Aswin Rangkuti, University of Copenhagen, Denmark

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

Seri 1: Ekonomi

Editor: Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

https://doi.org/10.14203/press.357

Seri 2: Kebudayaan

Editor: Adrian Perkasa & Diandra Pandu Saginatari

https://doi.org/10.14203/press.363

Seri 3: Hubungan Internasional

Editor: Fauziah Rohmatika Mayangsari, Pasha Aulia Muhammad, & Radityo Dharmaputra

https://doi.org/10.14203/press.366

Seri 4: Hukum

Editor: Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, & Edmond Febrinicko Armay

https://doi.org/10.14203/press.398

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

Seri 5: Pendidikan

Editor: Afifah Muharikah, Athifah Utami, & Randi Proska Sandra

https://doi.org/10.14203/press.374

Seri 6: Kesehatan

Editor: Anthony Paulo Sunjaya & Sandy Ardiansyah

https://doi.org/10.14203/press.364

Seri 7: Lingkungan

Editor: Radityo Pangestu, Raisa Rifat, Desy A. Prihardini, & Februriyana Pirade

https://doi.org/10.14203/press.359

Seri 8: Energi

Editor: Sindu Daniarta & Nuralfin Anripa

https://doi.org/10.14203/press.360

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

Seri 9: Teknologi

Editor: Ahmad Sony Alfathani, Muhammad Ali, & Rilwanu Ar Roiyyaan

https://doi.org/10.14203/press.383

Seri 10: Pangan

Editor: Hilmy Prilliadi & Siti Mustaqimatud Diyanah

https://doi.org/10.14203/press.368

Seri 11: Maritim

Editor: Ratna Nur Inten, Salsyabilla Ika Putri Aryaningrum, & Aries D. Siswanto

https://doi.org/10.14203/press.373

Seri 12: Timur Tengah

Editor: Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir, & Nur Fajri Romadhon

https://doi.org/10.14203/press.348

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Buku ini merupakan seri pertama dari rangkaian tersebut.

Seri Ekonomi membahas beberapa potensi masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari 17 target SDGs yang ada, bunga rampai ini memilih tiga target sebagai fokus bahasan, yaitu "mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun" (poin pertama), "mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi lapangan pekerjaan yang berkualitas" (poin kedelapan), serta "mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara (poin kesepuluh).

Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan di bidang pembangunan. Temukan beragam sudut pandang serta sumbangsih pemikiran dari perwakilan pelajar Indonesia di seluruh dunia terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Selamat membaca!

LIPI

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id

DOI 10.14203/press.357

ISBN 978-602-496-208-1

ISBN 978-602-496-207-4